



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023 PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer se wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun untuk memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4108/SEK/OT.1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2023 dan sekaligus bentuk pertanggung jawaban Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer se Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

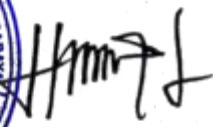
Laporan Pelaksanaan Tugas ini menggambarkan perkembangan dan hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer se Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan mendorong Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

Sidoarjo, 31 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,




Kirto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN MILITER.....	08
- Perkara Tingkat Pertama	08
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	09
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	09
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	10
B. PENYELESAIAN PERKARA	11
- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	11
- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	11
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.....	12
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	14
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	14
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	17
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN	20
A. Mutasi.....	42
B. Promosi.....	51
C. Pensiun	58
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	59
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	88
A. Pengelolaan Keuangan.....	88
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	139
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	171

BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	199
	A. Pembangunan Zona Integritas.....	199
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	202
	C. Inovasi Pelayanan Publik.....	206
BAB VI	PENGAWASAN.....	255
	A. Internal.....	255
	B. Evaluasi.....	263
BAB VII	PENUTUP.....	296
	A. Kesimpulan.....	296
	B. Rekomendasi.....	296

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil Peradilan

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2004 tentang pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam Pasal 25 ayat (4) serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (Prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih bersdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sesuai peraturan perundang – undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan Visi dan Misi sesuai dengan kebijakan yang telah di gariskan oleh Mahkamah Agung RI dalam terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan, daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meliputi - Jawa Timur, Sulawesi, Jayapura, NTT, Maluku dan Bali, yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) Pengadilan Militer yaitu :

- 1) Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkedudukan di Sidoarjo
- 2) Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Madiun
- 3) Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkedudukan di Denpasar
- 4) Pengadilan Militer III-15 Kupang berkedudukan di Kupang
- 5) Pengadilan Militer III-16 Makassar berkedudukan di Makassar
- 6) Pengadilan Militer III-17 Manado berkedudukan di Manado
- 7) Pengadilan Militer III-18 Ambon berkedudukan di Ambon
- 8) Pengadilan Militer III-19 Jayapura berkedudukan di Jayapura.

Tugas pokok Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan Militer Tinggi pada Tingkat Pertama:

- a) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwa adalah:
 - 1) Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas;
 - 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa atau salah satu Terdakwa berpangkat Mayor ke atas; dan
 - 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
 - b) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer.
- (2) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada Tingkat Banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding;
- (3) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam Daerah hukumnya.

Tugas pokok Pengadilan Militer Tingkat Pertama diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; "Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa ' termasuk tingkat kepangkatan' Kapten ke bawah; dan
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer".

Wilayah Yurisdiksi

No	Satker	Tipe	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Dilmilti III Surabaya	A	Sidoarjo	Jatim, Sulawesi, Jayapura, NTT, Bali, Maluku
2.	Dilmil III-12 Surabaya	A	Sidoarjo	Surabaya
3.	Dilmil III-13 Madiun	B	Madiun	Madiun
4.	Dilmil III-14 Denpasar	A	Denpasar	Denpasar
5.	Dilmil III-15 Kupang	B	Kupang	Kupang
6.	Dilmil III-16 Makassar	A	Makassar	Sulawesi
7.	Dilmil III-17 Manado	A	Manado	Sulawesi
8.	Dilmil III-18 Ambon	A	Ambon	Maluku
9.	Dilmil III-19 Jayapura	A	Jayapura	Jayapura

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajaran di bawahnya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan selaku Pembina Personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2023 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya yaitu :

Memeriksa dan memutus pada Tingkat Pertama perkara pidana berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Memeriksa dan memutus pada Tingkat Banding perkara pidana yang telah di putus oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam daerah hukumnya yang di mintakan banding. Menerima dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi dan Grasi serta Peninjauan Kembali (PK) perkara-perkara yang diajukan oleh Pengadilan Militer yang berada di bawah wewenangnya. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Melaksanakan Pengawasan dan Pengamatan di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Pelaksanaan tugas yang meliputi bidang Organisasi, Administrasi, Finansial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2023, telah dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada DIPA tahun 2023.

B. Visi dan Misi.

Untuk menyatukan persepsi serta mengimplementasikan dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi, dilandasi dengan Visi dan Misi yang ingin diwujudkan. Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang Agung”

MISI

Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja,

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki motto “**TEKAD**”, yang bila

diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

T: tangguh,

E : enerjik,

K: konsisten,

A: adil,

D: disiplin.

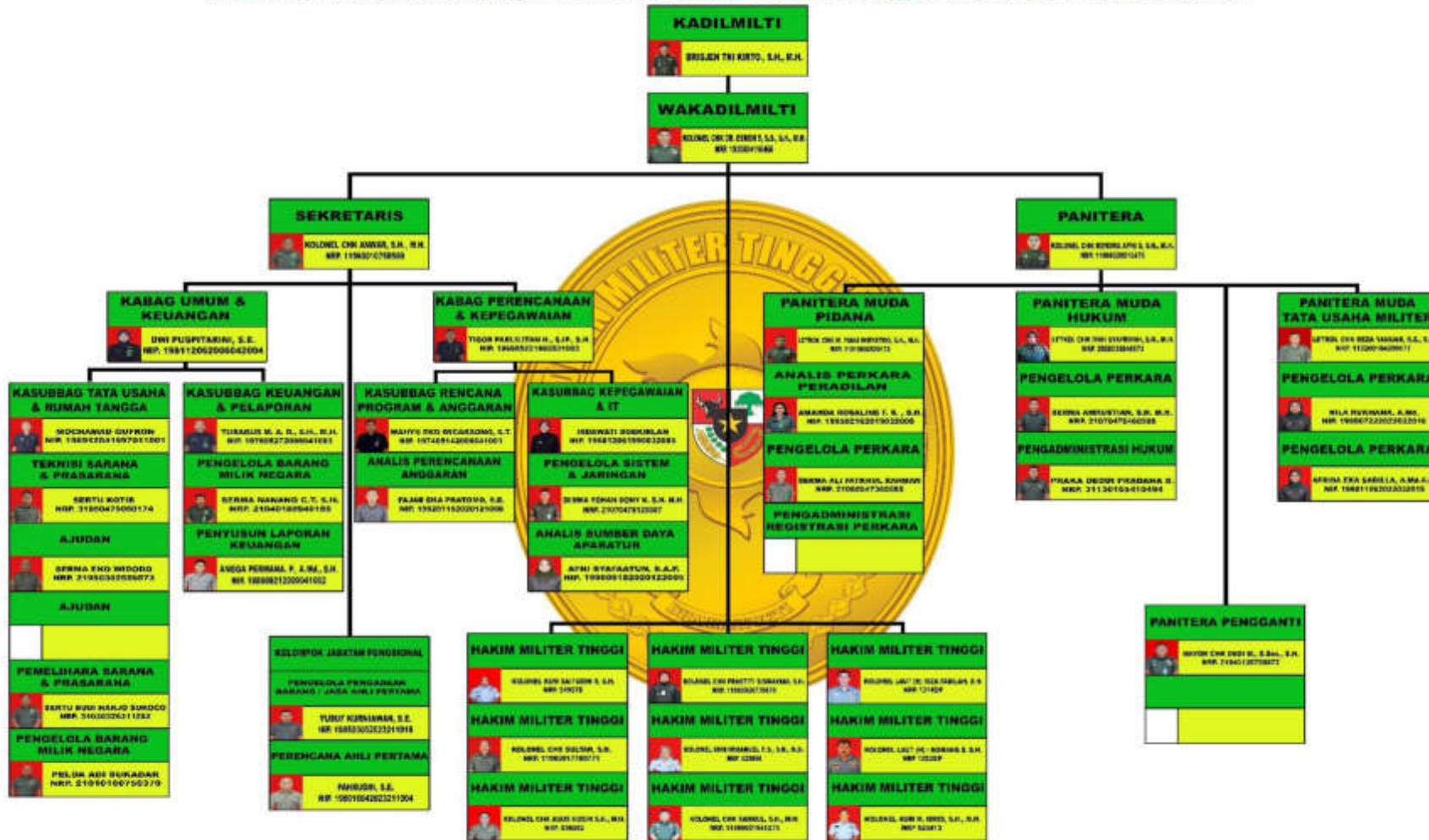
C. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Sejalan dengan program *One Roof System* (Peradilan Satu Atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2023 merupakan upaya untuk memaparkan serangkaian usaha dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini memaparkan hasil dan manfaat pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2023.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TA. 2023



BAB II

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN MILITER

Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan tanggal 9 Oktober 2018 bahwa yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah:

- 1) Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkedudukan di Sidoarjo
- 2) Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Madiun
- 3) Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkedudukan di Denpasar
- 4) Pengadilan Militer III-15 Kupang berkedudukan di Kupang
- 5) Pengadilan Militer III-16 Makassar berkedudukan di Makassar
- 6) Pengadilan Militer III-17 Manado berkedudukan di Manado
- 7) Pengadilan Militer III-18 Ambon berkedudukan di Ambon
- 8) Pengadilan Militer III-19 Jayapura berkedudukan Jayapura

Tugas pokok Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai kewenangan sebagai Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama yang Terdakwa Prajurit TNI yang berpangkat Mayor ke atas, serta memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang berada dalam jajaran daerah hukumnya dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya juga memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Militer dalam jajaran daerah hukumnya.

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN MILITER

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.

Adapun keadaan perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan Perkara Satuan Kerja Wilayah Dilmilti III Surabaya

No	Satker	Sisa tahun 2022	Masuk tahun 2023	Jumlah	Putus	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dilmilti III Surabaya	11	24	35	34	1	97,14
2	Dilmil III -12 Surabaya	31	169	200	179	21	89,5
3	Dilmil III -13 Madiun	0	45	45	40	5	89
4	Dilmil III -14 Denpasar	3	31	34	34	0	100
5	Dilmil III -15 Kupang	0	27	27	27	0	100
6	Dilmil III -16 Makassar	28	125	153	146	7	95,42
7	Dilmil III -17 Manado	6	88	94	75	19	80
8	Dilmil III -18 Ambon	25	71	96	90	6	94,82
9	Dilmil III -19 Jayapura	31	485	516	505	11	97,86

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selain menangani perkara Tingkat Pertama juga menangani perkara Tingkat Banding, dengan keadaan perkara Tingkat Banding sebagai berikut :

sisa tahun 2022	16	perkara
perkara di terima selama tahun 2023	202	perkara
Jumlah	218	perkara
perkara diselesaikan pada tahun 2023	208	perkara
sisa tahun 2023	10	perkara
persentase penyelesaian perkara yang putus	95,5	%

2. Keadaan perkara Tingkat Banding.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2023 telah memutus Perkara Tingkat Pertama sejumlah 34 (tiga puluh empat) perkara, dari jumlah perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum banding sejumlah 15 (lima belas) perkara, dengan rincian 14 (empat belas) berkas permohonan upaya hukum banding telah dikirim secara lengkap, namun 1 (satu) berkas permohonan upaya hukum banding belum terkirim dikarenakan permohonan banding tersebut di bulan Desember tahun 2023. Berkas beserta putusan banding yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Utama telah diterima kembali oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, berikut keadaan perkara upaya hukum banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya :

No.	Satker	Sisa Tahun 2022	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	Jumlah	Putus	Sisa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dilmilti III Surabaya	2	15	17	15	2
2.	Dilmil III-12 Surabaya	7	38	45	34	11
3.	Dilmil III -13 Madiun	4	16	20	18	2
4.	Dilmil III -14 Denpasar	1	9	10	7	3
5.	Dilmil III -15 Kupang	2	5	7	6	1
6.	Dilmil III -16 Makassar	12	32	44	36	8
7.	Dilmil III -17 Manado	5	23	28	26	2
8.	Dilmil III -18 Ambon	5	20	25	22	3
9.	Dilmil III -19 Jayapura	15	58	73	70	3

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2023 telah memutus Perkara Tingkat Pertama sejumlah 34 (tiga puluh empat) perkara, dari jumlah perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 8 (delapan) perkara, upaya hukum Kasasi tersebut atas Putusan Banding yang sudah diputus oleh Pengadilan Militer Utama, putusan upaya hukum kasasi yang turun dari Mahkamah Agung RI telah diterima kembali oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, berikut keadaan perkara upaya hukum banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya :

No	Satker	Sisa tahun 2022	Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023	Jumlah	Putus	Sisa
1.	Dilmilti III Surabaya	8	8	16	14	2
2.	Dilmil III-12 Surabaya	9	25	34	27	7
3.	Dilmil III -13 Madiun	3	15	18	12	6
4.	Dilmil III -14 Denpasar	4	8	12	10	2
5.	Dilmil III -15 Kupang	3	6	9	8	1
6.	Dilmil III -16 Makassar	18	20	38	33	5
7.	Dilmil III -17 Manado	4	27	31	22	9
8.	Dilmil III -18 Ambon	3	22	25	19	6
9.	Dilmil III -19 Jayapura	20	51	71	45	26

4. Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2023 telah memutus Perkara Tingkat Pertama sejumlah 34 (tiga puluh empat) perkara, pada tahun 2023 Pengadilan Milier Tinggi III Surabaya menerima 2 (dua) berkas permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali, dari permohonan tersebut terdapat 2 (dua) permohonan yang perkaranya diputus tahun 2022, sehingga perkara yang mengajukan permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang perkaranya diputus Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2023 sejumlah nihil perkara, berikut keadaan perkara upaya hukum banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya :

No	Satker	Sisa tahun 2022	Perkara yang mengajukan upaya hukum PK tahun 2023	Jumlah	Putus	Sisa
1.	Dilmilti III Surabaya	1	2	3	1	2
2.	Dilmil III-12 Surabaya	1	3	4	3	1
3.	Dilmil III -13 Madiun	0	5	5	0	5
4.	Dilmil III -14 Denpasar	0	1	1	0	1
5.	Dilmil III -15 Kupang	0	0	0	0	0
6.	Dilmil III -16 Makassar	0	3	3	1	2
7.	Dilmil III -17 Manado	0	2	2	0	2
8.	Dilmil III -18 Ambon	1	4	5	0	5
9.	Dilmil III -19 Jayapura	3	4	7	3	4

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.

Sisa perkara yaitu perkara yang belum bisa diselesaikan pada tahun berjalan sehingga menjadi beban perkara ditahun berikutnya, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya di tahun 2023 memiliki sisa Tahun 2022, yang dapat diselesaikan di tahun 2023 dengan rincian berikut :

No	Satker	Sisa tahun 2022	Putus tahun 2023	Sisa perkara
1.	Dilmilti III Surabaya			
	Tingkat pertama	11	34	1
	Tingkat banding	16	208	10
2.	Dilmil III-12 Surabaya	31	179	21
3.	Dilmil III -13 Madiun	0	40	5
4.	Dilmil III -14 Denpasar	3	34	0
5.	Dilmil III -15 Kupang	0	27	0
6.	Dilmil III -16 Makassar	28	146	7
7.	Dilmil III -17 Manado	6	75	19
8.	Dilmil III -18 Ambon	25	90	6
9.	Dilmil III -19 Jayapura	31	505	11

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Mendasari Surat Edaran tersebut Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Satker	< 3 bulan	4 - 5 bulan	6 - 12 bulan	> 12 bulan
1.	Dilmilti III Surabaya				
	Tingkat Pertama	24	9	0	1
	Tingkat Banding	208	0	0	0
2.	Dilmil III-12 Surabaya	159	20	0	0
3.	Dilmil III -13 Madiun	36	4	0	0
4.	Dilmil III -14 Denpasar	34	0	0	0
5.	Dilmil III -15 Kupang	26	1	0	0

6.	Dilmil III -16 Makassar	125	15	6	0
7.	Dilmil III -17 Manado	0	0	0	0
8.	Dilmil III -18 Ambon	72	3	0	0
9.	Dilmil III -19 Jayapura	50	341	18	0

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK.

➤ Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2023 telah memutus Perkara Tingkat Pertama sejumlah 34 (tiga puluh empat) perkara, dari putusan tersebut terdapat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, berikut keadaan perkara yang telah diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya:

No	Satker	Perkara di Putus	Perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan upaya HukumBanding
1.	Dilmilti III Surabaya	34	15	19
2.	Dilmil III-12 Surabaya	179	38	141
3.	Dilmil III -13 Madiun	40	15	25
4.	Dilmil III -14 Denpasar	34	9	25
5.	Dilmil III -15 Kupang	27	4	23
6.	Dilmil III -16 Makassar	133	32	101
7.	Dilmil III -17 Manado	75	23	52
8.	Dilmil III -18 Ambon	90	20	70
9.	Dilmil III -19 Jayapura	505	58	447

➤ Putusan Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2023 telah memutus perkara Tingkat Pertama sejumlah 34 (tiga puluh empat) perkara dan menerima Putusan Banding dari Pengadilan Militer Utama sejumlah 15 (lima) berkas, dari jumlah putusan banding tersebut terdapat 2 (dua) perkara yang permohonan upaya hukum bandingnya pada tahun 2022, dari jumlah tersebut terdapat perkara yang mengajukan permohonan upaya Hukum Kasasi sejumlah 8 (delapan) perkara, sehingga rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya sebagai berikut :

No	Satker	Perkara di Putus	Perkara yang mengajukan upaya Hukum Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi
1.	Dilmilti III Surabaya	34	8	26
2.	Dilmil III-12 Surabaya	179	38	141
3.	Dilmil III -13 Madiun	40	15	25
4.	Dilmil III -14 Denpasar	34	9	25
5.	Dilmil III -15 Kupang	27	4	23
6.	Dilmil III -16 Makassar	133	32	101
7.	Dilmil III -17 Manado	75	23	52
8.	Dilmil III -18 Ambon	90	20	70
9.	Dilmil III -19 Jayapura	505	58	447

➤ Putusan Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2023 telah memutus perkara Tingkat Pertama sejumlah 34 (tiga puluh empat) perkara dan menerima Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung sejumlah 14 (empat belas) putusan dari putusan tersebut ada 2 (dua) perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sehingga rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya sebagai berikut :

No	Satker	Perkara di Putus	Perkara yang mengajukan upaya hukum PK	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
1.	Dilmilti III Surabaya	34	2	32
2.	Dilmil III-12 Surabaya	179	3	176
3.	Dilmil III -13 Madiun	40	0	40
4.	Dilmil III -14 Denpasar	34	1	33
5.	Dilmil III -15 Kupang	27	0	0
6.	Dilmil III -16 Makassar	133	1	132
7.	Dilmil III -17 Manado	75	0	75
8.	Dilmil III -18 Ambon	90	4	86
9.	Dilmil III -19 Jayapura	505	4	501

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

1. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Salah satu kegiatan untuk meningkatkan pelayanan public dalam penyelesaian perkara dilakukan sidang keliling. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Manfaat Sidang Keliling adalah :

- Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara
- Biaya transportasi pihak pencari keadilan
- Menghemat waktu

Data Sidang keliling Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	15 s.d 25 Januari 2023	Dilmil III-19 Jayapura	10	10	0	Rp119.081.094,00
2.	7 s.d 11 Agustus 2023	Dilmil III-16 Makassar	5	5	0	Rp38.702.080,00
3.	27 November s.d 1 Desember 2023	Dilmil III-14 Denpasar	5	5	0	Rp46.240.000,00
4.	14 s.d 15 Desember 2023	Dilmil III-13 Madiun	6	6	0	Rp11.320.000,00
JUMLAH			26	26	0	Rp215.343.174,00

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	13 s.d 16 Maret 2023	Pengadilan Agama Kota Malang	14	12	2	Rp20.180.000,00
2.	22 s.d 27 Juni 2023	Pengadilan Agama Kota Malang	10	10	0	Rp20.180.000,00
3.	16 s.d 19 Oktober 2023	Pengadilan Agama Kota Malang	11	10	1	Rp20.180.000,00
JUMLAH			35	32	3	Rp60.540.000,00

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	22 s/d 29 Maret 2023	PN Kelas I A Blitar	5	0	5	Rp25.560.000,00
2.	13 s/d 15 September 2023	PN Kelas I A Blitar	5	5	0	Rp15.975.000,00
JUMLAH			10	5	5	Rp41.535.000,00

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-14 Denpasar

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	10 s.d 14 Maret 2023	PA Mataram	2	2	0	Rp29.389.200,00
2.	24 s.d 27 Juli 2023	PN Mataram	6	6	0	Rp26.055.600,00
JUMLAH			8	8	0	Rp55.444.800,00

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-15 Kupang

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	13-17 Februari 2023	P.A. Bajawa	2	2	0	Rp33.916.000,00
2.	23-27 Oktober 2023	P.N. Rote Ndao	2	2	0	Rp30.096.000,00
JUMLAH			4	4	0	Rp64.012.000,00

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-16 Makassar

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	27 Feb s.d 03 Mar 2023	Pengadilan Negeri Bone	12	11	1	Rp21.390.000,00
2.	22 Mei s.d 26 Mei 2023	PTUN Kendari	10	10	0	Rp34.195.000,00
3.	16 Okt s.d 20 Okt 2023	Pengadilan Negeri Pare-Pare	11	11	0	Rp34.195.000,00
JUMLAH			33	32	1	Rp89.780.000,00

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-17 Manado

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	21-27 Mei 2023	PN Gorontalo	9	9	0	Rp36.360.000,00
2.	18-22 September 2023	PN Gorontalo	12	11	1	Rp38.400.000,00
JUMLAH			21	20	1	Rp74.760.000,00

Data Sidang Keliling Dilmil III-18 Ambon

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	6 s.d 11 Maret 2023	PN. Ternate	10	8	2	Rp59.700.000,00
2.	23 s.d 26 Agustus 2023	PN Ternate	6	5	1	Rp48.060.000,00
3.	16 s.d 19 Oktober 2023	PN Masohi	4	3	1	Rp22.081.000,00
JUMLAH			20	16	4	Rp129.841.000,00

Data Sidang Keliling Dilmil III-19 Jayapura

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	20 s.d. 24 Februari 2023	Merauke	16	16	0	Rp56.802.050,00
2.	27 s.d. 31 Maret 2023	Biak	10	10	0	Rp58.329.849,00
3.	7 s.d. 11 Agustus 2023	Manokwari	11	10	1	Rp59.844.150,00
JUMLAH			37	36	1	Rp174.976.049,00

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terdiri dari 5 jenis status Kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil), PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dan BP Personel Militer. Tahun 2023 SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berjumlah 56 orang dengan rincian 26 orang Militer, 12 orang PNS, 2 orang PPPK, 11 orang PPNPN dan 6 orang BP Personel Militer.

SDM di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersusun atas tenaga Teknis dan Non Teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan bagian Kepaniteraan. Unsur PPNPN belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPNPN dalam Struktur Organisasi. Secara rinci SDM di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :

A. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	Kirto, SH.,M.H.	Brigadir Jenderal TNI	Kadilmilti III
2.	Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.	Kolonel Chk NRP 11950006980270	Waka Dilmilti III
3.	Prastiti Siswayani, S.H	Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670	Hakim Militer Tinggi
4.	Sultan, S.H	Kolonel Chk NRP 11980017760771	Hakim Militer Tinggi
5.	Agus Husin, S.H.,M.H.	Kolonel Chk NRP 636562	Hakim Militer Tinggi
6.	Saifuddin,S.H.,M.H.	Kolonel Sus NRP 519758	Hakim Militer Tinggi

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
7	Sahrul, S.H., M.H.	Kolonel Chk NRP 119800319412730114	Hakim Militer Tinggi
8	I Komang Suciawan, S.H.	Kolonel Laut (H) NRP 12535/P	Hakim Militer Tinggi
9	Riza Fadilah, S.H.	Kolonel Laut (H) NRP 13149/P	Hakim Militer Tinggi
10	Saifuddin, S.H., M.H.	Kolonel Kum NRP 519758	Hakim Militer Tinggi
11	Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si	Kolonel Sus NRP 520868	Hakim Militer Tinggi
12	Anwar, S.H.,M.H.	Kolonek Chk NRP 11960010750569	Sekretaris
13	Rendra Apri Sadewa, S.H.,M.H.	Kolonel Chk NRP 11990020210475	Panitera
14	Tigor Parlilitan Hasugian, S.IP.,S.H.	Pembina Gol. IV/a NIP 196905221992031003	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
15	Dwi Puspitarini, S.E.	Pembina Gol. IV/a NIP 198112062006042004	Kabag Umum dan Keuangan
16	Mustofa Yanu Wiryatmo, S.H. M.H.	Letkol Chk NRP 11010002530172	Panmud Pidana
17	Iyah Syafriah, S.H., M.H.	Letkol Chk (K) NRP 2920030840573	Panmud Hukum
18	Reza Yanuar, S.E.,M.H.	Mayor Chk NRP 1102006490177	Panmud TUM
19	Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.	Mayor Chk NRP 2194015750972	Panitera Pengganti
20	Irdawati Soekirlan, S.H.	Penata Tk.I Gol. III/d NIP 196812061990032005	Kasubbag Kepegawaian dan TI
21	Wahyu Eko Wicaksono, S.T.	Penata Tk.I Gol. III/d NIP 197405142006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
22	Tubagus Maulana Arif Darma, S.H., M.H.	Penata Tk.I Gol. III/d NIP 197605272006041003	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
23	Mochamad Gufron, S.H.	Penata Gol. III/c NIP 196912041997011001	Kabag Tata Usahadan Rumah Tangga
24	Amanda Rosaline Fajar Sari, S.H.	Penata Muda Tk.I Gol. III/b NIP 199502162019032008	Analisis Perkara Peradilan
25	Angga Permana Putra, S.H.	Penata Muda Tk. I Gol. III/b NIP 198509212009041002	Penyusun Laporan Keuangan
26	Fajar Eka Pratomo, S.E.	Penata Muda Gol. III/a NIP 199201152020121006	Analisis Perencanaan
27	Afni Syafaatun, S.AP.	Penata Muda Gol. III/a NIP 199609182020122005	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
28	Yohan Dony Kurniawan, S.H.,M.H.	Letda Chk NRP 21070475120387	Pengelola Sistem dan Jaringan
29	Adi Sukadar	Pelda NRP 21010160750379	Pengelola Barang Milik Negara
30	Eko Widodo	Serma NRP 21950302550573	Ajudan
31	Nanang Candra Trisnianto, S.H.	Serma NRP 21040180940185	Pengelola Barang Milik Negara
32	Ali Fatkul Rahman	Serma NRP 21060247360585	Pengelola Perkara
33	Amrustian, S.H.,M.H.	Serma NRP 21070475460288	Pengelola Perkara
34	Nila Rukhama, A.Md.	Pengatur Gol. II/c NIP 199807222022032016	Pengelola Perkara
35	Afrida Eka Sabiila, A.Md.AB	Pengatur Gol. II/c NIP 199811062022032015	Pengelola Perkara
36	Budi Harjo Sukoco	Sertu NRP 31030326311282	Pemelihara Sarana dan Prasarana

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
37	Kotib	Sertu NRP 31950475050174	Teknisi Sarana dan Prasarana
38	Deddi Pradana .S	Praka NRP 31130165410494	Pengadministrasi Hukum

Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No	Nama	Pangkat/NRP	Keterangan
1.	Yusuf Kurniawan, S.E.	NI. 199503052023211010	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama
2.	Fahrudin, S.E.	NI, 198010042023211004	Perencana Pertama

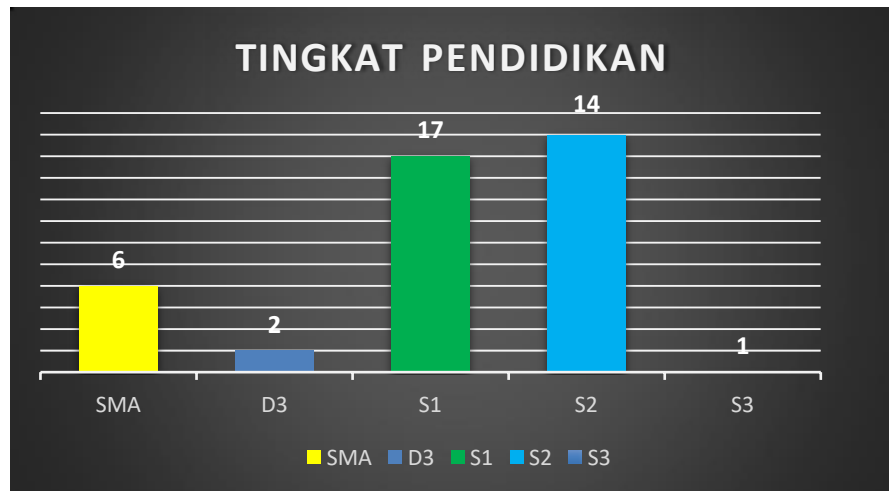
Data BP Personel Militer

No	Nama	Pangkat/NRP	Keterangan
1.	Hendra Duta Prasetya	Serda NRP 21210134821100	Staf Perkara
2.	Muhammad Irfan Efendy	Pratu NRP 31170487060497	Staf Perkara
3.	Fajar Firmansyah	Pratu NRP 31180278570396	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga
4.	Khaerudin Tamimi	Prada NRP 31210139770601	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga
5.	Rafif Dwi Bagus Setiawan Sutarto	Prada NRP 31210218550801	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga

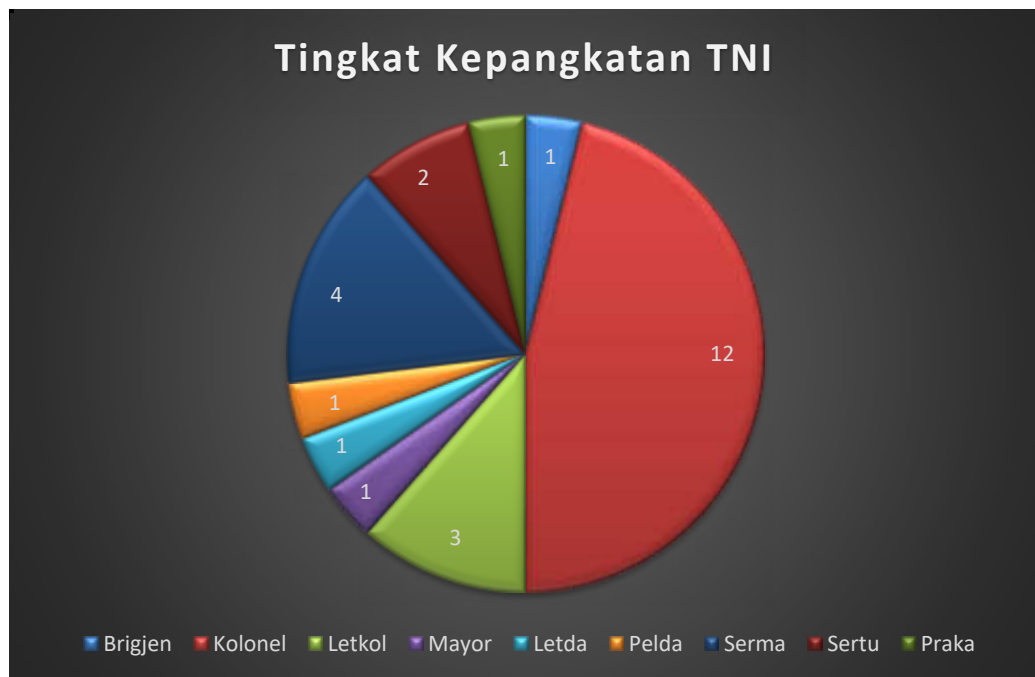
Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

No	Nama	Keterangan
1.	Karmayani	Pramubakti
2.	Purwaning Wahyudi	Pramubakti
3.	Agita Kartika Ayuningtyas , S.H.	Pramubakti
4.	Sukiman	Security
5.	Nanang Setiyoko	Security
6.	Amir Hasan	Security
7.	Nugraha Kencana Efendi	Driver
8.	M. Yusuf Efendhi	Pramubakti
9.	Faisal Dwikky K. Nugroho	Pramubakti
10	Gilang Pratama	Pramubakti
11	Ahmad Santoso	Pramubakti

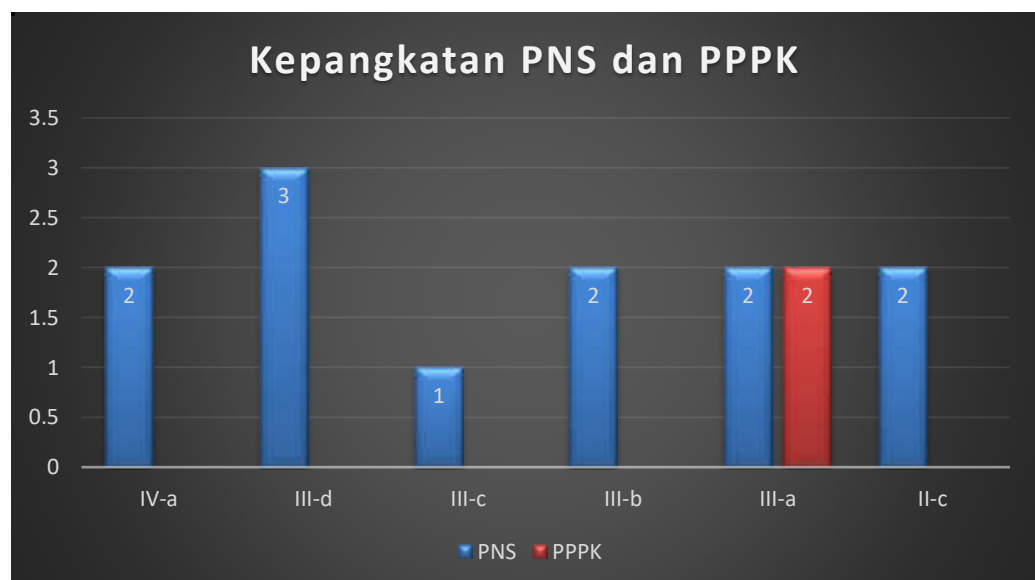
Tingkat Pendidikan Pegawai pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



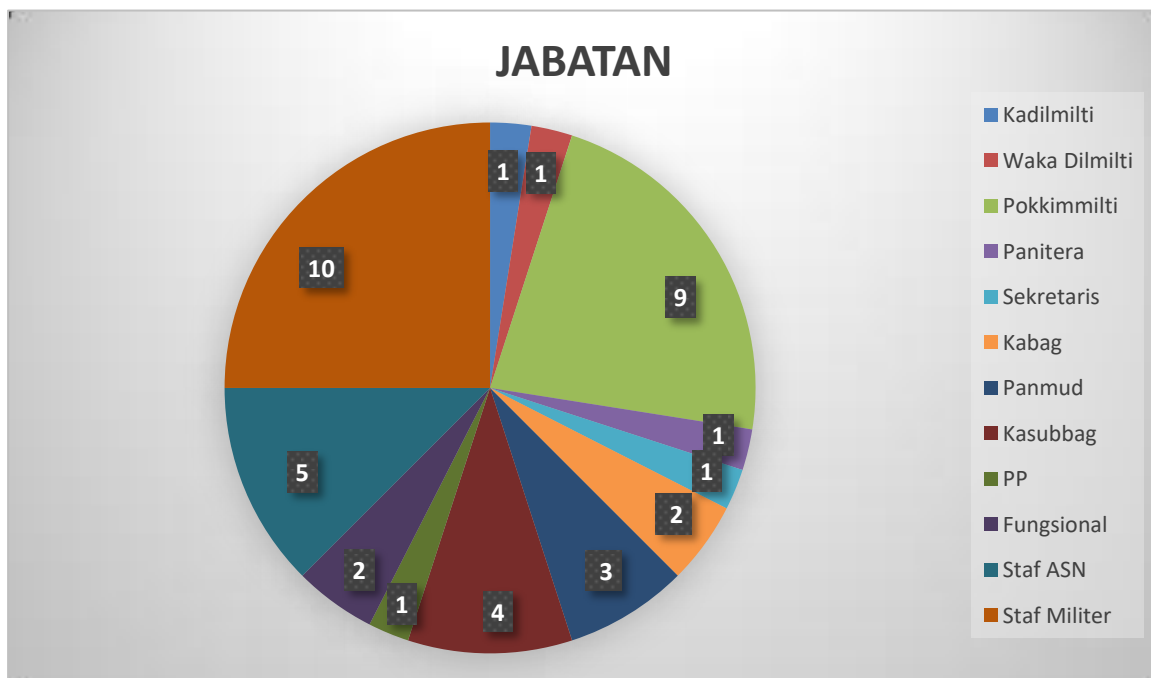
Pangkat TNI pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



Pangkat PNS pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



Jabatan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



a. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tingkat Pertama :

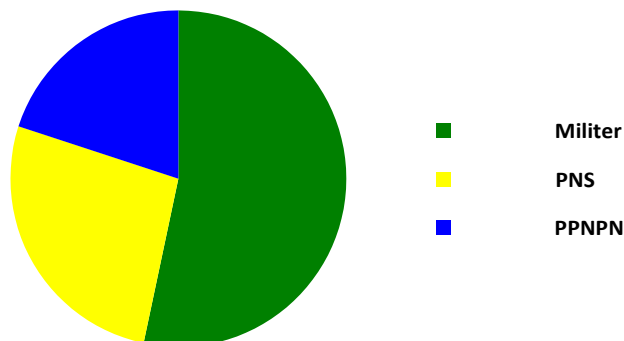
1. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	5 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	Kosong
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	6 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan	1 Orang
		Pengelola Perkara Pidana	5 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Hukum	1 Orang
		Pengadministrasi Register Perkara	0 Orang
		Pengelola Perkara	2 Orang
2	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	0 Orang
		Pengolah Informasi dan Komunikasi	0 Orang
		Pranata Kearsipan	1 Orang
		Pengelola Barang Milik Negara	1 Orang
		Pengelola Kepegawaian	1 Orang
		Pengolah Daftar Gaji	1 Orang
		Teknisi Sarana dan Prasarana	1 Orang
		Pengadministrasi Persuratan	3 Orang
		Pengadministrasi Kepegawaian	1 Orang
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	1 Orang
		Pranata Peradilan	Kosong

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	24	53,33
2	PNS	12	26,67
3	PPNPN	9	20,00
Jumlah Total		43	100.00

Grafik Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	23	1
2	PNS	3	9
3	PPNPN	7	2
Jumlah Total		33	12

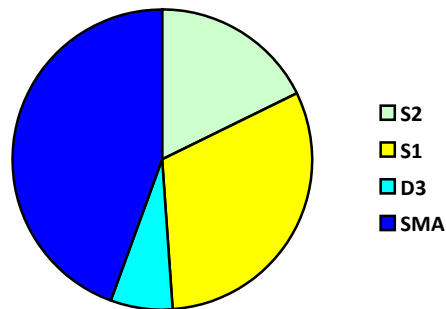
Tabel Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	4	-
3	Mayor	2	-
4	Kapten	1	-
5	Lettu	1	-
6	Peltu	3	-
7	Pelda	2	-
8	Serma	2	-
9	Serka	4	-
10	Sertu	-	-
11	Kopka	1	-
12	Koptu	1	-
13	Kopda	1	-
14	Praka	1	-
15	Pratu	-	-
16	Prada	-	-
17	IV/a	-	1
18	III/d	-	2
19	III/c	-	2
20	III/b	-	3
21	III/a	-	1
22	II/d	-	-
23	II/c	-	3
Jumlah Total		24	12

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	S-2	7	1	-	8
2	S-1	8	5	1	14
3	D-3	-	3	-	3
4	SMA	9	3	8	20

Grafik Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tabel Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	20 – 30 Tahun	1	3	3	7
2	31 – 40 Tahun	5	3	5	13
3	41 – 50 Tahun	14	3	-	17
4	51 – 58 Tahun	4	3	1	8

2 Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-13 Madiun :

urut berdasarkan kepangkatan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat dilihat pada

NO	NAMA PANGKAT	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Ahmad Efendi, S.H., M.H.	Letkol Chk	11020002860972	Kepala
2	Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.	Mayor Chk	11030043370581	Wakil
3	Prana Kurnia Wibowo, S.H	Mayor Laut (H)	18883/P	Hakim
4	Nurdin Ruka, S.H., M.H.	Mayor Chk	21950070141174	Hakim
5	Gatot Robby Bhaskara, S.H.	Lettu Kum	5440996	Panitera
6	Samian, S.H., M.M	IV/a	197002211992031001	Sekretaris

1	2	3	4	5
1	Gatot Suprpto	III/d	196805031991031009	Kasub Bagian Umum dan Keuangan
2	Mahardini Dianningtyas Swastika, S.H	III/d	198402132009122003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3	Sugeng Biyono	III/b	196810101991031003	Kasub Perencanaan Pelaporan dan IT
4	Sri Luswati	III/b	196803281989032004	Pengadministrasi Register Pekara
5	Amin	III/b	196712311992031024	Pemelihara Sarana Dan Prasarana
6	Sriyani	III/b	197210041994032001	Pengadministrasi Kepegawaian
7	Zakiah, S.E.	III/a	199110082020122007	Analisis Perencanaan
8	Rendy Ardicha Pradana, S.ST.	III/a	199202042019031004	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
9	Puguh Pambudi Susilo	Peltu	522415	Panitera Pengganti
10	Achmad Faizal	Pelda	1940155520273	Panitera Pengganti
11	Budi Utomo	Pelda	321010116541280	Pengolah data keberatan dan Banding, Panmud Hukum
12	Dodik Sugeng Prasetyo	Serma	531770	Pengolah data keberatan dan Banding, Panmud Pidana
13	Dodit Puguh Prasetyo	Serma	531806	Bendahara
14	Andri Sujatmiko	Serma Kom	106531	Pengelola Berkas Peninjauan Kembali, Panmud Hukum
15	Febi Ramona	Serma	31940520920274	Pengelola perkara, Panmud Pidana
16	Mulyono, S.H	Serka	31970176050877	Pengelola Barang Milik Negara (BMN)
17	Raudya Rifka Zahra, A.Md.	II/c	199712262020122005	Pengelola Kepegawaian
18	Yohanes Hartono	Serka	31960641781076	Pengelola Pekara, Panmud Hukum
19	Luki Setiawan, AMd.	II/c	199210262022031003	Pengelola Data
20	Hilmy Aziz Raihan, A.Md.	II/c	19951006202031009	Pengelola Berkas Peninjauan Kembali, Panmud Pidana

1	2	3	4	5
21	Adi Prakosa	Serka	21130071790694	Pranata Kearsipan
22	Agus Setiawan	Kopka Lis	96984	Teknisi Sarana Prasarana
23	Tommy Hariyanto	Kopka Ttu	99830	Pengadministrasi Umum
24	Badruzzaman	Koptu	31000591731079	Pengadministrasi Perpustakaan
25	Catur Yulianto	Kopda	529007	Pengadministrasi Persuratan
26	M. Afiq Nurzali	Kopda	31090486560390	Pengadministrasi Penanganan Perkara, Panmud Hukum
27	Ali Maskur	PPNPN	-	Stas Panitera Muda Hukum
28	Dimas Wahyu Nugroho	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
29	Dani Nani Nur	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
30	Suwanto	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
31	Kadir	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Personil Bawah Perintah pada Pengadilan Militer III-13 Madiun:

NO	NAMA PANGKAT	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	Gigih Dayu Priambudi, S.H.	Lettu Kum	544097	Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Personil OJT (*on the job training*) pada Pengadilan Militer III-13 Madiun:

NO	NAMA PANGKAT	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	Lina Nilawati	Serka	542081	Pengadministrasi Anggaran
2	Kamari	Sertu	531302	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor

- Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial sebanyak 19 (Sembilan belas) orang antara lain:

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	HAKIM MILITER	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 11020002860972
2		Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11030043370581
3		Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (H) NRP. 18883/P
4		Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 21950070141174
5	PANITERA	Gatot Robby Bhaskara, S.H. Lettu Kum NRP. 544096
6	PANITERA PENGGANTI	Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP. 522415
7		Achmad Faizal Pelda NRP. 31940155520273
8	PROVOST	Budi Utomo Pelda NRP. 21010116541280
9		Dodik Sugeng Prasetyo Serma NRP. 531770
1		Dodit Puguh Prasetyo Serma NRP. 531806
2		Andri Sujatmiko Serma NRP. 106531
3		Febi Ramona Serma NRP. 31940520920274
4		Yohanes Hartono Serka NRP. 31960641781076
5		Mulyono Serka NRP. 31970176050877
6		Adi Prakosa Serka NRP. 21130071790694
7		Agus Setiawan Kopka Lis NRP. 96984
8		Tommy Hariyanto Kopka Ttu NRP. 99830
9		Badruzzaman Koptu NRP. 31000591731079
10	Catur Yulianto Kopda NRP. 529007	
11	M. Afiq N. Kopda NRP. 31090486560390	

- Jumlah Personil Tenaga Non Teknis Yudisial sebagai berikut:

1) Berdasarkan Jabatan Struktural :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	KEPALA	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 11020002860972
2	WAKA	Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11030043370581
3	SEKRETARIS	Samian, S.H.,M.M. IV/a NIP. 197002211992031009
1	KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORTALA	Mahardini Dianningtyas Swastika, S.H. III/d NIP. 198402132009122003
2	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Gatot Suprpto III/d NIP.196805031991031009
3	KASUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	Sugeng Biyono III/b NIP.196810101991031003

2) Staf

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	STAF	Sri Luswati III/b 196803281989032004
2		Amin III/b 196712311992031024
3		Sriyani III/b 197210041994032001
4		Zakiah, S.E III/a NIP.19911008202012200
5		Rendy Ardicha Pradana, S.ST. III/a NIP. 19920202019031004
6		Raudya Rifka Zahra, A.Md. II/c NIP 199712262020122005
7		Luky Setiawan, A.Md. II/c NIP. 199210262022031003
8		Hilmy Aziz Raihan, A.Md. II/c NIP. 199510062022031009

3) PPNPN

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	PPNPN	Susriyani, S.H.
2		Ali Maskur
3		Dimas Wahyu Nugroho
4		Felicianus Suwanto
5		Dani Nani Nur
6		Kadir

3. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-14 Denpasar

No.	Nama	Pangkat/Korps/Gol NRP/NIP	Jabatan
Personel Militer			
1	Dedy Darmawan, S.H., M.H.	Kolonel Chk	Kadilmil
2	Muhammad Rizal, SH., MH.	Letkol Chk	Waka Dilmil
3	I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.	Letkol Chk	Hakim Gol. V
4	Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.	Letkol Chk	Hakim Gol. V
5	Kus Indrawati, S.H., M.H.	Letkol (K) Chk	Hakim Gol. V
6	Dianing Lusiasukma, S.H., M.H.	Kapten (K) Chk	Hakim Go. VII
7	Mahpul Saepuloh, S.H.	Mayor Chk	Panitera
8	Damai Chrisdianto, S.H	Lettu Chk	Panmud Pidana
9	Kadek Subrata, S.H.	Peltu	Panitera Pengganti
10	Purwodiyanto, S.H.	Serma	Pengolah data dan informasi
11	I Nym Jana Nuraga, SH.	Serma	Pengelola Perkara
12	Hendricus Andryas	Sertu	Teknisi Sarana dan prasarana
13	I Wayan Kusuma Yuda	Kopka	Pengadministrasian Perkantoran
14	I Wayan Widana	Kopka	Pengadministrasian Perkantoran
15	Viktor Januaris Berutu	Pratu	Pengadministrasian Perkantoran
Personel Pegawai			
1	I Wayan Parna, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Sekretaris
2	I Nym Suartika, SE, SH, MH	Penata Tk I III/d	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3	A.A.I Intan Prabawati, S.E.	Penata Tingkat I III/d	Kasubbag Umum dan Keuangan
4	Katharina, S.H.	Penata Tingkat I III/d	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
5	Sri Susmawati, SH	Penata III/c	Analisis Perkara Peradilan
6	I.G.A.N Wahyu Permadi, S.H.	Penata III/c	Analisis P. Keuangan APBN
7	I G.A.N Nym Giri Sundari, SE.M.M	Penata Tk I III/d	Penata Layanan Operasional
8	Ketut Suriani, SH	Penata Muda Tingkat I III/b	Penata Layanan Operasional
9	Ketut Gede Wiguna, S.IP.	Penata Muda III/a	Penata Layanan Operasional
10	Ni Kadek Yuliantini, A.Md.	Pengatur II/c	Penelaah Teknis Kebijakan
11	Gisca Pravita A, A.Md.M	Pengatur II/c	Penata Layanan Operasional
12	Melathi Indahsari, A.Md.M	Pengatur II/c	Pengolah data dan informasi

Data PPNPN

No	Nama	Status	Jabatan
1	I Nyoman Dika	PPNPN	Pramubakti
2	Sri Yuliowati	PPNPN	Pamubakti
3	I Putu Mega Yasa, S.H	PPNPN	Pamubakti
4	I.Nym Gede Jaya, S.Kom	PPNPN	Pamubakti
5	Pieteron Yagoto	PPNPN	Pamubakti
6	Nyoman Sukadi, S.H	PPNPN	Satpam
7	Gst Ngh Suardika Adi Saputra	PPNPN	Satpam
8	Bagoes Dewangga	PPNPN	Satpam

4. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-15 Kupang
- Pejabat Struktural

No	Nama	Pangkat/NRP/NIP	Jabatan
1	Agustono, S.H., M.H.	Letnan Kolonel Chk/ 21940080960873	Kadilmil
2	Hendro Cahyono, S.H., M.H.	Mayor Chk / 11040032130782	Waka Dilmil
3	Irwan Idris, S.H.	Kapten Chk / 21960348011275	Panitera
4	I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.	Letda Chk/ 21050263690586	Panmud Pidana
5	-	-	Panmud Hukum
6	Alexander, S.E.	ASN III/d 197609082009121002	Sekretaris
7	-	-	Kasubag IT dan Pelaporan
8	Delmi B Sabloit, A.Md	ASN III/b 198301262009042001	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
9	Marloyati Lado, S.H.	ASN III/a 198710082009122003	Kasubag Umum dan Keuangan

- **Hakim Militer**

No	Nama	Pangkat/NRP	Matra
1.	Agustono, S.H., M.H.	Letnan Kolonel Chk/ 21940080960873	Angkatan Darat
2.	Hendro Cahyono, S.H., M.H.	Mayor Chk / 11040032130782	Angkatan Darat
3.	Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.	Mayor Chk / 11080095390983	Angkatan Darat
4.	Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.	Kapten Kum / 537313	Angkatan Udara
5.	Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.	Kapten Kum / 541692	Angkatan Udara

- **Staf/Fungsional Umum**

No	Nama	Pangkat/NRP/NIP	Jabatan
1	Diana R. Laiskodat	ASN III/d 196901311991032002	Penyusun Laporan Keuangan
2	Hendra Dianto, S.H.	Serka / 31000726061278	Pengelola Perkara
3	Muhammad Ghiyats Lizuardi, A.Md.	ASN II/c 1994062020201007	Pengelola Sistem dan Jaringan
4	Ridwan Permana Putra, A.Md.	ASN II/c 199109122022031008	Pengelola Perkara
5	Tia Agustina Murtiani, A.Md.	ASN II/c 199608152022032013	Pengelola Kepegawaian
6	Hasbi Pasolo, S.H., M.H.	Sertu/ 31000726061278	Pengadministrasi Hukum
7	Daud Ena	Sertu/ 640525	Pemelihara Sarana dan Prasarana
8	Norberto Manek Alo, S.H.	Serda/ 31071468740188	Pengadministrasi Kepegawaian

Data peronel PPNPN Dilmil III-15 Kupang

No	Nama	Jabatan	Diperbantukan
1	Benyamin Giri	Pengemudi	Staf Kepaniteraan
2	Desi A. Hingmadi, SH	Pramubakti	Staf Umum dan Keuangan
3	Mariance Huwae, SH	Pramubakti	Staf Kepaniteraan
4	Jidon A. Balla	Pramubakti	Staf PTIP
5	Jermias J. Bessie	Pramubakti	Staf Umum dan Keuangan
6	Marthen Wila Do	Sekuriti	Staf Umum dan Keuangan
7	Bupelsi E. Tabun	Sekuriti	Staf Kepegawaian
8	Trymoon Tome	Sekuriti	Staf Umum dan Keuangan
9	Muchlis A. Achmad	Sekuriti	Staf Umum dan Keuangan

5. **Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-16 Makassar**

Tabel Data Klasifikasi Pegawai

NO	KLASIFIKASI	JABATAN	JUMLAH (Orang)
I	Struktural	Kepala	1
		Wakil Kepala	0
		Panitera	1
		Sekretaris	1
		Panitera Muda Pidana	1
		Panitera Muda Hukum	0
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1
		Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	1
		II	Fungsional
Panitera Pengganti	3		
Analisis SDM Aparatur Pertama	1		
III	Pelaksana	Analisis Perkara Peradilan Pidana	0
		Analisis Perkara Peradilan Hukum	1
		Pengelola Penanganan Perkara Pidana	4
		Pengelola Penanganan Perkara Hukum	1
		Pengolah Data Informasi Panmud Hukum	1
		Pengolah Data Informasi Subbag Kepegawaian	1
		Penata Layanan Operasional	1
		Pengadministrasi Perkantoran	1
		Penelaah Teknis Kebijakan	1
		Bendahara Pengeluaran	1
IV	Tenaga Kontrak	Pramubakti	2
		Pengemudi	2
		Satpam	4

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Militer	19	51,43
2.	PNS	9	25,71
3.	PPNPN	8	22,86
Jumlah		35	100

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Militer	13	5
2.	PNS	3	6
3.	PPNPN	7	1
Jumlah		23	14

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1.	Kolonel	1	
2.	Letnan Kolonel	1	
3.	Mayor	3	
4.	Kapten	2	
5.	Lettu	1	
6.	Letda	0	
7.	Peltu	2	
8.	Pelda	1	
9.	Serma	6	
10.	Serka	1	
11.	Kopda	0	
12.	Praka	0	
13.	Penata Tk I		5
14.	Penata		0
15.	Penata Muda Tk I		1
16.	Penata Muda		1
17.	Pengatur		2
Jumlah		18	9

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	S-2	5	1	-	6
2.	S-1	12	5	4	21
3.	D-3	-	2	-	2
4.	SMA	1	1	4	6
Jumlah		18	9	8	35

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	20 – 30 Tahun	0	2	5	7
2.	31 – 40 Tahun	7	2	2	11
3.	41 – 50 Tahun	9	3	1	13
4.	51 – 58 Tahun	2	2	0	4
Jumlah		18	9	8	35

6. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-17 Manado

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	Amriandie, S.H., M.H	Kolonel Laut (H) NRP 14124/P	Kepala
2.	Wakil	-	Kosong
3.	Prima Ledy Yudoyono, S.T(Han)., S.H	Kapten Chk NRP. 11130023470589	Panitera
4.	Meldi M. A. S Seon S.Pi.,	Penata Tk.I III/d NIP. 197405142002121001	Sekretaris
5	Amriandie, S.H., M.H	Kolonel Laut (H) NRP 14124/P	Hakim Militer
7	Patta Imang, S.H.	Mayor Chk NRP. 21930123471271	Hakim Militer
8	Ruslan, S.H.	Mayor Laut (H) NRP. 17599/P	Hakim Militer
9	Soniardhi, S.H., M.H.	Kapten Chk. NRP 11100009060986	Hakim Militer
10	Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H	Kapten Chk. NRP11120029260790	Hakim Militer
11	Zulkarnain S.H.	Lettu Chk NRP. 21020026780383	Panmud Pidana
12	Panmud Hukum	-	Kosong
13	Procleo Franz Simamora, S.H.	Kapten Chk NRP 21960348840874	Panitera Pengganti
14	Muhammad Sophian Dalimunthe, S.H.	Letda Chk NRP 21060309150286	Panitera Pengganti
15	Dharmawati Rahayu, S.E.,M.E.,	Penata Muda Tk.I III/c NIP.198708142011012015	Kasubbag Umum dan Keuangan)
16	Nasir,	Penata Muda Tk.I III/b NIP196805101997011001	Pengadministrasi Registrasi Perkara
17	Fiere G. Harinda, S.T	Penata Muda Tk. III/a NIP 197804042006041003	Analisis Tata Laksana / PIh. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi
18	Rohma Rohimah Hartono, A.Md	Pengatur II/c NIP.198810222022032003	Pengelola Perkara
19	Riri Agustina, A.Md.,A.B,	Pengatur II/c NIP 199908182022032009	Pengelola Perkara
20	Rodi Salmon	Sertu NRP. 31040378600482	Staf Kesekretariatan

Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

No	Nama	Keterangan
1.	Dewi Durandt	Pramubhakti
2.	Ervina R. Damima	Pramubhakti
3	Jinli Ignasius Repi	Pramubhakti
4	Zuhri Zain Purwanto, S.Tr.Kom.	Pramubhakti
5	Febrina Mato, S.H.,M.H	Pramubhakti
6	Ahmad Mahadjani, S.H.	Pengemudi
7	Fahmi Rizal Rahanyamtel	Pengemudi
8	Deavis Billi Chandra Aling	Security
9	Filipus P.A.R Anumpitan	Security

Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1.	Kolonel	1	
2.	Letnan Kolonel	-	
3.	Mayor	2	
4.	Kapten	4	
5.	Lettu	1	
6.	Letda	1	
7.	Peltu	-	
8.	Pelda	-	
9.	Serma	-	
10.	Serka	-	
11.	Sertu	3	
12.	Praka		
13.	Penata Tk I		1
14.	Penata		1
15.	Penata Muda Tk I		1
16.	Penata Muda		1
17.	Pengatur		2
Jumlah			

Berdasarkan pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	S-2	3	2	1	
2.	S-1	5	2	2	
3.	D-3		2		
4.	SMA	3	1	6	
Jumlah					

7. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-18 Ambon

Tabel Data Personel Militer

No	Nama	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.	Kolonel Chk / 11980040360874	Kadilmil
2.	Joko Trianto, S.H., M.H.	Letnan Kolonel Chk / 11020016150177	Hakim Militer
3.	Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla.	Letkol Laut (H) / 16762/P	Hakim Militer
4.	Magdial, S.H.	Letkol Chk/ 11030010440578	Cakim Militer (BP menunggu penempatan)
5.	Samsul Hadi, S.H., M.H.	Mayor Chk / 21940082370175	Hakim Militer
6.	Purwadi, S.H., M.H.	Mayor Chk / 21960345950374	Hakim Militer
7.	Dani Subroto, S.H., M.H	Mayor Chk / 2920087370171	Panitera (BP di Dilmilti III Surabaya)
8.	Riska Dori, S.H.	Lettu Chk / 21010058540582	Panitera Muda Hukum
9.	Juspindeli Girsang, S.H.	Lettu chk / 21010017470281	Panitera Pengganti Gol. VIII
10.	Syaiful Adhi Bramastagiri, S.H.	Letda Chk/ 21080731450589	Panitera Pengganti Gol. XI
11.	Hendra Yanto, S.H.	Serma / 21080776901187	Pengelola Penanganan Perkara
12.	Mukhammad Madaniil Mustofa	Praka / 31140180580393	Spri (ajudan) Kadilmil, Provost (BP dari Yonif 733/Masariku

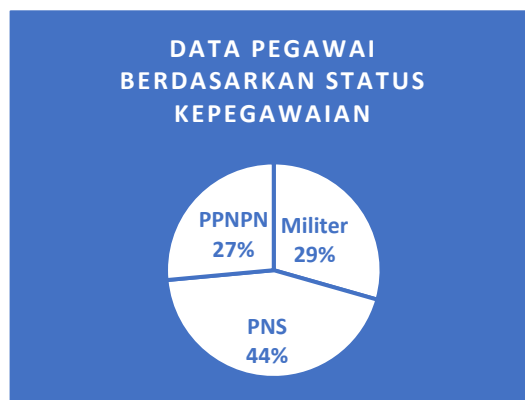
Tabel Data Personel Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Nama	Pangkat/Gol/NIP	Jabatan
1.	Hendri D. Muskitta, S.H	Pembina IV/a / 197602231998031001	Sekretaris
2.	Asis, S.Kom., S.H	Penata Tk.I III/d / 19830925200641003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.
3.	Rachel A. Patty, S.H.	Penata Tk.I III/d 197001251990032001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
4.	Rina D.J. Watimury, S.H., M.H	Penata / III/c 197304012006042001	Kasubbag Umum dan Keuangan
5.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Penata / III/c 197606061998031002	Analisis Perkara Peradilan
6.	Richardo Thenu	Penata Muda Tk.I / III/b 197707241998031002	Pengadministrasi Perkantoran
7.	Stany Rraprap, S.H.	Penata Muda Tk. I / III/b / 19871202006042001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
8.	Rio Matauseja, S.H.	Penata Muda Tk. I / III/b / 199005182009041001	Analisis Perkara Peradilan
9.	Nova Prihastuti, S.H.	Penata Muda Tk. I / III/b / 198411272011012015	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir
10.	Arfyan Wigga Juladha, S.H.	Penata Muda Tk. I / III/b 198807242019031005	Penata Layanan Operasional

11.	Muhammad Imam, S. S.H	Penata Muda Tk. I / III/b 199205302019031005	Analisis Perkara Peradilan
12.	M. Adib Hadriansyah, S.E.	Penata Muda III/a 199207192020121006	Penata Layanan Operasional
13.	Ade Widiyanto, A.Md.	Pengatur II/c 199009182020121002	Teknisi Sarana dan Prasarana
14.	Andra Abdul Rahman, A.Md	Pengatur II/c 199103312022031006	Pengelola Penanganan Perkara
15.	Dicky Dharma S., A.Md.Ak.	Pengatur II/c 199606222022031007	Pengelola Penanganan Perkara

Tabel Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

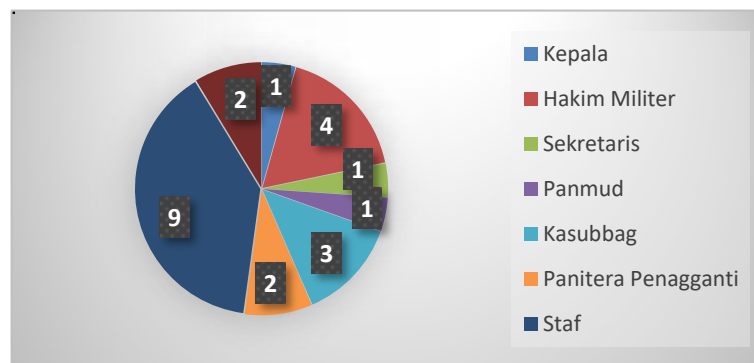
No	Nama	Keterangan
1.	Fredy Mahulette	Pramubhakti
2.	Alfred Werinussa, S.E	Pengemudi
3.	Arpan	Security
4.	Muhamad Alpisal	Security
5.	Akmal, S.H.	Security
6.	Reingard Pattiasina	Security
7.	Ratna Fairus, S.Kom.	Pramubhakti
8.	Ulfi Tehuayo, S.Pi	Pramubhakti
9.	Alifda Kiat, S.H.	Pengemudi



Tabel Data Pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
2	Wakil Kepala Pengadilan Militer	-
3	Pokkimmil	4 Orang
4	Sekretaris	1 Orang
5	Panitera	1 Orang
6	Panmud Hukum	1 Orang
7	Panmud Pidana	-

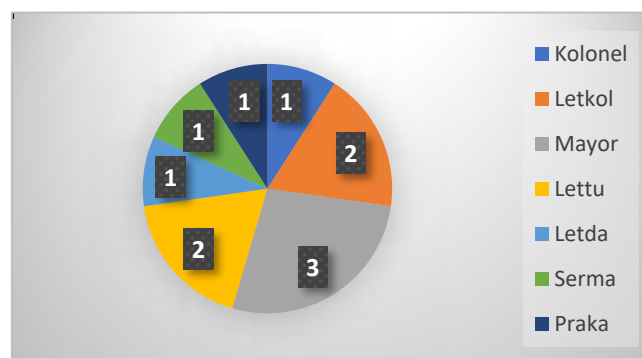
8	Panitera Pengganti	2 Orang
9	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
10	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
12	Fungsional Keuangan	2 Orang
12	Staf Panmud Hukum	1 Orang
13	Staf Panmud Pidana	5 Orang
14	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
15	Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
16	Staf Subbag Umum dan Keuangan	1 Orang



Grafik Pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel Data Pegawai Militer berdasarkan Pangkat Militer

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Kolonel	1 orang	
2	Letnan Kolonel	3 orang	1 orang BP (dari Dilmil III-16 Makassar)
3	Mayor	3 orang	1 orang BP (Dilmilti III Surabaya)
3	Letnan Satu	2 orang	
4	Letnan Dua	1 orang	
5	Sersan Mayor	1 orang	
6	Praka	1 orang	BP dari Yonif 733 Masariku
Jumlah		12 orang	

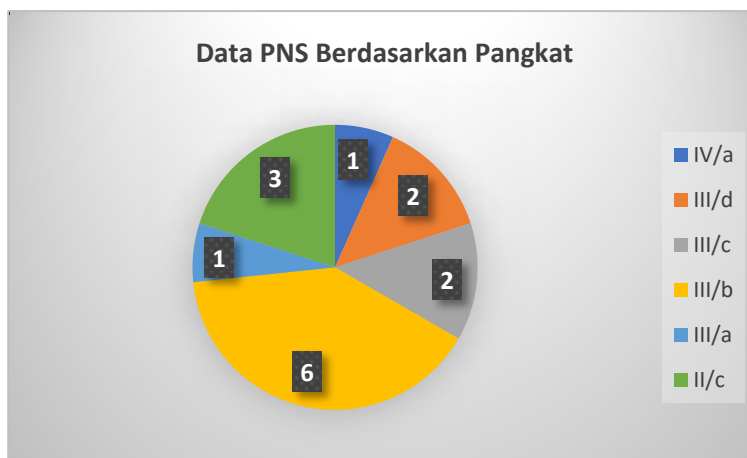


Grafik Pegawai berdasarkan Pangkat

Tabel Pangkat PNS

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Pembina	1	
2	Penata Tk.I	2	
2	Penata	2	
3	Penata Muda Tk.I	6	
4	Penata Muda	1	
5	Pengatur	3	
Jumlah		15	

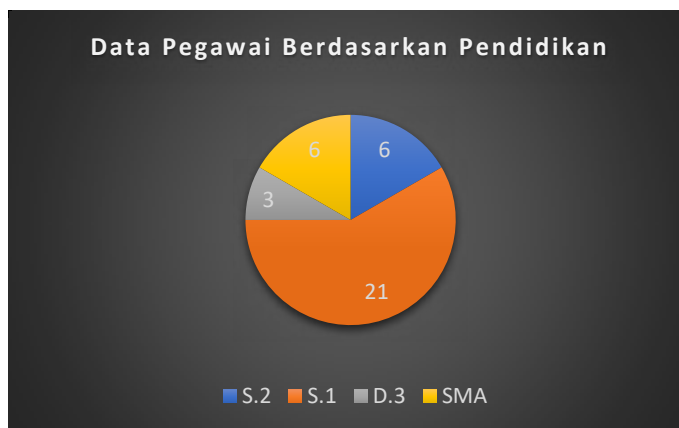
Grafik Data Pegawai PNS berdasarkan Golongan



Tabel Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	S-2	5	1	-	6
2.	S-1	6	10	5	21
3.	D-3	-	3	-	3
4.	SMA	1	1	4	6
Jumlah		12	15	9	36

Grafik Data Pegawai berdasarkan Pendidikan



7. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-19 Jayapura

No	NAMA	PANGKAT NRP	JABATAN
1	2	3	4
1	Slamet Widada, S.H., M.H.	Kolonel Laut (H) / 14131/P	Kepala
2	Panjaitan Hotman M.t. S.H., M.H.	Letkol Chk / 1100022761076	Waka
3	Dandi Andreas Sitompul, S.H.	Letkol Chk / 1100036211078	Hakim
4	M. Arif Sumarsono, S.H., M.H.	Letkol Chk / 11020006580974	Hakim
5	Hengki Afandi S.H., M.H	Mayor Chk / 11040016470180	Hakim
6	Awang Setyadi Bawana S.H.	Mayor Laut (H) / 17305/P	Hakim
7	Iskandar S.H., M.H.	Mayor Chk / 21960346030574	Hakim
8	Aditya Wicaksono S.H.	Kapten Chk / 11100004840584	Hakim
9	Muhammad Arfah Afendi, S.E., M.M.	Pembina (IV/a) / 197611302006041002	Sekretaris
10	Surajiman, S.H.	Penata Tk.I (III/d)/ 196605151994031004	Kasub Bagian Kepegawaian dan Ortala
11	Lilik Ernawati, S.E., M.Ak	Penata (III/c) / 198506242009042005	Kasub Umum dan Keuangan
12	Marthen Toding, S.H.	Penata (III/c) / 197507271998031002	Kasub PTIP
13	Alep Priyoambodo, S.H	Kapten Chk / 11120031550786	Panitera
14	Ali Yusuf, SH	Lettu Chk / 21980253770977	Panitera Pengganti
15	Jasri	Penata Muda Tk.I (III/b)/ 197306081998031002	Pengolah Informasi dan Komunikasi
16	Jerly Stevi Johannes Kowal, S.E.	Penata Muda Tk.I (III/b)/ 198704172019031003	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
17	Amiruddin, S.H.	Letda Chk / 21080776820786	Panitera Pengganti
18	Jhon Meris Nainggolan S.H., M.H	Letda Chk / 21050308250583	Panitera Pengganti
19	Muhammad Zainuddin Nasution S.H.	Letda Chk / 21050025350285	Panitera Pengganti
20	Alen Farlianso, S.E.	Penata Muda (III/a)/ 199406232020121004	Penyusun Laporan Keuangan
21	Angger Irwanto, S.Kom	Penata Muda (III/a)/ 198802182021011001	PSDJ
22	Wahyu Jatmiko	Peltu Bah / 88925	Panitera Pengganti
23	Irson Jaya, S.H.	Serma / 21050275730484	Pengelola Perkara
24	Boy Irianto Jaya	Serma / 21050275990286	Pengelola Perkara

1	2	3	4
25	Gatot Endro Darminto	Serka / 31970156580975	PengelolaPerkara
26	Eva Mutiara Sembiring, A.Md.	Pengatur (II/c) (CPNS) / 199611132022032013	Pengelola Perkara
27	Jihan Rahayu Ningsih, A.Md	Pengatur (II/c) (CPNS) / 199701072022032016	Pengelola Perkara
28	Natalia Siska Ohoirat	PPNPN	Pramubakti
29	Godfrits Maradona Raubun	PPNPN	Pengemudi
30	Febriyanti Pengulu	PPNPN	Pramubakti

- Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang antara lain :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	HAKIM MILITER	Kolonel Laut (H) Slamet Widada, S.H., M.H. NRP .14131P
2		Letkol Chk Panjaitan Hotman M.T., S.H., M.H. NRP 11000022761076
3		Letkol Chk Dandi Andreas Sitompul, S.H. NRP. 11000036211078
4		Letkol Chk M. Arif Sumarsono, S.H., M.H. NRP.
5		Mayor Chk Hengki Afandi, S.H., M.H NRP. 11040016470180
6		Mayor Laut (H) Awang Setyadi Bawana S.H. NRP. 17305/P
7		Mayor Chk Iskandar, S.H., M.H. NRP . 21960346030574
8		Kapten Chk Aditya Wicaksono, S.H. NRP. 11100004840584
9	PANITERA	Kapten Chk Alep Priyoambodo, S.H.. NRP. 11120031550786
10	PANITERA MUDA	-
11	PANITERA PENGGANTI	Lettu Chk Ali Yusuf, S.H NRP. Letda Chk Amiruddin, S.H NRP. Letda Chk Jhon Meris Nainggolan, S.H., M.H NRP. 21050308250583 Letda Chk M. Zainuddin Nasution, S.H. NRP. 21050025350285 Peltu Bah Wahyu Jatmiko NRP 88925
12	PROVOST	Serma Irsan Jaya, S.H. NRP 21050275730484
13		Serma Boy Irianto Jaya NRP 21050275990286
14		Serka Gatot Endro Darminto NRP 31970156580975

1. Mutasi

Mutasi masuk dan keluar di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

Data Mutasi Masuk Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer di bawahnya.

No	Nama/pangkat/ NRP/NIP	Jabatan		No.tgl. Surat
		Lama	Baru	
1	2	3	4	5
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya				
1	Riza Fadilah, S.H. Kolonel Kum / 13149/P	Kepala Pengadilan Militer III - 14 Denpasar	Angpokkimmilti Dilmilti III Surabaya	Miltama/Sprin/564/KP. 04.6/XII tanggal 12 Desember 2023
2	Sahrul, S.H.,M.H Kolonel Chk /11980031941273	Kepala Pengadilan Militer I - 02 Medan	Angpokkimmilti Dilmilti III Surabaya	Miltama/Sprin/564/K P.04.6/XII tanggal 12 Desember 2023
3	Dr. Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk /	Angpokkimmilti Dilmilti II Jakarta	Wakadilmilti III Surabaya	Miltama/Sprin/564/K P.04.6/XII tanggal 12 Desember 2023
4.	Komang Suciawan, S.H Kolonel Kum/ 12535/P	Angpokkimmilti Pengadilan Militer Tinggi I Medan	Angpokkimmilt i Dilmilti III Surabaya	Miltama/Sprin/564/K P.04.6/XII tanggal 12 Desember 2023
5.	Muhamad Idris, S.H., M.H Kolonel Kum / 524413	Kepala Pengadilan Militer II - 08 Jakarta	Angpokkimmilti Dilmilti III Surabaya	569/KPMU/SP.KP4.1. 3/IX/2o23 langgal 22 November 2023
6.	Yusuf Kurniawan, S.E	-	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Keputusan Sekma : 574/SEK/KP.1/SK/VI/ 2023, tanggal 31 Agustus 2023
7.	Fajar Eka Pratomo, S.E. Penata Muda (III/a) 19920115202012 1006	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dilmil III-15 Kupang	Analisis Rencana Kegiatan dan Anggaran Dilmilti III Surabaya	504/KPMU/SP.KP4.1.3/ X/2023 23 Oktober 2023
8	Iyah Syafriah, S.H., M.H. Letkol Chk / 2920030840573	Panitera Pengganti Pengadilan Militer Utama Jakarta	Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Sprin Kadilmiltama Nomor Sprin/455/KPMU/SP.K P4.1.3/IX/2023, tanggal 25 september 2023
9	Fahrudin, SE /19801004202321 1004	-	Perencana Ahli Pertama	Keputusan Sekma NOMOR : 2141/SEK/SK.KP1.2.7 /XI/2023, tanggal 28 November 2023
Pengadilan Militer III-12 Surabaya				
1	Jonarku, S.H., M.H.Letkol Sus 528375	Kepala Pengadilan Militer I - 03 Padang	Wakil Kepala Dilmil III-12 Surabaya	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023

2	Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Letkol Sus/524432	Hakim Militer Pengadilan Militer II - 10 Semarang	Anggota Pokkimmil Gol. V Dilmil III-12 Surabaya	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023
3	Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (KH) 18870/P	Anggota Pokkimmil Gol. VI Pengadilan Militer I - 03 Padang	Anggota Pokkimmil Gol. VI Dilmil III-12 Surabaya	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023
4	Feri Afzudi. Serka 21130148940892	Ba Mabes TNI	Pengelola Barang Milik Negara	480/SEK/KP.I/SK/IV/2023 28-04-2023
Pengadilan Militer III-13 Madiun				
1	Andri Sujatmiko, Serma Kom NRP 531806	Ba Mabes TNI	Pengelola Informasi dan Komunikasi pada Pengadilan Militer III-13 Madiun	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1688/SEK/Kp.I/SK/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022
2	Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 1102000280972	Hakim Militer II - 10 Semarang	Kepala pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 3 April 2023
3	Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581	Hakim Militer Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan	Wakil Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 3 April 2023
4	Gigih Dayu Priambudi, S.H., Lettu Kum NRP 544097	Panitera Pengganti Dilmil III-12 Surabaya	Plt. Pantiera Pengadilan Militer III-13 Madiun	Surat Tugas Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 208/DjMT/Ratgas/KP.00 .1/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023
5	Kamari, Sertu NRP 531302	Ba Mabes TNI	Pengadmnistra si Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.	Surat Perintah Kadilmiltama Nomor 474/KPMU/SP.KP4.1.3/X /2023 tanggal 5 Oktober 2023
6	Lina Nilawati, Serka NRP 542081	Ba Mabes TNI	Pengadministrasi Anggaran pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.	Kadilmiltama Nomor 521/KPMU/SP.KP4.1.3/X /2023 tanggal 27 Oktober 2023
7	Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I Kapten Chk NRP. 2198022093117	BP ke Jajaran Dilmil MARI	BP Calon Hakim Terpadu di Pengadilan Muliter III-13 Madiun	Surat Tugas Dirjen Badilmiltun Nomor 319 / DJMT/KP4.1.1/XI/2023 tanggal 22 November 2023

Pengadilan Militer III-14 Denpasar				
1	Muhammad Rizal, S.,H.,M.H Letkol Chk NRP 1101003680078	Angpokkimmil Gol. IV Dilmil II- 08 Jakarta	Waka Dilmil III-14 Denpasar	Miltama/Sprin/378/KP.0 4.1/VIII/2023
2	Kus Indrawati, S.H.,M.H Letkol Chk (K) NRP 11980036240871	Angpokkimmil Gol. V Dilmil II- 12 Surabaya	Angpokkimmil Gol. V Dilmil III-14 Denpasar	Miltaama/Sprin/167/KP. 04.6/IV/2023
3	Dianing Lusiasukma, S.H..M.H Kapten Chk (K) NRP 21980349810277	Pama MA	Angpokkimmil Gol. V Dilmil III-14 Denpasar	Miltama/Sprin/165/KP.0 4.6/IV/2023
4.	Johanes S, Taruk, S.H.,MH Letkol Chk 2910010890171	Angpokkimmil Gol. V Dilmil mIII-16 Makassar	Angpokkimmil Gol. V Dilmil III-14 Denpasar	W3.Mil03/936/Sprin/VII/ 2023
5	Viktor Januaris Berutu Pratu NRP 31170218440198	Ta Mabes TNI	Pengadministrasi register Perkara Dilmil III-14 Denpasar	480/SEK/KP.I/iv/2023
6	Ketut Gede Wiguna, S.IP Penata Muda/ 199640615202012100	Analisis SDM Dilmil III-16 Makassar	Analisis SDM Dilmil III-14 Denpasar	KEP/479/SEK/KP.I/SK/I V/2023
Pengadilan Militer III-15 Kupang				
1	Kapten Sus Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.	PAMA MA	Pokkimmil Gol. VII Dilmil III-15 Kupang	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023
2	Kapten Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.	PAMA MA	Pokkimmil Gol. VII Dilmil III-15 Kupang	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023
3	Letnan Kolonel Chk Agustono, S.H., M.H.	Pokkimmil Gol. VI Dilmil III-14 Denpasar	Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang	Miltama/Sprin/378/ Kp.04.1/VIII/2023 3 Agustus 2023
Pengadilan Militer III-16 Makassar				
1	Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H.NRP 13620/P	Kadilmil I - 07 Balikpapan	Kadilmil III – 16 Makassar	75/KMA/SK/IV/2023
2	Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981	Waka Pengadilan Militer III - 17 Manado	Pokkimmil Dilmil III-16 Makassar	323/KMA/SK/XI/2022
3	Mayor Chk Farid Iskandar, S.H., M.H. NRP 11060001420579	Sekretaris Pengadilan Militer III - 18 Ambon	Angpokkimmil Dilmil III-16 Makassar	61/KMA/SK/V/2023
4	Mayor Kum Anna Murdoko, S.H. NRP 534539	Pama Mabes TNI	Angpokkimmil Dilmil III-16 Makassar	61/KMA/SK/V/2023
5	Serka Noris Mbotengu, S.H. NRP 21110148701291	Ba Mabes TNI	Pengelola Perkara	480/SEK/KP.I/SK/IV/20 23

Pengadilan Militer III-17 Manado				
1	Kapten Chk Soniardhi, S.H., M.H.,	Pama Dilmil MA	Angpokkimmil Gol.VII Pengadilan Militer III-17 Manado	Surat Perintah Pengadilan Militer Utama Nomor : Miltama/Sprin/167/KP.04.6/V/2023
2	Kapten Chk Niko Yoga Satria, S.ST.Han., S.I.P., S.H., M.H.,	Pama Dilmil MA	Angpokkimmil Gol.VII Pengadilan Militer III-17 Manado.	Surat Perintah Pengadilan Militer Utama Nomor : Miltama/Sprin/167/KP.04.6/V/2023
3	Letda Chk M. Sopian Dalimunte, S.H.,	Pama Mahkamah Agung RI	Panitera Pengganti Gol.IX Pengadilan Militer III-17 Manado.	Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor : 243/DJMT/SK.KP.4.1.3/VIII/2023
4	Muhammad Vijay Mahendra, S.E.,	Penyusun Laporan Keuangan Pada Pengadilan Militer III-17 Manado	Analisis Perencanaan Pada Pengadilan Militer Utama	Surat Perintah Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor : 504/KPMU/SP.KP4.1.3/X/2023
Pengadilan Militer III-18 Ambon				
1	Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., MTr.Opsla. 16762/P	Hakim Militer Pengadilan Militer III - 14 Denpasar	Anggota Pokkimmil Gol.V Dilmil III-18 Ambon	61/KMA/SK/IV/2023 Tgl. 3 April 2023
2	Purwadi, S.H., M.HMayor Chk /21960345950374	Cakim	Anggota Pokkimmil Gol.V Dimil III-18 Ambon	61/KMA/SK/IV/2023, 3 April 2023
3	Praka Mukhammad Madanil Mustofa 31140180580393	BP dari Yonif 733 Masariku	Spri (Ajudan) Kadilmil, Provost	39/KPM.W3-Mil07/KP.01.2/IX/2023 11 September 2023
4	Syaiful Adhi Bramastagiri, S.H	Pama Mabes TNI	Panitera Pengganti Gol. XI	243/DJMT/SK.KP.4.1.3/VIII/2023, 31 Agustus 2023

Pengadilan Militer III-19 Jayapura				
1	Hengky Afandi, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 11040016470180	Pamen Dilmil MA	Anggpokimmil Gol VI Dilmil III-19 Jayapura	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 03 April 2023
2	Awang Setyadi Bawana, S.H., Mayor Laut (H) NRP. 17305/P,	Pamen Dilmil MA	Anggpokimmil Gol VI Dilmil III-19 Jayapura.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 03 April 2023
3	Iskandar, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 21960346030574	Pamen Dilmil MA	Anggpokimmil Gol VI Dilmil III- 19 Jayapura	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 03 April 2023
4	Aditya Wicaksono S.H., Kapten Chk NRP. 11100004840584	Pamen Dilmil MA	Anggpokim mil Gol VI Dilmil III-19 Jayapura	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 03 April 2023
5	Panjaitan Hotman M.T, S.H., M.H Letkol Chk NRP. 11000022761076	Kadilmil III-15 Kupang	Wakadilmil III- 19 Jayapura	Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MA RI Nomor 284/ DjMT /KEP /KP.00.3/ VII/2022 tanggal 08 Juli 2022
6	Ali Yusuf, S.H., LettuChk NRP 21980253770977	Pama MA	Panitera Pengganti Gol.VIII Dilmil III-19 Jayapura.	Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MA RI Nomor 302/ DjMT /KEP /KP.00.3/ VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022.
7	Jhon Meris Nainggolan, S.H., M.H Letda Chk NRP. 21050308250583	Pama Mabes TNI	Panitera Pengganti Gol IX Dilmil III-19 Jayapura	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 455/KPMU/SP.KP4.1.3/IX/2 023 tanggal 25 September 2023
8	Muhammad Zainuddin Nasution, S.H. Letda Chk NRP. 21050025350285	Pama Mabes TNI	Panitera Pengganti Gol IX Dilmil III-19 Jayapura	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 455/KPMU/SP.KP4.1.3/IX/2 023 tanggal 25 September 2023

Data Mutasi Keluar pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer di bawahnya.

No	Nama/Pangkat/ NRP/NIP	Jabatan		No.Tanggal surat
		Lama	Baru	
1	Kolonel Chk Dr. M. Ali Ridho, S.H.,M.H	Angpokkimmilti III Surabaya	Dir STHM	12 April 2023
2	Mayor Laut (H) Tri Arianto, S.H., M.H NRP 18373/P	Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Panitera Pengganti Pengadilan Militer Utama Jakarta	Sprin Kadilmiltama Nomor Sprin/455/KPMU/S P.KP4.1.3/IX/2023, tanggal 25 September 2023
Pengadilan Militer III-12 Surabaya				
1	Amin Matsuri, S.H. Serda NRP 31100130381289	Pengadministrasi Perkara, Panmud Pidana	Mabes TNI	169/SEK/KP.I/SK/XII/2022 07-12-2022 TMT 17-01-2023
2	Mayor Chk Ujang Taryana, SH,MH. / 636558	Anggota Pokkimmil Gol V Dilmil III-12 Surabaya	Anggota Pokkimmil Gol V Dilmil Bandung	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023 TMT 04-08-2023
3	Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol CHK (K) 11980036240871	Anggota Pokkimmil Gol V Dilmil III-12 Surabaya	Anggota Pokkimmil Gol V Dilmil III-14 Denpasar	61/KMA/SK/IV/2023 3 April 2023 TMT 21-08-2023
Pengadilan Militer III-13 Madiun				
1	Silveria Supanti, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 2910140031070	Kadilmil III-13 Madiun	Wakadilmil II-11 Yogyakarta	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 3 April 2023
2	Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476	Wakadilmil III-13 Madiun	Angpokkimmil Gol V Dilmil II-08 Jakarta	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 3 April 2023
3	Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020000960372	Hakim BP yang diperbantukan pada Dilmil III-13 Madiun selaku (Angpokkimmil Gol V I-07 Balikpapan)	Angpokkimmil Gol V Dilmil II-09 Bandun	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 3 April 2023
4	Purwadi, S.H., Mayor Chk NRP 21960345950374	Cakimmil PPC III TA 2021/2022 Dilmil III-13 Madiun	Angpokimmil Gol VI Dilmil III-18 Ambon	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 3 April 2023
5	Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.Ip., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029260790,	Cakimmil PPC III TA 2021/2022 yang diperbantukan pada Dilmil III-13 Madiun	Angpokimmil Gol VII Dilmil III-17 Ambon	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 3 April 2023

6	Susriyani, S.H., PPNPN,	Staf Umum dan Keuanga	PPPK Pengelola Barang dan Jasa pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2140/SEK/SK.KP1.2.7/ XI/2023 tanggal 28 November 2023.
---	----------------------------	--------------------------	--	--

Pengadilan Militer III-14 Denpasar

1	Ahmad Junedi, S.H.,M.H Mayor laut (KH) NRP 17425/P	Angpokkimmil Gol. VI Dilmil III- 14 Denpasar	Angpokkimm mil Gol. VI Dilmil II-08 Jakarta	Miltama/Sprin/378?KP.0 4.6/IV/2023
2	Agustono,S.H., M.H Letkol Chk NRP 21940080960873	Angpokkimmil Gol.V Dilmil III- 14 Denpasar	Kadilmil III-15 Kupang	W3.Mil03/102/Sprin/V III/2023
3	Bagus Parta Wijaya, S.H.,M.H Mayor Laut (KH) NRP 16760/P	Angpokkimmil Gol.V Dilmil III- 14 Denpasar	Angpokimmil Dilmil III - 18 Ambon	Miltama/Sprin/167/KP. 04.6/IV/2023
4	Mansarifika Serda NRP 31100260300989	Dilmil III-14 Denpasar	Biro Umum BUA MA RI	KEP/417/SEK.KP.I/SE K/III/2023
5	Lailatul Hidayah Muyassaroh, S.IP Penata Muda	Analisis Tata Laksana Dilmil III-14 Denpasar	Analisis Tata Laksana Dilmil II-11 Yogyakarta	KEP/479/SEK/KP.I/SK/IV /2023
6	Puguh Pambudi Susilo Peltu 135670972	Panitera Pengganti Dilmil III-14 Denpasar	Panitera PenggantiDilmil III-13 Madiun.	Miltama/Sprin/ 290/KP.04.6/VII/22 tgl 19 Juli 2022
7	Riza Fadilah, SH Kolonel Laut (H) 13149/P	Kadilmil III-14 Denpasar	Hakim Tinggi Dilmilti III Sby	Miltama/Sprin /568/XII/2022 tgl 13-12- 2022

Pengadilan Militer III-15 Kupang

1	Mayor Chk Samsul Arifin, S.H.	Pokkimmil Gol. VI Dilmil III-15 Kupang	Pokkimmil Gol. VI Dilmil II-11 Yogyakarta	61/KMA/SK/IV/2023 03-04-2023
2	Letnan Kolonel Chk Panjaitan Hotman Maruli Tua, S.H., M.H.	Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang	Wakil Kepala Pengadilan Militer III-9 Jayapura	Miltama/Sprin/378/ Kp.04.1/VIII/2023 03-08-2023
3	Fajar Eka Pratomo, S.E	Penyusun Rencana kegiatan dan Anggaran Dilmil III- 15 Kupang	Analisis Perencanaan Anggaran Dilmiti III Surabaya	504/KPMU/SP.KP4.1.3/X /2023 23 Oktober 2023
4	Peltu Muhaimin S.H.,M.H	BA Dilmil III – 15 Kupang	Pemelihara sarana dan Prasarana Dilmiltama	504/KPMU/SP.KP4.1.3/X /2023 1 November 2023

Pengadilan Militer III-16 Makassar				
1	Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H., M.H. NRP 13134/P	Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar	Kepala Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan	75/KMA/SK/IV/2023
2	Letkol Sus Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. NRP 534	Hakim Militer Pengadilan Militer III - 16 Makassar	Pokkimmil Gol V Pengadilan Militer II - 10 Semarang	61/KMA/SK/IV/2023
3	Letkol Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. NRP 2910010890171	Pokkimmil Gol V Dilmil III-16 Makassar	Pokkimmil Gol V Dilmil III-14 Denpasar	61/KMA/SK/IV/2023
4	Amy Amelia Haris, S.E NIP 197705102006042003	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dilmil III-16 Makassar	PTUN Makassar	479/SEK/Kp.I/SK/V/2023
5	Ketut Gede Wiguna, S.IP NIP 199406152020121003	Analisis SDM Aparatur Dilmil III-16 Makassar	Analisis SDM Aparatur Dilmil III-14 Denpasar	479/SEK/Kp.I/SK/V/2023
6	Dede Febrizal Rachman, S.H. NIP 19890202201903 1003	Analisis SDM Aparatur Dilmil III-16 Makassar	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	1604/SEK/SK/KP4.1.3/X/2023
Pengadilan Militer III-17 Manado				
1	Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H.,	Waka Dilmil III- 17 Manado	Angpokkimmil Gol.VI Pengadilan Militer III-16 Makassar.	Sprin Kadilmil III-17 Manado Nomor : W3- Mil.06/136/KP.001/II/2023
Pengadilan Militer III-18 Ambon				
1	Jhomson Maruli Siahaan, S.H.,M.Hum Letkol Chk / 2920087781171	Anggota Pokkimmil Gol.V Dilmil III-18 Ambon	Hakim Militer, Pengadilan Militer I - 04 Palembang	W3-Mil 07/29/Sprin/V/2023 Tgl. 30 Mei 2023
2	Febi Desry, S.H Lettu Chk/21990042230277	Panmud Dilmil III-18 Ambon	Hakim Ad Hock Tipikor PN Banjarmasin	19/KMA/SK/II/2022 18-01-2022
3	Avian Septiandhanu, S.Ian 199509232019031009	Analisis Pertama Kepegawaian Dilmil III-18 Ambon	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Pengadilan Militer Utama Jakarta	532/SEK/Kp.I/SK/V/2023 Tgl. 11 Mei 2023

Pengadilan Militer III-19 Jayapura				
1	Rudy Dwi Prakamto, S.H., Kolonel Chk NRP. 11980059590177	Hakim Dilmil III-19 Jayapura	Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75/KMA/SK/IV/2023 tanggal 27 April 2023
2	Arie Fitriansyah, S.H., M.H Letkol Chk NRP. 11020021000978	Hakim Militer Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 61/KMA/SK/IV/2023 tanggal 03 April 2023
3	Budi Santosa, S.H., M.H Kapten Kum NRP. 519172	Panitera Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	Panitera Dilmil II-09 Bandung	Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 455/KPMU/SP.KP4.1.3/IX/202 tanggal 03 April 2023

2. Promosi

Promosi merupakan salah satu cara agar Organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan Pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 bentuk promosi yaitu kenaikan Pangkat dan kenaikan Jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan Pangkat, dibedakan kewenangannya atas Personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan kebutuhan Pegawai dalam jabatan tertentu.

a. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer di bawahnya pada Tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

Data Kenaikan pangkat Personel TNI dan PNS Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer di bawahnya Tinggi III Surabaya

No	Nama/Pangkat/ NRP	Pangkat		TMT	Da sar
		Lama	Baru		
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya					
1	Tubagus Maulana Arief Darma, S.H., M.H.	III/c - Penata	III/d - Penata Tingkat I	1/10/ 2023	1/KPMT.W3.Mil/KP 2.1.1/IX/2023
2	Amanda Rosaline Fajar Sari, S.H.,M.H	III/a - Penata Muda	III/b - Penata Muda Tingkat I	01/4/ 2023	W3.Mil/01/KP.04.1/ SK/III/2023
3	Kotib	Sersan Satu	Sersan Kepala	01/10/2003	464/KPMU/SP.KP. 2.1.1/IX/2023
4	Yohan Dony Kurniawan, S.H.,M.H	Serma	Letda Chk	01 /8/2023	KEP/570-33/VIII/2023
Pengadilan Militer III-12 Surabaya					
1	Sugeng Aryanto, S.H. Letkol Chk / 11980058680275	Letkol Chk	Kolonel Chk	01/04/2023	16/TNI/TAHUN/2023 28 Maret 2023

2	Sumardi, Sertu / 31960173740276	Sertu	Serka	01/04/2023	Kep/200-33/III/2023 28 Maret 2023
3	Francisca Angelia R,SH 19910608201903 2009	Penatan Muda / III/a	Penata Muda TK.I (III/b)	01/04/2023	W3.Mil/01/KP.04.1/ SK/III/2023 27 Maret 2023
4	Firda Nuril Hanifah, S.Si, M.SPSDM, Penata Tk. I / III/d 19780408199604 2001	Penata Tk. I / III/d	Pembina/ IV/a	01/10/2023	972/SEK/SK.KP2.1. 1/IX/2023 7 September 2023
5	Ratih Dina Agustin, S.H. Penata Muda TK,I / III/b 19760825199803 2002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata III/c	01/10/2023	2/KPMT.W3.Mil/KP 2.1.1/IX/2023 26 September 2023
6	Marzuki, Koptu Mus / 112371	Koptu	Kopka	01/10/2023	Kep/2386/IX/2023 20 September 2023
7	Wahyu Ariwijaya, Praka / 31120174740292	Praka	Kopda	01-10/ 2023	Kep/692- 33/IX/2022 11 September 2022
Pengadilan Militer III-13 Madiun					
1	Adi Prakosa, Sertu NRP 211300717906 94,,	Sertu	Serka	1/4/2023	Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/200- 33/III/2023 tanggal 8 Maret 2023
2	Nurdin Rukka, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21950070141174	Kapten	Mayor	1/10/2023	Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1100/IX/2022 tanggal 26 September 2023
3	Samian, S.H., M.M., NIP 19700221199203 1001	Penata Tk I III/d	Pembina IV/a	1/10/2023	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 718/SEK/SK. KP2.1.1/III/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
Pengadilan Militer III-14 Denpasar					
1	Dedy Darmawan, S.H.,M.H	Letkol Chk	Kolonel Chk	1 /4/2023	Kepres No. 16/TNI/2023
2	Kadek Subrata, S.H	Pelda	Peltu	1 /10/ 2023	Sprin/487/KP.04.1/ 2021, tanggal 30 September 2023
3	IGM Nym Giri Sundari, SE.MM.	Penata III/c	Penata Tk.I III/d	1 /4/2023	W3.Mil/01/KP.04.1/ SK/III/2023

Pengadilan III-15 Kupang					
1	Sersan Dua Norberto Manek Alo, S.H	Kopda	Serda	22-5-2023	Kep/397-33/V/2023
Pengadilan Militer III-16 Makassar					
1	Jasdar, S.H., M.H. NRP 11030004260776	Mayor Chk	Letkol Chk	1/4/2023	Kep/320/III/2023
2	Nurman, S.H NRP 21000098320879	Pelda	Peltu	1/4/2023	Kep/200-33/III/2023
3	Rustan, S.H., M.H. NRP 3930332870473	Serma	Pelda	1/4/2023	Kep/195-33/III/2023
4	Indriasari, S.H. NRP 21080863860289	Serka (K)	Serma (K)	1/4/2023	Kep/200-33/III/2023
5	Ayu Pramita Sari, S.H. NRP 21080869150689	Serka (K)	Serma (K)	1/4/2023	Kep/200-33/III/2023
6	Dede Febrizal Rachman, S.H. NIP 198902022019031003	Penata Muda III/a	Penata Muda Tk. I III/b	1/4/2023	W3Mil/01/Kp.04.1/S K/III/2023
Pengadilan Militer III-18 Ambon					
1	Arfyan Wigga Juladha, S.H. 198807242019031005	Penata Muda / III/a	Penata Muda Tk. I / III/b	01 April 2023	W3.Mil/01/KP.04.1/SK/III/2023 30 Maret 2023
2	Muhammad Imam S., S.H 199205302019031006	Penata Muda / III/a	Penata Muda Tk. I / III/b	01 April 2023	W3.Mil/01/KP.04.1/SK/III/2023 30 Maret 2023
3	Bagus Partha Wijaya, S.H.,MK., MTr.Opsla 16762/P	Mayor	Letkol	01 Oktober 2023	Kep/1101/IX/2023 26 September 2023
4	Hendri D. Muskitta, S.H 197602231998031001	Penata Tk. I III/d	Pembina IV/a	01 Oktober 2023	752/SEK/SK.KP2.1.1/VIII/2023 28 Agustus 2023
5	Riska Dori, S.H. 21010058540582	Letnan Dua	Letnan Satu	01 Oktober 2023	Kep/550/IX/2023 21 September 2023

Pengadilan Militer III-19 Jayapura					
1	Slamet Widada, S.H., M.H Letkol Laut (H) NRP 14131/P	Letkol Chk	Kolonel	1/10/2023	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TNI/Tahun 2023 tanggal 26 September 2023.
2	Dandi A. Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078	Mayor Chk	Letkol Chk	1/4/2023	Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/320/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
3	M. Arif Sumarsono, S.H., M.H, Mayor Chk NRP. 110200065809	Mayor Chk	Letkol Chk	1/4/2023	Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/320/III/2023 tanggal 27 Maret 2023
4	Jerly Stevi Johannes Kowal, S.E	III/a	III/b	1/4/2023	Keputusan Kadilmilti III Surabaya Nomor W3.Mil/01.KP.04.1/SK/III/2023 tanggal 1 April 2023
5	Angger Irwanto, A.Md., Pengatur Gol. II/c NIP	II/d	III/a	1/10/2023	Keputusan Kadilmilti III Surabaya Nomor 04/KP.W3.MIL/KP.2.1.1-X/2023 tanggal 1 Oktober 2023

b. Kenaikan Jabatan

Pegawai Dilmilti III Surabaya dan Pengadilan Militer di bawahnya, pada Tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama / NRP/ NIP	Jabatan lama	Jabatan baru	TMT
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya				
1	Nila Rukhama, A.Md. Pengatur (II/c) / 199807222022032016	CPNS	PNS	28-02-2023
2	Afrida Eka Sabilla, A.Md.A.B. Pengatur (II/c) / 199811062022032015	CPNS	PNS	28-02-2023
Pengadilan Militer III-12 Surabaya				
1	Pelda Slamet / 21020097980681,	Pengelola BMN Dilmil III-12 Surabaya	Panitera Pengganti Gol. IX Dilmil III-12 Surabaya	01-02-2023
2	Serma Keu Nuryati, SH / 104997	Bendahara Dilmil III-12 Surabaya	Pengelola Perkara, Panmud Pidana Dilmil III-12 Surabaya	15-02-2023
3	PNS Setijo Utomo, III/b. 197003071994031002	Pengelola Informasi dan Komunikasi Dilmil III-12 Surabaya	Pengadministrasi Keuangan Dilmil III-12 Surabaya	15-02-2023

4	PNS Norma Azurah, S.E.I. III/a 199605022020122014	Penyusun Laporan Keuangan Dilmil III-12 Surabaya	Bendahara Dilmil III-12 Surabaya	15-02-2023
5	Serka Suwoko / 31950160391072	Pengolah Daftar Gaji Dilmil III-12 Surabaya	Pengelola Perkara, Panmud Hukum Dilmil III-12 Surabaya	15-02-2023
6	Angraini Esti Rahayu, A.Md. Pengatur (II/c) / 1997012602203201	CPNS Dilmil III-12 Surabaya	PNS Dilmil III- 12 Surabaya	28-02-2023
7	Dina Astari, A.Md. Pengatur (II/c) / 199706162022032017	CPNS Dilmil III-12 Surabaya	PNS Dilmil III- 12 Surabaya	28-02-2023
8	Melanti Puspara , S.E. 198405302006042002	Analisis Perencana an, Evaluasi dan Pelapora Dilmil III-12 Surabaya	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Dilmil III-1`2 Surabaya	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 473/SEK/SK.KP 4.1.3/IV/2023 27 April 2023
Pengadilan Militer III-13 Madiun				
1	Mahardini Dianningtyas Swastika, S.H., Penata Tk I III/d NIP 19840213200920 03	Analisis Tata laksana Dilmil III-13 Madiun	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Dilmil III-13 Madiun	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1512/SEK/SK.K P4.1.3/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023.

Pengadilan Militer III-16 Makassar				
1	Aqifah Febriani Muhtar, A.Md.A.B. NIP 199702282022032021	CPNS	PNS	W3Mil/11/KP.0 4.6/II/2023
2	Zesar Ria Ajeng Lestari, A.Md.M. 199811142022032010	CPNS	PNS	W3Mil/11/KP.0 4.6/II/2023
3	Pelda Rustan, S.H., M.H. NRP 3930332870473	Pengelola Perkara	Panitera Pengganti Gol IX	243/DJMT/SK. KP4.1.3/VIII/20 23
4	Aqifah Febriani Muhtar, A.Md.A.B. NIP 199702282022032021	Pengelola Perkara	Bendahara Pengeluaran	4/KPMT.W3Mil /KP3.4.6/XI/20 23
5	Ramlah Madjid, S.H. NIP 197310131998032011	Analisis Perkara Peradilan	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	1098/SEK/SK. KP3.4.5/X/202 3
6	Amiruddin, S.Pd. NIP 197412311998031011	Analisis Humas Operator	Penata Layanan Operasional	1098/SEK/SK. KP3.4.5/X/202 3
7	Nasriani NIP 197510131998032001	Pengadministrasi Persuratan	Klerek – Pengadministrasi Perkantoran	1098/SEK/SK. KP3.4.5/X/202 3
8	Dhanang Sri Anunggita, S.Sos. NIP 198402192019031005	Analisis Kepegawaian Pertama	Analisis SDM Aparatur Pertama	2071/SEK/SK. KP4.1.3/X/202 3
9	Zesar Ria Ajeng Lestari, A.Md.M. NIP 199811142022032010	Pengelola Perkara	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	1098/SEK/SK. KP3.4.5/X/202 3
10	Serma Riyanto NRP 21050147870784	Bendahara Penerimaan	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	1098/SEK/SK. KP3.4.5/X/202 3
11	Serma Samsuddin, S.H. NRP 21060247441085	Pengelola Perkara	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	1098/SEK/SK. KP3.4.5/X/202 3
12	Serma (K) Andi Unca Dahlan, S.H. NRP 21060319471285	Pengelola Perkara	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	1098/SEK/SK. KP3.4.5/X/202 3
13	Serma Andi Andri Yudha NRP 21060247690486	Pengelola Berkas Peninjauan Kembali	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	1098/SEK/SK. KP3.4.5/X/202 3
14	Serma (K) Indriasari, S.H. NRP 21080863860289	Pengolah Berkas Peninjauan Kembali	Klerek – Pengolah Data dan Informasi	1098/SEK/SK. KP3.4.5/X/202 3
15	Serma (K) Ayu Pramita Sari, S.H. NRP 21080869150689	Pengelola Kepegawaian	Klerek – Pengolah Data dan Informasi	1098/SEK/SK. KP3.4.5/X/202 3

16	Serka Noris Mbotengu, S.H. NRP 21110148701291	Pengelola Perkara	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	1098/SEK/SK. KP3.4.5/X/202 3
Pengadilan Militer III-17 Manado				
1	Meldi Metusallah Arnold Singal Seon, S.Pi.,	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Militer III-17 Manado	Sekretaris Pengadilan Militer III-17 Manado	3 Januari 2023SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4/SEK/Kp.I/SK/ I/2023
2	Muhammad Vijay Mahendra, S.E.,	Penyusun Laporan Keuangan Pada Pengadilan Militer III-17 Manado	Analisis Perencanaan Pada Pengadilan Militer Utama	Sprin Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor : 504/KPMU/SP. KP4.1.3/X/202 3
3	Fiere Gouberven Harindah, S.T	Pengadministrasi Kepegawaian Pada Pengadilan Militer III-17 Manado	Analisis Tata Laksana Pada Pengadilan Militer III-17 Manado.	Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 5/KPMT/W3.MI L/KP3.4.6/XI/2 023
Pengadilan Militer III-18 Ambon				
1	Stany Rraprap, S.H Penata Muda TK.I / III/b 198712022006042001	Penyusun Laporan Keuangan	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	87/SEK/Kp.I/S K/II/2023 Tgl 8 Februari 2023
2	Nova Prihastuti, S.H Penata Muda TK.I / III/b 198411272011012015	Bendahara	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan	88/SEK/Kp.I/S K/II/2023 Tgl 8 Februari 2023
3	Rina Deby.J.Wattimury, S.H.,M.H Penata III/c 197304012006042001	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Kasubbag Umum dan Keuangan	473/SEK/Kp.I/ SK/IV/2023 Tgl. 27 April 2023
Pengadilan Militer III-19 Jayapura				
1	Slamet Widada, S.H., M.H Letkol Laut (H) NRP 14131/P	Wakadilmil III-19 Jayapura	Kadilmil III-19 Jayapura	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75/KMA/SK/IV/ 2023 tanggal 27 April 2023
2	Alep Priyoambodo, S.H, Kapten Chk NRP. 11120031550786	Panitera Pengganti Dilmil III-19 Jayapura	Panitera Dilmil III-19 Jayapura	Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 243/DJMT/SK. KP.4.1.3/VIII/2 023 tanggal 31 Agustus 2023.
3	Marthen Toding, S.H Penata III/c NIP. 197507271998031002		Kasubbag PTIP	Keputusan Sekretaris Mahkamah

				Agung RI Nomor 473/SEK/Kp.I/ SK/IV/2023 tanggal 27 April 2023
--	--	--	--	--

3. Pensiun

Data Pensiun di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer Se-Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada Tahun 2023 Personil TNI maupun PNS sebanyak 1 (satu) orang dengan rincian sebagai berikut:

Daftar pensiun TNI dan Pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer di bawahnya.

No	Nama/Pangkat/ NRP/NIP	Jabatan	Nomor dan tanggal Skep	TMT
Pengadilan Militer III-13 Madiun				
1	Suaibatul Islamiah, Penata Tk I III/d NIP 1965040119890 32004	Pengadministrasi	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00278/13001/A/04/23 Tanggal 11 April 2023	1/4/2023

4. Diklat

Data Diklat Teknis maupun Non Teknis di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer Se-Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2023 sebanyak 273 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Data Diklat/Bintek/Sosialisasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

NO 1	Diklat/Bintek/Sosialisasi 2	Penyelenggara 3	Tempat/Waktu 4	Peserta 5
1	Refleksi Kinerja Tahun 2022 serta Pembinaan dan Pengarahan Rencana Kerja Tahun 2023	Dilmiltama	Dilmiltama 12 s.d 13 Januari 2023	Brigjen TNI Kirto, S.H.,M.H
2	Pendampingan persiapan Penyusunan Laporan Keuangan MARITahunan Tahun 2022 Wil. Jawa Timur	Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya	Pengadilan Tinggi Surabaya 24 Januari 2023	-Angga Permana Putra, S.H -Serma Nanang Candra Trisnianto, S.H
3	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan sebagai Hakim Militer Tinggi	Dilmiltama	Dilmiltama 16 Pebruari 2023	-Kolonel Laut (KH) Riza Fadilah, S.H. -Kolonel Chk Sahrul. S.H.,M.H
4	Sidang Istimewah MARI	MARI	Gd. Mahkamah Agung 22 s.d 23 Pebruari 2023	Brigjen TNI Kirto, S.H.,M.H
5	Harmonisasi Pengaturan dan Sinergitas Penegakan KodeHakin dan Panitera	Pusdiklat MARI	Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta 27 Pebruari s.d 1 Maret 2023	Kolonel Chk Rendra Apri Sadewa, S.H.,M.H
6	Rapat Online Kegiatan Uji Publik dan Observasi Penyusunan buku saku “ How to Win The SIPP-EIS”	Pusdiklat MA RI	Zoom meeting 8 Maret 2023	Kolonel Chk Dr. Eson Sinambela, S.H.,S.H.,M.H
7	Sosialisasi PMK	KPPN Surabaya	KPPN Surabaya 16 Maret 2023	-Tubagus Maulana Arif Darma, S.H.,M.H -Serma Nanang candra Trisnianto, S.H

1	2	3	4	5
8	Evaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Wil. Hukum Jawa Timur	Biro Perlengkapan MARI	Ruang Sidang pemerintah Kota Malang 29 Maret 2023	Serma Nanang Candra Trisnianto, S.H
9	Focus Group Discussion (FGD) TA 2023	Pusdiklat MARI	Zoom Meeting 2 April 2023	-Kolonel Chk Dr. Ebron Sinambela, S.H.,M.H - Kolonel Chk Sultan, S.H -Kolonel Chk Sahrul, S.H.,M.H
10	Penyusunan Naskah Kebijakan TA 2023	Pusdiklat MARI	Holiday Inn kemayoran Jakarta 4 s.d 6 April 2023	Kolonel Chk Rendra Apri Sadewa, S.H.,M.H
11	Pengarahan Panglima TNI terhadap Aparat Penegak Hukum	Mabes TNI	Denma Mabes TNI 3 Mei 2023	Brigjen TNI Kirto, S.H.,M.H
12	Sebagai Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar TA 2023	Pusdiklat MARI	Pusdiklat MARI 8 Mei 2023	Kolonel Chk Dr. Ebron Sinambela, S.S.,S.H.,M.H
13	Penyusunan Naskah Urgensi TA 2023	Pusdiklat MARI	Amarta Hills Hotel & Resort 9 s.d 10 Mei 2023	- Brigjen TNI Kirto, S.H - Praka Dedi Pradana Saputra
14	Ceramah Umum Kapusdiklat Menpin (Pelatihan kepemimpinan Kader Bela Negara)	Pusdiklat MARI	Zoom Meeting 11 Mei 2023	Kolonel Chk Dr. Ebron Sinambela, S.S.,S.H.,M.H
14	TOT Pelatihan III PPC Terpadu Peradilan Militer Angk. IV	Pusdiklat MARI	Pusdiklat MARI 16 Mei 2023	Kolonel Chk Sultan, S.H
16	Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1	Pusdiklat MARI	BPSDM Prop.Jatim – Malang Online, 30 Mei s.d 9 Juni 2023 Tatap Muka, 11 s.d 15 Juni 2023	PNS Afni Syafaatun, S.IP

1	2	3	4	5
17	Pelatihan SPIP Wil. Makassar Angk. VI	Pusdiklat MARI	Online 25 s.d 31 Mei 2023	Dwi Puspitarini, SE
18	Menghadiri Penyumpahan, Pelantikan dan Sertijab Kadilmil	Kadilmiltama	Dilmil III-13 Madiun 30 s.d 31 Mei 2023	Brigjen TNI Kirto, S.H.,M.H
19	Pelatihan Kepemimpinan Dasar kader Bela Negara	Pusdiklat MARI Pusdiklat MARI	Zoom, 28 Juni s.d 1 Juli 2023 Tatap Muka, 3 s.d 14 Juli 2023	PNS Afni Syafaatun, S.AP
20	Pengajar pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar Gel. II Tahun 2023	Pusdiklat MARI	Pusdiklat MARI 7 Juni 2023	PNS Tubagus Maulana Arif Darma, S.H.,M.H
21	Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa level-1	Pusdiklat MARI	Baperkom PUPR Wil Surabaya 12 s.d 16 Juni 2023	PNS Nila Rukhama, A.Md.
22	Pengembangan/ Penyempurnaan RBPP dan RBPMP	Pusdiklat MARI	Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta 14 s.d 17 Juni 2023	Letkol Chk Rendra Apri Sadewa, S.H.,M.H
23	Rakor Penyusunan Rencana Kerja Anggaran MARI Tahun 2024	MARI	Vasa Hotel Surabaya 30 Agustus s.d 1 September 2023	- Kolonel Chk Anwar, S.H.,M.H -PNS Wahyu Eko Wicaksono, S.T - PNS Fajar Eka Pratomo, SE
24	Pembinaan Ketua MARI, Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Dilmil III-19 Jayapura	MARI	Dilmil III-19 Jayapura	Brigjen TNI Kirto, S.H.,M.H
25	Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)	Pusdiklat MARI	Hotel Santika Surabaya 20 September 2023	PNS Tigor Parililitan Hasugian, S.IP.S.H
26	Bintek Kepanteraan Dilmiltma TA 2023	Dilmiltama	Hotel Grand Mercure Yogyakarta 20 s.d 22 September 2023	- Letkol Chk Reza Yanuar, SE.,SH - Mayor Laut (H) Tri Arianto, S.H.,M.H

1	2	3	4	5
27	Pen Calon Hakim PPC Angkatan IV	MARI	Dilmil Makassar 22 s.d 24 Oktober 2023	Kolonel Sultan, S.H
28	Ujian Potensi dan penilaian kompetensi wilayah hukum Surabaya	Biro Kepegawaian MARI	I.Zoom Meetingg 13 Oktober 2023 II.Pengadilan Tinggi Sby 17 Oktober 2023	-PNS Parlilitan Hasugian, S.IP.,S.H Tigor PNS Dwi Puspitarini, S.E
29	Sarasehan Perwira Korp Hukum Angkatan Laut wilayah Timur tahun 2023	Dirbinganismil MA RI	Hotel Grabd Wihz Trawas Mojokerto 1 November 2023	-Kolonel Laut (H) Riza Fadiyah, S.H -Kolonel Laut (H) I Komang Suciawan, S.H
30	Wisuda Kelulusan Peserta PPC Hakim Terpadu Peradilan Militer Seluruh Indonesia Angkatan IV	Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MARI	Gd.Sekretariat MARI 22 s.d 24 November 2023	-Brigadir Jenderal TNI Kirto, S.H.,M. - Pratu Fajar Firmansyah -PPNP Akhamad Santoso
31	Wisuda Kelulusan Peserta PPC Hakim Terpadu Peradilan Militer Seluruh Indonesia Angkatan IV	Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MARI	Gd. Sekretariat MARI 22 November 2023	-Kolonel Chk Sahrul, S.H.M.H -Kolonel Kum M. Idris, S.H,M.H
32	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim MiliterTinggi	Dilmiltama	Dilmiltama 27 November 2023	Kolonel Kum M. Idris, S.H,M.H
33	Kegiatan Character Building Biro Umum Mahkamah Agung	Biro Umum MA RI	Golden Tulip Holland Resort Batu Malang 30 November s/d 2 Desember 2023	-Kolonel Chk Anwar, S.H.M.H - Prada Khaerudin Tamimi
34	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024	Kepala Biro Keuangan	Gd. MA RI 13-16 Desember 2023	-PNS Angga Permana Putra, S.H - Serma Nanang Candra T, S.H

1	2	3	4	5
35	Penyusunan Anggaran DIPA 01 MA RI TA. 2025 dan Kegiatan Konfirmasi dan Validasi usulan Anggaran (Baseline) DIPA 01 TA. 2025	MARI	Hotel Novotel Jakarta 13 s.d 15 Desember 2023	-PNS Wahyu Eko Wicaksono, ST -PNS Fajar Eka Pratomo, S.E
36	Rakor Pelaksanaan Anggaran	Biro Keuangan MARI	Hotel Arya Duta Menteng Jakarta 17 s.d 20 Desember 2023	PNS Wahyu Eko Wicaksono,ST
37	Rakor Penerapan E-Berpadu Dan Prototipe Gedung Kantor Pengadilan Mliler	Dilmiltama	Dilmiltama, 13 s.d 15 Desember 2023	Brigadie Jenederl TNI Kirto, S.H.,M.H

Data Diklat/Bintek/Sosialisasi Pegawai Dilmil III-12 Surabaya

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Pelatihan teknis yudisial penistaan Agama bagi Hakim Peradilan Umum dan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Tahap I, Mandiri 27 Februari s.d. 3 Maret 2023 Tahap II, Bogor 6 s.d. 11 Maret 2023	Mayor Chk Ujang Taryana, SH,MH.
2	Pelatihan Teknis Yudisial pembuatan putusan dan problema penyelesaian hukum perkara koneksitas	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Tahap I, Mandiri 6 s.d. 10 Maret 2023 Tahap II, Medan 13 s.d. 17 Maret 2023	Letkol Chk Arif Sudibya, S.H.
3	Pelatihan manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara.	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Diklat PKN Yogyakarta, 3 s.d. 6 April 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si., PNS III/d
4	Pelatihan peningkatan kapasitas Hakim.	Komisi Yudisial	Bogor, 8 s.d. 12 Mei 2023	- Letkol Chk Arif Sudibya, S.H. - Mayor Chk UjangTaryana, SH,MH.
5	Training of Tutor Pelatihan III PPC IV, Peradilan Militer .	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARIPusdiklat Kumdil,	14 s.d. 18 Mei 2023	- Kolonel Chk Sugeng Aryanto,SH.MH. - Letkol Chk Arif Sudibya, SH - Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, SH.MH, MAP
6	Pelatihan SPIP	Balitbang Kumdil MARI Balai Diklat PKN Sulsel BPK RI	, 21 s.d. 26 Mei 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si., PNS III/d
7	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ PP Peradilan Militer	Balitbang Kumdil MARI	Tahap I. Mandiri 1 s.d. 4 Agustus 2023 Tahap II, Klasikal 6 s.d. 12 Agustus 2023	- Lettu Sus Gigih Dayu Priambudi, SH - Peltu Rudianto, S.H. - Peltu Faried Sunaryunan, SH. - Pelda Slamet
8	Penyusunan RBPP dan RBMP Pelatihan Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kumdil MA RI Jakarta	21 s.d. 24 Agustus 2023	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M. A.P.

9	Penyusunan Naskah Urgensi Tahun 2023” Penerapan Restorative Justice dalam penjatihan pidana Prajurit TNI yang melakukan KDRT”	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Surabaya, 7 s.d. 9 September 2023	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M. A.P.
10	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilihan Umum bagi Hakim TK pertama, Peradilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Bogor, 12 a.d. 17 November 2023	-Letkol Kum Jonarku, S.H., M.H. -Letkol Chk Arif Sudibya, S.H. -Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, SH.MH.MAP.

Tabel Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimtek Panitera/ Panitera Pengganti	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online Satker 20 s.d. 22 Februari 2023	- Lettu Sus Gigih Dayu Priambudi, S.H. - Pelda Slamet
2	Bimtek Hakim Militer TA. 2023	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online Satker 20 s.d. 22 Februari 2023	- Mayor Chk Musthofa, SH.MH. - Mayor Chk Ujang Taryana, SH, MH.
3	Bimtek Panitera/ PP Peradilan Milirter TA. 2023	Dirjen Badilmiltun MA RI	Daring 2 s.d. 4 Agustus 2023	- Kapten Sus Kholip, S.H. - Pelda Suhendra, S.H.
4	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI	Virtual, 28,29 Agustus 2023	- Kepala - Wakil Kepala - Anggota Pokkimmil - Panitera - Sekretaris
5	Konsinyering Finalisasi Penyusunan Naskah TA 2023 Restorative Justice Prajurit TNI melakukan KDRT, Wilayah Jateng	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Semarang, 20 s.d. 22 September 2023	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P
6	Bimtek Teknis Kepaniteraan	Dilmiltama	Yogyakarta 20 s.d. 22 September 2023	<u>Luring</u> : - Peltu Moh Fauzan - Pelda Suhendra <u>Daring</u> : - Kapten Sus Kholip, S.H. - Pelda Slamet
7	Bimtek Kesekretariatan	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Mojokerto, 11 s.d. 13 Oktober 2023	- Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d - Setijo Utomo, PNS-III/b

8	Pembinaan Pengelolaan PNPB	KA BUA	Malang, 30 November s.d. 2 Desember 2023	- Norma Azurah, S.E.I. - PNS III/a - Dina Astari, A.Md. - PNS II/c
9	Pembinaan Kesekretariatan	KA BUA	Surabaya, 13 s.d. 15 Desember 2023	- Ainur Rofiq, SE. - PNS-III/d

Tabel Daftar Kegiatan Sosialisasi Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan TA. 2022	KPPN Surabaya II	Surabaya 24 Januari 2023	PNS. Norma Azurah, S.E.I.
2	Sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2023	KPPN Surabaya II	Surabaya, 21 Februari 2023	1. PNS. Firda Nuril Hanifah, S.Si., 2. PNS Norma Azurah, S.E.I.
3	Pendampingan RKBMN TA 2025	BUA MA RI	Malang, 29 Maret 2023	-PNS. Firda Nuril Hanifah, S.Si., -Pelda Slamet
4	FGD Penyusunan Naskah Kebijakan TA 2023.	Komisi Yudisial RI Online	5 April 2023	-Letkol Chk Arif Sudibyo, SH. -Kapten Sus Kholip, SH.
5	FGD Penyusunan Naskah Urgensi TA2023 "Penerapan Restorative Justice Prajurit TNI yang melakukan KDRT"	Balitbang Kumdil MA RIDaring	10 Mei 2023	-Mayor Chk Musthofa, SH.MH. -Kapten Sus Kholip, SH.
6	Pembekalan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara Gel. I	Kapusdiklat Menpim. Balitbang Diklat Kumdil MA RIONline	11 Mei 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
7	Pembekalan Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara Gel. I	Kapusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kumdil MA RIONline.	11 Mei 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
8	Focus Group Discussion (FGD) wilayah Hukum Gorontalo	Kabalitbang Diklat Kumdil MA RI	Surabaya, 27 Juni 2023	Kapten Kum Kholip, S.H.
9	Sosialisasi kepersertaan JKN TNI dan POLRI Kab. Sidoarjo BPJS Kab. Sidoarjo		Sidoarjo, 20 Juli 2023	-Setijo Utomo, PNS III/b -Praka Wahyu Ari Wijaya
10	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Twl. III TA. 2023	Pengadilan Tinggi Surabaya	Surabaya, 3 Oktober 2023	-Norma Azurah, S.E.I. PNS III/b -Serka Feri Afzudi
11	Sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2023	KPPN Surabaya II	Surabaya, 25 Oktober 2023	Norma Azurah, S.E.I. PNS III/b

Tabel Daftar Peserta Ujian/Test Kenaikan Golongan

No	Jenis Ujian	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Ujian Dinas Elektronik (e-Expam)	Biro Kepegawaian MARI	Online Satker 17 Mei 2023	-Rijani Widyanti, PNSIII/d -Ainur Rofiq, S.E. PNSIII/d
2	Seleksi Diktuba TNI AL Angkatan LIV TA 2023	KASAL	Surabaya, 12 s.d. 16 Juni 2023	Kopda Mus Marzuki
3	Tes Casis Diktuba TNI AD TA. 2024	KASAD	Malang, 30 Oktober s.d. 2 November 2023	Serka Aji Wibayu, S.H., M.H.

Tabel Daftar Pengembangan Kompetensi SDM

No	Jenis Ujian	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Fit and Proper test calon Pimpinan Pengadilan Type A	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online Satker 07, 09 Februari 2023 Offline, Gedung Sekretariat MA RI 15 Februari 2023	Letkol Chk Arif Sudibya, S.H.
2	Susjabkimmil TNI	Panglima TNI	Kodiklat TNI 10 Mei s.d. 4 Agustus 2023	Letkol Chk (K) Kus Indrawati, SH, MH.
3	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/jasa	Balitbang Kumdil MARI	BPSDM Jatim 11 s.d. 15 Juni 2023	Norma Azurah, S.E.I. PNS-III/a
4	Ujian Potensi dan penilaian kompetensi wilayah hukum Surabaya	Biro Kepegawaian MARI	I.Zoom Meetingg 13 Oktober 2023 II.Pengadilan Tinggi Sby 17 Oktober2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si,

Tabel Daftar Pembinaan, Rapat Koordinasi dan Sarasehan

No	Jenis Pembinaan / Rakor	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Refleksi kinerja Tahun 2022, Pembinaan dan pengarahan rencana kerja TA 2023	Dilmiltama	Jakarta 12, 13 Januari 2023	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
2	Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI	Pengadilan Negeri Surabaya	Surabaya 20 Februari 2023	Kapten Sus Kholip, SH Peltu Rudianto, SH. Safiril Adi Husada, A.Md.
3	FGD Penyusunan Naskah Kebijakan TA 2023.	Komisi Yudisial RI	Online 5 April 2023	- Letkol Chk Arif Sudibyo, SH. - Kapten Sus Kholip, SH.

4	FGD Penyusunan Naskah Urgensi TA 2023 "Penerapan Restorative Justice Prajurit TNI yang melakukan KDRT"	Balitbang Kumdil MA RI	Daring 10 Mei 2023	Mayor Chk Musthofa, SH.MH. Kapten Sus Kholip, SH.
5	Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI.	Pengadilan Tinggi Surabaya	Pengadilan Tinggi Surabaya 11 Mei 2023	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Kapten Sus Kholip, SH. Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
6	Focus Group Discussion (FGD) wilayah Hukum Gorontalo	Kabalitbang Diklat Kumdil MA RI	Surabaya, 27 Juni 2023	Kapten Kum Kholip, S.H.
7	Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi (AKPK) Tahun 2024	Pusdiklat Menpin Balitbang Kumdil MA RI	Surabaya, 20 September 2023	-Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H. -Kapten Sus Kholip, SH. -Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
8	Rakor Sistem Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer Tingkat Pertama	Kadilmilti III Surabaya	Zoom Meeting, 22 s.d. 25 Agustus 2023	Wakil Kepala - Hakim Pengawas Bidang
9	Undangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Mahkamah Agung RI	Bogor 20 s.d. 22 September 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
10	Undangan Rapat Koordinasi	Dirjen Badilmiltun MARI	Jogyakarta, 25 s.d. 27 September 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
11	Sarasehahan Perwira Korps Hukum TNI AL	Kasal	Trawas Mojokerto. 1 November 2023	Mayor Laut Mirza Ardiyansah, SH, MH, MAP.
12	Rapat Koordinasi Teknis	Dirjen Badilmiltun MARI	Batam, 6 s.d. 8 November 2023	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M. H
13	Pembinaan dan Rapat Koordinasi Pembentukan Dilmil Baru	Kadilmiltama	Makasar, 16 s.d. 18 Juli 2023	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

Tabel Data Kunjungan/Magang Mahasiswa

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Univ. Islam Negeri Sunan Ampel Sby	Magang Mandiri	13 Februari s.d. 4 Maret 2023	
2	Univ. 17 Agustus 1945	Magang MB-KM	15 April s.d. 15 Juli 2023	2 orang mahasiswa
3	Univ. Wijaya Kusuma	Magang MB-KM	23 Maret s.d. 23 Juni 2023	5 orang mahasiswa
4	Univ. Pembangunan "Veteran" Jatim	Observasi	22, 23 Mei 2023	Mahasiswa semester IV
5	Univ. Madura	Mengikuti Persidangan	15 Juni 2023	Para Mahasiswa
6	Univ. Bhayangkara Surabaya	Magang	16 Juni s.d, 16 Agustus 2023	4 orang mahasiswa
7	Univ. Pembangunan "Veteran" Jatim	Perekaman Vidio lomba Persidangan semu	19 dan 26 Agustus 2023	Tim lomba Persidangan Semu
8	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	7 Oktober 2023	Gladi bersih lomba Persidangan semu
9	Univ. Gajah Mada Yogyakarta	Latihan Babak Final Pengadilan Semu	12 Oktober 2023	Mahasiswa Peserta lomba
10	Univ. Pembangunan "Veteran" Jatim	Perekaman Vidio pengembangan SDM Mahasiswa	4 November 2023	Para Mahasiswa
11	Univ. Muhamadiyah Malang	Observasi	30 November 2023	2 Orang Mahasiswa
12	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	15 September 2023 dan 15 Oktober 2023	Peserta lomba Persidangan Semu
13	Intitut Teknologi Adhi Tama Surabaya	Kerja Praktek	15 November s.d. 14 Desember 2023	1 Orang Mahasiswa
14	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	2,3, 8, 17 Desember 2023	Peserta lomba Persidangan Semu Piala Kasad

Daftar Diklat Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-13 Madiun

NO	Diklat/Bimtek /Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/waktu	Peserta
1	2	3	4	5
1	Refleksi Kinerja Tahun 2022 serta Pembinaan dan Pengarahan Rencana Kerja Tahun 2023	Dilmiltama	Dilmiltama 12 s.d. 13 Januari 2023	Silveria Supanti, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 2910140091070
2	Pelatihan Teknis Yudisial Penistaan Agama bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer seluruh Indonesia	Pusdiklat Mahkamah Agung RI	27 Februari s.d. 11 Maret 2023 secara daring dan luring	-Prana Kurnia Wibowo, S.H, Mayor Laut (H) NRP 18883/P
3	Bimtek Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA 2023	Pusdiklat Mahkamah Agung RI	20 s.d. 22 Februari 2023 secara daring	-Gatot Robby Bhaskara, S.H., Lettu Kum NRP 544096
4	Bimtek Hakim Militer TA 2023	Pusdiklat Mahkamah Agung RI	20 s.d. 22 Februari 2023 secara daring	-Prana Kurnia Wibowo, S.H, Mayor Laut (H) NRP 18883
5	Pembinaan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI	Dilmilti III Surabaya	20 Februari 2023	-Silveria Supanti, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 2910140091070; -Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476, -Prana Kurnia Wibowo, S.H, Mayor Laut (H) NRP 18883/P; -Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 21950070141174; -Samian, S.H., M.M., IV/a NIP 197002211992031001- Gatot Robby Bhaskara, S.H., Lettu Kum NRP. 544096; -M. Afiq Nurzali, Kopda NRP 3109486560390
6	Pelatihan Teknis Yudisial	MARI	6 s.d. 17 Maret 2023 Cambridge Hotel Medan	-Silveria Supanti, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 -Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 21950070141174
7	Pelatihan Pemantapan KEPPH.	Aston Bogor Hotel & Resort	13 s.d. 18 Maret 2023	Prana Kurnia Wibowo, S.H, Mayor Laut (H) NRP 18883/P
8	Focus Group Discussion dalam rangka penyusunan Naskah Kebijakan Tahun 2023	Daring	5 April 2023	-Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 21950070141174 - Gatot Robby Bhaskara, S.H., Lettu Kum NRP 544096

9	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer	Pusdiklat Mahkamah Agung Daring	24 s.d. 26 Mei	Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 202321950070141174
10	Pengembangan/ Penyempurnaan RBPP & RBPMP pelatihan Teknis Yudisial Peradilan Militer	MARI	Hotel Grand Mercure Harmoni 14 s.d. 17 Juni 2023	Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174
11	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama TA 2023	Dilmiltama	Hotel Santika Premier Bekasi 20 s.d. 22 Juni 2023	-Gatot Robby Bhaskara, S.H., Lettu Kum NRP 544096 - Andri Sujatmiko, Serma Kom NRP 106531
12	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Militer Seluruh Indonesia	Pusdiklat Mahkamah Agung	1 s.d. 12 Agustus 2023, daring dan luring	Achmad Faizal, Pelda NRP 31940155520273
13	Bimbingan Teknis Panitera	Pusdiklat Mahkamah Agung	Daring 2 s.d. 4 Agustus 2023	-Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP 522415
14	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer	Pusdiklat Mahkamah Agung	6 s.d. 8 September 2023 daring	Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174
15	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama TA 2023	Pusdiklat Mahkamah Agung	Hotel Grand Mercure Yogyakarta 20 s.d. 22 September 2023	-Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP 522415
16	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Pusdiklat Mahkamah Agung	Aston Kuta Hotel & Residence 18 s.d. 20 Oktober 2023	-Gigih Dayu Priambudi, S.H., Lettu Kum NRP 544097
17	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilihan Umum	Pusdiklat Mahkamah Agung RI	6 s.d. 18 November 2023, daring dan luring	-Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581
18	Pendampingan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Surabaya	24 Januari 2023	-Susriyani S.H., PPNPN -Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN
19	Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	KPPN Madiun	25 Januari 2023	Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001 Mulyono, Serka NRP 31970176050877
20	Pelatihan Smart ASN 'English for	KPPN Madiun	10 s.d. 17 Maret 2023 secara	-Raudya Rifka Zahra, A.Md., Pengatur II/c NIP

	Social and Office Communication”		online	199712262020122005
21	Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2022 dan Bimbingan Teknis Penerbitan SKPP Secara Elektronik	KPPN Madiun	9 Maret 2023	-Susriyani S.H., PPNPN
22	Evaluasi Terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	KPPN Madiun	29 Maret 2023 bertempat di Ruang Sidang Pemerintah Kota Malang	-Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001 - Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN
23	Sosialisasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (JFPLB)	KPPN Madiun	6 April 2023 secara daring	-Gatot Suprpto, Penata Tk I III/d NIP 196805031991031009 - Mahardini Dianningtyas Swastika, S.H., Penata Tk I III/d NIP 198402132009122003
24	Bimbingan Teknis Migrasi Aplikasi Gaji Web	KPPN Madiun	15 Juni 2023	-Dodit Puguh Prasetyo Serma NRP 531806
25	Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I Tahun 2023	KPPN Madiun	25 s.d. 27 Juni 2023 bertempat di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi	-Susriyani S.H., PPNPN - Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN
26	Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 dan Pelaporan Target/Proyeksi Output Satker Pada Aplikasi SAKTI	KPPN Madiun	24 Juli 2023	-Susriyani S.H., PPNPN
27	Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Dirjen Badilmiltun MARI	6 s.d. 8 September 2023 secara daring	-Febi Ramona, Serma NRP 31940520920274; - Luki Setiawan, A.Md., Pengatur II/c NIP 199210262022131003 - Hilmy Aziz Raihan, A.Md. Pengatur II/c NIP 199510062022031009
28	Rapat Koordinasi Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Dirjen Badilmiltun MARI	25 s.d. 27 September 2023 bertempat di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta	Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001
29	Bimtek Kesekretariatan dalam Bidang Persuratan/Tata Naskah dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Dilmilti III Surabaya	11 s.d. 13 Oktober 2023 bertempat di Grand Whiz Hotel Trawas	-Luki Setiawan, A.Md., Pengatur II/c NIP 199210262022131003 - Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN

30	Bimbingan teknis “Pengelolaan Barang Milik Negara dan Tata Naskah Dinas Guna Tertib Administrasi”		12 Oktober 2023 secara daring	-Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001 - Gatot Suprpto, Penata Tk I III/d NIP 196805031991031009
31	Kegiatan Sosialisasi PER-8/PB/2023	KPPN Madiun	10 Oktober 2023 KPPN Madiun	Susriyani S.H., PPNPN dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN
32	Sosialisasi dan simulasi ujian Profile Assessment	MA RI	12 Oktober 2023 secara daring	Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001
33	Pemetaan Kompetensi Pegawai Wilayah Jawa Timur	MA RI	18 Oktober 2023 Pengadilan Tinggi Agama	Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001
34	Kegiatan evaluasi Perpustakaan Tahun 2023		17 Oktober 2023 Ballroom Sun Hotel Madiun	Badruzzaman, Koptu NRP 31000591731079
35	Sosialisasi tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023	KPPN Madiun	24 Oktober 2023	-Dodit Puguh Prasetyo Serma NRP 531806 -Mulyono, Serka NRP 31970176050877
36	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilihan Umum	Badan Litbang Diklat Kumdil	pada 6 s.d. 18 November secara daring dan luring	Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581
37	Pendataan IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) Tahun 2023		15 November 2023 bertempat di Ballroom RM Ayam Pemuda	Badruzzaman, Koptu NRP 31000591731079
38	Pembinaan Kesekretariatan	Pengadilan Negeri Malang	30 November s.d tanggal 2 Desember 2023 bertempat di Harris Hotel and Coventions Malang	-Sriyani, Penata Muda Tingkat I III/b, NIP 197210041994032001 - Dodit Puguh Prasetyo, Serma NRP 531806
39	Kegiatan Susjabkimmil	Kodiklat TNI	10 Mei s.d. 4 Agustus 2023	Prana Kurnia Wibowo, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18883/P
40	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Level-1	BPSDM Provinsi Jawa Timur	30 Mei s.d. 15 Juni 2023 secara daring dan luring	-Mahardini Dianningtyas Swastika, S.H., Penata Tk I III/d NIP 198402132009122003 - Zakiah, S.E., Penata Muda III/a NIP 199110082020122007
41	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Level-1	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VI Surabaya	29 Mei s.d. 16 Juni 2023 secara daring dan luring	-Luki Setiawan, A.Md., Pengatur II/c NIP 199210262022131003 - Hilmy Aziz Raihan, A.Md. Pengatur II/c NIP 199510062022031009
42	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Level-1	BPSDM Provinsi Jawa Timur	30 Mei s.d. 15 Juni 2023.daring dan luring	Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a NIP 197002211992031001

43	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Level-1	Pusdiklat Mahkamah Agung RI	11 s.d. 27 September 2023, daring dan luring	Susriyani, S.H., PPNPN
44	Pembelajaran e-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	KPPN Madiun	2 s.d. 10 Oktober 2023 daring	Hilmy Aziz Raihan, A.Md. Pengatur II/c NIP 199510062022031009
45	Pembelajaran e-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	KPPN Madiun	23 s.d. 31 Oktober 2023 secara daring	Luki Setiawan, A.Md., Pengatur II/c NIP 199210262022131003

Daftar Diklat Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-14

No	Bimtek/Diklat/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	Bimtek Panitera	Dirjen Badilmiltun MARI	Virtual, 20-22 Februari 2023	Lettu Chk Damai Chrisdiantor, SH dan Pelda Kadek Subrata, SH.
2	Bimtek Hakim	SEKMA RI	Virtual, 20 -22 Februri 2023	Mayor Laut (KH) Ahmad Junaedi, SH. MH.
3	Sosialisasi Profil Asesment	MA RI	Virtual, 7 Februari 2023	Letkol Chk I Md Suryawan, SH., MH. dan Letkol Chk Agustono, SH.MH
4	Sosialisasi Perma terkait Admin dan Persidangan TK I, Banding, Kasasi, PK scr Elektronik	MA RI	Virtual, 20 Februari 2023	Seluruh Personil Kepaniteraan
5	Pelatihan Teknis Yudisial Penerapan Pleno Kamar	Balitbang Diklat Kumdil MA-RI	Learning,6-17 Maret 2023	Letkol Chk I Gd Md Suryawan, SH., MH.
6	PKA	Balitbang Diklat Kumdil MA-RI	Virtual, 3 Februari 2023.	Letkol Chk I Gd Md Suryawan, SH., MH.
7	Sosialisasi PMK 210 & Jabfung Keuangan	Biro Keuangan MARI	Virtual,9 Maret 2023	Sekretaris, staf Keuangan dan pejabat Fungsional
8	Ujian Kompetensi Barang/Jasa Pemerintah	Balitbang Diklat Kumdil, No. 137/Bld. 4/Pim/3/2023 tgl 03 -3-23	Virtual, 14 Maret - 1 April 2023	Lailatul H Muyassaroh, S.IP di ganti oleh PNS Gst Nym Ayu Giri Sundari, SH.MM.

9	Rakorniskum TNI	Dirjen Badilmiltun	Virtual, 16 Maret 2023	Letkol Chk Dede SH. Darmawan MH.
10	Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi ZI	Dilmilti III Sby	Virtual, 29 Maret 2023	Seluruh Area ZI
11	Sosialisasi Pem-baharuan Aplikasi SIPP Versi 5.2.0	Dirjen Badilmiltun	Virtual, 4 April 2023	Panitera dan Seluruh Staf Kepaniteraan
12	Sosialisasi Pem bayaran Tunjangan Kinerja	Badan Urusan Administrasi MA RI	Virtual, 4 April 2023	Sekretaris, Staf keuangan dan kepegawaian
13	Kegiatan Focus Group Discusion (FGD).	Balitbang Diklat Kumdil	Virtual, 5 April 2023	Mayor Laut (KH) A. Junaedi, SH. MH dan Panmud Hukum.
14	Kegiatan Pembinaan Kadilmilti III Sby	Kadilmilti III Sby	Virtual, 12 April 2023	Kadilmil dan seluruh staf Dilmil III-14 Dps
15	Webiner dari Perempuan Internasional.	Ditjen Badilmiltun MA RI.	Virtual, 14 April 2023	Waka dan Pokkimit
16	Sosialisasi E-Monev Bapennas	Mahkamah Agung RI	Virtual, 17 April 2023	Katharina, SH. dan 1 orang staf
17	Kegiatan Pengarahan Panglima TNI	Mabes TNI	Virtual, 3 Mei 2023	Kadilmil dan Waka.
18	Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)	Balitbang Diklat Kumdil MA RI No. 335/Bld/S/5/2023 tgl 03 Mei 2023	Virtual, 10 Mei 2023	Kapten Chk (K) Dianing L, SH. Dan Lettu Chk Damai C, SH.
19	Kegiatan Bimtek Perempuan berhadapan dengan Hukum dan permasalahannya.	Balitbang Diklat Kumdil.	Virtual / 20 - 22 Mei 2023	Kapten Chk (K) Dianing L, SH.
20	Peningkatan Kompetensi SDM Kepaniteraan Peradilan Militer.	Sprin Dari Dilmiltama.	Bekasi, 20-22 Juni 2023	Mayor Chk Mahpul Saepuloh, SH dan Serma I Nyoman Jana Nuraga, S.H
21	Ujian Dinas Elektronik (e-Exam)	Biro Kepeg BUA	Denpasar, 17 dan 23 Mei 2023	A.A.I Intan Prabawati, SE staf
22	Pelatihan Manajemen Pengelolaan BMN	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Gianyar, 29 s.d 31 Mei 2023	I Wayan Parna, S.H., M.H.

23	Program Digital Learning E-Learning MKN Keuangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Menkeu	Virtual/Learning 4-19 Agustus 2023	I.G.A.N Wahyu Permadi, S.H.
24	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkt III	Balitbang Diklat Kumdil	Virtual, 11-23 Agustus 2023	Ketut Suriani, SH.
25	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkt V	Balitbang Diklat Kumdil	Virtual, 22-26 Agustus 2023	Ketut Gede Wiguna, S.I.P
26	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ PP Peradilan Militer	Ditjen Badilmiltun MA RI	Bogor, 6-11 Agustus 2023	Lettu Damai Chrisdianto, SH.
27	Mengikuti Bimtek Kompetensi Hakim	Dirjen Badilmiltun	Virtual, 6-8 September 2023	Kapten Chk (K) Dianing Lusiasukma, SH.
28	Kegiatan Bimtek Kepaniteraan	Dilmiltama	Virtual, 20-22 September 2023	Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H.
29	Mengikuti Bimtek Kepaniteraan	Dilmiltama	Yogyakarta, 20-22 September 2023	Lettu Chk Damai Chrisdianto, SH dan Pelda Kadek Subrata, S.H.
30	Bimtek PTSP	Dilmiltama	Virtual, 6-8 September 2023	Serma I Nym Jana Nuraga, SH dkk.
31	Mengikuti Bimtek Bidang Kesekretariatan	Dilmilti III Surabaya.	Mojokerto, 11-13 Oktober 2023	ASN A.A.I Intan Prabawati, SE beserta 1 Staf Keuangan
32	Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Kepaniteraan	Dilmiltama	Kuta, 18-20 Oktober 2023	Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H.
33	Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pemilu Pidana Peradilan Umum	Puslitbang Hukum MA RI.	Lerasning, 6 -9 Nov 2023 Bogor, 12-18 Nov 2023	Letkol Chk M Rizal, SH. MH & Letkol Chk Johannes S.Taruk, SH. MH.

Daftar Diklat Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-15 Kupang

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu	Nama
1	2	3	4	5
1	Pelatihan Jarak jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	KPPN	13 Februari 2023	-PNS Marloyati Lado, S.H NIP. 198710082009122003 -PNS Fajar Eka Pratomo,S.E NIP. 199201152020121006
2	Pelatihan Kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan I s/d III Secara Blended Learning Tahun 2023	Pusdiklat MARI	Pusdiklat MARI 20 Maret 2023	PNS Delmi B. Sabloit, S.Ak NIP. 198301262009042001
3	Klasikal Pelatihan Kepemimpinan pengawas (PKP)	Pusdiklat MARI	Pusdiklat MARI 12 Mei 2023	PNS Delmi B. Sabloit, S.Ak NIP. 198301262009042001
4	Pelatihan E-Learning Bendahara pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan XIII TA 2023	KPPN	Kupang 20 November 2023	PNS Ridwan Pertama Putra,A.Md NIP. 199109122022031008
5	Refleksi Kinerja Tahun 2022 serta Pembinaan dan Pengarahan Rencana Kerja Tahun 2023	Dilmiltama	11 Januari 2023	Letkol Chk Panjaitan Hotman Maruli Tua S.H., M.H NRP. 11000022761076
6	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Terorisme bagi Hakim Pengadilan Umum dan Peradilan Militer seluruh Indonesia dengan Metode Blended Learning	Pusdiklat MARI	Bogor 20 Februari 2023	Mayor Chk Hendro Cahyono S.H., M.H NRP. 11040032130782 Mayor Chk Samsul Arifin,S.H NRP. 21960369130576
7	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer dengan tema Penyelesaian Perkara Koneksitas	Pusdiklat MARI	Bogor 20 Februari 2023	Mayor Chk Kurniawan Setyanto S.H., M.I.P NRP. 11080095390983

1	2	3	4	5
8	Bimbingan Teknis Kepaniteraan/Panitera Pengganti TA 2023	Dilmiltama	Jakarta 20 Februari 2023	Letda Chk I Nyoman Dharma Setyawan,S.H. NRP. 210502636905 86
9	Pelatihan Teknis Yudisial Penerapan Pleno kamar dalam Pembuatan Putusan dan Problematika Penyelesaian Hukum dalam Penerapan Koneksitas bagi Hakim Peradilan Militer.	Pusdiklat MARI	Medan 06 Maret 2023	Letkol Chk Panjaitan Hotman Maruli Tua S.H., M.H NRP. 11000022761076
10	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara	KPPN	Denpasar 03 April 2023	PNS Alexander,S.E NIP. 19760908200090420 01
11	Bimbingan Teknis Kesetaraan Gender bagi Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer	Kupang	Kupang 24 Mei 2023	Kapten Kum Ronald Sahat Hamonangan Sinaga,S.H NRP. 537313 Kapten Kum Arinta Mudji Pranata,S.H.,M.H NRP. 541692
12	Bimbingan Teknis Kepniteraan DilmiltamaTA 2023	Dilmiltama	Bekasi 22 Juni 2023	Kapten Chk Irwan idris,S.H NRP. 21960348011275
13	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera atau Panitera Pengganti Peradilan Militer seluruh Indonesia	Pusdiklat MARI	Bogor 01 Agustus 2023	Letda Chk I Nyoman Dharma Setyawan,S.H. NRP. 21050263690586
14	Bimbingan Teknis Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA 2023	Pusdiklat MARI	Kupang 2 Agustus 2023	Kapten Chk Irwan idris,S.H NRP. 21960348011275
15	Koordinasi Sistem Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah IV	Kupang	Kupang 22 Agustus 2023	Mayor Chk Hendro Cahyono S.H., M.H NRP. 11040032130782 Mayor Chk Kurniawan Setyanto S.H., M.I.P NRP. 11080095390983 Kapten Kum Ronald Sahat Hamonangan Sinaga,S.H NRP. 537313

1	2	3	4	5
16	Bimbingan Teknis Hakim Proses Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	Pusdiklat MARI	Kupang 6 September 2023	Mayor Chk Hendro Cahyono S.H., M.H NRP. 11040032130782 Kapten Kum Ronald Sahat Hamonangan Sinaga,S.H NRP. 537313
17	Bimbingan Teknis kepaniteraan Dilmiltama dengan Tema “Meningkatkan Kompetensi panitera dan Panitera Pengganti di dalam percepatan penyelesaian perkara di Lingkungan Peradilan Militer dengan memegang teguh kode etik”	Dilmiltama	Kupang 20 September 2023	Kapten Chk Irwan idris,S.H NRP. 21960348011275 Peltu Muhaimin,S.H.,M.H NRP. 21960347690177
18	Pembinaan bidang Teknis dan Administrasi Yudisial serta Pengawasan Oleh Pimpinan Mahkamah Agung.	MA RI	Labuhan Bajo 08 Oktober 2023	Letkol Chk Agustono,S.H.,M.H NRP. 21940080960873 Kapten Chk Irwan idris,S.H NRP. 21960348011275 PNS Alexander,S.E NIP. 1976090820009042001
19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Tenaga Teknis Kepaniteraan)	MARI	Denpasar 18 Oktober 2023	Kapten Chk Irwan Idris,S.H NRP. 21960348011275
20	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Tingkat Pertama di Peradilan Militer Seluruh Indonesia	MARI	Bogor 13 November 2023	Mayor Chk Hendro Cahyono S.H., M.H NRP. 11040032130782

Daftar Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-16 Makassar

Tabel Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Waktu	Peserta
DIKLAT TEKNIS			
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Penerapan Pleno Kamar Dalam Pembuatan Putusan dan Problematika Penyelesaian Hukum Dalam Perkara Koneksitas Bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia	6 s.d 17 Maret 2023	Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H., M.H.
2.	Pelatihan Pemantapan KEPPH	13 s.d 18 Maret 2023	Letkol Chk Jasdar, S.H., M.H.
3.	Susjabkimmil TNI XXX TA 2023	18 Mei s.d 4 Agustus 2023	Mayor Chk Victor Virghantara Taunay, S.H.
4.	Training of Tutor dan Training of Mentor Pelatihan II PPC Terpadu Peradilan Militer Angkatan IV	2 Januari s.d 31 Maret 2023	1. Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H., M.H. 2. Letkol Sus Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. 3. Letkol Chk Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
5.	Training of Tutor dan Training of Mentor Pelatihan III PPC Terpadu Peradilan Militer Angkatan IV	14 s.d 18 Mei 2023	1. Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H., M.H. 2. Letkol Chk Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. 3. Letkol Chk Jasdar, S.H., M.H.
6.	Training of Tutor dan Training of Mentor Pelatihan IV PPC Terpadu Peradilan Militer Angkatan IV	31 Mei s.d 20 November 2023	1. Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H. 2. Letkol Chk Jasdar, S.H., M.H. 3. Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H.
7.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama TA 2023 dengan tema "Meningkatkan kompetensi SDM Kepaniteraan Peradilan Militer di bidang administrasi dan persidangan perkara secara elektronik guna percepatan penyelesaian perkara"	20 s.d 22 Juni 2023	Peltu Nurman, S.H.
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer Seluruh Indonesia	1 s.d 12 Agustus 2023	1. Kapten Ayik Triandi Asmara, S.H. 2. Peltu Nurman, S.H.
9.	Bimbingan Teknis Hakim Militer TA 2023	6 s.d 8 Agustus 2023	1. Mayor Chk Farid Iskandar, S.H., M.H. 2. Mayor Kum Anna Murdoko, S.H.
10.	Seleksi Tahap II <i>Profile Assessment</i> Cakimmil TA 2023	18 s.d 21 September 2023	Kapten Kum Andi Dala Uleng, S.H.
11.	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama TA 2023 dengan tema "Meningkatkan Kompetensi Panitera dan PP di dalam Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dengan Memegang Teguh Kode Etik"	20 s.d 22 September 2023	1. Peltu Nurman, S.H. 2. Pelda Rustan, S.H., M.H.
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia	6 s.d 18 November 2023	Letkol Chk Jasdar, S.H., M.H.
13.	Seleksi Seskoau A-61 TA 2024	12 s.d 17 November 2023	Mayor Kum Anna Murdoko, S.H.
14.	Seleksi tahap III (Akademik dan Wawancara) Cakimmil TA 2023	4 s.d 7 Desember 2023	Kapten Kum Andi Dala Uleng, S.H.

1	2	3	4
15.	Seminar hukum “ <i>Artificial Intelligence</i> dan Pengaruhnya terhadap Sistem Hukum dan Peradilan”	13 s.d 15 Desember 2023	Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H.
DIKLAT NON TEKNIS			
1	Kegiatan Sertifikasi Bendahara melalui https://simaspaten.kemenkeu.go.id/	Maret 2023	-Nasriani -Ketut Gede Wiguna, SIP -Aqifah febriani Muhtar, A.Md.A.B. -Zesar Ria Ajeng Lestari, A.Md.M.
2	Sosialisasi Penggunaan CMS pada Satuan Kerja, Persiapan Migrasi Data Gaji dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023	12 uni 2023	-Sukmawaty Rasjid, S.Sos Aqifah Febriani Muhtar, A.Md. A.B
3	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Gaji Berbasis Web dan Pengajuan SPM Gaji Melalui Aplikasi SAKTI	15 Juni 2023	Nasriani
4	<i>Customer Gathering Logistics Day</i> dalam rangka Sosialisasi dan Edukasi Kustomer untuk menghadirkan industri kurir dan logistik yang lebih	21 Juli 2023	Bagiyo, S.H.
5	Asistensi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023	14 s.d 16 Agustus 2023	1. Serma Riyanto Aqifah Febriani Muhtar, A.Md. A.B
6	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian secara Online dari Tempat Tugas Angkatan 11 Tahun 2023	5 s.d 18 September 2023	Dhanang Sri Anunggita, S.Sos.
7	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan TA 2023	11 s.d 13 Oktober 2023	1. Sukmawaty Rasjid, S.Sos. 2. Serma Riyanto
8	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Tahun 2024	18 Oktober 2023	1. Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H. 2. Kapten Kum Andi Dala Uleng, S.H. 3. Peltu (K) Erna Dwi Astuti
9	Bimbingan Teknis Cash Management System (CMS) bagi satuan kerja pengguna rekening virtual BNI	26 Oktober 2023	1. Sukmawaty Rasjid, S.Sos 2. Aqifah Febriani Muhtar, A.Md. A.B
10	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan, Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun dan Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) dan Sosialisasi Digipay Satu	28 November 2023	1. Bagiyo, S.H. 2. Aqifah Febriani Muhtar, A.Md. A.B
11	Pembinaan disiplin kerja dan peningkatan fisik jasmani Tenaga Satuan Pengamanan Pengadilan Negeri Makassar	Bulan September s.d Desember 2023 (Jumat ke 2 dan 4)	1. Peltu Nurman, S.H. 2. Serma Riyanto 3. Serma Andi Andri Yudha 4. Serka Noris Mbotengu, S.H.

Daftar Diklat Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-17 Manado

NO	BINTEK/SOSIALISASI	NO. SURAT	PESERTA
1	Bimtek Hakim Militer Tahun Anggaran 2023.	Dirjen Badilmituin MARI Nomor : 275/DjMT.2/B/PP.00.1/II/2023	Mayor Laut (H) Ruslan, S.H
2	Bimtek Hakim Militer Tahun Anggaran 2023.	Surat Perintah Kadilmilti III Surabaya Nomor : W3-Mil/26/Sprin/II/2023	Mayor Laut (H) Ruslan, S.H
3	Bimtek Paniteran / Panitera Pengganti Tahun Anggaran 2023.	Surat Perintah Dirjenbadilmiltun MA RI Nomor : 287/DjMT.2/B/PP.00.2/I/2023	Kapten Chk Procleo Franz Simamora, S.H
4	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter Tahun Anggaran 2023	Surat Dirjenbadilmiltun MA RI Nomor : 339/DjMT/PP 00.1/II/2023	Kolonel Laut (H) Amriandie, S.H., M.H.,
5	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter Tahun Anggaran 2023	Surat Dirjenbadilmiltun MA RI Nomor : 339/DjMT/PP 00.1/II/2023	Mayor Laut (H) Ruslan, S.H.,
6	Pelatihan Teknis Yudisial Penerapan Pleno Kamar	Surat Badiklatkumdil MARI Nomor : 300/Bld.3/Dik/S/2/2023	Mayor Laut (H) Ruslan, S.H.,
7	Bimtek Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer	Surat Dirjenbadilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor : 868/DjMT.2/B/PP.001/V/2023	Kapten Chk Soniardhi, S.H., M.H.,
8	Bimtek Kesetaraan Gender Bagi Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan militer	Surat Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor : 868/DjMT.2/B/PP.001/V/2023	Kapten Chk Niko Yoga Satria, S.ST.Han., S.I.P., S.H., M.H.,
9	Peserta Bimtek Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer	Surat Dirjenbadilmiltun MA RI Nomor : 1360/DjMT.2/B/PP.00.2/VII/2023	Kapten Chk Procleo Franz Simamora, S.H
10	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Surat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Nomor :1304/Bld.3/Dik/S/7/2023	Lettu Chk Zulkarnain, S.H
11	Bimtek Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun Anggaran 2023.	Surat Dirjenbadilmiltun MA RI Nomor : 1674/DJMT.2/DL1/IX/2023	Sertu Rodi Salmon
12	Bimtek Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun Anggaran 2023.	Surat Direktur Dirjenbadilmiltun MA RI Nomor : 1674/DJMT.2/DL1/IX/2023	PPNPN Ervina Damima PPNPN Ahmad Mahadjani, S.H PPNPN Febrina Mato, S.H., M.H
13	Bimbingan Teknis Bidang Kesekretariatan.	Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 3/KPMT.W3.MIL/DL1.10/IX/202	ASN Dharmawati Rahayu, S.E., M.E

14	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilu Peradilan Militer	Surat Dirjenbadilmiltun MA RI Nomor : 1803/DJMT/B/DL1/IX/2023	Mayor Chk Patta Imang, S.H
15	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilu Peradilan Militer	Surat Dirjenbadilmiltun MA RI Nomor : 1803/DJMT/B/DL1/IX/2023	Mayor Laut (H) Ruslan, S.H.,
16	Pelatihan Pimpinan Pengadilan dan Pelatihan Kehumasan Pengadilan Tahun 2023	Surat Dirjenbadilmiltun MA RI Nomor : 1802/DJMT/B/DL1/IX/2023	Mayor Chk Patta Imang, S.H.,
17	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Tata Naskah Dinas Guna Tertib Administrasi di Jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun Anggaran 2023.	Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 5/KPMTW3.Mil/DL.1.10/X/2023	ASN Dharmawati Rahayu, S.E., M.E.,
18	Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM (Tenaga Tehnis Kepaniteraan) di Lingkungan Peradilan Militer TA 2023	Surat Dirjenbadilmiltun MA RI Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 1815/DJMT.2/PP.00.2/IX/2023	Letda Chk M. Sopian Dalimunthe, S.H.,
19	Peserta Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Tata Naskah Dinas Guna Tertib Administrasi di Jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun Anggaran 2023	Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 6/KPMT/W3.Mil/DL.1.10/X/2023	ASN Muhammad Vijay Mahendra, S.E
20	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indones	Surat Dirjenbadilmiltun MA RI Nomor : 1616/Bld.3/Dik/S/10/2023	Mayor Laut (H) Ruslan, S.H.,
21	Rapat Koordinasi Bendahara Pengeluaran Batch Keenam.	Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1678/BUA.3/UND.KU.1.1/XII/2023	ASN Dharmawati Rahayu, S.E., M.E.,

Daftar Diklat Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-18 Ambon

No	Bimtek/Diklat/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	Pembinaan dan Pengarahan oleh Kadilmiltama	Pengadilan Militer Utama	Jakarta / 11 s.d. 15 Januari 2023	Mayor Chk Dani Subroto, S.H., M.H.
2	Pelatihan Penulisan Putusan Bagi Hakim	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Bogor / 20 s.d 24 Februari 2023	Mayor Chk Samsul Hadi, S.H., M.H.
3	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Terorisme	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Bogor/ 27 Februari s.d. 4 Maret 2023	Mayor Chk Samsul Hadi, S.H., M.H.
4	Pelatihan Teknis Yudisial Penerapan Pleno Kamar dalam Pembuatan Putusan dan	Pengadilan Militer II-10 Semarang	Medan / 13 s.d. 17 Maret 2023	- Kolonel Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H. - Letkol Chk Joko Trianto, S.H.,

	Problematika Penyelesaian Perkara Koneksitas			M.H.
5	Pelatihan Pemantapan KEPPH	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Bogor / 13 s.d. 18 Maret 2023	Mayor Chk Samsul Hadi, S.H., M.H.
6	Pelatihan E-Learning Bendahara Penerimaan	Kementrian Keuangan RI	Ambon / 6 s.d. 13 Maret 2023	Muhammad Adib Hadriansyah, S.E.
7	Pelatihan Susjabkimmil TNI XXX TA 2023	Kodiklat TNI	Jakarta / 10 Mei 2023 s.d. 4 Agustus 2023	Mayor Chk Samsul Hadi, S.H., M.H.
8	Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) wilayah hukum Jawa Timur	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Ambon, 10 Mei 2023	- Mayor Chk Purwadi, S.H., M.H. - Lettu Chk Juspindeli Girsang, S.H.
9	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer dengan tema Kesetaraan Gender bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer MA RI	Ambon, 24 s.d. 26 Mei 2023	Mayor Chk Purwadi, S.H., M.H.
10	Pembinaan dan Pengarahan oleh Kadilmiltama	Dilmiltama	Madiun, 29 s.d. 31 Mei 2023	Kolonel Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.
11	Penyusunan dan Pendampingan RKA-K/L Pagu Indikatif T.A 2024	Badan Urusan Administrasi MARI	Ambon, 8 Juni 2023	-Rachel A. Patty, S.H. -Stany Raprap, S.H.
12	Sosialisasi Pagu Indikatif serta Petunjuk Teknis Penyusunan RKA dan Pertanggungjawaban DIPA 05 TA. 2024	Ditjen Badilmiltun MARI	Ambon, 23 Juni 2023	-Hendri D. Muskitta, S,H -Rachel A. Patty, S.H. - Rina.D.J.Wattimuri, S.H.,M.H
13	Pelatihan Perbendaharaan bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (KDLI)	Kementerian Keuangan RI	Ambon, 12 s.d. 14 Juni 2023	- Stany Raprap, S.H. - Nova Prihastuti, S.H.

14	Sosialisasi tentang Peran Jaksa Bidang Pidana Militer dalam Perkara Koneksitas pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.	Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Asisten Bidang Pidana Militer	Ambon, 06 Juli 2023 pukul 08.00 WIT	- Mayor Laut (H) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla. - ASN Dicky Dharma Saputra, A.Md.Ak.
15	Kegiatan Babak Kualifikasi PON XXI Tahun 2023 cabang olahraga Selam sebagai Manager Tim Selam Bali	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Jakarta, 17 s.d. 23 Juli 2023	Mayor Laut (H) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla
16	Forum Group Discussion (FGD) dalam Rangka Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 MA RI,	Mahkamah Agung RI	Bali, 08 s.d. 10 Agustus 2023	- Kolonel Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H. - Lettu Chk Juspindeli Girsang, S.H., - ASN Hendri D. Muskitta, S.H.
17	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Bogor, 01 s.d. 04 Agustus 2023	Letda Chk Riska Dori, S.H.
18	Bimtek Panitera/Panitera Pengganti	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer MA RI	Ambon, 02 s.d. 04 Agustus 2023	Lettu Chk Juspindeli Girsang, S.H.
19	Penyusunan RBPP dan RBPMP Pelatihan Tindak Pidana Pemilu	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Jakarta, 21 s.d. 24 Agustus 2023	Mayor Chk Samsul Hadi, S.H., M.H.
20	Bimtek Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer MA RI	Ambon, 06 s.d. 08 September 2023	Mayor Chk Purwadi, S.h., M.H.
21	Bimtek Petugas PTSP di Lingkungan Peradilan Militer TA 2023	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer MA RI	Ambon, 06 s.d. 08 September 2023	- PPNPN Muhammad Alpisal, - PPNPN Ratna Fairus, S.Kom., - PPNPN Ulfi Tehuayo, S.Pi.

22	Persiapan Pelaksanaan Penyusunan RKAK-KL Pagu Alokasi TA. 2024	Badan Urusan Administrasi MARI	Ambon, 18 September 2023	- Rachel A. Patty, S.H. - Stany Raprapp, S.H.
23	Rapat Koordinasi dan Konsultasi oleh Ketua Mahkamah Agung RI,	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Bogor, 20 s.d. 23 September 2023	- Mayor Chk Dani Subroto, S.H., M.H. - ASN Hendri Dunan Muskitta, S.H.
24	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama TA 2023	Pengadilan Militer Utama	Ambon, 20 s.d. 22 September 2023	Mayor Chk Dani Subroto, S.H., M.H.
25	Rapat Koordinasi Kesekretariatan	Dirjen Badilmiltun MA RI,	Yogyakarta, 25 s.d. 27 September 2023	ASN Hendri Dunan Muskitta, S.H.
26	Pengawasan dan Pengamatan terhadap para Terdakwa yang perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim Dilmil III-18 Ambon,	Pengadilan Militer III-18 Ambon	Lemasmil IV Makasar, 25 s.d. 27 September 2023	- Mayor Chk Purwadi, S.h., M.H. - Lettu Chk Juspindeli Girsang, S.H.
27	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara dan Tata Naskah Dinas	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Kab. Mojokerto, 11 s.d. 13 Oktober 2023	- ASN Rina Deby J. Wattimury, S.H., M.H. - ASN Stany Raprapp, S.H.
28	Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Tenaga Teknis Kepaniteraan	Ditjen Badilmiltun	Kuta, Bali, 18 s.d. 20 Oktober 2023	- Lettu Chk Juspindeli Girsang, S.H. - Letda Chk Syaiful Adhi B., S.H.
29	Rakernas Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI)	Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI)	Jakarta, 17 s.d. 22 Oktober 2023	Letkol Laut (H) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
30	Pelatihan E-Learning Bendahara Penerimaan	Kementrian Keuangan RI	Ambon / 30 Oktober s.d. 06 November 2023	ASN Arfyan Wigga Juladha, S.H.
31	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Tk Pertama Peradilan Militer	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	Bogor, 12 s.d. 18 November 2023	- Letkol Chk Joko Trianto, S.H., M.H. - Letkol laut (H) Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.,

				M.Tr.Opsla. - Mayor Chk Samsul Hadi, S.H., M.H.
--	--	--	--	--

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan keuangan negara, pengelola keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kasub Keuangan dan Pelaporan, namun secara khusus telah dibentuk pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggung jawab kegiatan yang dijabat oleh Kasub Rencana Program dan Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM/ Penguji SPD yang dijabat oleh Kasub keuangan dan pelaporan, Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerima, serta staf Pengelola Keuangan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam Tahun anggaran 2023 sesuai DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah mencairkan dana sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

a. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) awal nomor : SP DIPA-005.01.2.663300/2023 tanggal 17 November 2022 sebesar Rp. 8.580.423.000,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dan telah mengalami revisi sebanyak 8 kali dengan perubahan jumlah menjadi sebesar Rp. 9.242.642.000,- (*Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*), terdiri dari: Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 9.032.642.000,- (*Sembilan Milyar Tiga Puluh Dua Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri dari:

- 1) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi, terdiri dari:
 - a) Layanan Umum (Bimtek) sebesar Rp. 104,868,000,- (*Seratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - b) Layanan perkantoran (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 6,334,945,000,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - c) Layanan Umum (operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp. 2,592,829,000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI (layanan sarana dan prasarana internal) sebesar Rp. 210,000,000,- (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*), terdiri dari:

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Presentase (%)
Pagu	Rp. 9.242.642.000,-	100 %
Realisasi	Rp. 8,924,686,299 ,-	96.56 %
Sisa	Rp. 316,515,701 ,-	3.44 %

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 96.56 %.

b) DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI) nomor : DIPA-SP DIPA- 005.05.2.663301/2023 tanggal 17 November 2022 sebesar Rp. 440.199.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan mengalami revisi sebanyak 5 kali tanpa ada perubahan besaran pagu, yang terdiri dari:

- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, sebesar Rp. 440.199.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri dari:

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Presentase (%)
Pagu	Rp. 440.199.000,-	100 %
Realisasi	Rp. 434,538,351,-	98,71 %
Sisa	Rp. 5,660,649,-	1,29 %

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 98,71 %

2. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya**a) DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)**

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA- 005.01.2.663314/2023 tanggal 30 November 2022. Sepanjang tahun 2020, DIPA 01 mengalami dua kali revisi, yaitu revisi pada pagu belanjapegawai dan belanja barang.

Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 sebesar Rp. 4.541.016.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Belas Rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp. 4.541.016.000 (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Belas Ribu Rupiah). Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel Revisi DIPA 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama 17 April 2023	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 511121 (Penyesuaian harga satuan)	28.060.000	46.526.000	18.466.000
	Belanja Tunjangan Anak PNS 511122 (Penyesuaian harga satuan)	9.233.000	12.426.000	3.193.000
	Belanja Tunjangan PPh PNS 511125 (Penyesuaian harga satuan)	420.429.000	383.690.000	(36.739.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pergeseran anggaran dalam POK)	2.761.360.000	2.776.440.000	15.080.000
	Belanja Keperluan Perkantoran 521111 (Penambahan akun Langganan Air Minum)	715.593.000	718.593.000	3.000.000
	Belanja Barang Operasional Lainnya 521119 (Pergeseran Anggaran Penyemprotan Disinfektan)	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)
	Revisi Kedua 19 Juni 2023	Belanja Tunjangan Fungsional PNS 511124 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	6.615.167.000	4.615.167.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)		16.000.000	16.960.000	960.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pergeseran Anggaran dalam POK)	1.500.000	540.000	(960.000)

Revisi Ketiga 12 Juli 2023	Belanja Tunjangan Fungsional PNS 511124 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	131.080.000	128.980.000	(2.100.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pergeseran anggaran dalam POK)	2.776.440.000	2.778.540.000	2.100.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	18.000.000	10.500.000	(7.500.000)
	Belanja Langganan Telepon 522112 (Pergeseran anggaran dalam POK)	12.000.000	4.500.000	(7.500.000)
	Belanja Langganan Air 522113 (Pergeseran anggaran dalam POK)	6.000.000	6.150.000	150.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	16.960.000	31.810.000	14.850.000
	Revisi Keempat 23 Oktober 2023	Belanja Gaji Pokok PNS 511111 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	631.640.000	536.686.000
Belanja Tunjangan Struktural PNS (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)		40.320.000	36.000.000	(4.320.000)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS 511124 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)		128.980.000	3.000	(128.977.000)
Belanja Tunjangan PPh PNS 511125 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)		383.690.000	567.000	(383.123.000)
Belanja Uang Makan PNS 511129 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)		224.664.000	104.200.000	(120.464.000)
Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)		2.778.540.000	1.993.461.000	(785.079.000)

	Belanja Tunjangan PPh TNI 511225 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	309.736.000	264.088.000	(45.648.000)
	Belanja Keperluan Perkantoran 521111 (Penambahan Pagu Langganan Air Minum dari Pergeseran Anggaran dalam POK)	718.593.000	721.061.000	2.468.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	10.500.000	7.920.000	(2.580.000)
	Belanja Langganan Telepon 522112 (Pergeseran anggaran dalam POK)	4.500.000	1.080.000	(3.420.000)
	Belanja Langganan Air 522113 (Pergeseran anggaran dalam POK)	6.150.000	7.800.000	1.650.000
	Belanja Sewa 522141 (Penambahan Pagu Sewa Rumah Hakim dari Pergeseran Anggaran dalam POK)	164.520.000	173.160.000	8.640.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121 (Pergeseran anggaran dalam POK)	165.303.000	155.641.000	(9.662.000)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	31.810.000	34.714.000	2.904.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 (Penambahan Anggaran / ABT)	0	40.000.000	40.000.000
Revisi Kelima 06 Desember 2023	Belanja Tunjangan PPh PNS 511125 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	567.000	677.000	110.000
	Belanja Uang Makan PNS 511129 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	104.200.000	104.090.000	(110.000)
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	60.440.000	60.080.000	(360.000)
	Belanja Langganan Air 522113 (Pergeseran anggaran dalam POK)	7.800.000	8.160.000	360.000

Anggaran dalam DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rincian masing-masing pagu belanja dalam DIPA 01 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 3.052.602.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.448.414.000
53	Belanja Modal	Rp. 40.000.000
Jumlah		Rp. 4.541.016.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2023 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 171.127.954	Rp. 55.044.670	Rp. 0
Februari	Rp. 161.226.478	Rp. 98.295.967	Rp. 0
Maret	Rp. 156.876.775	Rp. 76.857.687	Rp. 0
April	Rp. 629.674.543	Rp. 143.708.020	Rp. 0
Mei	Rp. 155.753.271	Rp. 121.954.068	Rp. 0
Juni	Rp. 399.064.927	Rp. 84.665.444	Rp. 0
Juli	Rp. 216.716.245	Rp. 142.058.671	Rp. 0
Agustus	Rp. 200.741.345	Rp. 270.402.236	Rp. 0
September	Rp. 254.750.095	Rp. 73.928.952	Rp. 0
Oktober	Rp. 218.174.683	Rp. 132.650.424	Rp. 0
November	Rp. 218.310.683	Rp. 83.232.039	Rp. 39.985.000
Desember	Rp. 194.613.924	Rp. 155.416.412	Rp. 0
Jumlah	Rp. 2.977.030.923	Rp. 1.438.214.590	Rp. 39.985.000

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.541.016.000	100
Realisasi	Rp. 4.455.230.513	98,11
Sisa	Rp. 85.785.487	1,89

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 98.11%.

b) DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2023 tanggal 30 November 2022. Sepanjang tahun 2023, Setelah dilakukan revisi, pagu anggaran akhir menjadi Rp.176.850.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dari DIPA 05 tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 179.850.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah:

Tabel Revisi DIPA 05

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama 12 Juli 2023	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Pembelian ATK Perkara)	16.000.000	22.350.000	6.350.000
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Makan Persidangan di Luar Jam Dinas)	27.720.000	32.760.000	5.040.000
	Belanja Jasa Profesi 522151 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	11.430.000	5.080.000	(6.350.000)
	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	37.280.000	32.240.000	(5.040.000)

Revisi Kedua 13 September 2023	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pengembalian Anggaran ke Eselon I)	32.240.000	29.240.000	(3.000.000)
Revisi Ketiga 07 Oktober 2023	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Tingkat Pertama)	12.000.000	15.270.000	3.270.000
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Pembelian ATK Perkara)	22.350.000	25.620.000	3.270.000
	Belanja Jasa Profesi 522151 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	5.080.000	1.270.000	(3.810.000)
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Upaya Hukum)	12.000.000	15.270.000	3.270.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	29.240.000	23.240.000	(6.000.000)

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	Belanja Barang Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 4.977.250	Rp. 0
Februari	Rp. 10.588.000	Rp. 0
Maret	Rp. 5.240.000	Rp. 20.180.000
April	Rp. 0	Rp. 0
Mei	Rp. 9.582.900	Rp. 0
Juni	Rp. 5.990.500	Rp. 0
Juli	Rp. 9.726.000	Rp. 20.180.000
Agustus	Rp. 9.917.250	Rp. 0
September	Rp. 10.883.150	Rp. 0
Oktober	Rp. 10.085.550	Rp. 20.180.000
November	Rp. 9.839.800	Rp. 0
Desember	Rp. 17.670.540	Rp. 0
Jumlah	Rp. 104.500.940	Rp. 60.540.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 176.850.000	100%
Realisasi	Rp. 165.040.940	93,32%
Sisa	Rp. 11.809.060	6,68%

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 tahun 2023 sebesar 93.32%

3. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-13 Madiun

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

1. DIPA 01 (663321)

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.3.328.376.920,- atau mencapai 98.69% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.372.486.000,-

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	3.372.486.000	3.328.376.920	98.69	44.109.080

2. DIPA 05 (663322)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.59.123.000,- atau mencapai 97.17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.60.845.000,-

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	60.845.000	59.123.000	97.17 %	1.722.000

4. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar

1. DIPA dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663335/2023 tanggal 30 November 2022. Sepanjang tahun 2023, DIPA 01 ini mengalami 7 (tujuh) kali revisi, yaitu :

1. Revisi pertama yaitu revisi halaman III DIPA. Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
2. Revisi kedua yaitu revisi pagu anggaran, pergeseran antar Akun belanja pegawai dan belanja barang dengan pagu awal sejumlah Rp. 4.507.126.000,- (empat milyar lima ratus tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah). Revisi pagu ini disebabkan adanya pengurangan pagu anggaran pada belanja pegawai pada Gaji dan tunjangan dan penambahan dan pengurangan pagu anggaran pada belanja barang.
3. Revisi ketiga yaitu revisi pagu anggaran dengan pagu sejumlah Rp. 4.552.486.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Revisi pergeseran antar akun pada belanja Operasional dan Pemeliharaan kantor.
4. Revisi keempat yaitu Revisi Pagu Anggaran pergeseran antar akun pada belanja Operasional dan Pemeliharaan kantor dan Revisi Hal III DIPA dengan pagu sejumlah Rp. 4.665.786.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
5. Revisi kelima yaitu Revisi Pagu Anggaran pergeseran/penarikan antar akun pada belanja Pegawai, belanja operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan pagu sejumlah Rp. 4.384.491.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
6. Revisi keenam yaitu Revisi POK dan hal III DIPA dengan tidak merubah jumlah pagu.
7. Revisi ketujuh yaitu Revisi POK dan Hal III DIPA dengan tidak merubah jumlah pagu.

Setelah melalui 7 (tujuh) kali revisi, maka DIPA 01 Pengadilan Militer III-14 Denpasar di tahun 2023 menjadi sejumlah Rp. 4.384.491.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal digunakan untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah nilai aset. Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel di bawah :

Tabel Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.777.636.000,-
52	Belanja barang & non	Rp. 1.407.805.000,-
53	Operasional	Rp. 367.045.000,-
Jumlah		Rp 4.552.486.000,-

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 yang terealisasi sepanjang tahun 2023 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 163.914.309,-	Rp. 43.495.166,-	Rp. 0,-
Februari	Rp. 196.803.375,-	Rp. 133.330.165,-	Rp. 0,-
Maret	Rp. 184.044.887,-	Rp. 99.881.593,-	Rp. 314.400.000
April	Rp. 373.657.993,-	Rp. 114.602.175,-	Rp. -
Mei	Rp. 196.782.648,-	Rp. 109.124.666,-	Rp. 0,-
Juni	Rp. 305.715.062,-	Rp. 111.860.156,-	Rp. 41.814.000,-
Juli	Rp. 139.729.511,-	Rp. 119.350.439,-	Rp. 0,-
Agustus	Rp. 140.619.561,-	Rp. 106.977.229,-	Rp. 0,-
September	Rp. 163.878.986,-	Rp. 137.744.414,-	Rp. 0,-
Oktober	Rp. 183.210.837,-	Rp. 127.802.814,-	Rp. 0,-
November	Rp. 184.163.837,-	Rp. 123.949.691,-	Rp. 171.814.680,-
Desember	Rp. 177.369.119,-	Rp. 124.077.099,-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 2.409.520.125,-	Rp. 1.402.359.452,	Rp. 528.028.680,-

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.384.491.000,-	100
Realisasi	Rp. 4.345.080.257,-	99,10
Sisa	Rp. 39.410.743,-	0,90

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 99,10 %

2. DIPA dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA- 005.05.2.663336/2023 tanggal 30 November 2022. Sepanjang tahun 2023, DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi untuk Perubahan Halaman III DIPA.

Dari DIPA 05 di tahun 2023, Pengadilan Militer III-14 Denpasar mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 78.165.000,- (Tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Realisasi DIPA Dirjen pada sidang diluar gedung bulan April 2023 sebesar Rp 29.389.200,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan pada bulan Juli 2023 sebesar Rp. 26.055.600,- (dua puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah). Sehingga realisasi pagu pada akhir tahun 2023 sebesar Rp. 55.444.800,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	
	Belanja Barang Persediaan dan Jasa Pos	Belanja Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Februari	Rp. 2.882.100,-	Rp. 0,-
Maret	Rp. 2.809.250,-	Rp. 0,-
April	Rp. 936.000,-	Rp. 29.389.200,-
Mei	Rp. 2.215.250,-	Rp. 0,-
Juni	Rp. 1.826.500,-	Rp. 0,-
Juli	Rp. 2.868.000,-	Rp. 26.055.600,-
Agustus	Rp. 3.798.700,-	Rp. 0,-
September	Rp. 1.946.600,-	Rp. 0,-
Oktober	Rp. 822.000,-	Rp. 0,-
November	Rp. 1.725.000,-	Rp. 0,-
Desember	Rp. 885.600,-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 22.715.000,-	Rp. 55.444.800,-

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 78.165.000,-	100
Realisasi	Rp. 78.159.800,-	99,99
Sisa	Rp. 5.200,-	0,01

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 99,99 %

3. Keuangan dari Perkara

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-14 Denpasar.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2023 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah Biaya Perkara dan denda

No	Kategori Perkara	Jumlah
1.	Kejahatan	Rp. 245.000,-
2.	Pelanggaran	Rp. 3.570.000,-
3.	Denda Kejahatan	Rp. 50.000.000,-
4.	Denda Pelanggaran	Rp. 2.417.500,-
Jumlah total		Rp. 56.232.500,-

5. Pengelolaan keuangan Dilmil III-15 Kupang.

- DIPA 01

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) Nomor : SP DIPA-005.01.2.663342/2023 tanggal 30 November 2022 telah dilakukan revisi sebanyak 7 (tujuh) kali, terdiri dari :

1. Program Dukungan Manajemen :

AKUN	URAIAN	PAGU REVISI	REALISASI	SISA ANGGARAN	PROSENTASE
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA		3.440.068.000	3.383.049.626	57.018.374	98.34%
WA Program Dukungan Manajemen		3.440.068.000	2.859.649.626	57.018.374	98.05%
WA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		2.916.393.000	2761.760.876	56.743.374	98.05%
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		2.916.393.000	2.859.649.626	56.743.374	98.05%
EBA.962 Layanan Umum		4.629.000	4.627.000	2.000	99.96%
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah		4.629.000	4.627.000	2.000	99.96%
051.0A	Inventaris Perkantoran CPNS	3.704.000	3.702.000	2.000	99.95%
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	3.704.000	3.702.000	2.000	99.95%
051.0B	Pengadaan Barang Pendukung Disabilitas	925.000	925.000	0	100.00%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILT I III SURABAYA TAHUN 2023

AKUN	URAIAN	PAGU REVISI	REALISASI	SISA ANGGARAN	PROSENTASE
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	925.000	925.000	0	100.00%
EBA 994	Layanan Perkantoran	2.911.764.000	2.855.022.626	5.6741.374	98.05%
001	Gaji dan Tunjangan	1.747.572.000	1.705.164.783	42.407.217	97.57%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	329.611.000	329.609.960	1.040	100.00%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.000	6.569	1.431	82.11%
511121	Belanja Tunj. Suami/isteri PNS	17.479.000	17.476.878	2.122	99.99%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4.396.000	4.394.186	1.814	99.96%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	34.480.000	34.480.000	0	100.00%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	546.000	543.250	2.750	99.50%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	17.236.000	17.235.960	40	100.00%
511129	Belanja Uang Makan PNS	72.668.000	64.129.000	8.539.000	88.25%
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12.740.000	12.740.000	0	100.00%
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	78.300.000	78.300.000	0	100.00%
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/Polri	1.038.929.000	1.022.820.000	16.109.000	98.45%
511225	Belanja Tunj. PPh/POLRI	141.179.000	123.428.980	17.750.020	87.43%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.164.192.000	1.149.857.843	14.334.157	98.77%
002.0A	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	387.628.000	387.587.400	40.600	99.99%

521111	Belanja Keperluan Perkantoran	363.628.000	363.589.750	38.250	99.99%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24.000.000	23.997.650	2.350	99.99%
002.0B	Langganan Daya dan Jasa	192.056.000	190.956.168	1.099.832	99.43%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	156.982.000	156.333.818	648.182	99.59%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.004.000	13.881.000	123.000	99.12%
522112	Belanja Langganan Telepon	3.060.000	2.731.350	328.650	89.26%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTII III SURABAYA TAHUN 2023

AKUN	URAIAN	PAGU REVISI	REALISASI	SISA ANGGARAN	PROSENTASE
522113	Belanja Langganan Air	12.960.000	12.960.000	0	100.00%
522141	Belanja Sewa	5.050.000	5.050.000	0	100.00%
002.0C Pemeliharaan Gedung dan Halaman		151.400.000	151.395.050	4.950	100.00%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	151.400.000	151.395.050	4.950	100.00%
002.0D Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		157.565.000	157.498.950	66.050	99.96%
53121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157.565.000	157.498.950	66.050	99.96%
002.0E Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor		101,934,000	89,370,000	12,564,000	87.67%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	24,018,000	24,018,000	0	100.00%
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	77,916,000	65,352,000	12,564,000	83.87%
002.0F Koordinasi		14.144.000	14.000.467	143.533	98.99%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.144.000	14.000.467	143.533	98.99%
002.0G Konsultasi		36.465.000	36.049.808	415.192	98.86%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.465.000	36.049.808	415.192	98.86%
002.0H Perjadin ke KPPN dan Kanwil		2.040.000	2.040.000	0	100.00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.040.000	2.040.000	0	100.00%
002.0I Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc		120.960.000	120.960.000	0	100.00%
522141	Belanja Sewa	120.960.000	120.960.000	0	100.00%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTII III SURABAYA TAHUN 2023

WA.1071 PENGADAAN SARANA PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI		526.675.000	523.400.000	275.000	99.95%
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		526.675.000	523.400.000	275.000	99.95%
EBB.951 Layanan Sarana Internal		443.525.000	443.250.000	275.000	99.94%
051	Pengadaan kendaraan bermotor	385.025.000	384.750.000	275.000	99.93%
051.0A Pengadaan Kendaraan Dinas		385.025.000	384.750.000	275.000	99.93%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	385.025.000	384.750.000	275.000	99.93%
AKUN	URAIAN	PAGU REVISI	REALISASI	SISA ANGGARAN	PROSENTASE
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	54.000.000	54.000.000	0	100.00%
52.0A Pengolah Data		54.000.000	54.000.000	0	100.00%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.000.000	54.000.000	0	100.00%
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4.500.000	4.500.000	0	100.00%
053.0A	Pengadaan Sarana Pendukung Disabilitas	4.500.000	4.500.000	0	100.00%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000	4.500.000	0	100.00%
EBB.971 Layanan Prasarana Internal		80.150.000	80.150.000	0	100.00%
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	80.150.000	80.150.000	0	100.00%
051.0A	Pengadaan Prasarana Pendukung Disabilitas	80.150.000	80.150.000	0	100.00%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	80.150.000	80.150.000	0	100.00%

- DIPA 05

DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI) Nomor : SP DIPA-005.05.2.663343/2023 tanggal 30 November 2022, telah dilakukan revisi sebanyak 4 (empat) kali, yang terdiri dari:

AKUN	URAIAN	PAGU REVISI	REALISASI	SISA ANGGARAN	PROSENTASE
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA		86.167.000	85.437.000	730.000	99.15%
BF. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		86.167.000	85.437.000	730.000	99.15%
BF.1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		86.167.000	85.437.000	730.000	99.15%
BCA Perkara Hukum Perseorangan		22.155.000	21.425.000	730.000	96.71%
BCA.U03 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III – 18		22.155.000	21.425.000	730.000	96.71%
051 Pendaftaran Berkas Perkara		11.940.000	11.879.350	60.650	99.49%
051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	11.940.000	11.879.350	60.650	99.49%
521211	Belanja Bahan	2.260.000	2.258.350	1.650	99.93%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9.680.000	9.621.000	59.000	99.39%
052 Penetapan Hari Sidang		270.000	101.000	169.000	37.41%
052.0A	TANPA SUB KOMPONEN	270.000	101.000	169.000	37.41%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	120.000	101.000	19.000	84.17%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILT I III SURABAYA TAHUN 2023

524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000	0.00%
053 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan		6.060.000	5.839.900	220.100	96.37%
053.0A	TANPA SUB KOMPONEN	6.060.000	5.839.900	220.100	96.37%
521211	Belanja Bahan	5.580.000	5.839.900	10.100	99.83%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.000	0	210.000	0.00%
054 Minutasi/Upaya Hukum		2.505.000	2.495.750	9.250	99.63%
54.0A	TANPA SUB KOMPONEN	2.505.000	2.495.750	9.250	99.63%
521211	Belanja Bahan	2.505.000	2.495.750	9.250	99.63%
055 Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara		1.380.000	1.109.000	271.000	80.36%
055.0A	TANPA SUB KOMPONEN	1.380.000	1.109.000	271.000	80.36%
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.380.000	1.109.000	271.000	80.36%
QCA Perkara Hukum Perseorangan		64.012.000	64.012.000	0	100.00%
QCA.001	Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	64.012.000	64.012.000	0	100.00%
051 Sidang di Luar Gedung Pengadilan		64.012.000	64.012.000	0	100.00%

6. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-16 Makassar

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 2 (dua) orang Staf Pengelola Keuangan. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang didasarkan pada Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 63/PA/SK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Adapun Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Petugas pengelola Anggaran Belanja pegawai (PPABP) dan Petugas Pengantar SPM & Pengambil SP2D di Pengadilan Militer III-16 Makassar ditunjuk

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor W3.Mil05/71/KEP/IV/2023 tanggal 5 Juni 2023. Sedangkan penunjukan Bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerimaan Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor W3.Mil05/71/KEP/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2023, Pengadilan Militer III-16 Makassar didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

Pada DIPA 01 telah dilakukan revisi sebanyak 5 (lima) kali seiring dengan perubahan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. Adapun rincian revisi DIPA 01 yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dapat dilihat dengan tabel berikut:

Tabel Revisi DIPA 01 Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tanggal	Pegawai (Rp)	Barang (Rp)	Modal (Rp)	Jumlah (Rp)
1	DIPA awal	30-11-2022	3.313.297.000	1.203.901.000	25.650.000	4.542.848.000
2	Revisi 1	13-02-2023	3.313.297.000	1.203.901.000	25.650.000	4.542.848.000
3	Revisi 2	14-04-2023	3.313.297.000	1.203.901.000	25.650.000	4.542.848.000
4	Revisi 3	01-09-2023	3.313.297.000	1.203.901.000	97.800.000	4.614.998.000
5	Revisi 4	23-10-2023	2.563.964.000	1.233.901.000	101.652.000	3.899.517.000
6	Revisi 5	03-11-2023	2.563.964.000	1.233.901.000	101.652.000	3.899.517.000

1. Revisi Ke-1 Tanggal 13 Pebruari 2023 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
2. Revisi ke-2 tanggal 14 April 2023 tentang POK yaitu pergeseran antar akun belanja barang, Revisi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang serta tidak merubah Pagu Anggaran.
3. Revisi ke-3 tanggal 1 September 2023 mendapatkan tambahan belanja modal pembelian sarana fasilitas perkantoran sebesar Rp 72.150.000,00 dari Biro Renog MA semula sebesar Rp 25.650.000,00 untuk pembuatan jalur disabilitas dan pembelian kursi roda & alat bantu dengar sehingga jumlah belanja modal Rp 97.800.000,00.
4. Revisi ke-4 tanggal 23 Oktober 2023 tentang pengurangan belanja pegawai sebesar Rp 749.333.000,00 dari pagu sebelumnya Rp. 3.313.297.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp 2.563.964.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Revisi pagu ini dilakukan oleh Biro Renog MA untuk mengambil kelebihan pagu belanja pegawai untuk dialihkan ke Pengadilan lain dan mendapat anggaran tambahan belanja barang sebesar Rp 30.000.000,00 serta belanja

modal sebesar Rp 3.852.000,00 untuk penambahan pembuatan jalur disabilitas.

5. Revisi ke-5 tanggal 3 November 2023 tentang POK yaitu pergeseran antar akun belanja barang, Revisi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang serta tidak merubah Pagu Anggaran.

Setelah melalui 5 (lima) kali revisi, maka DIPA 01 Pengadilan Militer III-16 Makassar di tahun 2023 dari pagu awal sebesar Rp 4.542.848.000 (empat milyar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 3.899.517.000 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah). Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedangkan belanja modal digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.563.964.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.233.901.000
53	Belanja Modal	Rp. 101.652.000
Jumlah		Rp. 4.188.221.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2023 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai (Rp)	Barang (Rp)	Modal (Rp)
Januari	301.710.021	95.771.400	0
Februari	148.024.607	96.933.500	0
Maret	147.405.607	70.175.300	0
April	363.776.492	107.471.800	0
Mei	241.022.471	82.496.246	0
Juni	369.456.928	168.973.103	21.150.000
Juli	175.096.844	147.100.470	0
Agustus	176.081.844	80.785.640	4.500.000
September	138.326.907	63.227.000	72.150.000
Oktober	175.308.707	84.049.696	0
November	142.473.285	89.097.400	0
Desember	6.615.000	127.031.227	3.852.000
Jumlah	2.385.298.714	1.213.112.782	101.652.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Persentase (%)
Pagu	Rp. 3.899.517.000	100
Realisasi	Rp. 3.704.833.495	95.01
Sisa	Rp. 194.683.505	4.99

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi anggaran untuk DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun 2023 sebesar 95.01% atau Rp 3.899.517.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga puluh tiga empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

Penyerapan anggaran hanya sebesar 95.01% dikarenakan terdapat mutasi pegawai dan kelebihan alokasi belanja pegawai sebesar Rp. 178.665.287,00 (seratus tujuh

puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah). Kelebihan alokasi anggaran belanja pegawai terbesar terdapat pada akun belanja uang makan ASN dan belanja tunjangan PPh TNI. Belanja barang yang tidak terserap sebanyak Rp. 16,018,218,00 (enam belas juta delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah) diantaranya pada akun belanja perjalanan dinas dan pengiriman surat dinas.

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA- 005.05.2.663357/2023 tanggal 30 November 2022.

Pada DIPA 05 telah dilakukan revisi sebanyak 3 (tiga) kali seiring dengan perubahan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. Rincian revisi DIPA 05 yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar berikut :

1. Revisi Ke-1 Tanggal 13 Pebruari 2023 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
2. Revisi ke-2 tanggal 14 April 2023 tentang POK yaitu pergeseran antar akun belanja barang, Revisi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang serta tidak merubah Pagu Anggaran.
3. Revisi ke-3 tanggal 24 Oktober 2023 tentang POK yaitu pergeseran antar akun belanja barang, Revisi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang serta tidak merubah Pagu Anggaran.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	
	Belanja Barang Persediaan dan Jasa Pos	Belanja Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 6.895.000	Rp. 0
Februari	Rp. 6.052.100	Rp. 0
Maret	Rp. 9.246.200	Rp. 21.390.000
April	Rp. 3.490.500	Rp. 0
Mei	Rp. 7.372.400	Rp. 0
Juni	Rp. 5.164.500	Rp. 34.152.500
Juli	Rp. 4.897.400	Rp. 0
Agustus	Rp. 3.058.600	Rp. 0
September	Rp. 3.124.000	Rp. 0
Oktober	Rp. 4.203.800	Rp. 34.190.000
November	Rp. 6.673.000	Rp. 0
Desember	Rp. 14.262.500	Rp. 0
Jumlah	Rp. 74.440.000	Rp. 89.732.500

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pagu	164.370.000	100
Realisasi	164.172.500	99,88
Sisa	197.500	0,12

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 99,88% atau sebesar Rp 164.172.500,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

3. KEUANGAN DARI PERKARA

Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara karena pengelolaan biaya perkara dikelola oleh Oditurat Militer.

7. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-17 Manado

DIPA BUA Nomor : 005.01.2.663360/2023 tanggal 30-11-2022 sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai :

Pagu awal	: Rp. 2.579.476.000,- (Dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
Pagu Setelah Revisi	: Rp. 1.747.676.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
Realisasi	: Rp. 1.728.139.952,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah)
Sisa	: Rp. 19.536.048,- (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah)

b. Belanja Barang :

Pagu awal	: Rp. 1.524.671.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
Realisasi	: Rp. 1.521.044.494,- (Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah)
Sisa	: Rp. 3.626.506,- (Tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam rupiah)

c. Belanja Modal :

Pagu awal	: Rp. 458.629.000,- (Empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
Realisasi	: Rp. 456.535.500,- (Empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)
Sisa	: Rp 2.093.500,- (Dua juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

DIPA Dirjen : 005.05.2.663361/2023 tanggal 30-11-2022
sebagai berikut :

- Pagu	: Rp. 132.970.000,- (Seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Realisasi	: Rp. 131.171.637,- (Seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Sisa	: Rp. 1.798.363,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)

8 Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-18 Ambon

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

Tabel Data Pagu dan Realisasi DIPA 01

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Belanja Pegawai	3.534.330.000	2.708.330.000	2.503.873.487	92,45
2	Belanja Barang	1.393.836.000	1.393.836.000	1.323.536.432	94.96
3	Belanja Modal	44.500.000	82.488.000	126.988.000	100
JUMLAH		4.972.154.000	4.229.154.000	3.953.287.823	93.48

Untuk diketahui bersama bahwa dalam Tahun Anggaran 2022 DIPA 01 mengalami revisi tingkat kewenangan esalon-1 dengan (DJA) sebanyak 2 (dua) kali dan revisi pada tingkat kewenangan Satker dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan sebanyak 3 (tiga) kali dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Revisi ke-1, 4.972.666.000 tgl 13-04-2023 (revisi halaman III DIPA)
- b. Revisi ke-2, 4.972.666.000 tgl 07-07-2023 (revisi halaman III DIPA)
- c. Revisi ke-3, 5.055.154.000 tgl 01-09-2023 (penambahan anggaran belanja modal) revisi eselon I
- d. Revisi ke-4, 4.229.154.000 tgl 23-10-2023 (pengurangan belanja pegawai) revisi eselon I

e. Revisi ke-5, 4.229.154.000 tgl 03-11-2023 (revisi halaman III DIPA)

1).Belanja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja pegawai dipergunakan untuk :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan dan Tunjangan Lauk Pauk yang melekat pada pembayaran Gaji;
- b) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan Dokter/Bidan Pegawai Tidak Tetap;
- d) Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;

e) Belanja Lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;

f) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;

g) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi dan/atau pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi;

h) Belanja Kontribusi Sosial termasuk Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri, Belanja Tunjangan Hari Tua Belanja Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara,

TNI/Kemhan, Polri, dan Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai/Pejabat Negara/TNI/POLRI /Pensiunan/Veteran;

i) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan

j) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

Pada Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon Belanja Pegawai diperuntukan sebagai berikut :

- a) Belanja Gaji Pokok PNS;
- b) Belanja Pembulatan Gaji PNS;
- c) Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS;
- d) Belanja Tunjangan Anak PNS;
- e) Belanja Tunjangan Struktural PNS;
- f) Belanja Tunjangan PPh PNS;
- g) Belanja Tunjangan Beras PNS;
- h) Belanja Uang Makan PNS;
- i) Belanja Tunjangan Umum PNS;
- j) Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim; dan
- k) Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI.

Sedangkan untuk Belanja Gaji TNI/POLRI dan Tunjangan Lauk Pauk bagi personel TNI dibayarkan oleh Mabes TNI.

(1). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Alokasi pagu awal belanja pegawai yang tertuang dalam DIPA (01) BUA MA RI tahun anggaran 2023 pada satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **Rp 3.534.330.000-** (Tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh rupiah) dan setelah mengalami revisi anggaran tingkat esalon I sebanyak dua kali sehingga pagu anggaran belanja pegawai menjadi **Rp. 2.708.330.000,-** (Dua milyar tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

(2). Pelaksanaan Anggaran

Dari alokasi pagu anggaran belanja pegawai TA 2023 yang telah direvisi, realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.502.763.391,- (Dua milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) atau 92.41% dari pagu anggaran, sedangkan pada TA 2022 realisasi belanja pegawainya sebesar **Rp 2.619.510.884,-** (Dua milyar enam ratus sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) atau 94.58 % dari pagu anggaran.

Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp 116.747.493,-** (serratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau (4,66 %) dibandingkan realisasi belanja pegawai pada TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan besaran pagu anggaran belanja pegawai antara TA 2023 dengan TA 2022 sehingga jumlah maksimal pagu yang dapat diserap berbeda. Namun jika dilihat dari persentase

realisasi anggaran belanja pegawai terhadap pagu anggaran belanja pegawai, maka realisasi anggaran belanja pegawai pada Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja per 31 Desember 2022. Terjadinya penurunan persentase realisasi anggaran belanja pegawai sebesar 4.66 % ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah personel Hakim Militer dan staf pada tahun 2023 sehingga berkurang realisasi belanja pegawai. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Data Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	756.000.000	741,414,000	693,276,960	93.51
Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.000	15.000	12,464	83.09
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	40.600.000	44,955,000	42,073,348	93.59
Belanja Tunj. Anak PNS	12.906.000	12,597,000	11,750,540	93.28
Belanja Tunj. Struktural PNS	32.880.000	38,880,000	36,000,000	92.59
Belanja Tunj. Fungsional PNS	25.600.000	19,920,000	18,840,000	94.58
Belanja Tunj. PPh PNS	145.400.000	194,400,000	170,787,475	87.85
Belanja Tunj. Beras PNS	40.000.000	41,450,000	38,744,700	93.47
Belanja Uang Makan PNS	155.696.000	136,139,000	119,008,000	87.42
Belanja Tunjangan Umum PNS	47.332.000	27,710,000	26,060,000	94.05
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2.047.500.000	1,302,050,000	1,210,520,000	92.97
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	230.400.000	148,800,000	136,800,000	91.94
Jumlah	3.534.330.000	2.708.330.000	2.502.763.391	92.41

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2023	Naik/Turun	%
Belanja Gaji Pokok	694.131.480	693,276,960	(854.520)	
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.041	12,464	1.423	
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	37.698.152	42,073,348	4.375.196	
Belanja Tunj. Anak PNS	10.116.008	11,750,540	1.634.532	
Belanja Tunj. Struktural PNS	28.800.000	38,880,000	10.080.000	

Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.720.000	19,920,000	13.200.000	
Belanja Tunj. PPh PNS	144.977.623	194,400,000	49.422.377	
Belanja Tunj. Beras PNS	36.137.580	41,450,000	5.312.420	
Belanja Uang Makan PNS	135.534.000	136,139,000	605.000	
Belanja Tunjangan Umum PNS	30.925.000	27,710,000	(3.215.000)	
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.343.260.000	1,302,050,000	(41.210.000)	
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	151.200.000	148,800,000	(2.400.000)	
Jumlah	2.619.510.886	2.502.763.391	(116.747.493)	

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp 205.566.609 (Dua ratus lima juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) dari total pagu yang dialokasikan, (sisa anggaran tersebut dapat dilihat pada table diatas).

2). Belanja Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

(1). Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA- KL)

Alokasi pagu awal belanja barang dalam DIPA 01 BUA MA RI tahun anggaran 2023 pada satker Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **Rp. 1.393.836.000-** (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

(2). Pelaksanaan Anggaran

Realisasi anggaran belanja barang per 31 Desember T.A 2023 adalah sebesar **Rp. 1.335.194.432,-** (Satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), atau sebesar 95.79 % dari pagu anggaran, sedangkan pada T.A 2022 adalah sebesar **Rp. 1.412.692.532-** (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua rupiah atau 85.20 % dari pagu anggaran).

Jumlah realisasi belanja barang pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp 77.498.100,-** atau (10.59%) dibandingkan realisasi Belanja Barang TA 2022. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2022, Hal ini disebabkan karena adanya estimasi skala prioritas terhadap belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta pemeliharaan gedung dan bangunan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2023 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Keperluan Perkantoran	369.708.000	369.708.000	365.492.200	98.86
Belanja Barang Konsumsi	64.300.000	64.300.000	64.299.800	100
Belanja Langganan Internet	264.000.000	264.000.000	259.740.000	98.39
Belanja Lisensi Video Conference	6.000.000	6.000.000	1.412.000	23.53
Belanja Sewa Web Hosting	4.000.000	4.000.000	2.880.000	72
Belanja Pengiriman Surat Dinas	12.000.000	7.200.000	5.529.500	76.80
Belanja Langganan Telepon	38.000.000	8.000.000	6.959.729	87.00
Belanja Pemeliharaan Gedung	198.520.000	198.520.000	198.520.000	100
Belanja Pemeliharaan	126.810.000	138.930.000	118.776.500	85.49

Peralatan dan Mesin				
Belanja Honor Operasional	78.276.000	78.276.000	67.726.000	86.52
Belanja Pakaian Dinas	32.436.000	32.436.000	29.708.000	91.59
Belanja Perjadin ke Pusat	79.200.000	111.000.000	107.067.343	96.46
Belanja Perjadin Telaah RKAKL	17.600.000	10.300.000	10.157.360	98.62
Belanja Perjadin Rakernas	24.960.000	460.000	0	0
Belanja Sewa Rumdis Hakim	68.040.000	90.720.000	86.940.000	95.83
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
Belanja Pengadaan inventaris CPNS	3.986.000	3.986.000	3.986.000	100
Belanja Alat Bantu Jalan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
Jumlah	1.393.836.000	1.393.836.000	1.335.194.432	95.79

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2023	NAIK/TURUN	%
Belanja Keperluan Perkantoran	369.708.000	365.492.200	(4.215.800)	1.14
Belanja Barang Konsumsi	64.299.000	64.299.800	800	0
Belanja Langganan Internet	259.155.000	259.740.000	585.000	0.22
Belanja Langganan Listrik	128.509.607	0	0	0
Belanja Lisensi Video Conference	0	1.412.000	1.412.000	100
Belanja Sewa Web Hosting	2.880.000	2.880.000	2.880.000	0
Belanja Pengiriman Surat Dinas	3.889.000	5.529.500	1.640.500	42.18

<i>Belanja Langganan Telepon</i>	7.265.009	6.959.729	(305.280)	4.20
<i>Belanja Pemeliharaan Gedung</i>	198.440.000	198.520.000	80.000	0.04
<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	98.270.607	118.776.500	20.505.893	20.87
<i>Belanja Honor Operasional</i>	47.400.000	67.726.000	20.326.000	42.88
<i>Belanja Pakaian Dinas</i>	28.800.000	29.708.000	908.000	3.15
<i>Belanja Perjadin ke Pusat</i>	76.645.709	107.067.343	30.421.634	36.69
<i>Belanja Perjadin Telaah RKAKL</i>	8.844.000	10.157.360	1.313.360	14.85
<i>Belanja Perjadin Rakernas</i>	23.600.000	0	0	0
<i>Belanja Sewa Rumdis Hakim</i>	85.050.000	86.940.000	1.890.000	2.22
<i>Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19</i>	9.936.600	5.000.000	4.936.600	49.68
<i>Belanja Pengadaan inventaris CPNS</i>	0	3.986.000	3.986.000	100
<i>Belanja Alat Bantu Jalan</i>	0	1.000.000	1.000.000	100
<i>Jumlah</i>	1.412.692.532	1.335.194.432	87.364.707	6.18

(3). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 58.641.568 (Lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 4.21 % dari total pagu yang dianggarkan.

3) Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan fisik yang mendukung tupoksi.

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 126.988.000,- (Seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 100 % dari total pagu anggaran yang dianggarkan, sedangkan realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sebesar 100 % dari total pagu anggaran yang dianggarkan.

Jika dicermati terlihat bahwa realisasinya belanja modal mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2023 dari tahun 2022 Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon memperoleh alokasi pagu anggaran belanja modal yang besar dibandingkan TA 2022.

Tabel Realisasi Belanja Modal TA 2023 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	44.500.000	82.488.000	126.988.000	100
<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	0	0	0	0
<i>Jumlah</i>	44.500.000	82.488.000	126.988.000	100

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2023 (dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2023	Kenaikan /Penurunan	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	126.988.000	116.988.000	1.170
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	
Jumlah	10.000.000	126.988.000	116.988.000	1.170

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA. 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Daftar Pagu dan Realisasi DIPA 01

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
1.	Belanja Barang	187.771.000	186.625.000	99.39
JUMLAH		187.771.000	186.625.000	99.39

DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan administrasi perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan militer yang tepat waktu dan kegiatan penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI sepanjang tahun anggaran 2023 mengalami revisi 3 (tiga) kali revisi Kanwil Anggaran, namun pagu anggaran tetap yakni sebesar Rp 187.771.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Revisi ke I, 187.771.000 tgl 10-04-2023 (revisi halaman III DIPA)

Revisi ke II, 187.771.000 tgl 07-07-2023 (revisi halaman III DIPA)

Revisi ke III, 187.771.000 tgl 10-10-2023 (revisi halaman III DIPA)

1) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu anggaran belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada tahun anggaran 2023 Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebesar Rp 187.771.000- (Seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sidang keliling, ATK perkara dan pengiriman berkas perkara upaya hukum.

2) Pelaksanaan Anggaran

Realisasi belanja barang pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI per 31 Desember T.A 2023 adalah sebesar Rp. 186.625.000- (Seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99.39 % sedangkan realisasi belanja barang pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 181.705.000,- (Seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) atau sebesar 87.01%.

Nilai realisasi belanja barang DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang TA 2022. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang pagu anggaran TA 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2021, namun besaran pagu anggaran pada TA 2023 lebih meningkat/lebih besar dibandingkan pagu anggaran TA 2022.

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2023 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Realisasi	%
<i>Belanja Pendaftaran Berkas Perkara</i>	24,720,000	24,632,000	99.64
<i>Belanja Penetapan Hari Sidang</i>	125.000	205.000	84.00
<i>Belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan</i>	26,635,000	25,597,000	96.10
<i>Belanja Minutasi / Upaya Hukum</i>	1,650,000	1,650,000	100
<i>Belanja pengiriman dokumen penyelesaian perkara</i>	4.800.000	4.800.000	100
<i>Belanja Sidang diluar Gedung Pengadilan</i>	129.841.000	129,841,000	100
<i>Jumlah</i>	187.771.000	186.625.000	99.39

Tabel Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan TA 2023 (dalam satuan rupiah).

Uraian	TA 2022	TA 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
<i>Belanja Pendaftaran Berkas Perkara</i>	19.790.000	24,632,000	4.842.000	24.46
<i>Belanja Penetapan Hari Sidang</i>	792.000	105.000	(687.000)	86.74
<i>Belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan</i>	19.527.000	25,597,000	6.070.000	31.09
<i>Belanja Minutasi / Upaya Hukum</i>	7.377.000	1.650.000	5.727.000	77.63
<i>Belanja Sidang diluar Gedung Pengadilan</i>	127.152.000	129,841,000	2.689.000	2.11
<i>Jumlah</i>	181.705.000	186.625.000	4.920.000	2.71

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan alokasi pagu anggaran yang diterima pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada TA 2023 yakni sebesar Rp. 187.771.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 186.625.000,- (Seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99.39% sehingga sisa anggaran belanja yang tidak terserap sebesar Rp. 1.146.000,- (Satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 0.61 %.

3. KEUANGAN DARI PERKARA

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer IV-19 Ambon.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2023 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah biaya perkara

No.	Perkara	Jumlah Rp.
1.	Kejahatan	Rp. 892.500,-
2.	Pelanggaran	Rp. 145.000,-
3.	Denda Kejahatan	Rp. 1.000.000.000,-
4.	Denda Pelanggaran	Rp. 2.850.000,-
Jumlah		Rp. 1.003.887.500,-

8. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura

1. DIPA 01 (663381)

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 17.899.938.058,- atau mencapai 99,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 17.956.813.000,-

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-19 Jayapura

No	Pagu Dipa	Total Realisasi			Sisa Dana
		Rp.	Pengembalian	%	
1	2	3	4	5	6
1.	17.956.813.000	17.899.938.058		99,68	56.874.942

Kejadian-kejadian di Keuangan selama Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III – 19 Jayapura adalah:

- 1) BRI Cab. Jayapura 653246633811000 a.n. BPg 063 PENGADILAN MILITER III 19 JAYAPURA (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.
- 2) BRI Cab. Jayapura 651556633821000 a.n. BPg: 063 PENGADILAN MILITER III 19 JAYAPURA (05) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

b. Revisi DIPA

1. Revisi DIPA kesatu oleh Eselon 1 tanggal 28 Desember 2022.
2. Revisi DIPA kedua oleh Eselon 1 tanggal 17 Januari 2023.
3. Revisi DIPA ketiga oleh Eselon 1 tanggal 14 Februari 2023.
4. Revisi DIPA keempat oleh Eselon 1 tanggal 13 April 2023.
5. Revisi DIPA kelima oleh Eselon 1 tanggal 13 Juli 2023.
6. Revisi DIPA keenam oleh Eselon 1 tanggal 1 September 2023.
7. Revisi DIPA ketujuh oleh Eselon 1 tanggal 23 Oktober 2023.
8. Revisi DIPA kedelapan oleh Eselon 1 tanggal 01 Desember 2023.
9. Revisi DIPA kesembilan oleh Eselon 1 tanggal 05 Desember 2023.

c. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

- 1) Koreksi Data/Pembetulan SPM (Nihil)
- 2) SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) yang merupakan sisa Uang Persediaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tahun 2023 yang di setor melalui BRI sejumlah Nihil.

2. DIPA 05 (663382)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 355.989.049,- atau mencapai 97.67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 364.490.000,-.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-19 Jayapura

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1	364.490.000	355.989.049	97.67	8.500.951

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. Dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, wajib dilakukan pemeliharaan dan pengamanan agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek Kelembagaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Fasilitas kerja lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Militer, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menunjang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi: perencanaan, penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI) pada seluruh aset tetap Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer Se-Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Aplikasi SAKTI Modul Aset telah dijalankan di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku UAKPB dan laporannya disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung selaku UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang).

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 meliputi :

- 1 Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- 2 Pengadaan;
- 3 Penggunaan;
- 4 Pemanfaatan;
- 5 Pengamanan dan pemeliharaan;
- 6 Penilaian;
- 7 Penghapusan;
- 8 Pemindahtanganan;
- 9 Penatausahaan; dan
- 10 Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Apabila sepuluh bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (*life-cycle costing*) sebagai berikut:

1. Fase perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
2. Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.
3. Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar- besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diatur bahwa Menteri Keuangan RI adalah sebagai Pengelola Barang dan Menteri/Pimpinan Lembaga adalah sebagai Pengguna Barang.

1. PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA.

a. Sarana Dan Prasarana.

Di Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melaksanakan 4 kegiatan belanja modal yaitu Pengadaan Inventaris CPNS, Pengadaan Printer, Pengadaan Alat Pengolah Data dan Pengadaan Meubelair. Rincian pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	Pengadaan Inventaris CPNS	Rp. 4.446.000,-
2.	Pengadaan Printer	Rp. 10.000.000,-
3.	Pengadaan Alat Pengolah Data	Rp. 100.000.000,-
4.	Pengadaan Meubelair	Rp. 100.000.000,-
Total Nilai		Rp. 214.446.000,-

b. Tanah Dan Gedung Kantor.

Gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berlokasi di jalan Ir. H. Juanda No. 87 Sidoarjo. Gedung kantor ini berada dalam satu kompleks dengan gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dimana masing-masing tahap pembangunan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu di tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2010 dengan total nilai aset sebesar Rp.6.267.714.000,- (*enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah*).

Pada tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 903/DjMT.1/B/PL.04/6/2022 tanggal 29 Juni 2022 telah dilaksanakan acara penyerahan barang milik negara berupa sertifikat tanah dari Dirjen Badilmiltun MA RI kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima tersebut Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima dua sertifikat tanah dengan Nomor 00052 seluas 3.844 m² yang di atasnya berdiri bangunan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan sertifikat tanah Nomor 00054 seluas 212 m² yang dipergunakan sebagai jalan umum warga Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Kedua sertifikat tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada bulan Desember tahun 2022 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima transfer masuk aset tetap berupa tanah dari Ditjen Badilmiltun MA RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 2064a/DjMT.1/B/PL.04/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, sehingga aset tetap berupa tanah yang semula tercatat pada Data Aset Ditjen Badilmiltun MARI sekarang tercatat sebagai aset tetap berupa tanah dalam Data Aset Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Tabel Daftar Tanah

No	Uraian	Jumlah M ²	Nilai
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.844	Rp. 3.697.749.000,-
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	212	Rp. 50.447.887.264,-

Tabel Daftar Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah (M ²)	Nilai
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.499	Rp. 3.727.649.000,-
2.	Rumah Negara Golongan II Tipe BPermanen	120	Rp. 359.129.000,-

c. Peralatan Dan Mesin.

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat dibedakan menjadi:

- 1) kendaraan dinas
- 2) alat pengolah data dan komunikasi
- 3) inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam tahun 2022 yaitu:

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 9 (sembilan) unit, dimana 3 (tiga) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan, 2 (dua) unit merupakan transfer masuk dari Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI, sedangkan kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit yang semua perolehannya merupakan hasil pembelian melalui pengadaan.

Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Merk/Type	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	Randis R-4	Toyota Camry	2023	1 unit	digunakan untuk operasional KA
2	Randis R-4	Mitsubishi Pajero Sport	2023	1 unit	digunakan untuk operasional Waka
3	Randis R-4	Toyota CorollaAltis	2008	1 unit	digunakan untuk operasional Sekretaris
4	Randis R-4	Toyota CorollaAltis	2006	1 unit	digunakan untuk operasional Panitera
5	Randis R-4	Toyota Vios	2009	1 unit	digunakan untuk operasional Kantor
6	Randis R-4	Toyota Kijang Innova	2009	1 unit	digunakan untuk operasional Kantor
7	Randis R-4	Toyota New Avanza	2011	1 unit	digunakan untuk operasional Kantor
8	Randis R-4	Toyota Hiace	2020	1 unit	digunakan untuk operasional Kantor
9	Randis R-4	Toyota Innova Zenix	2023	1 unit	digunakan untuk operasional Kantor
10	Randis R-2	Honda Supra Fit	2006	1 unit	digunakan untuk operasional
11	Randis R-2	Honda GL Max125	2006	1 unit	digunakan untuk operasional

12	Randis R-2	Honda Mega Pro CW	2007	1 unit	digunakan untuk operasional
13	Randis R-2	Honda MegaPro CW	2008	1 unit	digunakan untuk operasional kantor
14	Randis R-2	Honda Blade	2011	1 unit	digunakan untuk operasional

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Nilai Aset Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	unit	Rp. 1.143.726.500,-
2	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	- Sewa
3	Kendaraan Dinas Roda 2	unit	Rp. 82.767.000,-
			Rp. 1.226.493.500,-

Tabel Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	PC Unit	36 unit	Rp. 377.296.613
2.	Lap Top	22 unit	Rp. 270.125.176
3.	Note Book	5 unit	Rp. 77.459.500
4.	CPU	4 unit	Rp. 59.400.000
5.	Monitor	1 unit	Rp. 4.500.000
6.	Printer	40 unit	Rp. 119.468.040
7.	Scanner	4 unit	Rp. 39.668.698
8.	External/Portable Harddisk	1 unit	Rp. 1.500.000
9.	Server	2 unit	Rp. 182.399.250
10.	Router	1 unit	Rp. 8.899.000
11.	Hub	3 unit	Rp. 30.000.000
12.	Modem	1 unit	Rp. 3.960.000
13.	Rak server	2 unit	Rp. 18.314.590
Nilai			Rp 1.192.990.867

d. Pemeliharaan sarana dan prasana.

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun, upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, pemeliharaan yang dilakukan berupa pemeliharaan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp 562.463.000,- (*lima ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) terdiri dari:

- 1) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, dengan anggaran sebesar Rp 242.470.000,- (*dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*), berupa:
 - Pemeliharaan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Halaman Kantor
 - Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor.
 - Pemeliharaan rumah genzet
- 2) Pemeliharaan Gedung dan Pembangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*), berupa pemeliharaan rumah dinas. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dengan anggaran sebesar Rp.307.993.000,- (*tiga ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), berupa:
 - Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4,
 - Pemeliharaan Kendaraan (BBM Hiace),
 - Pemeliharaan Sound System,
 - Pemeliharaan mesin fotocopy,
 - Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2,
 - Pemeliharaan PC, Laptop/Notebook dan Printer,
 - Pemeliharaan AC Split Portable AC,
 - Pemeliharaan Inventaris kantor,
 - Pemeliharaan Genzet, dan
 - Pemeliharaan mesin potong rumput.
 - Bahan Bakar Genzet.
 - Bahan Bakar Kendaraan Sewa.

2. PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sidoarjo secara periodik per semester.

a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana.

Di Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kegiatan belanja modal yaitu pengadaan Meubelair. Pengadaan Meubelair berupa meubelair kantor yang terdiri dari kursi direktur untuk Wakil Kepala, Lemari Besi untuk lemari arsip persuratan, kursi staf untuk ruang rapat, loker untuk menyimpan barang dan penitipan barang serta kursi lipat untuk keperluan kantor. Pengadaan Meubelair tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengadaan Meubelair dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Rincian pengadaan meubelair sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	Printer 2 unit @Rp.5.000.000	Rp. 10.000.000
	Realisasi: Pelaksanaan bulan Mei 2022 Total Belanja 2 Unit = Rp.8.873.874. PPN = Rp.990.991 PPH Pasal 22 = Rp.135.135 Grand Total = Rp.10.000.000 Sisa Pagu = Rp.0	
2.	Sarana Disabilitas	Rp. 20.000.000
	Realisasi: Pelaksanaan bulan Oktober 2022 Total Belanja = Rp.17.587.026 PPN = Rp.1.974.055 PPH 22 = Rp.358.919 Grand Total = Rp.19.920.000 Sisa Pagu = Rp.80.000	
3	Prasarana Disabilitas	Rp. 30.000.000
	Total Nilai	Rp. 60.000.000

b. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki.

1) Tanah

Berdasarkan pengelompokan aset Tanah dan Gedung Bangunan yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu:

a) Aset tanah.

Tabel: Rincian Tanah

No	Nama Barang	Jenis Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Tanah Seluruhnya (M ²)	Alamat
1	Tanah bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	Rp.15,140,580,000	1,974	SEDATI AGUNG
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	Rp.46,445,128,259	3,539	Jl. Juanda No 85 Sidoarjo

b) Aset Gedung Bangunan.

Tabel Rincian Aset Gedung Bangunan

No	Nama Barang	Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Bangunan	Jalan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	IMB	Rp.4,427,663,000	1,440	Jl. Raya Juanda

2) Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dibedakan menjadi:

- (1) Kendaraan dinas
- (2) Peralatan Mesin Non Tik
- (3) Peralatan Khusus Tik
- (4) Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2023 yaitu:

(1) Kendaraan Dinas.

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan dan 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas:

Tabel Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah		Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2018	1	Unit	Digunakan untuk operasional jabatan Kepala
2.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Avanza Tahun 2011	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
3.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 2	Suzuki Thunder Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Mega Pro Tahun 2007	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
6.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2008	3	Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Tabel Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Kendaraan dinas roda 4	2	Unit	Rp. 361.400.000
2.	Kendaraan dinas roda 4	1	Unit	Sewa
3.	Kendaraan dinas roda 2	5	Unit	Rp. 77.450.000
Total Nilai			Rp.	438.850.000

(2) Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tabel Daftar Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1	Kursi Roda	1	Unit	Rp. 2,265,000
2	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Unit	Rp. 1,500,000
3	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Unit	Rp. 2,200,000
4	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Rp. 9,900,000
5	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit	Rp. 32,998,350
6	Mesin Fotocopy Folio	2	Unit	Rp. 60,600,000
7	Lemari Besi/Metal	14	Unit	Rp. 4,750,000
8	Lemari Kayu	13	Unit	Rp. 4,950,000
9	Filing Cabinet Besi	20	Unit	Rp. 2,953,500
10	Brandkas	1	Unit	Rp. 4,000,000
11	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Unit	Rp. 990,000
12	Locker	2	Unit	Rp. 3,550,000
13	Box Printer dan Reader Smart Card	2	Unit	Rp. 5,000,000
14	Tabung Pemadam Api	4	Unit	Rp. 4,928,000

15	Rambu-Rambu	1	Unit	Rp.	1,010,000
16	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	Rp.	19,965,000
17	Papan Visual/Papan Nama	34	Unit	Rp.	1,010,000
18	Movitex Board	1	Unit	Rp.	17,630,000
19	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Rp.	3,115,000
20	Hand Metal Detector	1	Unit	Rp.	1,479,500
21	Mesin Laminating	1	Unit	Rp.	2,129,050
22	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Rp.	9,620,000
23	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	6	Unit	Rp.	1,996,500
24	Alat Kantor Lainnya	1	Unit	Rp.	26,994,550
25	Meja Kerja Kayu	80	Unit	Rp.	900,000
26	Kursi Besi/Metal	104	Unit	Rp.	665,000
27	Kursi Kayu	15	Unit	Rp.	2,176,150
28	Sice	5	Unit	Rp.	13,475,000
29	Bangku Panjang Kayu	32	Unit	Rp.	2,176,130
30	Meja Rapat	2	Unit	Rp.	9,933,000
31	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Rp.	1,630,000
32	Meja Telepon	1	Unit	Rp.	1,382,700
33	Meja Resepsionis	1	Unit	Rp.	13,640,330
34	Partisi	4	Unit	Rp.	14,648,700
35	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	Unit	Rp.	1,015,650
36	Mesin Penghisap Debu /Vacuum Cleaner	2	Unit	Rp.	2,101,000
37	Mesin Pel/Poles	2	Unit	Rp.	24,948,000
38	Mesin Pemetong Rumput	4	Unit	Rp.	3,982,000
39	Air Cleaner	1	Unit	Rp.	19,772,500
40	Lemari Es	3	Unit	Rp.	4,482,500
41	A.C. Split	45	Unit	Rp.	8,970,500
42	Kitchen Set	1	Unit	Rp.	9,500,500
43	Televisi	5	Unit	Rp.	19,987,000
44	Loudspeaker	4	Unit	Rp.	10,434,000
45	Sound System	1	Unit	Rp.	39,999,300
46	Microphone	7	Unit	Rp.	549,450
47	Tiang Bendera	6	Unit	Rp.	1,061,500
48	Tangga Aluminium	2	Unit	Rp.	1,485,000
49	Dispenser	7	Unit	Rp.	1,793,000
50	Palu Sidang	4	Unit	Rp.	212,300
51	Handy Cam	1	Unit	Rp.	14,905,000
52	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Rp.	2,155,620
53	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	Unit	Rp.	495,000
54	Audio Mixing Console	1	Unit	Rp.	16,483,500
55	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	Unit	Rp.	1,034,520
56	Layar Film/Projector	1	Unit	Rp.	5,447,200
57	Camera Digital	1	Unit	Rp.	4,950,000
58	LCD Monitor	1	Unit	Rp.	10,644,900
59	Camera Conference	1	Unit	Rp.	25,518,900
60	Mesin Pemetong Biasa	1	Unit	Rp.	2,948,000
61	Mesin Jilid	2	Unit	Rp.	4,950,000
62	Alat Studio Lainnya	1	Unit	Rp.	4,950,000
63	Telephone (PABX)	1	Unit	Rp.	24,915,000
64	Facsimile	2	Unit	Rp.	3,550,000
65	Genset	1	Unit	Rp.	198,969,000
66	Alat Kedokteran THT Lainnya	1	Unit	Rp.	1,692,750
67	Walker Polding	4	Unit	Rp.	1,110,000
Nilai Total				Rp.	1,992,481,715

(3) Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tabel Daftar Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Local Area Network (LAN)	1 Unit	Rp. 12,536,194
2.	Komputer Jaringan Lainnya	2 Unit	Rp. 115,740,000
3.	P.C Unit	39 Unit	Rp. 543,524,610
4.	Lap Top	27 Unit	Rp. 425,599,550
5.	Tablet PC	1 Unit	Rp. 444,000
6.	Komputer Unit Lainnya	1 Unit	Rp. 102,352,500
7.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21 Unit	Rp. 55,165,100
8.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6 Unit	Rp. 99,698,350
9.	Server	3 Unit	Rp. 223,655,000
10.	Router	1 Unit	Rp. 9,955,000
11.	Rak Server	1 Unit	Rp. 9,866,590
Nilai Total			Rp. 1,598,536,894

(4) Aset tetap lainnya

Tabel Daftar Aset tetap lainnya

No	NUP	Nama Barang	Kondisi	Merk/Tipe	Nilai Perolehan Pertama
1	1	Monografi	Baik	Buku Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial	Rp.105,000
2	2	Monografi	Baik	Buku Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas,	Rp.85,000
Jumlah					Rp.190,000

c. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana.

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440m² senilai Rp.197.568.000,- (*Seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp.161.323.000,- (*Seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).

d. Penghapusan Sarana Dan Prasarana.

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah barang serta nilai barang.

Di tahun 2023 belum dilakukan lagi pengajuan permohonan penghapusan BMN ke KPKNL.

3. PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN.

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-13 selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasikan dengan KPPN dan KPKNL Madiun yang disampaikan secara periodik baik bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

a. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Mini Bus	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Kendaraan Sekretaris
2.	Mini Bus	2011	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Kendaraan Kadilmil
3.	Station Wagon	2021	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Panitera
4.	Mini Bus	2023	Baik	-	-	Digunakan untuk kendaraan Waka
II.	Jenis kendaraan Roda 2					
1.	Honda Supra X 125	2006	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Caraka Kantor
2.	Honda Mega Pro GL 160 D	2007	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Operasional Kantor
3.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Kendaraan Panitera
4.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Operasional Kantor
5.	Honda GL Max II	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Operasional Kantor

b. Rumah Dinas.

Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak memiliki Rumah Dinas.

c. Bangunan Gedung Tempat Kerja.

No	Uraian	Tahun Perlehan	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Bangunan Gedung Kantor	2013	Baik	-	-
2.	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	2015	Baik	-	-

d. Peralatan dan Mesin.

No	Nama Barang	Tahun Perlehan	Jumlah Barang	Jumlah Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Battery Charge	2013	1	1	-	-
2.	Scanner (Universal Tester)	2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017	6	6	-	-
3.	Mesin Ketik Manual	2006	1	1	-	-
4.	Mesin Ketik Listrik	2007	2	2	-	-
5.	Mesin Foto Copy	2009-2010	2	-	2	-
6.	Lemari Besi Metal	2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018.	25	25	-	-
7.	Lemari Kayu	2011, 2015, 2016, 2017	14	13	-	1
8.	Rak Besi	2013	1	1	-	-
9.	Filing Cabinet Besi	2006, 2007, 2008	9	9	-	-
10.	Brandkas	2006	1	1	-	-
11.	Peti Uang/Cash Box	2008	1	1	-	-
12.	Tabung Pemadam Api	2018	2	2	-	-
13.	CCTV – Camera Control Television System	2017	1	1	-	-
14.	Papan Visual/ Papan Nama	2010	6	6	-	-
15.	Alat Penghancur Kertas	2007, 2009, 2010	4	2	-	2
16.	LCD Projector/ Infocus	2008	1	1	-	-
17.	Alat Perekam suara	2011	1	1	-	-
18.	Meja Kerja Kayu	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023	55	31	24	-
19.	Kursi Besi/Metal	2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2022, 2023	198	195	-	3
20.	Kursi Kayu	2010	3	3	-	-
21.	Sice/ Sofa	2008, 2013, 2017	7	7	-	-
22.	Meja Rapat	2010, 2015	6	6	-	-
23.	Meja Komputer	2007, 2009, 2010	16	16	-	-
24.	Meja Resepsionis	2013	1	1	-	-
25.	Kasur/Spring Bed	2011	4	4	-	-
26.	Partisi	2015	2	-	-	2
27.	Publik Astari (pembatas antrian)	2010, 2015	3	3	-	-

28.	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	2010	2	2	-	-
29.	Mesin Potong Rumput	2008, 2009, 2010	4	0	4	-
30.	Lemari Es	2011	2	2	-	-
31.	A.c. Sentral	2013, 2021	3	1	2	-
32.	A.c. Split	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017, 2021	24	3	21	-
33.	Televisi	2007, 2011, 2017	4	3	1	-
34.	Sound System	2007, 2008	2	2	-	-
35.	Lambang Garuda Pancasila	2010	1	1	-	-
36.	Tiang Bendera	2010	2	2	-	-
37.	Dispenser	2007, 2011	5	5	-	-
38.	Mimbar/Podium	2010	1	1	-	-
39.	Lambang Instansi	2011	1	1	-	-
40.	Handy Cam	2008	1	1	-	-
41.	Gordyin/ Kray	2013	20	20	-	-
42.	Kabel Roll	2017	1	1	-	-
43.	Panggung	2010	1	1	-	-
44.	Microphone/ Wireless Mic	2017	6	6	-	-
45.	Microphone/ boom Stand	2017	6	6	-	-
46.	Audio Master Control Unit	2017	1	1	-	-
47.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2008, 2011, 2013, 2015, 2017, 2022	25	11	-	14
48.	Microphone Cable	2017	6	6	-	-
49.	Camera Digital	2011	1	1	-	-
50.	Connectors	2013	1	1	-	-
51.	Broadband Amlifier	2013	1	1	-	-
52.	Pesawat Telephone	2013	10	10	-	-
53.	Facsimile	2007	1	1	-	-
54.	Finger Printer Time Attandance	2013, 2017	2	2	-	-
55.	Genset	2013	1	-	1	-
56.	Kursi Dorong	2018, 2022	2	2	-	-
57.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2018	4	4	-	-
58.	Internet	2009, 2010	2	2	-	-
59.	P.c Unit	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022	42	40	-	2
60.	Lap Top	2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022	26	22	3	1
61.	CPU (peralatan Personal Komputer)	2013	1	1	-	-
62.	Monitor (Dell LCD)	2009	1	1	-	-
63.	Printer (peralatan personal komputer)	2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023	25	23	-	2
64.	Peralatan personal komputer lainnya (Pfelink Psw 161)	2009	1	1	-	-
65.	Server	2009, 2013, 2015, 2021	5	4	-	1
66.	Router	2013, 2016	2	2	-	-
67.	Rak Server	2013, 2021	2	2	-	-

68.	Kabel UTP	2013, 2017	2	2	-	-
69.	Switch (TP link WR743ND)	2013	12	12	-	-
70.	Alat Kedokteran Umum Lainnya	2022	2	2	-	-
71.	Microphone	2022	7	7	-	-
72.	Loudspeaker	2022	4	4	-	-
73.	Audio Mixing Console	2022	1	1	-	-
74.	Camera Conference	2022	1	1	-	-
75.	Bracket Standing Peralatan	2022	1	1	-	-
76.	LCD Monitor	2022	1	1	-	-

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang Prima terhadap para Pencari Keadilan, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2018 telah membangun Mushola “Al-Ikhlas” dengan biaya pengadaannya berasal dari swadaya para Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun.

4. PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan seluruhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Sarana dan Prasarana di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam tahun 2023 ada penambahan sapsras berupa: AC Standing, AC Split, LCD Proyektor, Mesin Absensi, Kursi Pimpinan, Sofa tamu ruang Kadilmil, lemari besi , hal ini dikarenakan tahun 2023 Pengadilan Militer III-14 Denpasar mendapatkan anggaran biaya tambahan sejumlah Rp.171.845.000,-. Sarana dan prasarana sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

a. Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

Tabel Tanah dan Bangunan

No	Satker	Gedung Kantor	
		Tanah	Bangunan
1.	Pengadilan Militer III-14 Denpasar	2110 M ²	1512 M ²

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Untuk menunjang kinerja pegawai disamping sarana dan prasarana gedung, sarana dan prasarana fasilitas yang lainnya merupakan sesuatu yang sangat penting, sarana dan prasarana fasilitas gedung yang terdiri

dari meubelair dan alat-alat lain serta fasilitas kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang ada pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2023 mendapat Hibah kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) sebagaimana pada tabel di bawah ini:

1) Kendaraan Dinas.

Tabel Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1	Toyota Kijang Innova	2009		1		
2	Nissan Grand Livina	2011	1			
3	Toyota/Kijang Innova	2021	1			
4	Toyota Avansa	2012	1			
5	Toyota/Inova Rebon	2011	1			Hibah
6	Toyota Rush	2023	1			
II	Kendaraan Roda 2					
1	Honda GL Max	2007		2		
2	Suzuki Thunder	2007		1		
3	Honda Mega Pro	2007		2		

2) Rumah Dinas.

Tabel Rumah Dinas

0	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Rumah Dinas Kepala	0			
2	Rumah Dinas Wakil Kepala	0			
3	Rumah Dinas Hakim	0			
4	Rumah Dinas Panitera	0			
5	Rumah Dinas Sekretaris	0			

3) Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung/Kantor

Tabel Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung/Kantor

No	Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah	Kondisi
Gedung I			
Lantai 1 (satu)			
1	Ruang TI/ Ruang Server	1	Baik
2	Ruang Sidang	1	Baik

3	Ruang Oditur	1	Baik
4	Ruang PH	1	Baik
5	Ruang Tahanan	1	Baik
6	Ruang Perpustakaan	1	Baik
7	Ruang Laktasi	1	Baik
8	Toilet	1	Baik
9	Lobby	1	Baik
10	Ruang bermain anak	1	Baik
11	Ruang Tunggu Terbuka/Teras Imperium	1	Baik
Lantai 2 (dua)			
1	Ruang Kepala	1	Baik
2	Ruang Wakil Kepala	1	Baik
3	Ruang Pokkimmil	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Panmud Pidana	1	Baik
6	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
7	Ruang Staf Kepaniteraan	1	Baik
8	Ruang Tamu VIP	1	Baik
9	Ruang Spri	1	Baik
10	Ruang Staf Kepaniteraan	1	Baik
11	Toilet	2	Baik
Gedung II			
Lantai 1 (satu)			
1	Ruang Arsip	1	Baik
2	Rencana Ruang Sidang Baru	1	Baik
3	Toilet	1	Baik
4	Gudang	1	Baik
Lantai 2 (dua)			
1	Ruang Sekretaris	1	Baik
2	Ruang Kasubbag UK dan Staf UK	1	Baik
3	Ruang Kasubbag KOTL	1	Baik
4	Ruang Coment Center	1	Baik
5	Ruang Kasubbag PTIP dan staf	1	Baik
6	Ruang Staf KOTL	1	Baik
7	Toilet	1	Baik
Gedung III			
Lantai 1 (satu) dan 2 (dua)			
1	Ruang Tamu	1	Baik
2	Kamar Tidur	5	Baik
3	Kamar Mandi	1	Baik

4) Inventaris Kantor

Tabel Inventaris Kantor

No	Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah	Kondisi
1	Alat Kantor Lainnya	3	Baik
	Alat Kantor Lainnya	2	Rusak Ringan
2	Rak Besi	1	Rusak Berat
3	Lemari Kayu	1	Baik
	Lemari Kayu	3	Rusak Ringan
4	Rak Kayu	2	Baik

5	Filing Cabinet Besi Filing Cabinet Besi	9 2	Rusak Ringan Rusak Berat
6	Brandkas	1	Rusak Ringan
7	Buffet	1	Rusak Ringan
9	Dispenser	2	Rusak Ringan
10	Alat Penghancur Kertas	1	Rusak Berat
11	CCTV - Camera Control Television System CCTV	3 1	Baik Rusak Berat
12	Mesin Absensi Mesin Absensi	1 1	Baik Rusak Ringan
13	LCD Projector/Infocus LCD Projektor	1 1	Rusak Ringan Baik
14	Lemari Es/Kulkas	1	Rusak Ringan
15	Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu Meja Kerja Kayu	38 3 1	Rusak Ringan Baik Rusak Berat
16	Kursi Besi Metal Kursi Besi/Metal Kursi Besi/Metal	3 10 60	Baik Rusak Berat Rusak Ringan
17	Kursi Kayu	6	Rusak Ringan
18	Sice Sice	3 1	Rusak Ringan Baik
19	Meja Rapat	1	Rusak Ringan
20	Meja Komputer	4	Rusak Ringan
21	Meja Telepon	2	Rusak Ringan
22	Loker	1	Baik
23	Pompa Air	1	Rusak Berat
24	Meja Makan Kayu	1	Rusak Ringan
25	Televisi	4	Rusak Ringan
26	Sound System Souns System	2 1	Rusak Berat Rusak Ringan
27	Unit Power Supply Unit Power Supply	4 2	Baik Rusak Ringan
28	Jam Elektronik	1	Rusak Ringan
29	Tiang Bendera	2	Baik
30	Palu Sidang	1	Baik
31	Lambang Instansi	1	Baik
32	Internet	1	Baik
33	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik
34	P.C Unit P.C Unit P.C Unit	11 15 3	Baik Rusak Ringan Rusak Berat
35	Laptop Laptop Laptop	10 10 1	Baik Rusak Ringan Rusak Berat
36	Server Server	1 2	Baik Rusak Ringan
37	Rak Server	1	Baik
38	Monografi	2	Baik
39	Software Komputer	8	Baik
40	Lemari Besi/Metal	17	Rusak Ringan
41	A.C Window	2	Rusak Ringan
42	A.C Split A.C Split AC Split	15 3 8	Rusak Ringan Rusak Berat Baik
43	Facsimile	2	Rusak Ringan
44	Monitor	1	Rusak Ringan

45	Printer	3	Baik
		9	Rusak Ringan
46	Router	3	Rusak Ringan
47	Kabel UTP	1	Rusak Ringan
48	Peralatan jaringan lainnya	2	Rusak ringan
49	Note Book	2	Baik
50	Scanner	1	Baik
51	Camera Conference	1	Baik
52	Alat Kesehatan Umum Lainnya	3	Baik
53	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
54	Genset	1	Baik
55	Microphone	7	Baik
56	Loudspeaker	4	Baik
57	Kipas Angin	2	Baik
	Kipas Angin	1	Rusak Ringan
58	Kursi Fiber Glas/Plastik	7	Baik
59	Conector	1	Rusak Berat
60	Walker Polding	1	Baik
61	LCD Monitor	1	Baik
62	Wheel Chair (Alkes Rehabilitasi Medis)	1	Baik
63	Audio Mixing Console	1	Baik

5. PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG.

a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Militer III-15 Kupang telah dilaksanakan secara rutin untuk menjaga sarana dan prasarana agar selalu laik fungsi.

b. Perangkat Keras.

Dalam rangka mendukung penyelesaian tugas pokok, Pengadilan Militer III-15 Kupang memiliki Server 2 unit, PC (*Personal Computer*) sejumlah 25 unit, Printer sejumlah 14 unit, Laptop sejumlah 17 Unit. Fasilitas Layanan Publik (Desk Info) Pengadilan Militer III-15 Kupang yang tersedia berupa TV LCD 2 unit yang berada di lobby depan dan lobby belakang.

c. Perangkat Lunak.

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam sistem operasi komputer pada Pengadilan Militer III-15 Kupang adalah Windows 10, Windows 11 dan Centos untuk Server.

5. PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Pengadilan Militer III-16 Makassar. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) modul Aset Tetap yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Makassar secara periodik per semester.

a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana.

Pengadaan sarana dan prasarana yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Militer III-16 Makassar Kode Satker 663356 Tahun 2023 telah dilaksanakan pengadaannya adalah:

1. Pembuatan Jalur Disabilitas;
2. Pembelian 1 (dua) unit Kursi roda dan 1 (satu) unit alat bantu dengar;
3. Anggaran belanja tambahan 8 (delapan) unit fasilitas perkantoran sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kuantitas
1	4832302001-ALT-175159694 LCD Proyektor	1.0
2	4835301004-ALT-175160879 Layar Proyektor Tripod	1.0
3	4721300001-ALT-175161649 LED TV	1.0
4	4733002000-ALT-175162725 WEB CAM	1.0
5	4733002000-ALT-175163908 Wireless Microphone	1.0
6	4733001012-ALT-175165707 Speaker	2.0
7	4733001012-ALT-175166674 Mixer Audio	1.0

b. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki.

1) Tanah dan Gedung Kantor.

Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menempati Gedung Kantor baru di Jalan Batara Bira Km. 16 No.5 Baddoka Makassar sejak tanggal 19 Agustus 2013. Penempatan gedung kantor baru ini berdasarkan peresmian langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H. di Pengadilan Negeri Tenggarong Kalimantan Timur pada tanggal 22 Mei 2013. Sarana dan Prasarana Kantor Dilmil III-16 Makassar sebagian besar merupakan pengadaan sendiri dari Mahkamah Agung.

Untuk tertib pengadministrasian sarana dan prasarana Gedung Kantor Pengadilan Militer III-16 Makassar telah dilaksanakan pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara ke dalam aplikasi, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) serta pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah.

2) Peralatan Dan Mesin.

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dapat dibedakan menjadi:

- a) Kendaraan dinas
- b) Genset
- c) Alat pengolah data dan komunikasi
- d) Inventaris kantor lainnya

Aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-16 Makassar sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran Laporan kegiatan Pengadilan Militer III-16 Makassar Tahun 2023 ini.

7. PENGADILAN MILITER III-17 MANADO.

a. Sarana dan Prasarana Gedung.

Bahwa sejak tanggal 5 Mei 2020 Pengadilan Militer III-17 Manado sudah menempati gedung Kantor sendiri yang merupakan pengadaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, yang terletak di lokasi Peradilan Terpadu kota Manado.

b. Pengadaan.

Pengadilan Militer III-17 Manado sejak bulan Januari 2023 sampai dengan akhir bulan Desember 2023 telah mendapatkan Sarana dan Prasarana untuk persidangan online dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Anggaran DIPA BUA Mahkamah Agung RI, sehingga Pengadilan Militer III-17 Manado sudah mempunyai peralatan untuk sidang *online*.

c. Pemeliharaan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan:

- 1) Perawatan Gedung Kantor / Khusus, Kegiatan Perawatan Gedung Kantor / Khusus sebanyak 1 (satu) unit yang terdiri dari perawatan gedung kantor, sehubungan dengan hal itu Pengadilan Militer III-17 Manado telah memiliki tanah, namun belum terealisasi pembangunan.
- 2) Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor:
 - a) Perawatan Randis roda-4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit ditambah 1 (satu) unit kendaraan sewa.
 - b) Perawatan Randis roda-2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.
 - c) Perawatan sarana gedung kantor.

Sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan Militer III-17 Manado sejak bulan Mei 2020 sudah memadai bila dihubungkan dengan standarisasi kebutuhan rencana Mahkamah Agung RI untuk semua badan peradilan, apalagi fasilitas yang tersedia sangat cukup menunjang untuk pelaksanaan tugas. Adapun fasilitas yang tersedia sebagai berikut:

- a) Ruang Kepala
- b) Ruang Wakil Kepala
- c) Ruang Pokkimmil
- d) Ruang Panitera
- e) Ruang Sekretaris
- f) Ruang Para Kasubbag, Bendahara dan Pelaksana (Kesekretariatan).
- g) Ruang Sidang Utama
- h) Ruang Sidang Kecil
- i) Ruang Musyawarah

- j) Ruang Perpustakaan
- k) Ruang Tahanan Pria
- l) Ruang Tahanan Wanita
- m) Ruang Server
- n) Ruang Tunggu
- o) Ruang tamu dan Ruang Piket
- p) Ruang PTSP
- q) Ruang Oditur Militer
- r) Ruang Penasihat Hukum
- s) Ruang Saksi
- t) Ruang Laktasi dan Kesehatan
- u) Ruang Garasi yang difungsikan sebagai tempat olahraga
- v) Ruang Gudang
- w) Ruang Pantri
- x) Ruang Arsip Aktif dan Ruang Arsip Pasif
- y) Ruang Panel Kontrol (Atas /Bawah)
- z) Ruang Rapat/Command Center

Peralatan penunjang lainnya (Telepon, Faksimilie, Komputer, Televisi, Internet, Server, Genset dan AC).

- 3) Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor Pengadilan Militer III-17 Manado sudah dilaksanakan dengan Pagu awal Rp.206.298.000,- (*dua ratus enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), tambahan pagu revisi Kanwil sebesar Rp.20.223.000,- (*dua puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) sehingga total pagu Pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi sebesar Rp.226.521.000,- (*dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*) terealisasi sampai akhir tahun anggaran 2023 Rp.226.431.766,- (*dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*) Sisa Rp.89.234,- (*delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat*).
- 4) Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) 3 (Unit) ditambah 1 (Satu) Unit Kendaraan Sewa pagu awal sebesar Rp.78.000.000,- (*Tujuh puluh delapan juta rupiah*), penambahan revisi DJA sebesar Rp.25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*) sehingga total pagu menjadi sebesar Rp.103.000.000,- (*Seratus tiga juta rupiah*),

teralisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp.102.907.365,- (*Seratus dua juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*), Sisa Rp.92.635,- (*Sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*) Sedangkan Perawatan kendaraan roda 2 (dua) 5 (Lima) unit, untuk tahun anggaran 2023 pagu awal sebesar Rp.17.500.000,- (*Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*), terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp.17.494.885,- (*Tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*), Sisa Rp.5.115,- (*Lima ribu seratus lima belas rupiah*).

- 5) Perawatan untuk sarana dan prasarana kantor lainnya, Pagu awal anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.42.850.000,- (*Empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), penambahan pagu revisi Kanwil sebesar Rp.3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) sehingga pagu menjadi Rp.45.850.000,- (*Empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 terealisasi Rp.45.429.044,- (*Empat puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah*) Sisa Rp.420.956,- (*Empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*) dana tersebut adalah untuk perawatan/ perbaikan Air conditioner (AC), perawatan / perbaikan alat pengolah data (komputer, laptop, printer) serta untuk pemeliharaan inventaris kantor dan perawatan mesin Genset.

d. Penghapusan.

Bahwa selama tahun 2023 Pengadilan Militer III-17 Manado belum melaksanakan kegiatan penghapusan Barang Milik Negara.

8. PENGADILAN MILITER III-18 AMBON.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan asset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventaris lainnya.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan Negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan di Pengadilan Militer III-18 Ambon selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik persemester ke Pengadilan Tinggi Agama selaku Korwil dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Ambon.

a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana.

Setiap periode tahun anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-18 Ambon senantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran berikutnya. Namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhan tersebut, belum semuanya dapat direalisasikan. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran yang diterima.

Di tahun anggaran 2023, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan pengadaan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Merk/Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Total	Kondisi
Sarana pendukung Disabilitas						
1	Kursi Roda	Sakura Roda BE	1 buah	3.000.000	3.000.000	Baik
2	Alat bantu dengar	Hearing Aid Pro 201 (GEA)	1 buah	1.500.000	1.500.000	Baik
3	Alat Bantu Jalan	Deluxe	2 buah	500.000	1.000.000	Baik
Prasarana Disabilitas						
1	Jalur/Toilet Disabilitas	-	1 Keg	40.000.000	40.000.000	Baik
Barang Inventaris						
1.	Meja kerja kayu	Olympic	2 buah	999.000	1.998.000	Baik
2.	Kursi kerja Besi	Futura	2 buah	994.000	1.988.000	Baik
3.	Multimedia Proyektor	Panasonic PT-VX610	1 buah	36.008.000	36.008.000	Baik
4.	Kursi Kerja	Avery	21 buah	1.110.000	23.310.000	Baik
5.	Lemari Arsip Besi Sliding Kaca	Bufalo AA	1 buah	4.920.000	4.920.000	Baik

6.	Lemari Besi Sliding	Importa	1 buah	3.450.000	3.450.000	Baik
7.	Meja 1 Biro	Importa	3 buah	3.950.000	11.850.000	Baik
8.	Meja ½ Biro	Importa	1 buah	2.950.000	2.950.000	Baik

b. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki dan masih digunakan.

1) Tanah dan Gedung Kantor.

- a) Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati Gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon, yang berdiri diatas tanah seluas 2.000m² dengan nilai aset sebesar Rp.15.350.756.700,- (lima belas milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Tanah ini telah memiliki sertifikat dengan Hak Pakai Nomor 19 dan 20 tanggal 10 April 2007.
- b) Tanah Eks Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Ambon telah menjadi tanah milik Pengadilan Militer III-18 Ambon sejak tanggal 14 Januari 2014 dengan luas 870 m² yang terletak di Desa Hative Kecil Ambon.

2) Peralatan dan Mesin.

Barang Milik Negara peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat dibedakan menjadi:

a) Kendaraan dinas.

Kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 3 (tiga) unit.

Tabel Daftar kendaraan dinas

No	Uraian	Tipe/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	Avanza Tahun 2011	1 Unit	Baik	Digunakan untuk operasional kantor
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	Rush Tahun 2022	1 Unit	Baik	Digunakan untuk operasional Kadilmil
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	Avanza Tahun 2012	1 Unit	Baik	Digunakan untuk operasional kantor

b) Peralatan dan mesin lainnya

Tabel Daftar Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Pompa Air	4	4 baik
2.	Station Wagon	2	2 baik
3.	Rak penyimpanan	2	2 baik
4.	Lemari penyimpanan	1	1 baik
5.	Lemari besi/metal	19	19 baik
6.	Lemari Kayu	8	8 baik
7.	Filling cabinet besi	9	9 rusak ringan
8.	Filling cabinet kayu	1	1 baik
9.	Brandkas	1	1 baik
10.	Tabung Pemadam Kebakaran	3	3 baik
11.	Cctv _ Camera Control Television System	10	10 baik
12.	Papan Visual/Papan Nama	15	15 baik
13.	White Board	6	6 baik
14.	Peta	2	2 baik
15.	Alat penghancur kertas	1	1 baik
16.	Mesin absensi	1	1 baik
17.	Mesin pemotong kertas	1	1 baik
18.	Papan gambar	1	1 baik
19.	Perkakas lainnya	1	1 baik
20.	Meja kerja kayu	39	27 baik 12 rusak ringan
21.	Kursi besi metal	117	117 baik
22.	Kursi kayu	26	26 baik
23.	Sice	6	5 baik 1 rusak ringan
24.	Meja rapat	2	2 baik
25.	Meja computer	13	13 rusak ringan
26.	Meja resepsionis	1	1 baik
27.	Kursi fiber glas/plastic	14	14 baik
28.	Partisi	2	2 baik
29.	Rak Sepatu	3	3 baik
30.	Mesin pemotong rumput	1	1 baik
31.	Lemari es	2	2 rusak ringan
32.	Ac Sentral	2	2 baik
33.	AC Split	24	24 baik
34.	Kompore Gas	1	1 rusak ringan
35.	Rak piring aluminium	1	1 baik
36.	Mixer	1	1 baik
37.	Televisi	3	3 baik
38.	Sound System	1	1 baik
39.	Microphone	9	9 baik
40.	Lambang garuda Pancasila	3	3 baik
41.	Gambar presiden	1	1 baik
42.	Tiang Bendera	6	6 baik
43.	Tangga aluminium	1	1 baik
44.	Lambang instansi	1	1 baik
45.	Asbak tinggi	6	6 baik
46.	DVD Player	1	1 baik
47.	Tangka Air	5	5 baik
48.	UPS	6	6 baik
49.	Battery Charger (peralatan studio Audio)	1	1 baik

50.	Power Amplifier	1	1	baik
51.	Digital Led Running Text	1	1	baik
52.	Digital Keyboard Technics	1	1	baik
53.	Camera Digital	1	1	baik
54.	LCD Monitor	8	3 5	baik rusak ringan
55.	Pesawat telepon	37	37	baik
56.	Facsimile	1	1	rusak ringan
57.	Finger Print	1	1	baik
58.	Switcher Matrix And Server	1	1	baik
59.	Switcher Manual	1	1	baik
60.	Booster	1	1	baik
61.	Receiver Audio/Video	1	1	baik
63.	Internet	1	1	baik
64.	Komputer jaringan lainnya	1	1	baik
65.	P.C.Unit	22	22	baik
66.	Laptop	15	15	baik
67.	CPU (Peralatan personal computer)	5	5	baik
68.	Printer (Peralatan personal computer)	7	7	baik
69.	Scanner (peralatan personal computer)	2	2	baik
70.	Server	3	3	baik
71.	Router	1	1	baik
72.	Rak Server	1	1	baik
73.	Monografi	22	22	baik
74.	Alat music lainnya	1	1	baik
75.	Loundspeaker	4	4	baik
76.	Audio Mixing Console	1	1	baik
77.	Camera Conference	1	1	baik
78.	Bracket Standing Peralatan	1	1	baik

c. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana.

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA).

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi:

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

d. Penghapusan Sarana Dan Prasarana.

Pada tahun 2023, aset Barang Milik Negara di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdapat dalam aplikasi SIMAK-BMN tidak ada barang yang diajukan untuk penghapusan.

9. PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Militer Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Jayapura secara periodik per semester.

Setiap periode Tahun Anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-19 Jayapura senantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk Tahun Anggaran berikutnya. Namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhan tersebut, belum semuanya dapat direalisasikan. Dalam Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Militer III-19 Jayapura melaksanakan pengadaan sarana dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.13.951.634.947,- (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh*). Dari pagu tersebut, realisasi pengadaan sarana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Realisasi Pengadaan

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	Pengadaan Gedung dan Bangunan	Rp. 13.951.634.947
Total Nilai		Rp. 13.951.634.947

Di bawah ini kami sajikan seluruh BMN yang dimiliki Pengadilan Militer III-19 Jayapura:

a. Kendaraan Dinas.

Tabel Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Mini Bus	2006	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Operasional Dilmil
2.	Mini Bus	2011	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Kadilmil
II.	Jenis kendaraan Roda 2					
1.	Honda Supra X 125	2007	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Panitera
2.	Honda Gl Max	2006	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Panmud Hukum
3.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Operasional Kantor
4.	Honda NF 125 S	2006	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Operasional Kantor

b. Rumah Dinas.

Dilmil III-19 Jayapura belum memiliki Rumah Dinas.

1) Tanah dan Bangunan

Tabel Tanah Dan Bangunan

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Tanah	2006, 2016	Baik	-	-
2.	Bangunan Lainnya	2017	Baik	-	-

2) Peralatan dan Mesin.

Tabel Peralatan Dan Mesin

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Mesin Foto Copy Folio	2013	1	-	-	1
2.	Lemari Besi/Metal	2008, 2019	6	6	-	-
3.	Lemari Kayu	2008, 2011	13	12	-	1
4.	Rak Kayu	2017	2	2	-	-
5.	Filing Cabinet Besi	2007,2008, 2011	10	8	-	2
6.	Brandkas	2008	1	1	-	-
7.	Peti Uang	2008	1	-	-	1
8.	Tabung Pemadam Api	2009	4	4	-	-
9.	CCTV	2009	1	-	1	-
10.	Papan Visual	2008	3	3	-	-
11.	Alat Penghancur Kertas	2008, 2009	2	2	-	-
12.	Alat Pemotong Kertas	2009	1	1	-	-
13.	LCD Projector/Infocus	2008	1	1	-	-
14.	Acces Control System	2014	1	1	-	-
15.	Meja Kerja Kayu	2006, 2007, 2008, 2009, 2010	33	30	-	3
16.	Kursi Besi/Metal	2006, 2007, 2008, 2009, 2010	116	111	-	5
17.	Kursi Kayu	2010	3	3	-	-
18.	Sice	2006, 2008, 2009	5	2	-	-
19.	Meja Komputer	2012	5	5	-	-
20.	Kasur/Spring Bed	2009	1	1	-	-
21.	Meubelair Lainnya	2009	1	1	-	-
22.	Mesin Penghisap Debu	2008	1	1	-	-
23.	A.c. Split	2006, 2007, 2008, 2009	10	10	-	-
24.	Televisi	2007	1	1	-	-
25.	Sound System	2008	1	1	-	-
26.	Stabilisator	2017	1	1	-	-
27.	Lambang Instansi	2012	1	1	-	-
28.	Handy Cam	2008	1	-	-	1
29.	Karpet	2014	1	1	-	-
30.	Alat Rumah Tangga Lainnya	2008	3	3	-	-
31.	Audio Command Desk	2010	1	1	-	-
32.	UPS	2006, 2009, 2010, 2013	5	5	-	-
33.	Pesawat Telephone	2008	1	1	-	-
34.	Facsimile	2008	2	2	-	-
35.	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	2009	1	1	-	-
36.	Switching Matrix and Server	2013	1	1	-	-
37.	Switcher Manual	2012	1	1	-	-
38.	Conecctor	2008	1	1	-	-
39.	Genset	2012	1	-	-	1

40.	Mainframe	2010	1	-	-	1
41.	Komputer Jaringan Lainnya	2019	1	1	-	-
42.	P.C Unit	2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2021, 2022	25	25	-	-
43.	Lap Top	2009, 2010, 2011, 2022	14	14	-	2
44.	Scanner	2016	1	1	-	-
45.	CPU	2008	1	1	-	-
46.	Monitor	2008	1	1	-	-
47.	Printer	2009, 2010, 2017, 2022	12	3	5	4
48.	Server	2013, 2015, 2019	3	3	-	-
49.	Rak Server	2019	1	1	-	-
50.	Kabel UTP	2012, 2013	2	2	-	-
51.	Hubbel UTP	2016	1	1	-	-
52.	Mixer Settler Type Adsorption Equipment	2008	1	-	-	1

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.

1. PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam lembaga publik merupakan suatu keniscayaan. hal itu terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan website pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya mengambil peranan penting dalam keterbukaan informasi. melalui pengelolaan website yang berisikan informasi mengenai transparansi keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA serta transparansi putusan.

a. Dukungan Aplikasi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen BadilmiltunMA-RI dan Kementerian Keuangan. Serta aplikasi yang di bangun oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sendiri.

1) Di Bidang Perkara:

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Direktori Putusan
- Aplikasi Opera (*Google Drive*)

- 2) Di Bidang Kepegawaian:
 - Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).
 - Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)
 - My ASN
 - SIASN BKN
 - KOMDANAS MA RI

- 3) Di Bidang Keuangan:
 - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
 - Sistem Aplikasi Satker (SAS)
 - Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI).
 - Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi
 - Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - Monev DJA
 - KOMDANAS MA RI

- 4) Di Bidang Pelayanan Publik:
 - Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL) Elektronik Tamu Militer (*e- Tamil*).
 - SP4N Laporan!
 - SIWAS MA RI

- 5) Di Bidang Umum
 - Aplikasi SIMAN
 - Aplikasi E-SADEWA
 - SAKTI (Persediaan)
 - KOMDANAS MA RI
 - Si Pinter (Aplikasi Perpustakaan berbasis Web)

- 6) Di Bidang Perencanaan
 - Monev Bappenas
 - *e-Iplans*
 - SAKTI
 - Satu DJA

b. Dukungan Jaringan, Internet dan Server

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menunjuk Inti Netsebagai penyedia layanan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Kecepatan akses 40 Mbps
- Unlimited traffic and access time
- IP Static / 30
- Network monitoring MRTG
- Support network 24 x 7
- Service Level Agreement Qos 99,5 %

Adapun server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berjumlah 2 (dua) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2015 yang digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Mahkamah Agung RI tahun 2019 digunakan sebagai server pendukung e-Court. Spesifikasi masing-masing server sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

Data Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung SIPP	Merk Intel Xeon 3,4 Ghz	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSIMegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
	Server Pendukung e-Court		
Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz			
Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC			
Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC			
OS Centos			
Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA			
Storage Controller PRAID CP400i			
Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp			

2. PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.

Mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern.

a. IMPLEMENTASI e-COURT

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. e-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain:

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini dikarenakan :

- 1) Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- 2) Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah perkara pidana dan pelanggaran saja. Dalam penyelesaian

perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa / Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan Putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

- 3) Pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

b. IMPLEMENTASI SIPP.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan. SIPP membantu kinerja Pengadilan untuk tertib administrasi, efektif dan efisien. SIPP digunakan juga sebagai media monitoring dan pengawasan.

Dalam penggunaan SIPP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/42/Kep/VIII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2023 adalah versi 5.3.1.

Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 3.0.3.

Sampai dengan akhir tahun 2023 dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan rasio penanganan perkara sebesar 176.92%.

c. DUKUNGAN APLIKASI.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional. Aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu:

- 1) Di Bidang Perkara
 - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 - Monitoring Implementasi SIPP (MIS).
- 2) Di Bidang Kepegawaian.
 - Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).
- 3) Di Bidang Keuangan
 - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
 - Sistem Aplikasi Satker (SAS)
 - Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI)
 - Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi (SPRINT)
 - Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - Elektronik Integrated Planning System (e-IPLANS).
- 4) Di Bidang Pelayanan Publik.
 - Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL)

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu:

- 1) Di Bidang Kepegawaian:
 - Sistem Informasi Personel Dilmil (SIPDIL).
 - Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (ASK-TI).
- 2) Di Bidang Perkara:
 - Sistem Komunikasi Dan Informasi Persidangan (SISKOMINFOSID).
 - Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan (SIPTERA).

3) Di Bidang Pelayanan Publik:

- Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA).
- Chat Online berbasis Website.

d. DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER.

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Selain menggunakan LAN, transmisi data juga menggunakan jaringan wifi. Terdapat 9 access point yang membantu mendistribusi sinyal wifi ke seluruh gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk mendukung ketersediaan jaringan internet, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjuk PT. Inti Data Telematika sebagai pihak ketiga penyedia layanan jaringan internet dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Kecepatan akses 100 Mbps.
- Unlimited traffic and access time.
- IP Static / 30.
- Network monitoring MRTG.
- Support network 24 x 7.
- Service Level Agreement Qos 99,5%.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki dan mengoperasikan server sebanyak 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019.

Tabel Spesifikasi Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5	1	Unit
	Processor Dual-core Intel Xeon E5410 2.33 GHz 2 GB		
	Memory PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 16 GB Max		
	Hard Drive up to 8 SAS/SATA via HBA or RAID Controller		

	Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0,1,10)		
	Power Supply One 650W Single Non-Redundant		
	OS Ubuntu		
Server Pendukung SIPP	Merk Fujitsu	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4	1	Unit
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp		
	Warranty 3/3/3		

3. PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN.

a. Implementasi *e-court*.

e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara *Online*, Mendapatkan Taksiran Panjar / Biaya Perkara secara *online*, Pembayaran secara *online*, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- 1) *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- 2) *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*)
- 3) *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara *online*)
- 4) *e-Litigation* (Persidangan secara *online*)

Namun, untuk saat ini, jajaran Pengadilan Militer III-13 belum menggunakan e-court dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara pidana. Sementara e-court sendiri adalah untuk perkara perdata. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi TI kedepan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI maka e-court juga akan digunakan untuk perkara pidana.

b. Implementasi SIPP.

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan salah satu aplikasi berbasis web, Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang modern, dalam peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara, Kegunaan dari SIPP selain untuk mempermudah administrasi perkara juga sebagai alat penelusuran terhadap data perkara yang masuk di Pengadilan Militer III-13 Madiun mulai dari Register perkara, status perkara hingga perkara tersebut di putus.

Seluruh informasi perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat di akses oleh publik secara gratis, di tahun 2023 ini Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerapkan aplikasi SIPP. Dasar dibentuknya SIPP adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Surat keputusan Ketua MARI Nomor 1-144/KMASSK/I/2011 tentang Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar Pelayanan pengadilan.

Pada Tahun 2022, versi SIPP Pengadilan Militer III-13 Madiun mengalami peningkatan ke versi 5.1.0. dan pada tahun 2023 Versi SIPP mengalami empat kali peningkatan versi yaitu 5.1.1., 5.2.0., 5.3.0. dan terakhir versi 5.3.1. Peningkatan versi tersebut didasari adanya penyempurnaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang terus berkembang.

Sarana pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan Militer III-13 Madiun meliputi:

1) Komputer Server dengan spesifikasi:

- a) Merk : Fujitsu PRIMERGY RX100 S7 Server.
- b) CPU : Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1230 V2 @3.30 Ghz
- c) Memory : 8 Gb
- d) Hard Disk : 300 Gb
- e) OS : Linux centos 7

2) Router:

- a) Merk : MikrotikRB1100AHX2
- b) CPU : Freescale P2020 1066MHz Dual Core
- c) Main Storage : 64 MB
- d) RAM : 1,5 Gb
- e) LAN Port : 13 Port
- f) OS : Router OS

3) Bahwa dalam mendukung pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan transparansi peradilan pada bulan November 2021 Pengadilan Militer III-13 mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung berupa:

a) Server dengan spesifikasi:

- (1) Merk: Fujitsu TX1330M4
- (2) CPU : Intel Xeon E-2134
- (3) Memory : 32 GB
- (4) Hard Disk : 2 x 1TB

b) Komputer PTSP:

- (1) Merk: HP AIO ProOne 600 G5
- (2) CPU : Intel Core i5
- (3) RAM: 4GB
- (4) Hard Disk : 1TB
- (5) OS : Windows 10

c) UPS:

- (1) Merk: APC Back-Up BX1400U-MS
- (2) DayaKeluar : 1400VA/700W
- (3) Form factor : Tower

- d) Kiosk Touchscreen:
 - (1) Merk: Vestouch
 - (2) OS : Android
 - (3) Display : 21,5 Inch

 - e) Rak Server:
 - (1) Merk: Indorack
 - (2) Ukuran : 19 Inch
 - (3) Jenis: *Close rack Glass Door*
- 4) Komputer Client yang berfungsi untuk input data perkara berdasarkan tupoksi masing-masing, rata-rata menggunakan komputer yang memadai serta menggunakan system operasi Windows 7 atau di atasnya. Sinkronisasi data dari server local ke server Mahkamah Agung dilakukan setiap hari agar data perkara selalu terupdate. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) web Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan alamat www.sipp.dilmil-madiun.go.id juga dilakukan sinkronisasi setiap hari sehingga data SIPP Web Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bisa diakses oleh masyarakat umum selalu terupdate.

One Day One Publish merupakan bentuk pelayanan kepada *public*, dalam hal ini khususnya terhadap pencari keadilan, dimana Pengadilan Militer III-13 Madiun mempublikasikan Informasi perkara maksimal 1 (satu) hari setelah perkara tersebut diputus. Akan tetapi Pengadilan Militer III-13 Madiun saat ini terus berupaya melaksanakan Pelayanan *Same day Publish*, yaitu mempublikasikan pada hari yang sama pada saat perkara tersebut diputus. Hal ini dapat terlaksana karena pada Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 5.0.1 telah terintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga memudahkan Majelis Hakim dalam mengupload Putusan dan pada hari itu juga Putusan tersebut dapat langsung terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) untuk dipublikasikan.

4. PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam lembaga publik merupakan suatu keniscayaan. Hal itu terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan Website pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengambil peranan penting dalam keterbukaan informasi. Melalui pengelolaan website yang berisikan informasi mengenai transparansi keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA serta transparansi putusan.

Adapun data alamat website Pengadilan Militer III-14 Denpasar aktifasinya sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar di bidang Teknologi dan Informasi maka didukung berbagai perangkat teknologi yaitu:

a. Server:

Tebal Server

No	Satker	Jenis barang	Terpelihara	Rusak Berat	Total
1	Pengadilan Militer III-14 Denpasar	Server	3		3
		Printer	9		9
		Laptop	20		20
		PC. Unit	26		26
		Stabilizer	2		2
		Router	3		3
		UPS	6		6

b. Perangkat keras

Perangkat Keras Teknologi Informasi (Hardware) merupakan semua bagian yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam bentuk fisik. Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas agar efektif dan efisien telah menyiapkan sarana dan prasarana kinerja teknologi informasi berupa perangkat keras sebagai berikut:

Tabel Aplikasi

No	Satker	Nama Aplikasi	Pembuat/Pengelola Aplikasi	Kondisi
1	Pengadilan Militer III-14 Denpasar	Simak BMN	Kemenkeu	Baik
		Saiba	Kemenkeu	Baik
		GPP Gaji	Kemenkeu	Baik
		SPM	Kemenkeu	Baik
		SAS	Kemenkeu	Baik
		SAKTI	Kemenkeu	Baik
		Sikep	Mahkamah Agung	Baik
		Komdanas	Mahkamah Agung	Baik
		SIPP	Mahkamah Agung	Baik
		Simari	Mahkamah Agung	Baik
		Siratmil	Ditjen Badilmiltun	Baik
		Simpekip	Dilmil III-14 Denpasar	Baik
		Ampura	Dilmil III-14 Denpasar	Baik
		E-Santi	Dilmil III-14 Denpasar	Baik

c. Implementasi SIPP.

Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yaitu aplikasi sistem penelusuran perkara yang dapat diakses melalui internet sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai perkara yang ada pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang perkara yang ada pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk informasi perkara. Saat ini Aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Miiter III-14 Denpasar adalah SIPP Versi 5.3.1

5. PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG.

Pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Implementasi SIPP sudah sampai pada versi terbaru 5.3.1 dan juga aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang merupakan aplikasi pengawasan SIPP terdiri dari 8 (delapan) submenu, antara lain:

- a. Beranda.
- b. Data Umum.
- c. Pidana.
- d. Penetapan.

- e. Jadwal Sidang.
- f. Putus dan Minutasi.
- g. E-Doc.
- h. Kinerja.

Terdapat juga aplikasi Siratmil (Sistem Informasi Administrasi Peradilan Militer) yang merupakan aplikasi monitoring kegiatan kantor oleh Pimpinan dan Pimpinan Atas mulai dari Persuratan, Kepaniteraan, Kepegawaian, Keuangan dan BMN serta Umum dan implementasi terbaru adalah e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web untuk integrasi berkas pidana antar penegak hukum.

6. PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR.

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-16 Makassar bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Militer III-16 Makassar telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan website resmi di alamat www.dilmil-Makassar.go.id. Dalam website ini Pengadilan Militer III-16 Makassar menyajikan informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Militer III-16 Makassar baik informasi yang bersifat teknis, non teknis maupun informasi umum lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-16 Makassar menggunakan jaringan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Adapun dalam hal peningkatan bandwidth internet, sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 724/SEK/OT.01.1/5/2019 tanggal 1 Januari 2022 Pengadilan Militer III-16 Makassar menunjuk PT. Fibernet sebagai penyedia layanan.

Jumlah Server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-16 Makassar berjumlah 2 (dua) unit. 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019 untuk digunakan sebagai server pendukung e-court.

a. **IMPLEMENTASI e-COURT**

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Secara umum, *e-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. *e-Court* merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain:

- *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online)

- *e-Litigation* (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi *e-court* saat ini tidak dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar mengingat perkara Tata Usaha Militer pada peradilan militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi.

b. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat. SIPP juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selanjutnya Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: W3.Mil05/29/KEP/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP pada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan versi. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar di tahun 2023 adalah versi 5.3.1. Pembaruan versi ini sehubungan dengan adanya pengembangan aplikasi *E-Berpadu* versi 3.0.0 berdasarkan Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 119/Bua.6.01/TL.1.2/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Pemberitahuan pembaruan aplikasi SIPP tingkat pertama versi 5.3.1. Dan sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-16 Makassar menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 5.3.1

Sampai dengan akhir tahun 2023 dapat dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan rasio penanganan perkara sebesar 95,42%.

7. PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

a. Implementasi e-court

Electronic Court (*e-court*) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkaca dari negeri kangguru (Australia), *e-court* menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya *e-court* ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski *Federal Court of Australia* (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya meninggalkan *paper based system* dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari *paper based* ke *paperless*.

Aplikasi *e-court* dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017. Kala itu Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan SUSTAIN EU-UNDP dan Tim Pembaharuan Peradilan membentuk kelompok kerja khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya. Aplikasi ini cukup lengkap karena berisi modul-modul, seperti:

- 1) Pembuatan akun (*account/user*) perorangan maupun advokat secara *online* (untuk saat ini hanya diberlakukan untuk kalangan advokat).

- 2) Perhitungan biaya panjar perkara secara *online*.
- 3) Pendaftaran perkara secara elektronik dan terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- 4) Panggilan para pihak secara elektronik.
- 5) Perekaman (*input*) data/informasi pada tahap Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik
- 6) Pemberitahuan putusan/penetapan secara elektronik.

Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu di install di masing-masing *server* maupun *website* pengadilan, mengapa?

Karena otomatis akan terkoneksi dengan *database* pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan *e-court*. Untuk saat ini pengguna terdaftar hanya ditujukan kepada Advokat, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum. Untuk mendaftar perkara secara elektronik Advokat harus membuat *account/user* pada aplikasi *e-Court* dengan domisili elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi di mana Advokat tersebut di sumpah. Setelah *account/user* diaktivasi, maka Advokat harus melengkapi data Advokat seperti KTP, Kartu Tanda Anggota Advokat, dan Berita Acara sumpah yang harus diunggah ke dalam aplikasi *e-court*. Pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara secara elektronik pada Pengadilan yang telah mengimplementasikan *e-court* dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sudah terdaftar dan tervalidasi pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung. Pendaftaran perkara secara elektronik akan mendapatkan *barcode* dan nomor *register online* (bukan nomor perkara).

Tahapan pendaftaran perkara secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a) Memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum memulai pendaftaran.
- b) Mendaftarkan surat kuasa secara elektronik.
- c) Memasukkan data pihak.
- d) Mengunggah dokumen (*surat gugatan, surat kuasa* dan lain sebagainya).
- e) Mendapatkan e-SKUM (taksiran panjar biaya perkara).
- f) Mendapatkan nomor pembayaran (*Virtual Account*) dan menyelesaikan pembayaran secara *online*. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah bekerjasama dengan Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI.
- g) Menunggu verifikasi dan registrasi Nomor Perkara dari Pengadilan yang dimohonkan.
- h) Mendapatkan Nomor Perkara.

E-court dapat digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen persidangan seperti *Replik, Duplik*, Kesimpulan dan atau Jawaban. Aplikasi *e-court* juga digunakan untuk pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang telah menyetujui dan kepada penggugat/pemohon yang mendaftar secara elektronik dianggap menyetujui menggunakan saluran elektronik untuk pemanggilan.

Aplikasi *e-court* dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (selama memiliki *account/user*) dengan dibekali koneksi *internet* dan perangkat yang memiliki *web browser*. Sebagai informasi, adapun tujuan daripada diluncurkannya Aplikasi *e-court* ini ialah dalam rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Bussiness/EODB*) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, aplikasi ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini adalah suatu bentuk kemajuan dan inovasi yang

digaungkan oleh Mahkamah Agung, menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta aparat peradilan di lingkungannya untuk mendukung implementasi inovasi ini.

Pengadilan Militer III-17 Manado sejak awal bulan Januari 2019 sampai dengan akhir tahun 2019 belum menerapkan *e-court* hal ini dikarenakan belum adanya sarana pasarana yang mendukung untuk pelaksanaan *e-court*. Sebagai persiapan penerapan *e-court* Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 13 November 2019 telah memperoleh sarana dan prasarana penunjang penerapan *e-court* dari Mahkamah Agung dan pada tahun 2020 *e-court* sudah siap diterapkan.

b. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Militer

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai mana telah diubah dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung RI membangun dan mengembangkan sebuah aplikasi pencatatan dan penelusuran perkara di pengadilan yaitu SIPP yang pada versi 3.1.1 sudah dipergunakan di 4 (empat) Badan Peradilan. SIPP merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Aplikasi SIPP Manual Pengguna (User Manual) Aplikasi Perangkat Lunak Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 di Pengadilan Militer Utama merupakan *web-based application*, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai web browser melalui

suatu jaringan Internet atau intranet. Contoh umum web-based aplikasi adalah Facebook, Google, dan Twitter. Dalam perkembangannya SIPP dimulai dengan versi 1 dimana hanya beberapa Pengadilan Negeri yang digunakan sebagai percontohan. Kemudian pada versi 2 SIPP diluncurkan dengan pembaharuan diantaranya jurnal keuangan perkara perdata, auto generate Template penetapan hakim, Berita Acara Persidangan dan pembaharuan fasilitas dan fungsi yang lainnya. Kemudian pada versi 3 dimana Pengadilan Tinggi turut berperan serta dalam pencatatan perkara dengan diluncurkannya SIPP-PT. Pada versi 3 ini juga mencakup perbaikan-perbaikan pada versi SIPP untuk Pengadilan Negeri. Versi berikutnya dari SIPP adalah versi 3.1.1 dimana aplikasi SIPP untuk Pengadilan Negeri dibangun ulang menjadi SIPP untuk Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat mencakup 4 (empat) lingkungan peradilan. Versi selanjutnya 3.1.1 dari SIPP adalah versi 3.1.2. Versi paling akhir dari SIPP yang digunakan di Pengadilan Militer III-17 Manado adalah versi 3.3.0.1. Pada tahun 2020 SIPP yang digunakan Pengadilan Militer III-17 Manado mengalami dua kali update yaitu versi 4.0.0. kemudian diupdate pada bulan November 2020 dengan Versi 4.01 sampai dengan akhir tahun 2021.

Kemudian di upgrade kembali pada tahun 2022 dengan SIPP versi terbaru yaitu versi 5.1.0. Kemudian di Tahun 2023 di Upgrade kembali ke SIPP versi terbaru yaitu versi 5.3.1. Implementasi SIPP di Pengadilan Militer III-17 Manado sampai dengan akhir bulan Desember 2023 sudah mencapai 99,9%.

8. PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

Penerapan pengelolaan teknologi informasi merupakan kebutuhan di setiap instansi pemerintah penyelenggara pelayanan public mengingat peran teknologi informasi yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arahan pembaruan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya termasuk Pengadilan Militer III-18 Ambon. Adapun proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-18 Ambon bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsisten, ketepatan dan keandalan.

Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

a. Implementasi e-Court.

Berdasarkan Keputusan Ditjen Badilmiltun MARI, yang dimaksud *e-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Secara umum, *e-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftar perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik

dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada tanggal 4 April 2018. *e-Court* merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam *e-court* antara lain:

- *e-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan)
- *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*)
- *e-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara *Online*)
- *e-Litigation* (Persidangan secara *Online*).

Dari beberapa layanan yang tersedia dalam aplikasi *e-court* ini, masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-18 Ambon, hal ini dikarenakan:

- Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak melalui proses pendaftaran, tetapi melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer IV-19 Ambon.
- Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah perkara pidana dan perkara pelanggaran. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa/Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-18 Ambon juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer IV-19 Ambon.
- Pemanggilan pihak bukan kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, namun kewenangan Oditurat Militer IV-19 Ambon.

b. Implementasi SIPP

Sebagai sebuah aplikasi yang membantu mempermudah pelaksanaan business process dan penyediaan informasi publik atas penanganan perkara di pengadilan, aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan saat ini pada pengadilan Militer III-18 Ambon dan dapat diakses oleh umum serta digunakan sebagai data penyusunan laporan keadaan perkara pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis Web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat. SIPP juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim. SIPP dibangun sebagai media kerja yang efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan biaya murah.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan versi. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon di akhir tahun 2023 adalah versi 5.3.1 Dan sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang ada di SIRATMIL yaitu Versi 5.3.1.

c. Dukungan Aplikasi.

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas, Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan beberapa aplikasi. Aplikasi tersebut di dapat dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MARI dan Kementerian Keuangan, dimana aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional, sedang aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri oleh pegawai dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Aplikasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilmiltun MARI yang digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon diantaranya adalah:

- 1) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu aplikasi dibidang perkara.
- 2) Monitoring Implementasi SIPP(MIS)
- 3) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), yaitu aplikasi di bidang kepegawaian.
- 4) Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), yaitu aplikasi di bidang administrasi.
- 5) Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yaitu aplikasi dibidang administrasi Barang Milik Negara.
- 6) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi dibidang keuangan.
- 7) Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- 8) *Electronic Integrated Planning System* (E-IPLANS) yaitu aplikasi dibidang keuangan.
- 9) Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yaitu aplikasi dibidang perkara.

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu:

- 1) Pusat Aplikasi Pelayanan Elektronik Data (PAPEDA), yaitu aplikasi virtual yang melayani informasi dibidang, Kesekretariatan melayani informasi tentang organisasi, dibidang Kepaniteraan melayani informasi tentang perkara, dibidang pengaduan melayani informasi tentang pengaduan dan dibidang pelayanan informasi tentang profil dan layanan lainnya.
- 2) Elektronok Pemusatan Data Informasi Monitoring Cuti dan Kinerja (E-PATTIMURA), yaitu aplikasi yang digunakan untuk monitoring, pengajuan cuti pegawai dan capaian kinerja.

d. Dukungan Jaringan, Internet dan Server.

Jaringan computer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan jaringan LAN (*Local Area Connection*) dengan sistem client-server. Desain jaringan ini memungkinkan antar computer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Adapun Server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima pada bulan Desember 2019 sebagai server pendukung *e-court*.

Tabel Data Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur Jaringan		
Jaringan internet	Total bandwidth	20 Mbps
	Nama provider internet	Indihome Telkom
	Wifi dengan layanan internet	Tersedia untuk dinas dan pengunjung
Jaringan LAN	Koneksi LAN	Jaringan local antar ruang

9. PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA.

a. Implementasi *e-court*.

e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar / Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- 1) *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- 2) *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*)
- 3) *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online)
- 4) *e-Litigation* (Persidangan secara online)

Namun, untuk saat ini, jajaran Pengadilan Militer III-19 Jayapura belum menggunakan *e-court* dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara pidana. Sementara *e-court* sendiri adalah untuk perkara perdata. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi TI kedepan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI maka *e-court* juga akan digunakan untuk perkara pidana.

b. Implementasi SIPP.

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan salah satu aplikasi berbasis web, Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern, dalam peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara, Kegunaan dari SIPP selain untuk mempermudah administrasi perkara juga sebagai alat penelusuran terhadap data perkara yang masuk di Pengadilan Militer III-19 Jayapura mulai dari Register perkara, status perkara hingga perkara tersebut di putus.

Seluruh informasi perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura dapat di akses oleh publik secara gratis, di tahun 2023 ini Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah menerapkan aplikasi SIPP Versi 5.3.1 Dasar dibentuknya SIPP adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Surat keputusan Ketua MARI Nomor 1-144/KMASSK/I/2011 tentang Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standart Pelayanan pengadilan.

Sarana pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan Militer III-19 Jayapura meliputi :

(1) Komputer Server dengan spesifikasi:

- (a) Merk : LENOVO X 3250 M5 AC 1
- (b) CPU : Intel Xeon E3-1200 V3
- (c) Memory : 8 Gb
- (d) Hard Disk : 500 Gb
- (e) OS : Linux centos

(2) Router:

- (a) Merk : Mikrotik Router Board 1100AHX2
- (b) CPU : Freescale P2020 1066MHz Dual Core
- (c) Main Storage : 64 MB
- (d) RAM : 1,5 Gb
- (e) LAN Port : 13 Port
- (f) OS : RouterOS

(3) Perangkat pendukung pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengadilan Militer III-19 Jayapura:

(a) Komputer PTSP:

- Merk : HP AIO ProOne 600 G5
- CPU : Intel Core i5
- RAM : 4GB
- Hard Disk : 1TB
- OS : Windows 10

(b) Kiosk Touchscreen:

- Merk : Vestouch
- OS : Android
- Display : 21,5 inch

(4) Komputer Client yang berfungsi untuk input data perkara berdasarkan tupoksi masing-masing, rata-rata menggunakan komputer yang memadai serta menggunakan system operasi Windows 7 atau di atasnya.

Sinkronisasi data dari server local ke server Mahkamah Agung dilakukan setiap hari agar data perkara selalu terupdate. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) web Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan alamat sipp.dilmil-jayapura.go.id juga dilakukan sinkronisasi setiap hari sehingga data SIPP Web Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bisa diakses oleh masyarakat umum selalu terupdate.

One Day One Publish merupakan bentuk pelayanan kepada publik, dalam hal ini khususnya terhadap pencari keadilan, dimana Pengadilan militer III-19 Jayapura mempublikasikan Informasi perkara maksimal 1 (satu) hari setelah perkara tersebut diputus. Akan tetapi Pengadilan Militer III-19 Jayapura saat ini terus berupaya melaksanakan Pelayanan *Same day Publish*, yaitu mempublikasikan pada hari yang sama pada saat perkara tersebut diputus. Hal ini dapat terlaksana karena pada Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 411 telah terintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga memudahkan Majelis Hakim dalam mengupload Putusan dan pada hari itu juga Putusan tersebut dapat langsung terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) untuk dipublikasikan.



BAB V


PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. ZONA INTEGRITAS

Sesuai peraturan Menpan dan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan instansi pemerintah, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI di Pengadilan Militer pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 2017. Berikut ini adalah daftar Pengadilan Militer di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah melaksanakan pembangunan zona integritas, yaitu :

No	Satker	Predikat		Foto Sertifikat
		WBK	WBBM	
1	Dilmilti III Surabaya	10 /12/ 2019	Diusulkan tahun 2023 (Gagal)	
2	Dilmil III-12 Surabaya	10 /12/ 2019	Diusulkan tahun 2023 (Gagal)	

3	Dilmil III-13 Madiun	10 /12/ 2018	-	<p>WBK</p> 
			18 /12/ 2020	<p>WBBM</p> 
4	Dilmil III-14 Denpasar	Diusul kan tahun 2023 (Gagal)	-	-
5	Dilmil III-15 Kupang	Diusul kan tahun 2023 (Gagal)	-	-
6	Dilmil III-16 Makassar	Tidak Mengusulk an di tahun 2023	-	-

7	Dilmil III-17 Manado	21 Desember 2020	Diusulkan tahun 2023 (Gagal)	 <p>PIAGAM PENGHARGAAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Memberikan Penghargaan Kepada: Pengadilan Militer III-17 Manado atas persembahannya sebagai unit kerja pelayanan berprestasi WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) Jakarta, 21 Desember 2020 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjajaja Kumala</p>
8	Dilmil III-18 Ambon	20 Desember 2021	Diusulkan tahun 2023 (Gagal)	 <p>PIAGAM PENGHARGAAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Memberikan Penghargaan Kepada: PENGADILAN MILITER III-18 AMBON atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berprestasi menuju WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) Jakarta, 20 Desember 2021 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjajaja Kumala</p>
9	Dilmil III-19 Jayapura	Diusulkan tahun 2023 (Gagal)	-	-



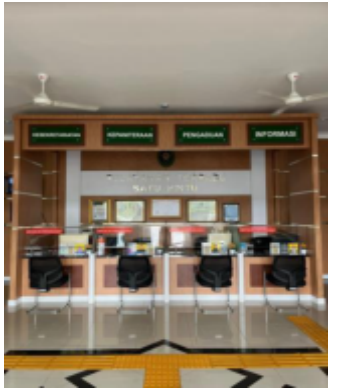
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Kalsifikasi Surat Mahkamah Agung RI serta Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 460/DjMT/Kep/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, anti korupsi, kolusi, PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan. Melalui Meja PTSP ini, pencari Keadilan cukup datang kemeja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas PTSP dan seluruh Pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang akan bekerja dan melayaninya.

Gambar Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Satker	Pembangunan PTSP (Tahun)/ Prestasi	SK Tim PTSP	Foto PTSP
1	Dilmilti III Surabaya	2018 dan direnovasi tahun 2022 dengan DIPA TA 2022	Surat Keputusan Kadilmilti III Surabaya Nomor W3.Mil/09/PS.02/V III/2022 tanggal 10 Agustus 2022	
2	Dilmil III-12 Surabaya	2018	Surat Keputusan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/13/KEP/II/2023 tanggal 2 Februari 2023	
3	Dilmil III-13 Madiun	2018 dan direnovasi tahun 2021 dengan DIPA TA 2021/ Juara III perlombaan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Militer (2018)	Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/62/Sprin/I/2022 tanggal 21 Januari 2022	
4	Dilmil III-14 Denpasar	2018	Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor W3-Mil03/25/SK/I/2023 tanggal 2 Januari 2023	

5	Dilmil III-15 Kupang	<p>2018 dan direnovasi tahun 2019 dengan DIPA TA 2019/</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan dari Kemenpan RB Tahun 2022 sebagai Lembaga dalam lingkungan Peradilan yang melaksanakan “Pelayanan Prima” - Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTT dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Yudikatif sebagai Badan Publik dengan Predikat “Cukup Informatif”. 	<p>Surat Keputusan Kadilmil III-15 Kupang Nomor W3-Mil04/20/Skep/I/2022 tanggal 10 Januari 2022</p>	
6	Dilmil III-16 Makassar	2019	<p>Surat Keputusan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: W3.Mil05 /70/KEP/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023</p>	
7	Dilmil III-17 Manado	2018	<p>Surat Keputusan Kadilmil III-17 Manado Nomor W3.Mil06/88a/OT.0 0/I/2022 W3.Mil06/89a/OT.0 0/I/2022 W3.Mil06/90a/OT.0 0/I/2022 W3.Mil06/91a/OT.0 0/I/2022 Tanggal 27 Januari 2022</p>	

8	Dilmil III-18 Ambon	2018	Surat Keputusan Kadilmil III-18 Ambon Nomor W3.Mil07/59/Skep/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022	
9	Dilmil III-19 Jayapura	2018	Surat Perintah Kadilmil III-19 Jayapura Nomor W3-Mil.08/SK/06/1/2022 tanggal 4 Januari 2022	

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

a. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Pelayanan publik secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berlakunya Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan Publik maupun masyarakat. Inovasi pelayanan Publik di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat.

Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang asas-asas pelayanan Publik, menjelaskan bahwa salah satu asas pelayanan Publik adalah fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelayanan Publik sebagaimana amanat dari undang-undang pelayanan Publik memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan antara lain perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Dalam rangka memberikan pelayanan bagi kaum penyandang disabilitas agar terwujud pelayanan inklusif, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menyediakan sarana dan prasarana khusus disabilitas. Di tahun 2023 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membangun dan menjalankan tiga inovasi baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta 3 inovasi pada tahun 2022 yang diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan. Ketiga inovasi tersebut yaitu :

1. Inovasi *WhatsApp Bot* Pelayanan Publik

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta praktek kerja mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya atas nama Dani Fauzan Al Faruq. Inovasi ini dilaksanakan sebagai alat yang inovatif untuk memberikan informasi dan pelayanan publik yang ada pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada masyarakat secara lebih efisien, cepat dan akurat. *WhatsApp Bot* pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebuah aplikasi berbasis *Node.js* yang dirancang untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui platform pesan instan *WhatsApp*. Berikut adalah gambaran singkat tentang *WhatsApp Bot* ini:

- a. **Informasi Umum:** *WhatsApp Bot* ini memberikan informasi umum tentang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, seperti alamat, jam operasional, nomor telepon, dan layanan yang tersedia.
- b. **Informasi Kasus:** Masyarakat dapat menggunakan *WhatsApp Bot* ini untuk memeriksa status perkara hukum tertentu. Mereka dapat memasukkan nomor perkara dan mendapatkan informasi tentang jadwal

sidang, status perkara, dan perkembangan terkini.

- c. **Pengaduan dan Umpan Balik:** *Bot* ini juga menerima pengaduan dan umpan balik dari masyarakat terkait pelayanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pengguna dapat mengirim pesan terkait keluhan atau saran, dan *bot* akan mengarahkannya kepada departemen yang bersangkutan.
- d. **Penghitungan Pengunjung:**
Bot juga mencatat jumlah pengunjung dan pengunjung yang baru bergabung.
- e. **Survey Kepuasan Masyarakat:**
Bot mengirimkan pesan yang mengarahkan pengguna untuk mengisi survei kepuasan masyarakat tentang pelayanan publik.
- f. **Penanganan Pesan Tidak Dikenali :**
Jika pengguna mengirimkan pesan yang tidak dikenali, *bot* akan memberikan pesan selamat datang dan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

Penggunaan *WhatsApp Bot* pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau kepada masyarakat. Hal ini juga membantu mengurangi beban pekerjaan staf pengadilan dalam memberikan informasi yang sifatnya rutin dan dapat diotomatisasi. Selain itu, *bot* ini meningkatkan aksesibilitas pelayanan hukum, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi kapan saja melalui platform yang sudah sangat umum digunakan, yaitu *WhatsApp*.

2. Inovasi Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Web

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta praktek kerja mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya atas nama Okky Dwita Lorenza. Inovasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan manajemen data perpustakaan dan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada pengguna serta memungkinkan pencarian informasi yang cepat dan akurat. Website ini dapat menjadi sarana yang memungkinkan para pihak terkait, termasuk hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya, untuk dengan mudah mengakses informasi hukum yang relevan. Sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi pencarian, peminjaman, dan manajemen koleksi buku.

3. Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan *Digital*

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta praktek kerja mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya atas nama Yoga Adi Pratama. Inovasi ini dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi kritis, termasuk manajemen buku, pencarian, dan fitur peminjaman. Dengan menerapkan sistem informasi perpustakaan berbasis *web* pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, diharapkan dapat mengoptimalkan proses-proses di dalam perpustakaan, meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pencarian informasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan koleksi.

Pengembangan aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis *web* di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap:

1. Efisiensi Pencarian Informasi:

Membantu pengguna untuk dengan cepat dan efisien menemukan buku atau informasi yang mereka butuhkan melalui fitur pencarian yang lebih canggih.

2. Layanan Sirkulasi yang Lebih Baik:

Mengotomatisasi proses sirkulasi buku, peminjaman, dan pengembalian untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan layanan.

3. Pembuatan Laporan yang Cepat dan Akurat:

Memudahkan petugas perpustakaan dalam menyusun laporan mengenai peminjaman, pengembalian, dan keadaan stok buku secara *real-time*.

4. Peningkatan Keakuratan Data:

Mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan data perpustakaan, sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

5. Peningkatan Aksesibilitas:

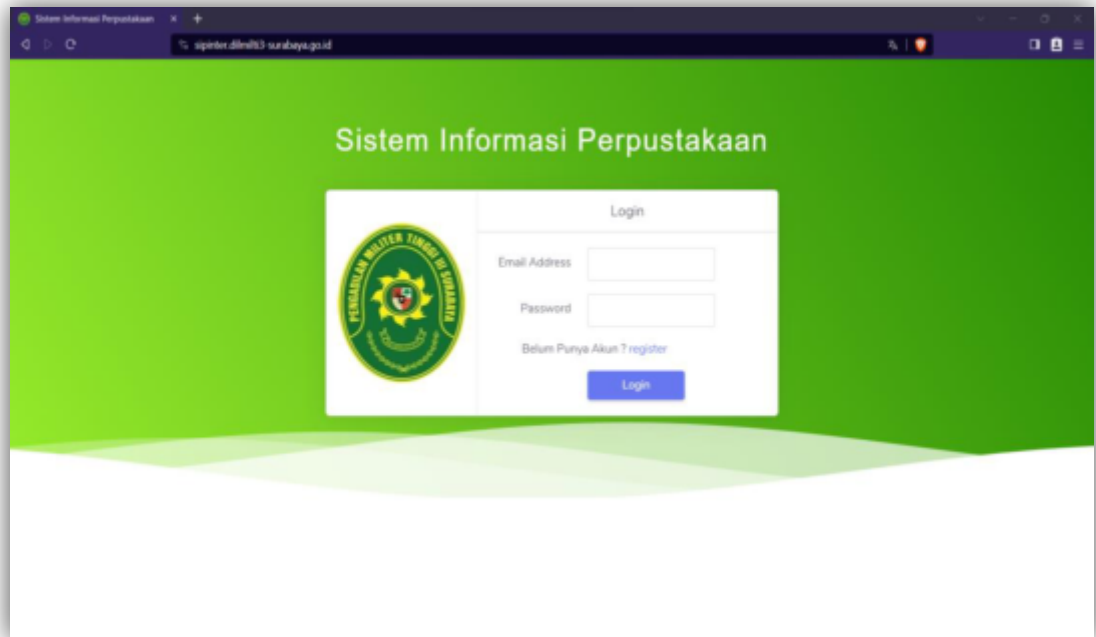
Memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan dari berbagai lokasi dan perangkat.

Melalui penerapan sistem informasi perpustakaan digital ini, diharapkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi perpustakaan, mempercepat proses pencarian buku, memberikan layanan sirkulasi yang lebih baik, dan menyediakan laporan yang cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan koleksi literatur.

Berikut ini tampilan dari Sistem Informasi Perpustakaan *Digital* pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya :

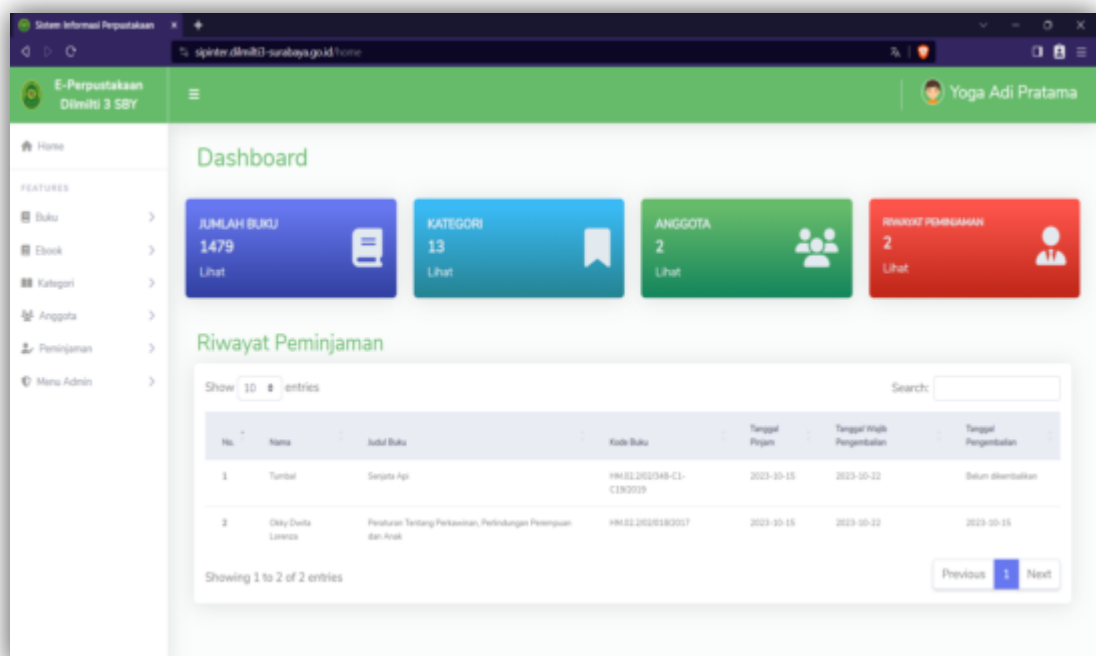
a. Halaman *Login*

Halaman *login* merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika *project* dijalankan yang dapat diakses.



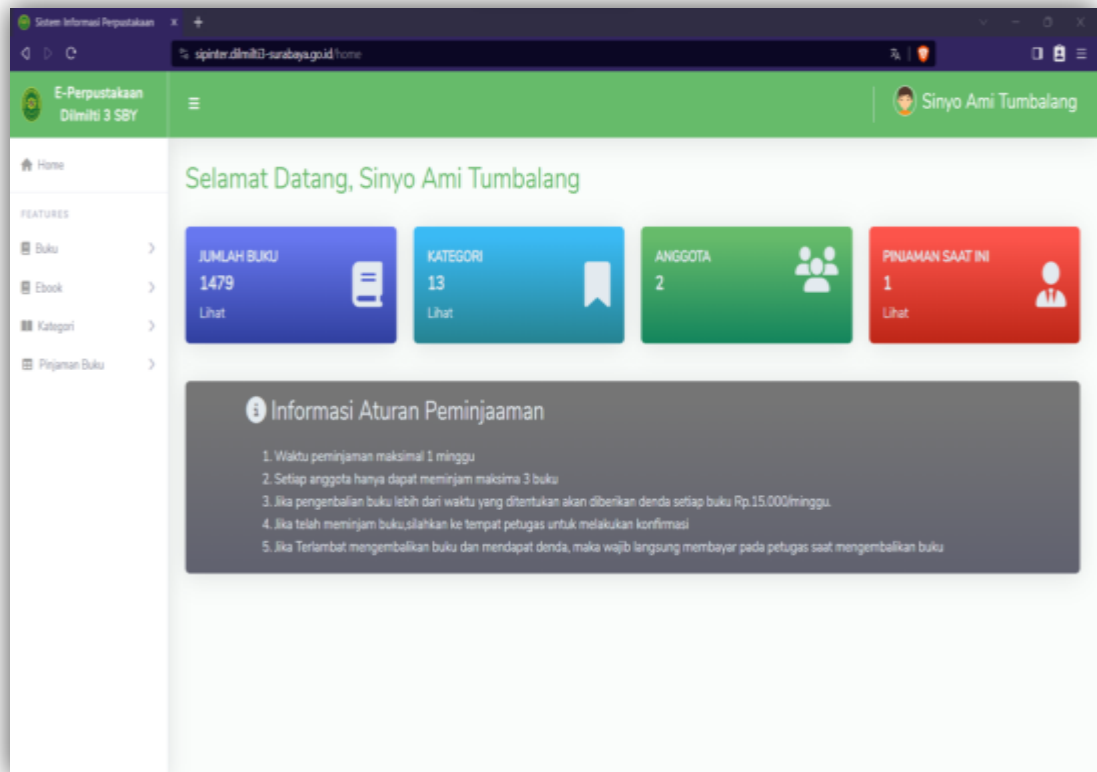
b. Halaman *Home (Admin)*

Halaman utama merupakan *interface* awal setelah *Admin* melakukan *login*. Halaman ini berfungsi untuk pengelolaan sistem informasi perpustakaan, baik itu untuk mengolah data buku, data anggota maupun transaksi yang terdiri dari peminjaman dan pengembalian.



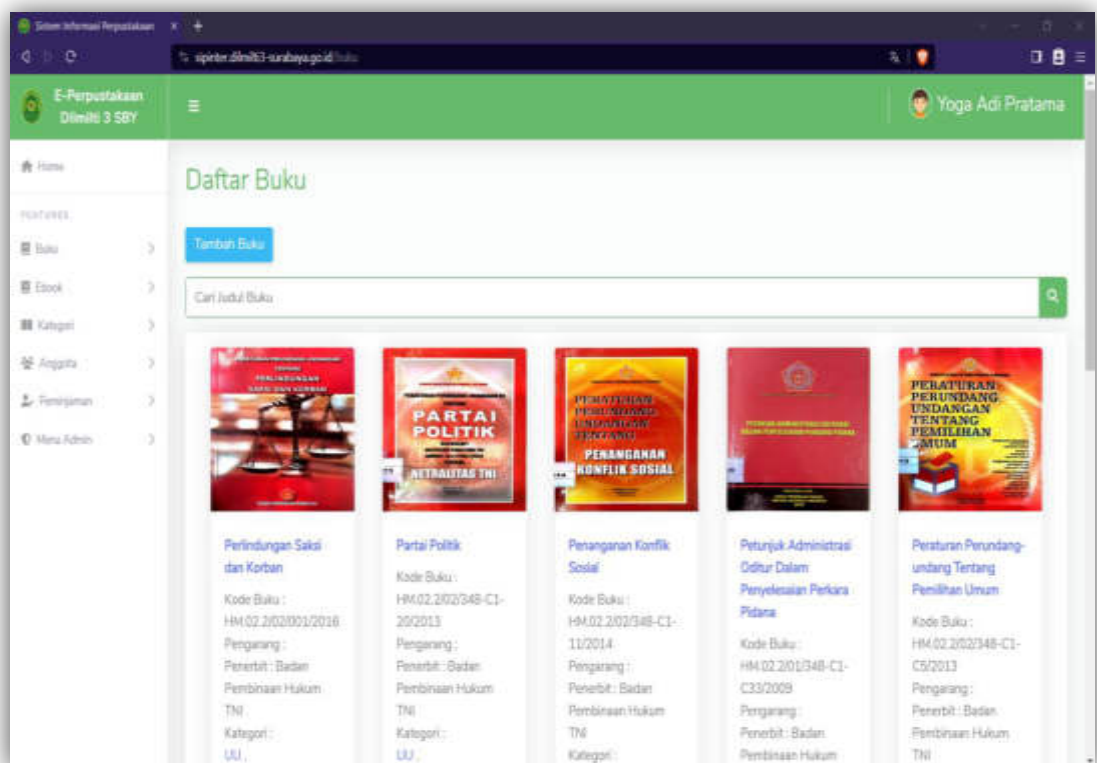
c. Halaman *Home* (Anggota)

Halaman utama merupakan *interface* awal setelah Anggota melakukan *login*.



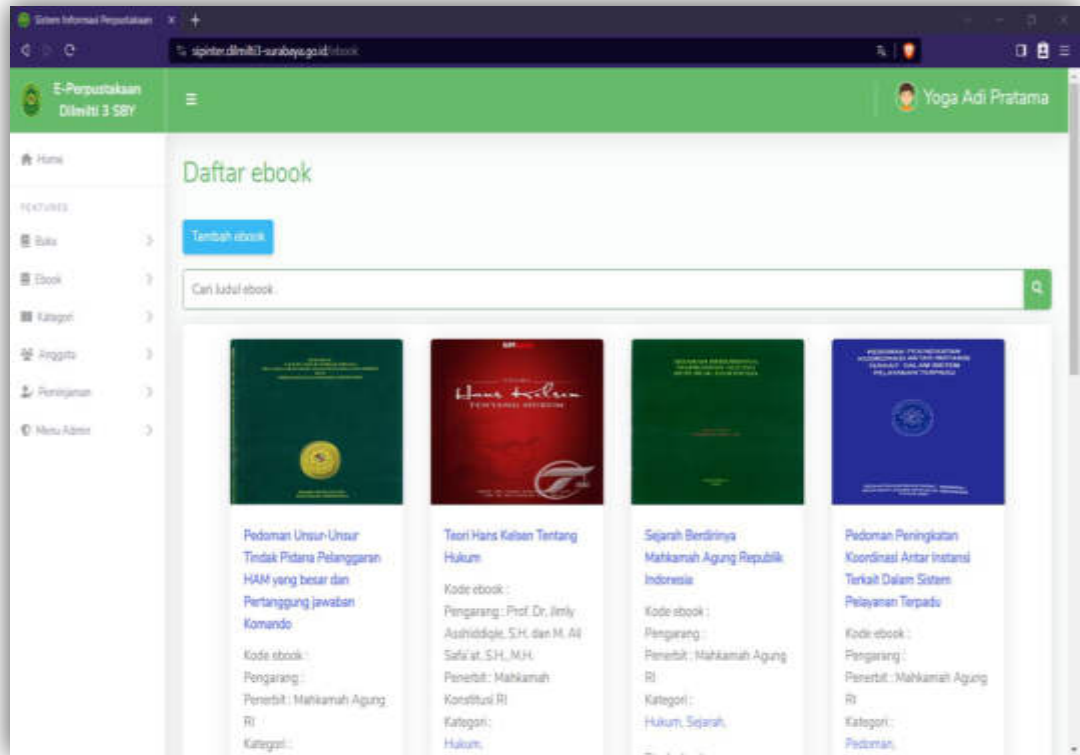
d. Halaman Buku (Admin dan Anggota)

Pada tampilan menu data buku ini, *admin* bisa mencari data buku sesuai dengan kategori buku.



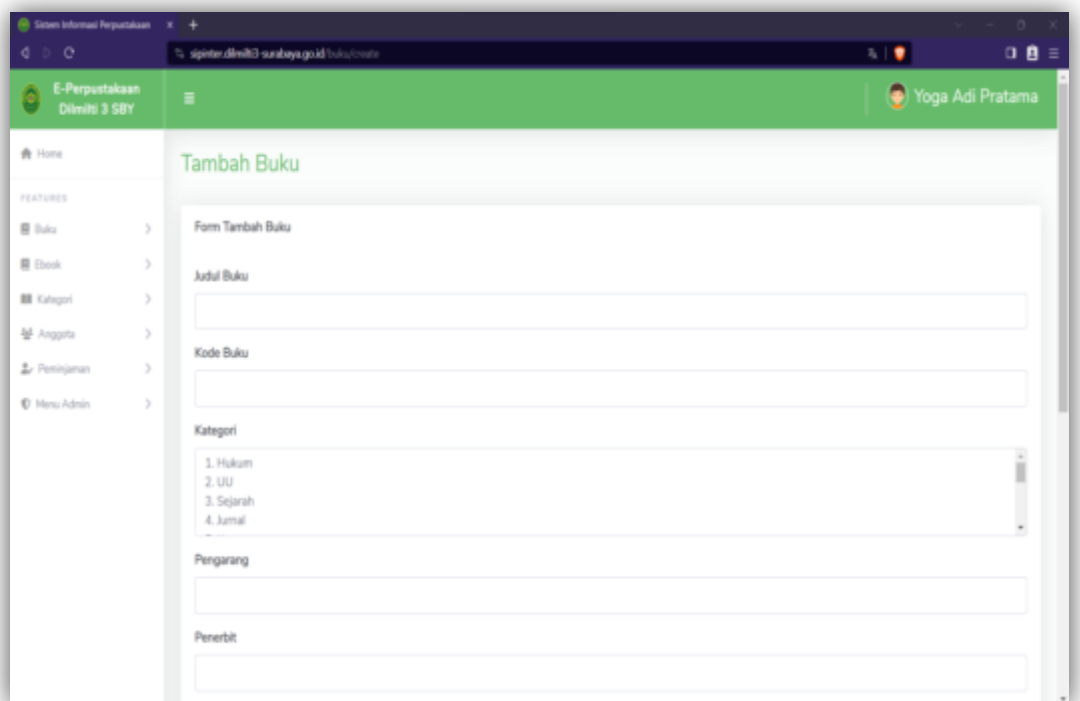
e. Halaman Ebook (Admin dan Anggota)

Pada tampilan menu data Ebook ini, admin bisa mencari data buku sesuai dengan kategori Ebook.



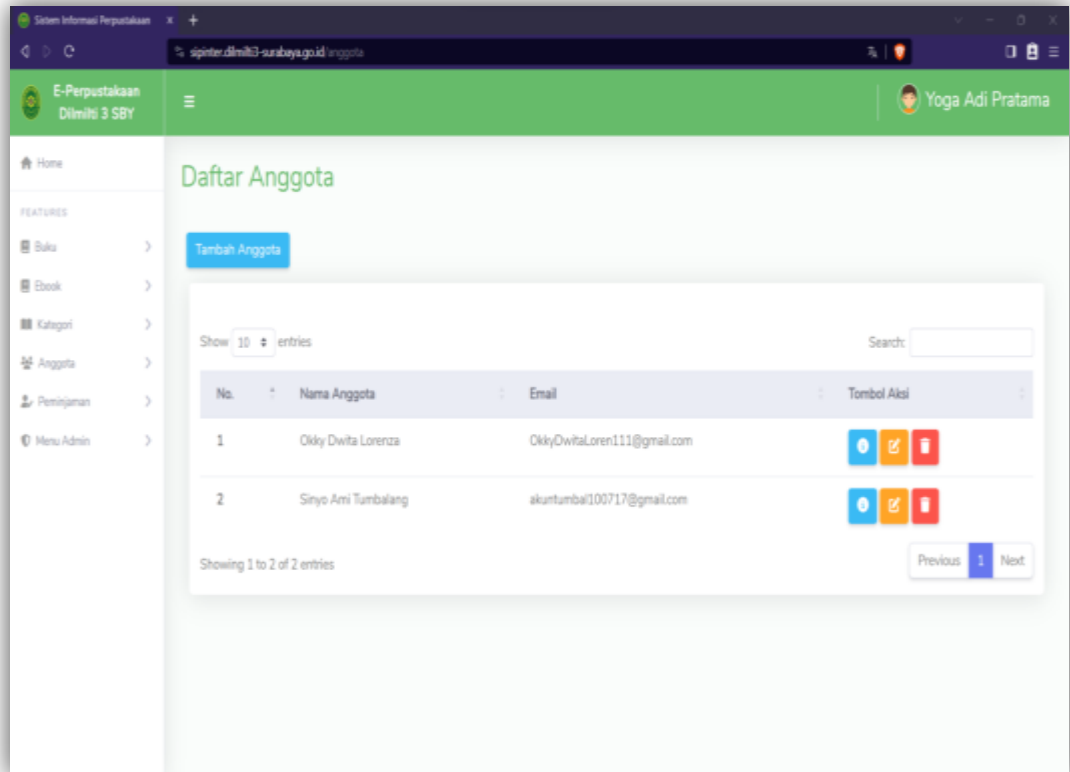
f. Halaman Olah Buku atau Ebook (Admin)

Menu mengolah data buku atau ebook yang ada diperpustakaan dengan fitur menambah, mengedit data buku.



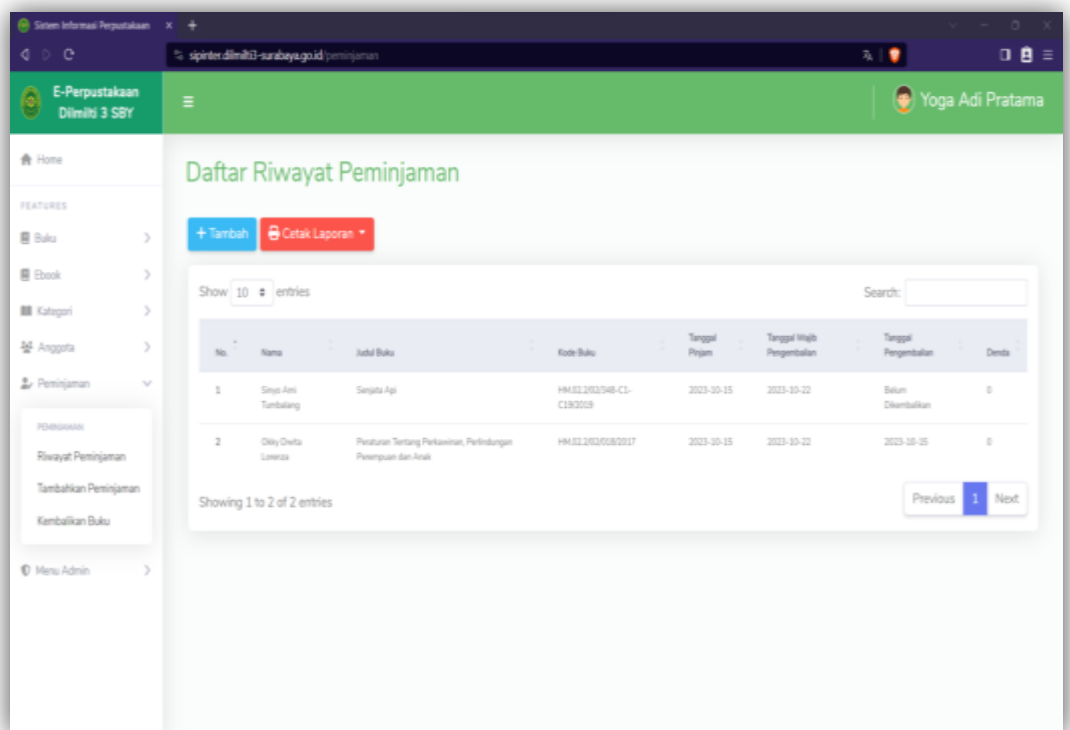
g. Halaman Anggota (Admin)

Pada menu data anggota, *admin* dapat melihat seluruh data Anggota yang sudah terdaftar menjadi anggota perpustakaan.



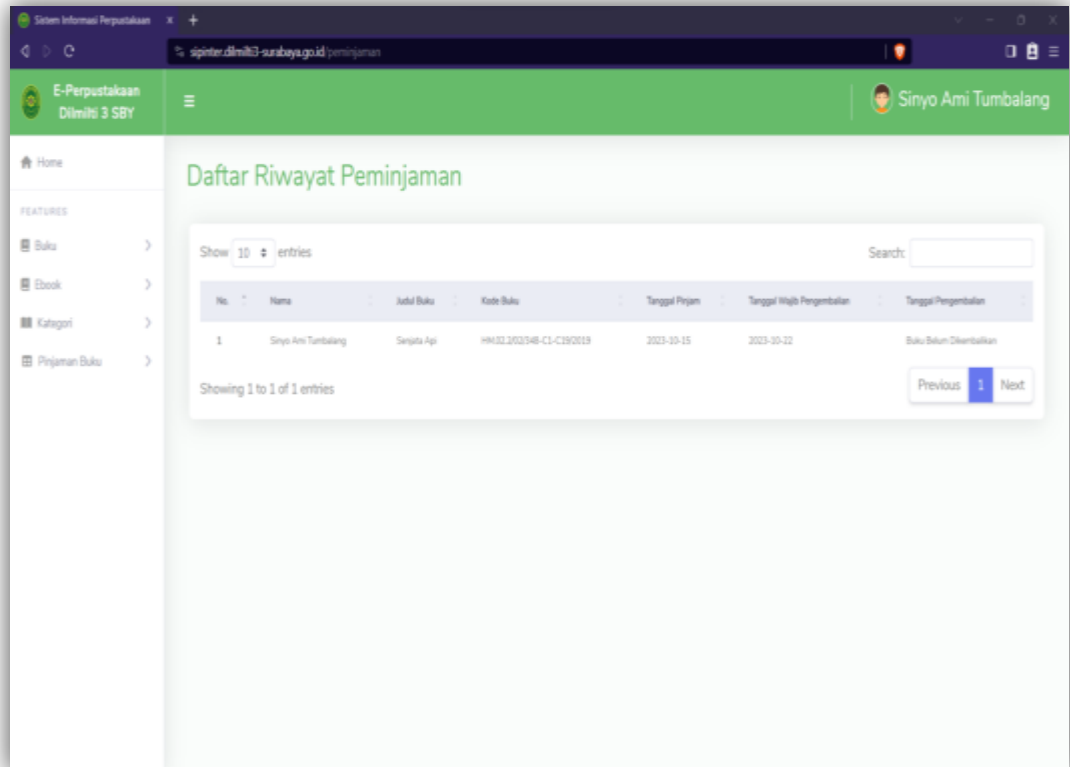
h. Halaman Riwayat Peminjaman (Admin)

Pada menu riwayat peminjaman, *admin* dapat melihat seluruh data peminjaman yang sudah tersimpan.



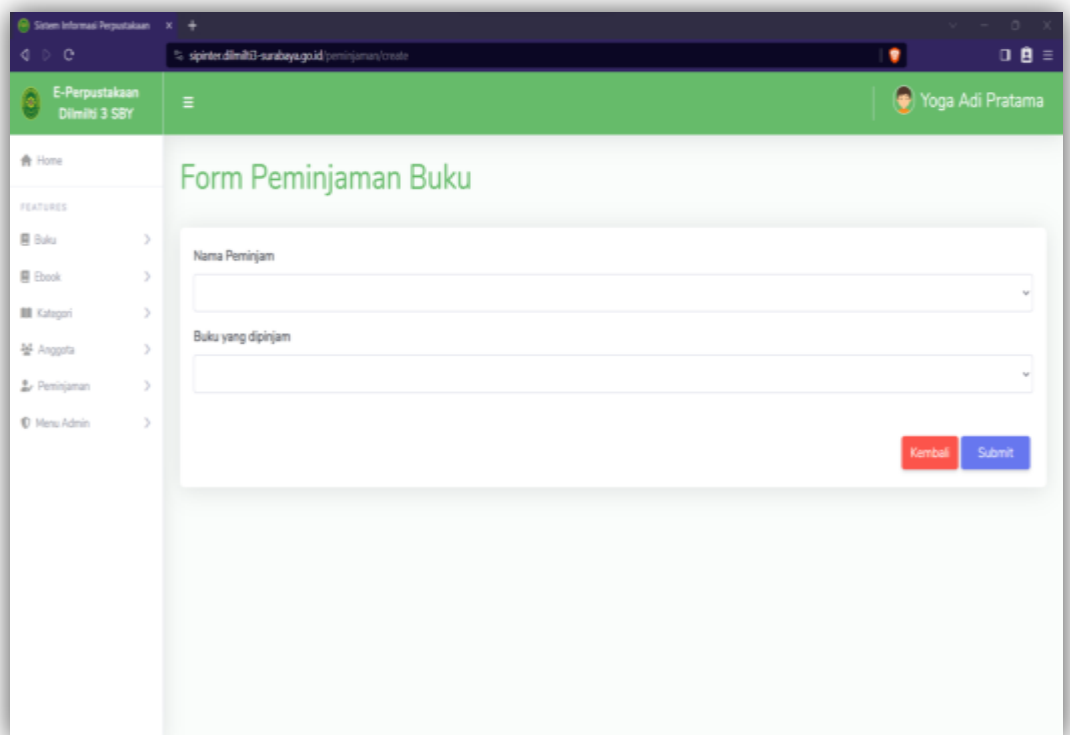
i. Halaman Riwayat Peminjaman (Anggota)

Pada menu riwayat peminjaman , Anggota dapat melihat seluruh data peminjaman yang sudah tersimpan.



j. Halaman Tambah Peminjaman Buku (Admin)

Menu Tambah Peminjaman digunakan untuk melakukan transaksi peminjaman Buku oleh Anggota yang dioperasikan oleh Admin.



k. Halaman Pengembalian Buku (*Admin*)

Menu pengembalian digunakan untuk transaksi pengembalian buku. Pada menu ini jika anggota mengembalikan buku lebih dari 7 hari setelah peminjaman, maka sistem dapat menghitung denda secara otomatis.

No.	Nama	Judul Buku	Kode Buku	Tanggal Pinjam	Tanggal Wajah Pengembalian	Tanggal Pengembalian
1	Smpa Ani Tumbalang	Seyata Api	HM.02.2020348.C3-C3.0019	2023-10-15	2023-10-22	Belum Dikembalikan
2	Diky Delta Lorenza	Peraturan Tentang Perkawinan, Perlindungan Perempuan dan Anak	HM.02.20201802017	2023-10-15	2023-10-22	2023-10-15

Form input fields:

Nama Peminjam:

Buku yang akan dipinjam:

Buttons: Kembali Submit

4. Inovasi *Standard Operational Procedure (SOP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)* bagi Kaum Penyandang Disabilitas.

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta pelatihan dasar atas nama CPNS Afni Syafaatun, S.A.P. Inovasi ini dilaksanakan khusus pada bagian PTSP di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna netra. Adapun inovasi yang dilaksanakan berupa :

- a. Pembuatan *Standard Operational Procedure (SOP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu* bagi kaum penyandang disabilitas di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan nomor : W3.Mil/20/SOP.01/IV/2022.

 PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA J. Raya H. H. Juanda No.87 Gedangan - Sidoarjo 61283 Telp. (031) 887193 Fax. (031) 887194 Email : mti3.surabaya@dilmil3.org	No. SOP : 001/2023 Tanggal : 27 April 2023 Di Buat : 27 April 2023
	Di Periksa : Di Sahkan :
Disahkan dan ditandatangani oleh :  Ir. H. S. H. Kepala Biro Hukum, Pengaduan, dan Hubungan Masyarakat	
Disahkan dan ditandatangani oleh :  Ir. H. S. H. Kepala Biro Hukum, Pengaduan, dan Hubungan Masyarakat	
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Fasilitas Kebutuhan Khusus bagi Penyandang Disabilitas 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Aturan Pelaksanaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Perekrutan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4025/ET/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Tinggi 5. Peraturan Menteri Ketenakerjaan Nomor 100/M/2013/PP/2013 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Tinggi 6. Peraturan Menteri Ketenakerjaan Nomor 100/M/2013/PP/2013 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Tinggi	1. 3.4 2. 2.0 3. 2.0 4. 4.4 5. 7.1.3 6. 7.1.4 7. 7.1.2 8. 7.1.3
1. 1.1 2. 1.2 3. 1.3 4. 1.4 5. 1.5 6. 1.6 7. 1.7 8. 1.8 9. 1.9 10. 1.10 11. 1.11 12. 1.12 13. 1.13 14. 1.14 15. 1.15 16. 1.16 17. 1.17 18. 1.18 19. 1.19 20. 1.20	1. 1.1 2. 1.2 3. 1.3 4. 1.4 5. 1.5 6. 1.6 7. 1.7 8. 1.8 9. 1.9 10. 1.10 11. 1.11 12. 1.12 13. 1.13 14. 1.14 15. 1.15 16. 1.16 17. 1.17 18. 1.18 19. 1.19 20. 1.20

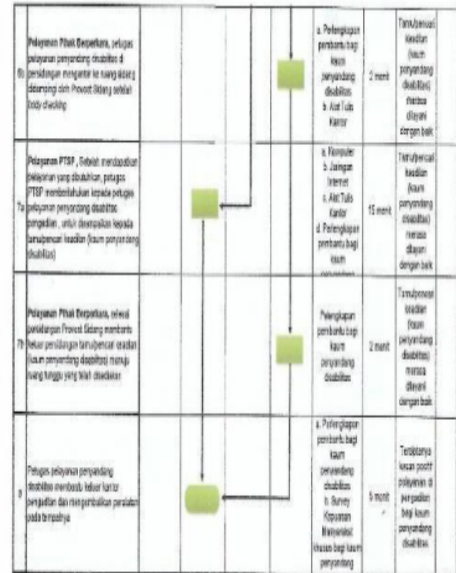
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
 J. Raya H. H. Juanda No.87 Gedangan - Sidoarjo 61283
 Telp. (031) 887193 Fax. (031) 887194
 Website : www.dilmil3-surabaya.go.id
 Email : mti3.surabaya@dilmil3.org

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BAGI KAUM PENYANDANG DISABILITAS
 DI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
 J. Raya H. H. Juanda No.87 Gedangan - Sidoarjo 61283
 Telp. (031) 887193 Fax. (031) 887194
 Website : www.dilmil3-surabaya.go.id
 Email : mti3.surabaya@dilmil3.org

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
 S.O.P. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BAGI KAUM PENYANDANG DISABILITAS
 DI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Dibuat Oleh	 AFNI SYAFAATUN S.A.P. NIP. 19960918 202002 2 005
Diperiksa Oleh	 DR. KOERNAIWATY SJARIEF, S.H., M.H. KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 13712P
Disahkan Oleh	 KIRTO, S.H., M.H. BRIGADIR JENDERAL TNI



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
 J. Raya H. H. Juanda No.87 Gedangan - Sidoarjo 61283
 Telp. (031) 887193 Fax. (031) 887194
 Website : www.dilmil3-surabaya.go.id
 Email : mti3.surabaya@dilmil3.org

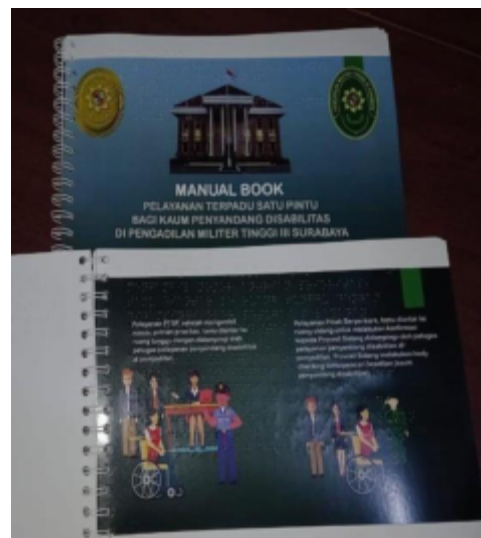
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
 S.O.P. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BAGI KAUM PENYANDANG DISABILITAS
 DI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Dibuat Oleh	 AFNI SYAFAATUN S.A.P. NIP. 19960918 202002 2 005
Diperiksa Oleh	 DR. KOERNAIWATY SJARIEF, S.H., M.H. KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 13712P
Disahkan Oleh	 KIRTO, S.H., M.H. BRIGADIR JENDERAL TNI

- b. Buku pengunjung/tamu pengadilan dan kartu antrian prioritas khusus kaum penyandang disabilitas di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



- c. *Manual book* Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi Kaum Penyandang Disabilitas dalam bentuk *braille* di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



- d. Penayangan video alur Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi Kaum Penyandang Disabilitas di TV Plasma/Layar monitor ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



5. Inovasi Digitalisasi Pelayanan Perkara bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta pelatihan dasar atas nama CPNS Nila Rukhama, A.Md. Inovasi ini dilaksanakan khusus pada bagian pelayanan perkara di PTSP kepaniteraan dan pelayanan perkara di persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Adapun inovasi yang dilaksanakan berupa :

- a. Brosur di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tentang prosedur pelayanan prioritas PTSP Kepaniteraan dan prosedur pelayanan prioritas persidangan



- b. Standing banner di depan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tentang prosedur pelayanan prioritas PTSP Kepaniteraan.

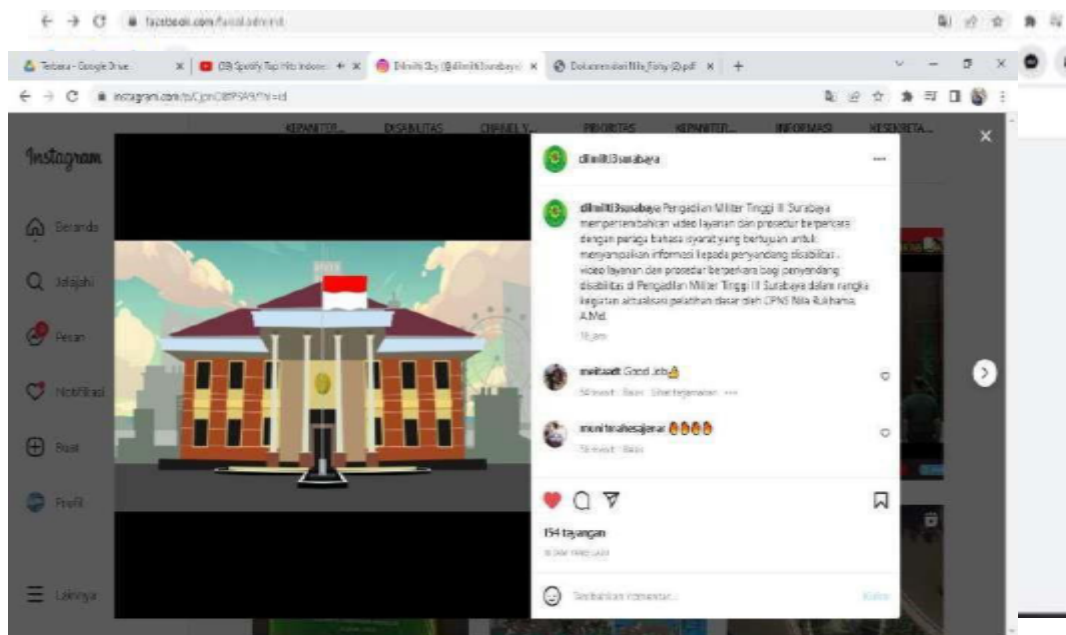


- c. Standing banner di depan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tentang prosedur pelayanan prioritas Persidangan.



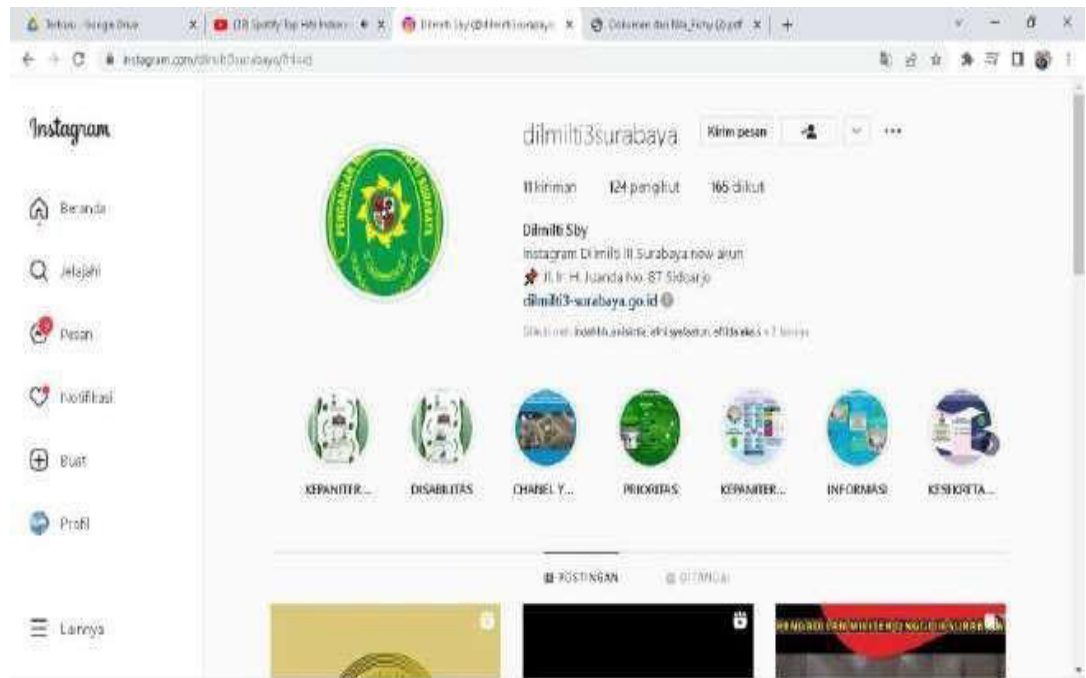
- d. Publikasi Video Pelayanan Perkara dengan peraga Bahasa isyarat Bagi penyandang disabilitas di Youtube, Website, Instagram, Facebook Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.





- e. Publikasi Brosur dan Standing Banner Pelayanan Perkara dengan peraga Bahasa isyarat Bagi penyandang disabilitas di Instagram dan Facebook Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.





- f. Penayangan video Pelayanan Perkara dengan peraga Bahasa isyarat Bagi penyandang disabilitas di TV Plasma / Layar monitor ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



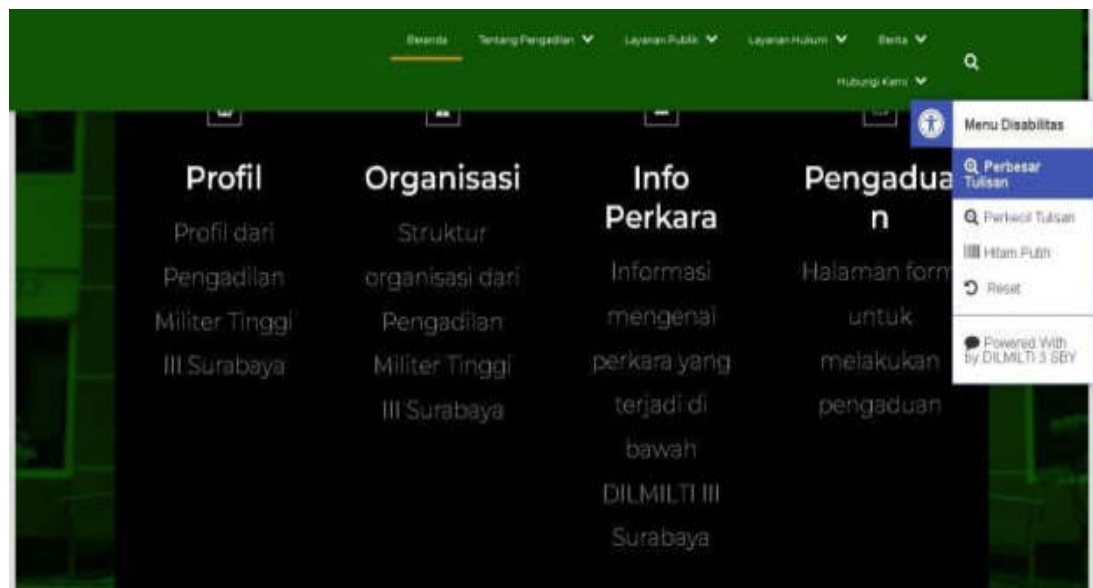
6. Inovasi Penambahan Fitur Ramah Kelompok Rentan Pada Website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta pelatihan dasar atas nama CPNS Afrida Eka Sabilla, A.Md.A.B. Inovasi ini dilakukan pada *Website* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna netra. Adapun inovasi yang dilaksanakan berupa :

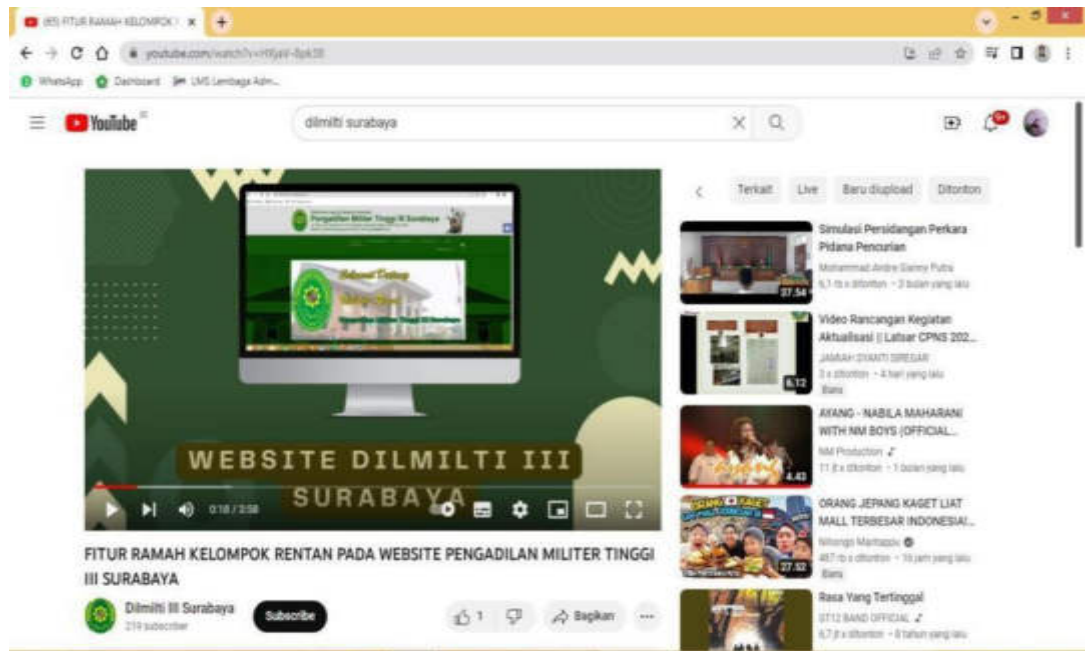
- a. Penambahan fitur suara, saturasi, dan perbesar font bagi kelompokrentan pada website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

```

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
    
```



- b). Publikasi fitur ramah kelompok rentan pada website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di media sosial youtube dan Instagram.



b. Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi sejak tahun 2016. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

1. Aplikasi SISKOMINFOSID

Aplikasi Siskominfosid merupakan bagian dari Sistem Informasi Dan Komunikasi Dilmil III-12 Surabaya. Tujuan pembangunan aplikasi Siskominfosid yaitu untuk membantu kelancaran proses penyelesaian perkara terutama untuk menginformasikan dan sebagai pengingat (*reminder*) jadwal sidang kepada pihak luar yang terlibat dalam persidangan yaitu Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

Siskominfosid dibangun sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja pelayanan publik di bidang perkara yaitu masih adanya jadwal persidangan yang terlambat atau tertunda dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang hadir terlambat atau tidak mengetahui jadwal sidang karena merasa belum menerima *hardcopy* jadwal sidang yang telah dikirim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya maksimal seminggu sebelum persidangan.

Siskominfosid dijalankan oleh admin yang bertugas mengirimkan pesan kepada Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang berisi tentang jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

2. Aplikasi ASK-TI

Aplikasi ASK-TI atau Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi merupakan aplikasi persuratan di bidang kepegawaian. ASK-TI dibangun dan dijalankan sejak Mei 2019.

ASK-TI dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian seperti Surat Perintah (Surat Tugas), Surat Ijin, Surat Jalan dan Surat Cuti. Melalui ASK-TI, proses pembuatan surat kepegawaian menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien.

3. Aplikasi SUKMA

SUKMA atau Survei Kepuasan Masyarakat adalah aplikasi survei secara elektronik sebagai pengganti survei secara manual dengan menggunakan lembar kertas kuesioner. Aplikasi SUKMA ini telah dibangun dan diaplikasikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak Oktober 2017.

4. Aplikasi SIPDIL

Aplikasi SIPDIL atau Sistem Informasi Personel Dilmil merupakan aplikasi untuk menunjang kinerja di bidang kepegawaian. Aplikasi SIPDIL dibangun dan dijalankan sejak Agustus 2016.

5. Aplikasi HARUM

Aplikasi HARUM merupakan aplikasi yang dibangun untuk menunjang pelayanan publik Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Mei 2021. HARUM adalah kepanjangan dari Halaman Forum.

Aplikasi HARUM dimaksudkan sebagai media berbagi informasi dan diskusi tentang hukum dan pelayanan publik. Pembangunan aplikasi HARUM ini didasari oleh beberapa pemikiran yaitu :

1. Banyaknya permohonan data dari mahasiswa.

Sehubungan hal ini, dirasa akan memberi manfaat lebih apabila Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan media bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mencari informasi dan diskusi hukum dengan Hakim (pengampu yang ditunjuk) yang notabene memiliki keilmuan dan pengalaman dalam bidang hukum.

2. Kondisi pandemi.

Melalui media ini, mahasiswa dan masyarakat umum dapat tetap memperoleh informasi tanpa harus datang dan berinteraksi dengan petugas, sehingga tetap terjaga protokol kesehatan.

Aplikasi HARUM menyediakan layanan diskusi dan berbagi informasi dari masyarakat maupun dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi HARUM dijalankan dengan menunjuk Hakim sebagai pengampu atau narasumber.

6. Aplikasi SIPTERA

Aplikasi SIPTERA merupakan aplikasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Juli 2021. SIPTERA adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan.

Aplikasi SIPTERA adalah sebuah sistem terintegrasi yang menghubungkan antara *database* dengan *Microsoft Word* untuk membantu memudahkan kepaniteraan dalam membuat akta-akta dan persuratan. SIPTERA merupakan aplikasi internal kepaniteraan pertama di Dilmil III-12 Surabaya. Aplikasi SIPTERA dibangun dengan bahasa pemrograman SQL melalui *Microsoft Access* untuk kemudahan pengaturan *database*.

Pada SIPTERA terdapat tiga versi untuk setiap pihak berperkara, yaitu versi terdakwa, versi penasihat hukum dan versi oditur militer. Akta-akta dan surat-surat dari aplikasi SIPTERA bergantung pada siapa yang mengajukan upaya hukum. Dengan demikian akan meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam proses pembuatan akta dan surat yang dimaksud. SIPTERA sementara direncanakan dalam tiga kali tahapan. Tahap pertama adalah versi yang sedang digunakan dan dikembangkan saat ini di Kepaniteraan Dilmil III-12 Surabaya, tahap kedua yaitu integrasi dengan SIPP sehingga proses pengisian atau manajemen *database* bisa berjalan lebih efektif dan efisien dan tahap ketiga adalah tambahan Fitur BAS dan Konsep Putusan secara otomatis.

7. Chat Online berbasis Website

Aplikasi CHAT ONLINE BERBASIS WEB merupakan aplikasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Maret 2023.

Aplikasi CHAT ONLINE BERBASIS WEB adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet, tetapi secara spesifik mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis teks antara dua pengguna layanan di Internet yang terdapat di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi ini bertujuan agar pengguna layanan dapat segera mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

8. Pelayanan Kepada Masyarakat

1. Kunjungan / Magang Mahasiswa

Untuk memenuhi kurikulum Program Strata Satu (S1) bagi para mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi baik di instansi pemerintah maupun swasta. Menanggapi hal tersebut Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan beberapa Dekan Universitas Fakultas Hukum yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 telah melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun peminjaman ruang sidang sebagai sarana persidangan semu bagi para mahasiswa, adapun data kunjungan/magang Mahasiswa sebagai berikut :

Tabel Data Kunjungan/Magang Mahasiswa

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Univ. Islam Negeri Sunan Ampel Sby	Magang Mandiri	13 Februari s.d. 4 Maret 2023	
2	Univ. 17 Agustus 1945	Magang MB-KM	15 April s.d. 15 Juli 2023	2 orang mahasiswa
3	Univ. Wijaya Kusuma	Magang MB-KM	23 Maret s.d. 23 Juni 2023	5 orang mahasiswa
4	Univ. Pembangunan "Veteran" Jatim	Observasi	22, 23 Mei 2023	Mahasiswa semester IV
5	Univ. Madura	Mengikuti Persidangan	15 Juni 2023	Para Mahasiswa
6	Univ. Bhayangkara Surabaya	Magang	16 Juni s.d. 16 Agustus 2023	4 orang mahasiswa
7	Univ. Muhamadiyah Malang	Observasi	30 November 2023	2 Orang Mahasiswa
8	Intitut Teknologi Adhi Tama Surabaya	Kerja Praktek	15 November s.d. 14 Desember 2023	1 Orang Mahasiswa

2. Peminjaman Ruang Sidang

Pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini Mahasiswa, yaitu dalam hal peminjaman ruang sidang untuk keperluan akademik.

Tabel Data Peminjaman Ruang Sidang

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Univ. Pembangunan "Veteran" Jatim	Perekaman Vidio lomba Persidangan semu	19 dan 26 Agustus 2023	Tim lomba Persidangan Semu
2	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	7 Oktober 2023	Gladi bersih lomba Persidangan semu
3	Univ. Gajah Mada Yogyakarta	Latihan Babak Final Pengadilan Semu	12 Oktober 2023	Mahasiswa Peserta lomba

4	Univ. Pembangunan “Veteran” Jatim	Perekaman Vidio pengembangan SDM Mahasiswa	4 November 2023	Para Mahasiswa
5	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	15 September 2023 dan 15 Oktober 2023	Peserta lomba Persidangan Semu
6	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	2,3, 8, 17 Desember 2023	Peserta lomba Persidangan Semu Piala Kasad

c. Pengadilan Militer III-13 Madiun

Demi mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, Pengadilan Militer III-13 Madiun selaku badan peradilan dibawahnya juga tak lelah untuk berinovasi. Yang terbaru adalah perombakan website Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang lebih rapih dan estetik, dan juga sudah menyesuaikan dengan standarisasi website yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Website yang baru ini pun sudah dapat menyesuaikan dengan tampilan gawai dari masing-masing pengakses. Selain itu, website ini juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang ramah terhadap penyandang disabilitas dengan hadirnya fitur *Accessibility Menu* dan juga *Text to Speech*.

Tampilan website sebelum dirombak :



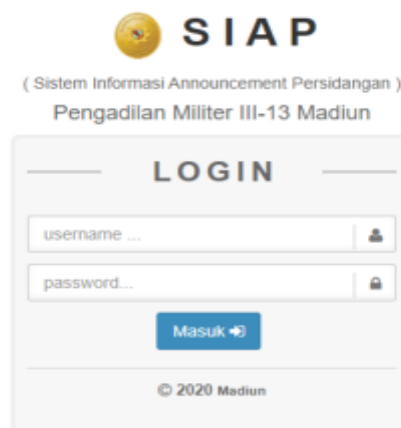
Tampilan Website Sesudah dirombak :



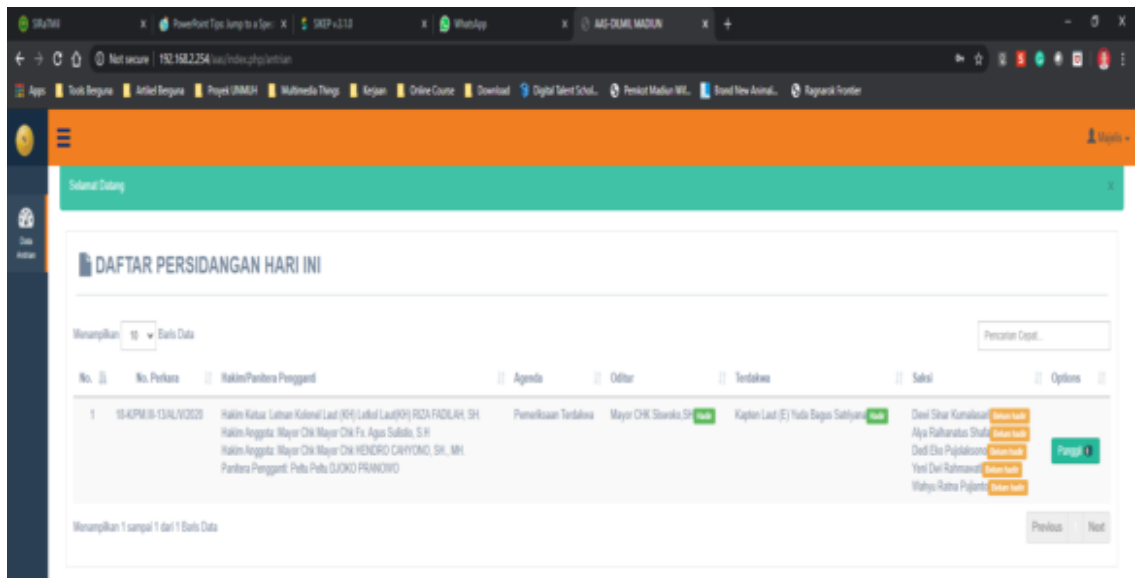
- **Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Announcement Persidangan)**

Aplikasi SIAP dirancang oleh tim IT Dilmil III-13 Madiun sebagai bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan. Sebelumnya, Provost kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan Panitera terkait agenda persidangan mana yang lebih didahulukan, karena tidak ada media untuk melakukan monitoring tamu persidangan yang telah hadir. Untuk itu, tim IT berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi, yang data-datanya bersumber dari SIPP dan etamil, yang kemudian akan memunculkan data tamu persidangan secara komplit dan real-time. Selain itu, didalam aplikasi juga terdapat tombol 'Panggil' untuk tamu persidangan yang sudah lengkap. Tombol ini begitu di klik akan terkoneksi dengan sound system yang ada di area kantor, jadi para tamu persidangan bisa mempersiapkan diri di ruang sidang. Aplikasi SIAP bisa dilihat secara transparan baik oleh masyarakat pencari keadilan dan tamu persidangan yang hadir di Pengadilan Militer III-13 Madiun sehingga para pencari keadilan mengetahui atas kesiapan pelaksanaan persidangan.

Tampilan login dari aplikasi SIAP

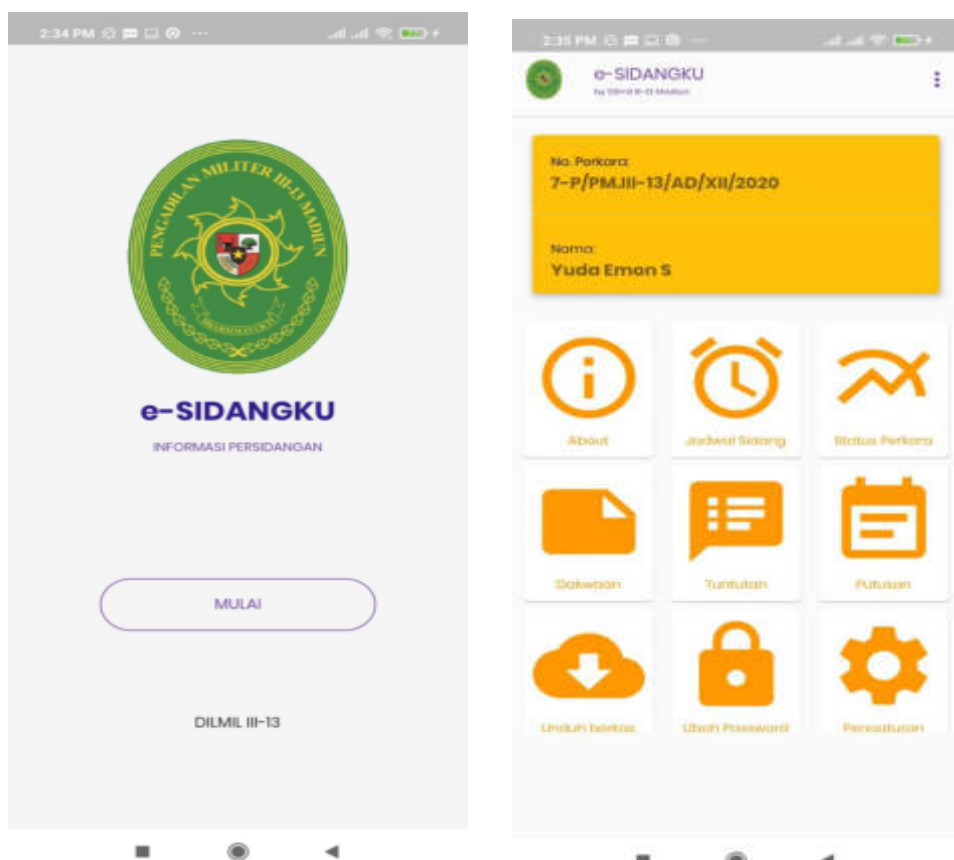


Halaman dashboard dari aplikasi SIAP



- **Aplikasi e-SIDANGKU**

e-SIDANGKU adalah sebuah inovasi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun yang berupa aplikasi untuk para pihak berperkara dalam memperoleh informasi terkait persidangan yang tengah mereka jalani secara mudah, efektif, dan efisien. Aplikasi ini dapat diunduh oleh pemilik Ponsel berbasis Android di Google Play Store. Didalamnya terdapat menu Jadwal Persidangan, Status Perkara, Dakwaan, Pengaduan, dan Unduh Salinan Putusan. Terdapat pula fitur pengingat untuk memastikan agar para pihak berperkara tidak lupa akan jadwal persidangan yang akan mereka jalani.



- **Public Service**

Area ini disediakan untuk masyarakat Pencari Keadilan dan para tamu persidangan untuk melepas penat dan dahaga ketika menunggu jalannya proses persidangan yang sedang berlangsung. Tersedia air mineral, kopi, teh dan snack yang dapat dinikmati oleh para tamu persidangan yang disediakan gratis oleh kantor, yang dana nya berasal dari sumbangan sukarela para anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. Hal ini merupakan wujud nyata Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mempertahankan Predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).



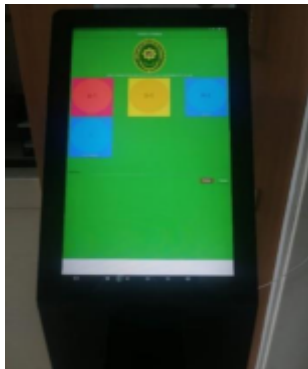
- **Ruang Tunggu Terbuka**

Ruang tunggu terbuka ini disediakan agar para tamu persidangan dan masyarakat pencari keadilan tidak bosan menunggu didalam ruang tunggu yang tersedia didalam kantor.



- **Aplikasi Nomor Antrian Tamu**

Untuk tertibnya pelayanan, maka digunakan sistem antrian secara elektronik berupa aplikasi antrian tamu, dimana tamu akan dibagi sesuai dengan jenis layanannya, yang kemudian nantinya akan dipanggil oleh petugas PTSP, sehingga proses antrian tamu dapat berjalan dengan lancar dan tertib.



Tiket Antrian

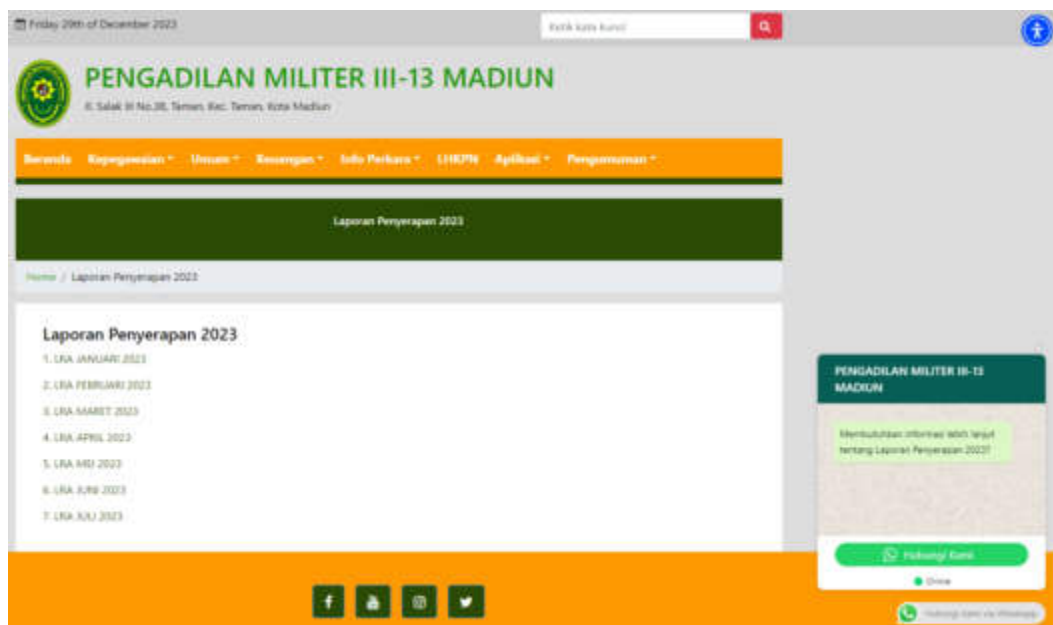
#	No Antrian	Loket	Jam Datang	Keterangan	Aksi
1	P-01	Kepaniteraan	15:32:53	Menunggu	Panggil
2	S-01	Kesekretariatan	15:32:49	Menunggu	Panggil
3	S-02	Kesekretariatan	15:32:51	Menunggu	Panggil

© 2021 Dilmi III-13 Madiun

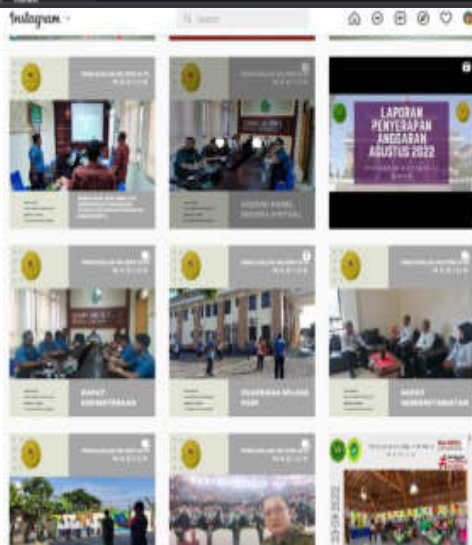
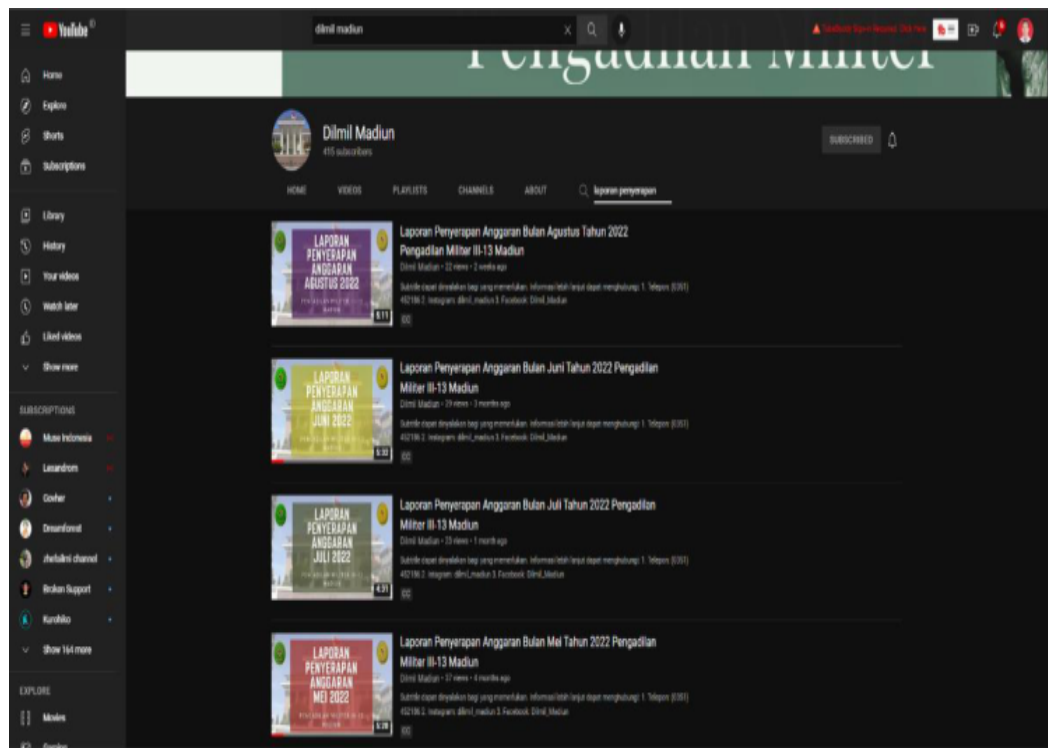
- **Inovasi Digitalisasi Penyerapan Anggaran**

Inovasi ini dihadirkan demi membantu rekan-rekan kita para difabel untuk lebih memahami tentang Penyerapan Anggaran pada Dilmi III-13 Madiun, dan juga untuk mendigitalisasi laporan ini agar dapat dimuat di seluruh media sosial Dilmi III-13 Madiun.

Pada Website



Pada Youtube Dilmil III-13 Madiun

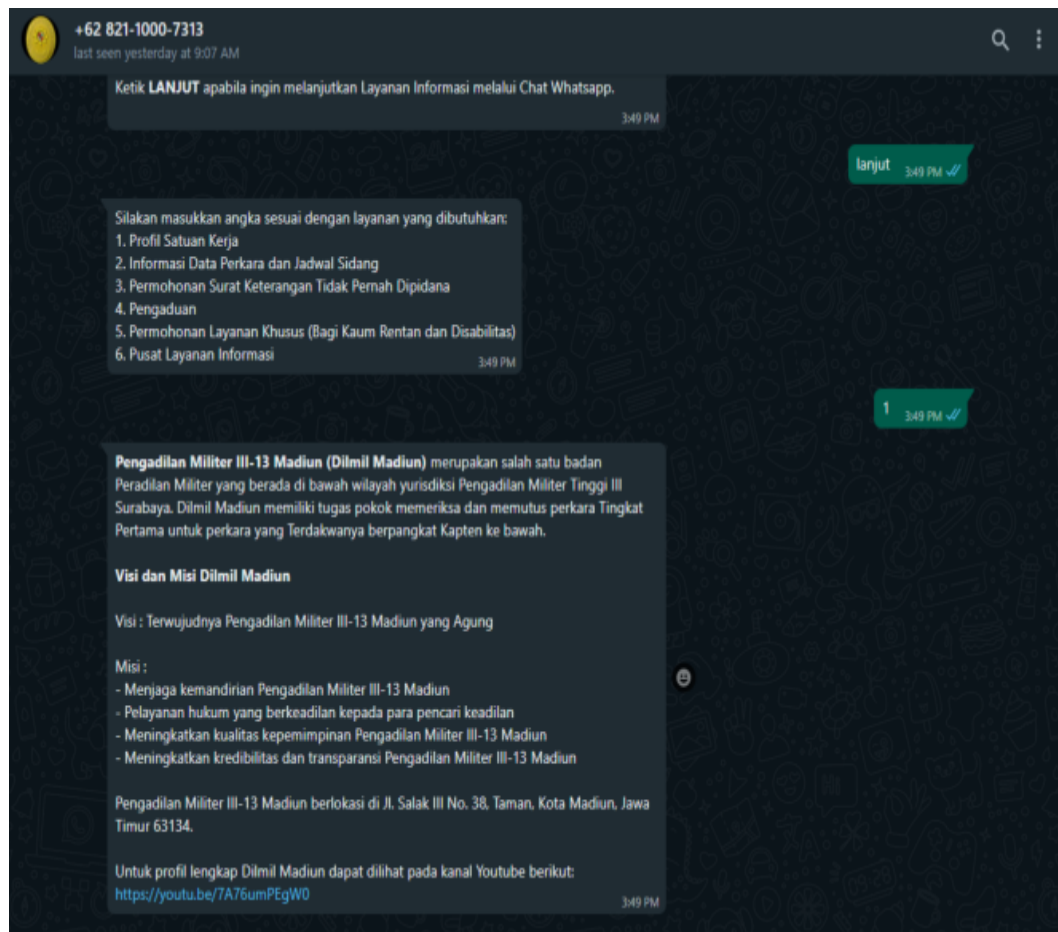


Pada Instagram

Facebook

• **Inovasi Layanan Khusus Informasi Digital Whatsapp pada Website dan Sosial Media Pengadilan Militer III-13 Madiun**

Terdapat chat yang terhubung langsung dengan bot, yang akan menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh publik, seperti informasi data perkara, jadwal sidang, permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana, pengaduan, permohonan layanan khusus (bagi kaum rentan dan disabilitas), dan pusat layanan informasi.



• **Wall of Impressions**

Berisi tentang kata-kata motivasi atau impresi dari beberapa tamu yang hadir di kantor Dilmil III-13 Madiun.



• **Semir Sepatu Gratis**

Inovasi ini dihadirkan sebagai salah satu upaya Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mencapai pelayanan yang prima untuk para pencari keadilan.



- **Ladies Park**

Ladies park ini disediakan guna mewartahi masyarakat pencari keadilan dan tamu Pengadilan Militer III-13 Madiun khususnya wanita, untuk dapat memarkir kendaraannya dengan mudah, dengan spot parkir yang dinilai paling mudah untuk diakses.



- **Parkir Difabel**

Parkir difabel ini disediakan untuk memudahhi Para Disabilitas agar dapat dengan mudah turun dari kendaraan dan mengakses sarana disabilitas kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun.



- **Survey Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik**

Selain dari survey manual yang telah disediakan (dengan mengisi form/angket survey yang telah disediakan), masyarakat pencari keadilan juga dapat mengisi survey indeks kepuasan masyarakat secara online langsung dari gadget/gawai nya masing-masing. Survey ini berbentuk QR-Code yang tersebar di berbagai area kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. Survey elektronik ini disediakan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai tolak ukur dalam mewujudkan pelayanan yang prima dan juga wujud nyata dalam mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).



- **Pojok Baca**

Pojok baca disediakan untuk masyarakat pencari keadilan dan tamu Pengadilan Militer III-13 Madiun agar dapat mengisi waktu ketika menunggu dengan bacaan yang menambah ilmu dan keimanan. Buku/bacaan ini disediakan di berbagai sudut kantor seperti ruang tunggu, didalam ruang tahanan, dan juga di ruang ramah anak.



- **ATR (Audio to Text Recorder)**

ATR adalah perangkat yang berfungsi untuk merubah audio menjadi text yang dapat mempercepat proses persidangan. Dengan demikian proses persidangan menjadi lebih akurat dan cepat untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan.



- **Go Green**

Go green adalah kawasan atau area yang berada di sekitar kantor maupun di dalam kantor yang berfungsi untuk keindahan dan kenyamanan para pencari keadilan. Kawasan atau area Go Green ini bertujuan untuk menyegarkan udara.



- **Charger HP**

Perangkat ini merupakan piranti yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini. Seiring perkembangan teknologi informasi, maka keberadaan charger HP sangat diperlukan sebagai sarana pelayanan bagi pencari keadilan dan pengunjung sidang mengisi daya baterai HP



- **Kotak P3K**

Sarana ini diperlukan sebagai sarana pelayanan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan baik terhadap pengunjung sidang, pencari keadilan dan anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun



- **Smoking Area**

Bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam rangka bebas dari asap rokok, maka sebagai sarana pelayanan menyediakan Smoking Area untuk pengunjung Sidang dan Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun sehingga di dalam ruangan dan di sekitar ruangan aman atau terbebas dari asap rokok



- **Free Wifi di seluruh kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun**



- **Televisi untuk Menampilkan DIPA dan Jadwal Persidangan**

Sarana televisi besar sebagai sarana transparansi peradilan berkaitan dengan informasi persidangan, jadwal sidang dan sosialisasi pelayanan prima yang ada di Pengadilan Militer III-13 Madiun.



- **Alat Pemadam Api Ringan (APAR)**

Sarana ini dibutuhkan sebagai sarana pengamanan tingkat pertama apabila terjadi kebakaran di dalam kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun



- **Alur Evakuasi Bencana**

Alur ini digunakan untuk mempermudah evakuasi apabila terjadi kebakaran, gempa dan bencana alam lainnya



- **Jalur Evakuasi Titik Kumpul**

Sarana digunakan sebagai titik kumpul evakuasi apabila terjadi bencana alam



- **Jalur Khusus Disabilitas**

Sarana Disabilitas digunakan sebagai sarana pelayanan yang berkebutuhan khusus bagi pencari keadilan dan pengunjung sidang, sehingga dapat mempermudah akses bagi yang berkebutuhan khusus.



- **Pos Penjagaan dan Ruang Tunggu Tamu**

Sarana ini digunakan sebagai screening pertama apabila ada tamu keluar masuk kantor sehingga keamanan dapat terkendali



- **Papan Pengumuman**

Sarana ini digunakan untuk mempermudah sebagai sarana pelayanan informasi pencari keadilan dalam rangka mempublikasikan hasil persidangan



- **Tempat Bermain Anak**

Sarana ini digunakan untuk membantu para pencari keadilan yang membawa anaknya yang masih balita untuk dapat bermain di tempat tersebut sehingga tidak mengganggu proses persidangan ketika dalam proses pemeriksaan berlangsung.



d. **Pengadilan Militer III-14 Denpasar**

1. **Aplikasi Ampura**

Pada tahun 2022 terdapat satu Aplikasi yaitu Aplikasi Ampura (Aplikasi Mobile Penelusuran Perkara), aplikasi ini berbasis android pada Google Playstore, terdapat data perkara Pidana dan pelanggaran, yang dibutuhkan oleh pencari keadilan untuk mendapat data-data yang diperlukan. Aplikasi tersebut telah di Launching oleh Kadilmil III-14 Denpasar yang dihadiri oleh seluruh staf Dilmil III-14 Denpasar dan undangan di jajaran Kodam IX/Udayana pada tanggal 28 Maret 2022 di lapangan Tennis Prajaraksaka Kapaon Denpasar.



2. Aplikasi E-Santi (Elektronik Sistem Asisten Terintegrasi)

Di tahun 2023 Pengadilan Militer III-14 Denpasar membangun satu aplikasi baru yaitu aplikasi E-Santi (Elektronik Sistem Asisten Terintegrasi). Aplikasi E-Santi (Elektronik Sistem Asisten Terintegrasi) pada tanggal 21 Juli 2023 Aplikasi tersebut di Launching oleh Kadilmil III-14 Denpasar yang dihadiri oleh seluruh staff Dilmil III-14 Denpasar

3. Aplikasi SIMPEKIP (Sistem Pengelolaan PKP dan SKP Pegawai)

Aplikasi SIMPEKIP (Sistem Pengelolaan PKP dan SKP Pegawai) merupakan inovasi sistem media pengelolaan, pengumpulan sekaligus penyimpanan berkas PKP dan SKP pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar secara digital menggunakan google form dan google drive.



e. Pengadilan Militer III-15 Kupang

Pada Pengadilan Militer III-15 Kupang tahun 2023 terdapat 6 (enam) inovasi yaitu :

1. Kiosk Touchscreen

Kiosk Touchscreen atau anjungan touchscreen yang diletakkan di area PTSP yang berisi menu informasi berupa pengisian e-survey, hasil survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat, hasil survey Indeks Persepsi Korupsi, aplikasi SIWAS MARI, Website tentang peradilan yang dapat diakses secara elektronik oleh masyarakat, serta brosur-brosur elektronik yang dapat di akses di mesin Kiosk tersebut sehingga mempermudah masyarakat memperoleh informasi secara mandiri apabila datang ke kantor Pengadilan Militer III-15 Kupang.

2. E-Brosure

Tujuan E-Brosur adalah mempermudah masyarakat khususnya para pencari keadilan mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang ada di Pengadilan Militer III-15 Kupang. Dengan E-Brosur ini, pengguna layanan dapat mengakses brosur-brosur yang disajikan di Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut, tanpa harus membawa fisik (hardcopy) dokumen informasi yang disediakan di meja PTSP Pengadilan Militer III-15 Kupang.

3. E-Survey

E-Survey merupakan aplikasi berbasis Google Form yang bertujuan untuk mendapatkan feedback dari masyarakat atas pelayanan Dilmil III-15 Kupang yang menjadi tolak ukur indeks kepuasan masyarakat secara real time sehingga dapat diketahui sebaik apa pelayanan di Pengadilan Militer III-15 Kupang melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

4. E-PIS (Elektronik Pakta Integritas)

E-PIS merupakan aplikasi berbasis Google Form yang bertujuan untuk penandatanganan pakta integritas secara elektronik oleh para aparatur sebelum pelaksanaan persidangan dimulai baik terdakwa, POM, saksi, Oditur, maupun penasehat hukum dalam upaya menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5. E-GUHHAN (Elektronik Penanguhan Penahanan)

E-Guhhan merupakan aplikasi berbasis Google Form yang bertujuan untuk mendaftarkan Penanguhan Penahanan, Penanguhan Penahanan dapat diajukan dalam hal adanya jaminan tersangka / dan atau terdakwa dengan syarat tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan, tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana atau membuat keonaran atau adanya permintaan dari Komandan satuan dengan alasan tertentu.

6. Pelayanan Upaya Hukum

Pelayanan terhadap permohonan banding, Administrasi Perkara Kasasi, Administrasi Perkara Peninjauan Kembali, dan Administrasi Perkara Grasi.

7. Pelayanan Penanguhan Penahanan

Pelayanan terhadap permintaan Penanguhan Penahanan yang dapat diajukan dalam hal adanya jaminan tersangka / dan atau terdakwa dengan syarat tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan, tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana atau membuat keonaran atau adanya permintaan dari Komandan satuan dengan alasan tertentu.

8. Pelayanan Administrasi Persidangan

Pelayanan Persidangan Perkara Pidana Kejahatan dan Pidana Pelanggaran.

9. Pelayanan Permohonan Informasi

Pelayanan Permohonan Informasi bisa diajukan secara offline dengan cara mengunjungi PTSP Pengadilan Militer III-15 Kupang dan mengisi formulir Permohonan Informasi, atau dapat juga melalui online berbasis website dengan mengunjungi alamat berikut <https://dilmil-kupang.go.id/layanan-informasi.php> .

10. Pelayanan Pengaduan

Pelayanan Pengaduan bisa diajukan secara offline dengan cara mengunjungi PTSP Pengadilan Militer III-15 Kupang dan mengisi formulir Pengaduan, dapat juga melalui online berbasis website dengan mengunjungi alamat berikut <https://dilmil-kupang.go.id/layanan-pengaduan.php> .

f. Pengadilan Militer III-16 Makassar

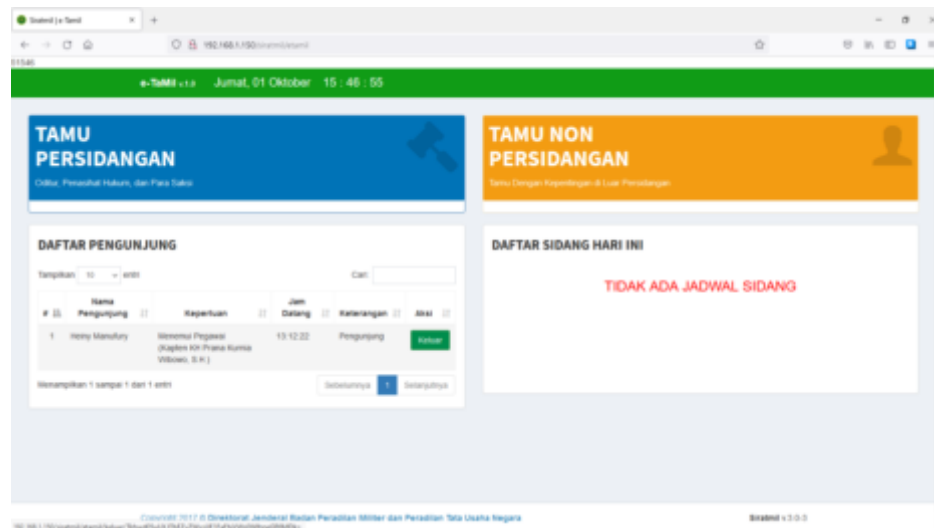
Pada Pengadilan Militer III-16 Makassar tahun 2022 terdapat inovasi sebagai berikut :

1. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Adanya ruang tunggu bagi pencari keadilan, ruang menyusui, mushola, dan tempat bermain anak-anak yang representatif.
3. Adanya Jalur disabilitas tuna Netra berupa *guiding block*.
4. Drop off khusus penyandang disabilitas
5. Ruang Sidang Virtual
6. Adanya Aplikasi Siratmil untuk mempermudah pelayanan terhadap presensi dan survey pencari keadilan.

g. Pengadilan Militer III-17 Manado**1. Penggunaan Aplikasi e-TaMil**

Merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh personel Pengadilan Militer III-17 Manado yang mana aplikasi ini berfungsi sebagai buku tamu secara elektronik sehingga para tamu persidangan maupun non-persidangan tidak perlu lagi menulis buku tamu secara manual dan akan terus dikembangkan serta akan disinkronkan dengan aplikasi survei kepuasan publik.

Penggunaan Aplikasi e-Tamil

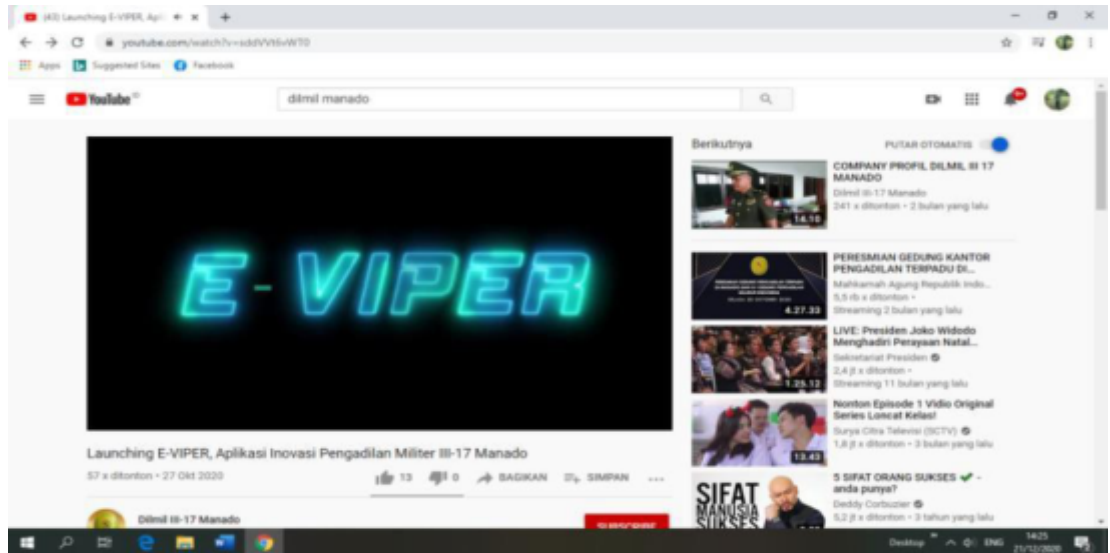


Pada tanggal 13 Desember 2018, Penggunaan Aplikasi elektronik Buku Tamu Pengadilan Militer (e-TaMil) pada Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari ke-2 sangat menginspirasi beberapa pihak dalam model pelayanan masa depan, Aplikasi ini disambut antusias oleh para pencari keadilan, hal ini terbukti dengan banyaknya penilaian positif dari hasil polling Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. PENGGUNAAN APLIKASI e-Viper

Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan Militer III-17 Manado terus berinovasi, tahun 2020 Inovasi yang dilakukan yaitu Aplikasi e-Viper yang di resmikan penggunaannya oleh Kadilmil III-17 Manado, Letnan Kolonel Chk Dwi Yudo Utomo, S.H., pada tanggal 27 Oktober 2020. Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan kepada pengguna layanan PTSP sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengantri di PTSP Dilmil III-17 Manado. Dengan demikian maka tidak akan terjadi penumpukan pengunjung di Front Office Dilmil III-17 Manado pada jam pelayanan kerja yang bertujuan meminimalisir terjadinya penularan virus corona (Novel Corona Virus 2019).

Penggunaan Aplikasi e-Viper



Penggunaan Aplikasi e-Viper



3. SMS BLAST

SMS Blast adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan pesan sms melalui provider Telkomsel kepada pengunjung dengan radius sekitar Pengadilan Militer III-17 Manado dimana ini dari pesan tersebut adalah berupa pesan layanan yang ada pada Pengadilan Militer III-17 Manado. Pada pesan tersebut akan terdapat link menuju aplikasi layanan E-Viper yang nantinya didalam aplikasi tersebut terdapat layanan PTSP Pengadilan Militer III-17 Manado.

4. Layanan GOBERXIM

Layanan ini merupakan salah satu inovasi dalam hal pelayanan publik dimana nantinya fungsi dari layanan ini adalah untuk membantu para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Militer III-17 Manado

tanpa membawa kendaraan sehingga petugas piket persidangan bias menawarkan layanan untuk dipesanan taxi online.



5. Inovasi yang sedang dikembangkan

Untuk tahun 2023, Staf IT Pengadilan Militer III-17 Manado berencana membuat sebuah inovasi untuk website yang bernama Virtual Tour 360 derajat. Virtual Tour atau biasa disebut dengan istilah tur 360 derajat, merupakan kumpulan gambar panorama 360 derajat yang digabungkan sehingga Anda mendapatkan pengalaman seperti berada di tempat itu. Selain itu inovasi ini nantinya diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui layanan yang ada di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan gambar visual.



h. Pengadilan Militer III-18 Ambon

1. Aplikasi PAPEDA

merupakan suatu bentuk pelayanan yang dapat digunakan oleh parapencari keadilan untuk memperoleh informasi Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan mudah, khususnya untuk satuan Tentara Nasional Indonesia yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari dua propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku utara.

Adapun PAPEDA tersebut adalah aplikasi virtual untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan nomor Whatsapp (082198798318) yang melayani informasi antara lain :

1. Kesekretariatan melayani informasi tentang Organisasi
2. Kepaniteraan melayani informasi tentang Perkara
3. Pengaduan melayani informasi tentang Pengaduan
4. Pelayanan melayani informasi tentang Profil Dan Layanan lainnya.

2. Pojok Tensi.

Pojok Tensi merupakan bentuk pelayanan yang disediakan kepada Pengunjung sidang maupun non persidangan yang berkenaan untuk mengecek tekanan mereka oleh petugas Dilmil III-18 Ambon.



Gambar Inovasi Pojok Tensi

3. **Senin Berkah**

Senin Berkah merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada pengunjung sidang maupun non persidangan yang datang pada setiap hari Senin, dan akan mendapatkan reward berupa snack gratis oleh Dilmil III-18 Ambon.



Gambar Senin Berkah

i. **Pengadilan Militer III-19 Jayapura**

1. **Aplikasi SI-PAITUA (Sistem Informasi Pengadilan Militer III-19 Jayapura)**

Aplikasi SI-PAITUA dirancang oleh tim IT Dilmil III-19 Jayapura sebagai bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan. Pengadilan Militer III-19 Jayapura memiliki 2 (dua) wilayah hukum yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga para pencari keadilan terkadang kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai persidangan dikarenakan jarak yang sangat jauh apabila harus datang langsung ke kantor Dilmil III-19 Jayapura. Oleh karena itu tim IT Dilmil III-19 Jayapura membuat sebuah aplikasi berbasis pesan WhatsApp yang dapat mempermudah para pencari keadilan untuk memperoleh informasi mengenai persidangan di Dilmil III-19 Jayapura. Aplikasi SI-PAITUA ini dapat memberikan informasi mengenai jadwal sidang, informasi perkara, direktori putusan dan pengaduan.



2. Pojok Bermain Anak

Sarana ini digunakan untuk membantu para pencari keadilan yang membawa anaknya yang masih balita untuk dapat bermain di area yang telah disediakan, sehingga tidak mengganggu proses persidangan ketika pemeriksaan sedang berlangsung.



3. Layanan Khusus Disabilitas

Sarana Disabilitas digunakan sebagai sarana pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus agar mendapat kemudahan pada saat mengunjungi persidangan.



4. Smoking Area (Area Merokok)

Bahwa Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam rangka bebas dari asap rokok, maka sebagai sarana pelayanan menyediakan Smoking Area untuk pengunjung Sidang dan Anggota Pengadilan sehingga di dalam ruangan dan sekitar ruangan aman atau bebas dari asap rokok.



5. Tempat Charger

Sarana ini di tempatkan di ruang tunggu sidang dan diperuntukan bagi pengunjung persidangan untuk mengisi daya baterai HP pada saat sedang menunggu jalannya persidangan.



BAB VI

PENGAWASAN

1. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Dalam sebuah instansi atau organisasi, perlu adanya pengawasan, baik pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Kegiatan dari pengawasan itu sendiri berfungsi untuk mengaudit, mereviu, mengevaluasi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk masing-masing bidang/bagian dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian besar terhadap tata cara pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Pengawasan penting dan mutlak dilakukan untuk mengetahui apakah proses yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan rencana, dengan hasil akhir dan dari segi efisiensi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya melaksanakan pengawasan pembinaan baik internal dan eksternal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sendiri serta Pengadilan di jajaran Wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Maksud Pengawasan :

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
 - a. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
 - b. Menilai kinerja seluruh personel pengadilan.

Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya.

Fungsi Pengawasan :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah.

Pengawasan Bidang Teknis Yustisial

1. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di jajaran wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
2. Memberikan petunjuk-petunjuk dalam rangka eksaminasi terhadap putusan, petikan putusan, BAS dan kelengkapan berkas perkara untuk selanjutnya dijadikan bahan penyusunan petunjuk teknis di jajaran wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

3. Mengadakan kunjungan kerja ke Wilayah/Daerah hukum di jajaran wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam rangka Pengawasan dan Pembinaan Yustisial serta Pengawasan Personel.

Pengawasan Bidang Non Teknis Yustisial

Melakukan pengawasan keuangan sesuai prosedur yang telah ditentukan.

- a. Mengawasi dan memonitor dari Kemungkinan-kemungkinan terjadi penyalahgunaan keuangan.
- b. Memonitor setiap saat pada pelaksanaan apel pagi dan apel sore secara langsung.
- c. Memberi masukan kepada Kepala setiap Personel yang akan UKP (Usulan Kenaikan Pangkat).
- d. Memberi teguran kepada setiap Personel yang melakukan kesalahan / pelanggaran.

Perspektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

A. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis Pengawasan yaitu:

a. Pengawasan Melekat

Istilah pengawasan melekat (waskat) pertama kali muncul dalam Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan melekat menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan bahwa pengawasan melekat merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern, selanjutnya disebut WASKAT adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Segala sumber daya dimanfaatkan, dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Melekat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Adanya monitor CCTV di ruang Kepala untuk mengawasi seluruh anggota;
- 2) Kegiatan apel pagi dan apel siang/sore yang mana pengambil apel dilakukan oleh Kepala, Wakil Kepala, Hakim Militer Tinggi dan Pejabat Struktural secara bergilir untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota;
- 3) Kegiatan Jam Komandan setiap awal bulan;
- 4) Survei atau pengawasan yang dilakukan oleh Kepala / terhadap kegiatan pegawai dan kebersihan ruangan.

Pelaksanaan apel pagi bersama Dilmilti III Surabaya & Dilmil III-12 Surabaya



b. Pengawasan Rutin/Reguler.

Pengawasan Rutin/Reguler adalah Pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik di bidang Perkara maupun Kesekretariatan dengan metode *interview* dan pemeriksaan dokumen serta Pengawasan Bidang Teknis Yustisial dan Pengawasan Bidang Non Teknis Yustisial, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

- 1) Memeriksa program kerja;
- 2) Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja;
- 3) Memberikan saran-saran untuk perbaikan;
- 4) Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- 5) Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Militer Tingkat Pertama atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

Untuk melaksanakan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menunjuk para Hakim Tinggi untuk mengawasi bagian-bagian guna meningkatkan profesionalisme tiap bidang dan terwujudnya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W3.Mil/01/PS.00/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu:

- 1) Kolonel Chk Dr. Eron Sinambela S.S S.H.,M.H. NRP 11950006980270, jabatan Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Koordinator Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya,
- 2) Kolonel Chk Dr Mokhamad Ali Ridho, S.H.,M.Hum. NRP 1910027650569 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan,

- 3) Kolonel Chk (K) Prastiti Siswayani, S.H NRP 11960026770670 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Kebersihan, Kerapihan dan Ketertiban,
- 4) Kolonel Sus Immanuel Pancasila, S.,S.H.,M.Si, NRP 520868 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Keuangan dan Pengawas Bidang Pelayanan Publik,
- 5) Kolonel Chk Sultan, S.H. NRP 11980017760771 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang Disiplin Kinerja Kepegawaian,
- 6) Kolonel Sus Saifudin, S.H., M.H., NRP 519758 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang Umum dan Persuratan,
- 7) Kolonel Chk Agus Husin, S.H.,M.H.NRP 636562 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang Perpustakaan dan Arsip,
- 8) Kolonel Laut (KH) Riza Fadilah, S.H., NRP 13149/P jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang Administrasi Perkara,
- 9) Kolonel Chk Sahrul, S.H.,M.H. NRP 11980031941273 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.

Eksternal

Untuk melaksanakan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Daerah maka Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menunjuk para Hakim Tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan terwujudnya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W3.Mil/03/PS.00/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Militer Tinggi Pengawas Daerah pada wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu:

- 1) Kolonel Chk Dr. Eron Sinambela S.S S.H.,M.H. NRP 11950006980270, jabatan Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Daerah pada wilayah Dilmil III-16 Makassar,

- 2) Kolonel Laut (KH) Riza Fadilah, S.H., NRP 13149/P dan Kolonel Chk Sahrul, S.H.,M.H., NRP 11980031941273, jabatan anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Daerah pada wilayah Dilmil III-12 Surabaya,
- 3) Kolonel Sus Saifudin, S.H., NRP, jabatan anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Daerah pada wilayah Dilmil III-18 Ambon,
- 4) Kolonel Chk Sultan, S.H., NRP 11980017760771, jabatan anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Daerah pada wilayah Dilmil III-13 Madiun,
- 5) Kolonel Sus Immanuel Pancasila S, S.H.,M.Si., NRP 520868, jabatan anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Daerah pada wilayah Dilmil III-15 Kupang,
- 6) Kolonel Chk Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H.,M.Hum., NRP 1910027650569, jabatan anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Daerah pada wilayah Dilmil III-17 Manado,
- 7) Kolonel Chk (K) Prastiti Siswayani, S.H., NRP 11960026770670, jabatan anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Daerah pada wilayah Dilmil III-14 Denpasar,
- 8) Kolonel Chk Agus Husin, S.H.,M.H., NRP 636562, jabatan anggota Pokkimmilti Gol. IV pada Dilmilti III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Daerah pada wilayah Dilmil III-19 Jayapura.

Selama Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melaksanakan pengawasan daerah ke satuan kerja jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya:

1. Pengadilan Militer III-18 Ambon (8-10 Februari 2023)
 Hasil pengawasan pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu:
 - a. Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam bidang manajemen pengadilan dalam pengawasan dan pembinaan sudah dilaksanakan dengan baik dan perlu ditingkatkan.
 - b. Penyelesaian Berkas Perkara pada Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam bidang Administrasi persidangan atau minutasasi perkara perlu ditingkatkan.
 - c. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-18 Ambon dari segi kualitas memadai dan baik.

- d. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan pelayanan publik sesuai ketentuan yang ada.
 - e. Untuk percepatan penyelesaian berkas perkara sebaiknya Pejabat Pengadilan Militer III-18 Ambon meningkatkan koordinasi dengan Oditur Militer maupun Kaotmil IV-19 Ambon khususnya dalam hal penuntutan.
2. Pengadilan Militer III-15 Kupang (23-26 Mei 2023)
- Hasil pengawasan pada Pengadilan Militer III-15 Kupang yaitu:
- a. Kinerja Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam bidang manajemen pengadilan dalam pengawasan dan pembinaan sudah dilaksanakan dengan baik dan perlu ditingkatkan
 - b. Penyelesaian Berkas Perkara pada Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam bidang Administrasi persidangan atau minutasasi perkara perlu ditingkatkan.
 - c. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-15 Kupang dari segi kualitas memadai dan baik
 - d. Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan pelayanan publik sesuai ketentuan yang ada
 - e. Untuk percepatan penyelesaian berkas perkara sebaiknya Pejabat Pengadilan Militer III-15 Kupang meningkatkan koordinasi dengan Oditur Militer maupun Kaotmil III-14 Kupang khususnya dalam hal penuntutan.
3. Pengadilan Militer III-19 Jayapura (14-17 Juni 2023)
- Hasil pengawasan pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yaitu:
- a. Kinerja Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam bidang manajemen pengadilan dalam pengawasan dan pembinaan sudah dilaksanakan dengan baik dan perlu ditingkatkan.
 - b. Penyelesaian Berkas Perkara pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam bidang Administrasi persidangan atau minutasasi perkara perlu ditingkatkan.
 - c. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-19 Jayapura dari segi kualitas memadai dan baik.
 - d. Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan pelayanan publik sesuai ketentuan yang ada.

- e. Perlu adanya perbaikan oleh Staf kesekretariatan sesuai dengan temuan yang telah disampaikan oleh Tim Pengawas.
4. Pengadilan Militer III-13 Madiun (24-25 Agustus 2023)
Hasil pengawasan pada Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu:
 - a. Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam bidang manajemen pengadilan dalam pengawasan dan pembinaan sudah dilaksanakan dengan baik namun perlu ditingkatkan khususnya dalam hal kualitas putusan dan minutasi perkara.
 - b. Penyelesaian Berkas Perkara pada Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam bidang Administrasi persidangan atau minutasi perkara perlu ditingkatkan.
 - c. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-13 Madiun dari segi kualitas memadai dan baik.
 - d. Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan pelayanan publik sesuai ketentuan yang ada.
 - e. Perlu adanya perbaikan oleh Staf kesekretariatan sesuai dengan temuan yang telah disampaikan oleh Tim Pengawas.

B Evaluasi

Secara prinsip bahwa terhadap hasil Pengawasan dari seluruh pejabat struktural dan para Hakim Pengawas bidang tersebut ditindak lanjuti melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Temuan dari para Pejabat Struktural dalam melaksanakan pengawasan melekat secara umum hasilnya langsung ditindak lanjuti oleh masing-masing unsur terkait terkecuali untuk masalah-masalah tertentu dibawa terlebih dahulu dalam forum rapat bulanan yang diselenggarakan minimal satu bulan satu kali.
2. Pada saat para Hakim Pengawas Bidang menemukan temuan-temuan atau masalah-masalah sesuai bidang pelaksanaan tugasnya, maka hakim Pengawas bidang tersebut pada saat itu langsung memberikan arahan/bimbingan kepada pelaksana dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi.

3. Seluruh hasil temuan dari masing-masing Hakim Pengawas bidang dilakukan eksphose yang dipimpin Kepala Pengadilan Militer III Surabaya Pengawasan kepada seluruh Pegawai, untuk menyikapi masalah-masalah tertentu, maka kadilmilti III Surabaya mengambil Kebijakan-kebijakan khusus.
4. Para Hakim Pengawas bidang selalu melakukan monitoring tindak lanjut hasilPengawasan.

2. Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka PengadilanMiliter III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Hakim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk. Hasil pengawasan internal yang dilakukan tahun 2022 yaitu:

1. PENGAWASAN BIDANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/43/KEP/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas. Yang selanjutnya dilakukan perubahan Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 01 / KPM.W3.Mil01 / OT1.6 / IX / 2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2023.

Hakim Pengawas Bidang ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

a) Pengawasan Bidang Keuangan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah :

- 1) Terjadinya pergantian Bendahara terhitung mulai tanggal per 1 Maret 2022 namun belum dilakukan penggantian nama Bendahara pada Aplikasi SAKTI.
- 2) Adanya kekosongan jabatan Pengelola BMN.
- 3) Masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran semester 1 untuk Dipa 01 maupun Dipa 05

b) Pengawasan Bidang Teknologi Informasi Dan SIPP

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang IT adalah:

- 1) Laporan perkara di Aplikasi SIPP belum sinkron dengan laporan perkara di google Drive.
- 2) Bandwidth pada seluruh access point kantor disetting unlimited

c) Pengawasan Bidang Kepegawaian

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Kosongnya jabatan Panitera Muda Pidana, Panitera muda Hukum dan Kasubbag PTIP.

- 2) Adanya kekosongan jabatan Pengelola BMN.
- 3) Adanya permohonan /usul anggota untuk mengikuti pendidikan Secapa dan Secaba bagi anggota TNI

d) Pengawasan Bidang Administrasi Umum

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang administrasi umum adalah :

- 1) Ruang arsip berkas di Gudang bawah sudah di skat tetapi masih belum tertata rapi dan masih terlihat bertumpuk karena arak arsip sudah penuh.
- 2) Penataan tempat parkir kendaraan Roda Dua, Roda 4 milik Karyawan/pegawai dan milik Pengunjung/Tamu masih menjadi satu tempat
- 3) Inventarisir terhadap pemegang barang/BMN masih ditemukan belum adanya surat penyerahan tanggung jawab kepada personil pemegang barang BMN tersebut.
- 4) Tidak adanya ruang saksi yang memadai.
- 5) Kurangnya kerapihan dan kebersihan kantor

e) Pengawasan Bidang Perkara

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

- Masih terdapat BAS yang belum selesai tepat waktu.

f) Pengawasan Bidang Pelayanan Publik

- pada Pengawasan Bidang Pelayanan Publik tidak ada Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang pelayanan publik.

2. PENANGANAN GRATIFIKASI

Sebagai pedoman pengawasan dan penanganan gratifikasi, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/20/Kep/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan sebagai pelaksana penanganan gratifikasi, diterbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/21/Kep/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Di tahun 2023 tim pelaksana penanganan gratifikasi tidak mendapati atau menerima laporan sehubungan dengan kejadian atau tindakan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sebagai dasar hukum pelaksanaan SPIP, Kepala Pengadilan Militer III 12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3.Mil-01/32/Kep/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Beberapa hal yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka penerapan SPIP yaitu:

- a) Membangun kebijakan dan mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai dan pemilihan agen perubahan.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- c) Melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.
- d) Menyusun SOP.
- e) Menyusun analisa dan pengendalian resiko.
- f) Menyusun laporan pengawasan bidang.

4. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Penanganan pengaduan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing sysem*). Sebagai pelaksana penanganan pengaduan ditunjuk petugas sesuai Keputusan Kepala pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/16/Kep/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan MA tersebut, Mahkamah Agung membangun aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). SIWAS berfungsi sebagai media untuk melaporkan / mengadukan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah ditunjuk sebagai petugas pengaduan.

Berdasarkan data dari meja PTSP, di tahun 2023 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel Pengaduan Masyarakat

1	Melapor melalui SIWAS	0
2	Melapor melalui meja PTSP	0
3	Melapor melalui pelayanan online di website	0
4	Inisiatif tingkat banding	0
Total		0

B. PENGAWASAN EKSTERNAL

Dalam hal pengawasan eksternal, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima pengawasan dari luar dan sebaliknya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan keluar. Pada Tahun 2023 pengawasan eksternal sebagai berikut :

1. Pengawasan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1448/SEK/KU1.3/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang memerintahkan Kepala Badan Pengawasan untuk melakukan reuiu atas realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp.495.898.100 yang tidak dapat diyakini kebenarannya.
2. Pengawasan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1449/SEK/KU1.3/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Instruksi Tindak Lanjut atas Temuan Badan Pengawas Keuangan RI. Atas temuan Badan Pengawas Keuangan RI telah di tindak lanjuti oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan hasil tindak lanjut tersebut dikirim melalui surat dengan Nomor : W3.Mil01/41/OT.01.2/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Pada tanggal 24 Oktober 2023 Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan Reuiu atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

3. Pengawasan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 228/DJMT.1/KP7.1/VIII2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Asistensi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Monitoring Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimana pengawasan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas program kerja serta optimalisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Monitoring Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun pengawasan keluar dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kegiatan wasmat (pengawasan dan pengamatan). Sepanjang tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kali wasmat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) III Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Kegiatan wasmat ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Berdasar hasil wasmat melalui kunjungan langsung ke Lemasmil III Surabaya, diperoleh data dan informasi tentang jumlah dan kondisi Terdakwa yang sedang menjalani eksekusi sesuai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Secara umum dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan instansi pemerintah, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LHKASN atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

LHKPN disampaikan oleh Kepala, Wakil Kepala, para Hakim Militer dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku penyelenggara negara. LHKPN berisi tentang harta kekayaan yang dimiliki para penyelenggara negara saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Berikut dilampirkan LHKPN pejabat negara dan pejabat struktural di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah melaksanakan

Tabel LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periodik 2022

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2022	Letkol Chk Sugeng Aryanto, S.H NRP 11980058680275	16 Januari 2023
		Letkol Chk (K) Kus Indrawati, S.H.,M.H NRP 11980036240871	17 Januari 2023
		Letkol Chk Arif Sudibya, S.H. NRP 11010036380878	14 Januari 2023
		Mayor Chk Musthofa, S.H.,M.H NRP 607969	10 Januari 2023
		Mayor Chk Ujang Taryana, S.H.,M.H NRP 636558	13 Januari 2023
		Kapten Sus Kholip, S.H NRP 519169	8 Maret 2023
		PNS Firda Nuril Hanifah, S.Si NIP 197804082006042001	27 Januari 2023
		PNS Ainur Rofiq, S.E NIP197903172006041004	25 Januari 2023
		Lettu Sus Gigih Dayu Priambudi, S.H NRP 544097	26 Januari 2023
		Lettu Chk Ahmad Suryadi, S.H NRP 21000075960980	16 Januari 2023
		Peltu Rudianto, S.H. NRP 21960347440875	13 Januari 2023
		Peltu M. Fauzan, S.Ag. NRP 21960346110176	31 Januari 2023
		Peltu Faried Sunaryunan, S.H. NRP 21970306830676	13 Januari 2023
		Pelda Suhendra. S.H. NRP 21010150930781	19 Januari 2023

Adapun LHKASN juga telah dilaporkan oleh seluruh jajaran PNS di Pengadilan Militer III-12 Surabaya mulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V. Berikut dilampirkan LHKASN seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya :

Tabel LHKASN Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2022	Rijani Widyanti, Penata Tk.1 / III/d NIP 197011281990032001	30 Januari 2023
		Melanti Puspara, SE Penata Muda Tk.1 / III/b NIP 198405302006042002	20 Januari 2023
		Setijo Utomo Penata Muda Tk.1 / III/b NIP	3 Februari 2023
		Atim Sumarni Penata Muda Tk.1 / III/b NIP	17 Januari 2023

	Ratih Dina Agustin Penata Muda Tk.1 / III/b NIP	2 Februari 2023
	Fransisca Angelina R., S.H. Penata Muda / IIIa NIP 199106082019032009	30 Januari 2023
	Norma Azurah, S.E.I Penata Muda / IIIa NIP 199605022020122014	30 Januari 2023
	Safрил Adi Husada, A.Md Pengatur / IIc NIP 198804262020121007	6 April 2023
	Anggraini Esti Rahayu, A.Md Pengatur / IIc NIP 199701262022032011	18 Januari 2023
	Dina Astari, A.M.d Pengatur / IIc NIP 199706162022032017	18 Januari 2023

C. EVALUASI

Kegiatan evaluasi merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah sebuah kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.

Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mencari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari.

1. EVALUASI PENGAWASAN BIDANG

a) Evaluasi Bidang Keuangan

Dari hasil pengawasan di bidang keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Akan segera dikoordinasikan dengan KPPN Surabaya II terkait penggantian tersebut. Serta melengkapi dokumen- dokumen data dukung yang diperlukan.
- 2) Akan dilakukan Baperjakat Internal untuk Pengelola BMN agar dapat fokus dan optimal dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing.
- 3) Agar segera direalisasikan untuk rencana kontrak yang telah disusun dan akan melakukan revisi pergeseran anggaran ke pos-pos yang diperlukan.

b) Evaluasi Bidang Teknologi Informasi dan SIPP

Dari hasil pengawasan di bidang TI dan SIPP, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu:

- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti diharapkan bisa bekerjasama dalam mengupload putusan di Aplikasi SIPP.

c) Evaluasi Bidang Kepegawaian

Dari hasil pengawasan di bidang kepegawaian, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu:

- 1) Perlu penambahan personil Panmud Pidana, Panmud Hukum dan Kasubbag PTIP agar perkara dapat diselesaikan tepat waktu.
- 2) Akan dilakukan Baperjakat Internal untuk Pengelola BMN agar dapat fokus dan optimal dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing.

d) Evaluasi Bidang Administrasi Umum

Dari hasil pengawasan di bidang administrasi umum, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Agar segera dilakukan pengadaan tempat dan Rak Arsip agar berkas-berkas yang sudah dalam usia tua/lama bisa di tempatkan di ruang tersendiri dengan di disusun /disimpan dengan rapi.
- 2) Agar segera dibuatkan tempat Parkir tersendiri dan dipisahkan antar parkir kendaraan baik Roda 4 maupun Roda 2 Milik pegawai/Karyawan dengan parkir kendaraan pengunjung dengan di beri tanda khusus.

e) Evaluasi Bidang Perkara

Dari hasil pengawasan di bidang Perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- Masih adanya BAS yang belum selesai tepat waktu mengakibatkan hambatan pada minutasi yang berakibat pada kecilnya nilai capaian SIPP. Untuk mengatasi hal ini, Hakim Pengawas merekomendasikan agar Majelis Hakim memonitor dan mendorong terlaksananya penyelesaian BAS secara tepat waktu.

f) Evaluasi Bidang Pelayanan Publik

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Adanya kekosongan petugas di meja PTSP pada saat jam kerja disebabkan kurangnya jumlah pegawai. Untuk mengatasi hal ini, akan disusun kembali jadwal piket petugas PTSP.
- 2) Pengisian survei yang belum maksimal disebabkan karena rusaknya e-kios sebagai perangkat untuk menampilkan aplikasi pengisian survei. Sebagai solusi, aplikasi survei dijadikan satu dalam perangkat yang sama dengan buku tamu elektronik. Hal ini menyebabkan pengunjung tidak mengetahui keberadaan aplikasi survei tersebut, sehingga pengunjung tidak dapat mengisi survei.

2. EVALUASI PENANGANAN GRATIFIKASI

Dengan tidak adanya kasus gratifikasi selama tahun 2023 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

3. EVALUASI PENERAPAN SPIP

SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini ditunjukkan adanya kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta diterapkannya aturan-aturan lain yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

**4. EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)**

Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2022 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan

3. Pengadilan Militer III-13 Madiun

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan, administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai kawal depan (Provost) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016. Adapun tiga hal yang menjadi objek pengawasan Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah :

- Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang.
- Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik negara sehingga tujuan pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu :

1. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan Para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik didalam Pengadilan Militer III-13 Madiun.

2. Hakim Pengawasan yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan jajarannya.
3. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat pengadilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
4. Mengadakan rapat berkala/jam Komandan setiap 1 (satu) bulan sekali.
5. Memberi sanksi jika terdapat personel baik militer maupun ASN yang melanggar disiplin

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan bidang oleh Hakim pengawas bidang di Pengadilan Militer III-13 Madiun yang dilaksanakan oleh Para Hakim Sesuai dengan Surat Keputusan kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun yang terus diupdate terakhir yaitu Nomor Surat W3-MIL02 /467/SK/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, daftar nama-nama Hakim tersebut antara lain:

- a. Mayor Chk Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. NRP. 11030043370581 Waka Dilmil III-13 Madiun sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
- b. Mayor Laut (H) Prana Kurnia Wibowo, S.H. NRP. 18883/P Angpokkimmil Gol. VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan.
- c. Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174 Angpokkimmil Gol. VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan, administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum, dan pelayanan public.

B. Evaluasi

Evaluasi dari pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan melalui pembahasan atas laporan baik secara lisan maupun tertulis yang diajukan pada saat pertemuan rutin yang diselenggarakan secara berkala di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa kekurangan dan kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia.

4. Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Hakim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Keseluruhan hasil pengawasan tim ini dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan yang kemudian berdasarkan laporan ini akan diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal merupakan pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan melekat dan pengawasan rutin yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian.

Keberhasilan Pelaksanaan tugas peradilan amat ditentukan oleh peran aparatur penyelenggaranya. Beberapa kegiatan pokok dalam mencapai program pengawasan aparatur Negara adalah meningkatkan kualitas informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan peningkatan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai penjuror depan Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7, 8 dan 9 tahun 2016.

Tugas Pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam tingkat pertama adalah melakukan Pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi objek Pengawasan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk peningkatan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim dan kode etik Panitera.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan pengawasan internal, yang meliputi pengawasan melekat dan rutin mengenai :

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Kepegawaian
3. Administrasi Umum
4. Administrasi Perkara
5. Administrasi Persidangan
6. Administrasi Keuangan

Tujuan diadakannya pengawasan adalah supaya penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan agar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang dan mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga tujuan pembinaan aparatur menghasilkan pemerintah yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu :

1. Memonitoring tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di dalam Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Hakim Pengawas bidang yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan jajarannya.

3. Menindaklanjuti pengaduan Masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
4. Mengadakan rapat berkala (Monev) atau Jam Komandan setiap 1 (satu) bulan sekali.
5. Memberi sanksi jika terdapat personil baik Militer maupun PNS yang melanggar disiplin.
6. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang penunjukkan Hakim Pengawas Bidang yakni Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : W3-Mil03/60/SK/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang susunannya sebagai berikut :

Tabel VI.1: Kimwasbid

No	Nama/Pangkat/Korps/NRP	Jabatan	Hakim Pengawas Bidang
1.	Letkol Chk Muhamamad Rizal, SH. MH	Wakil Kepala	Koordinator Hakim Pengawas Bidang
2.	Letkol Chk (K) Kus Indrawati, SH. MH.	Angpokkimmil Gol. V	Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan
3.	Letkol Chk I Gede Made Suryawan, SH. MH	Angpokkimmil Gol. V	Bidang Kepagwaian dan Ortala
4.	Letkol Chk Johannes Sudarso Taruk, SH.MH.	Angpokkimmil Gol VI	Bidang Kepaniteraan
5.	Kapten Chk (K) Dianing Lusiasukma, SH., MH.	Angpokkimmil Gol VII	Bidang Umum dan Keuangan Bidang Pelayanan Publik

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sebagai dasar hukum pelaksanaan SPIP, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil03/06/SK/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Beberapa hal yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam rangka penerapan SPIP yaitu :

- a) Membangun kebijakan dan mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai dan pemilihan agen perubahan.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- c) Melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.
- d) Menyusun SOP.
- e) Menyusun analisa dan pengendalian resiko.
- f) Menyusun laporan pengawasan bidang.

2. Penanganan Pengaduan Masyarakat (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Penanganan pengaduan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*).

Sebagai pelaksana penanganan pengaduan ditunjuk petugas sesuai Keputusan Kepala pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor W3-Mil03/05/SK/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Dan Operator Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan MA tersebut, Mahkamah Agung membangun aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). SIWAS berfungsi sebagai media untuk melaporkan / mengadukan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah ditunjuk sebagai petugas pengaduan.

Berdasarkan data dari meja PTSP, di tahun 2023 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Berdasarkan urut Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar menerbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor W3-Mil03/18/SK/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Berdasarkan laporan dari tim penanganan benturan kepentingan, tidak terdapat kejadian atau tindakan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

PENGAWASAN EKSTERNAL

Pengawasan eksternal di tahun 2023 ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar menerima kedatangan tim Pembinaan dan Pengawas eksternal dari Kadilmiltama, berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor :516/KPMU/SP.PW1/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang dilaksanakan dari tanggal 29 s/d 31 Oktober 2023.

B. EVALUASI

Kegiatan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk memecahkan masalah. Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-14 Denpasar menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Metode evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dirancang telah dijalankan dan untuk mengidentifikasi kendala dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, untuk kemudian dicari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari. Evaluasi yang telah dilakukan yaitu :

1. Evaluasi Pengawasan Bidang

a. Evaluasi Bidang Pelayanan Publik

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2023 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan para pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya pelayanan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

b. Evaluasi Bidang Teknologi Informasi

Dari hasil pengawasan di bidang TI, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1). Agar server ataupun alat pengolah data tetap dapat berfungsi dengan baik, maka perawatan rutin tetap dijalankan sesuai anggaran yang ada, selain itu SDM yang menggunakan perangkat-perangkat ini juga harus membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang penggunaan perangkat TI.

2). Dengan penambahan bandwidth yang telah dilakukan, agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Bagian IT agar tetap memonitor kelancaran.

c. Evaluasi Bidang Perkara

Dari hasil pengawasan di bidang Perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu:

- Aplikasi SIPP harus selalu dimonitor dan diupdate agar aplikasi SIPP tetap berjalan dengan baik.
- Tidak adanya anggaran (Wasmal) dalam pengawasan terhadap terpidana.

d. Evaluasi Bidang Keuangan

Dari hasil pengawasan di bidang Keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu agar belanja barang (52) dapat terserap optimal maka perlu dimonitor pembelanjannya dalam buku pengawasan anggaran, sehingga dapat direncanakan penarikan dananya agar terserap maksimal.

e. Evaluasi Bidang Personel

Dari hasil pengawasan di bidang Personel, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu:

- 1). Agar bagian kepegawaian dapat segera membuat laporan dalam jabatan fungsional yang masih ada untuk dapat difungsikan dan melakukan pelaksanaan Penilaian Bagi Pegawai PPNPN di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya kepada seluruh Anggota PPNPN Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- 2). Perihal masih kurangnya jumlah tenaga pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas masih ada yang rangkap jabatan, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu agar bagian kepegawaian menindaklanjuti dengan membuat surat permohonan kepada Mahkamah Agung untuk pengisian jabatan-jabatan dimaksud.

f. Evaluasi Penanganan Gratifikasi

Dengan tidak adanya kasus gratifikasi selama tahun 2023 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik dan Penerapan aturan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

g. Evaluasi Penerapan SPIP

SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Hal ini ditunjukkan adanya beberapa kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, serta diterapkannya aturan-aturan lain yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

h. Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2023 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

i. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Dengan tidak adanya kejadian yang membutuhkan penanganan untuk mengatasi benturan kepentingan selama tahun 2023, maka dapat dinyatakan bahwa standar pelayanan publik yang diberlakukan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

5. Pengadilan Militer III-15 Kupang

A. Internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian.

Fungsi pengawasan peradilan dilakukan oleh unit organisasi yang konvensional dan berwibawa yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personelnnya serta peran dalam organisasi Mahkamah Agung.

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendaikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer III-15 Kupang sebagai kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan

senantiasa berpedoman pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016. Tugas Pokok Pengadilan Militer III-15 Kupang selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan.

Tujuan diadakannya pengawasan adalah :

1. Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/ pengembangan dimasa yang akan datang.
2. Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran, atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga tujuan pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer III-15 Kupang yaitu :

1. Bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan,
2. Bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan
3. Bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk peningkatan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Pengadilan Militer III-15 Kupang melakukan pengawasan internal, yang meliputi pengawasan melekat dan fungsional mengenai :

1. Manajemen Peradilan,
2. Administrasi Kepegawaian,
3. Administrasi Umum,
4. Administrasi Perkara,
5. Administrasi Persidangan,
6. Administrasi Keuangan.

Pembinaan Pengawasan oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang Tahun 2023 telah dilaksanakan antara lain :

1. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di dalam Pengadilan Militer III-15 Kupang.

2. Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera / Sekretaris dan jajarannya.
3. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
4. Mengadakan rapat berkala/Jam Komandan setiap 1 (satu) bulan sekali.
5. Memberi sanksi jika terdapat personil baik militer maupun PNS yang melanggar disiplin.

B. Evaluasi

Pada tahun Anggaran 2023 pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-15 Kupang selalu berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pelayanan Teknis dibidang Administrasi Perkara, Administrasi Umum dan Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian secara tehnis dan Non teknis telah dilaksanakan dan menjadi beban tanggung jawab masing-masing Sub Bagian sesuai dengan jabatan, tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-15 Kupang dibidang urusan perkara telah berjalan dengan baik dan penyelesaian perkara dapat diselesaikan di bawah waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Satker Pengadilan Militer III-15 Kupang tetap mengacu pada sistem yang ada dan Struktur Organisasi yang ditetapkan, sehingga penerapannya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang tercantum dalam Visi dan Misi untuk mewujudkan Pengadilan Militer III-15 Kupang Yang Agung.

hSumber Daya Manusia (SDM) dan pendukung teknis lainnya secara personal merupakan Aset yang sangat penting demi terwujudnya sistem kerja yang baik dan berkualitas.

6. Pengadilan Militer III-16 Makassar

A. INTERNAL

Pengawasan internal merupakan pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian.

Komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum sebagai bagian dari penuntasan agenda reformasi sampai saat ini masih banyak menghadapi kendala. Harapan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan agar benar-benar dapat menempatkan dirinya sebagai benteng keadilan tidak sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak, hal ini terbukti dengan masih banyaknya kritik dan sorotan yang ditujukan terhadap lembaga peradilan.

Masyarakat mengkritik bahwa lembaga peradilan belum sepenuhnya menempatkan diri sebagai lembaga yang dapat memberikan pelayanan keadilan sebagaimana yang diharapkan, lambat dalam menangani perkara, biaya dirasakan mahal, adanya perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) yang dianggap tercela. Banyak kritik yang dialamatkan terhadap lembaga peradilan tersebut bagaimanapun tidak terlepas dari kinerja lembaga peradilan selama ini. Terlebih lagi, era reformasi memerlukan keterbukaan (transparansi), profesionalisme serta demokrasi disegala bidang termasuk di lembaga peradilan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas peradilan amat ditentukan oleh peran penyelenggara negaranya. Beberapa kegiatan pokok dalam mencapai program pengawasan aparatur Negara adalah meningkatkan kualitas informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan/pengendalian pelaksanaan dan pelaporan.

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendaikan agar tugas tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai kawal depan (provost) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016.

Tugas Pokok Pengadilan Militer III-16 Makassar selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi objek pengawasan Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim

dan Panitera) untuk peningkatan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Tujuan diadakannya pengawasan adalah:

- Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang.
- Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran, atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga tujuan pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu :

1. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di dalam Pengadilan Militer III-16 Makassar.
2. Hakim pengawasan yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera atau Sekretaris dan jajarannya.
3. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
4. Mengadakan rapat berkala/jam Komandan (monitoring dan evaluasi) setiap 1 (satu) bulan sekali.
5. Memberi sanksi jika terdapat personel baik Militer maupun PNS yang melanggar disiplin.

Salah satu bentuk pengawasan internal yang sangat membantu dalam monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan yang berkaitan erat dengan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer III-16 Makassar pada Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar, yaitu:

- Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: W3.Mil05/75/KEP/VIII/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

B. Evaluasi

Evaluasi dari pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan melalui pembahasan atas laporan baik secara lisan dan tertulis yang diajukan pada saat pertemuan rutin yang diselenggarakan secara berkala di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa kekurangan dan kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia.

7. Pengadilan Militer III 17 Manado

A. Internal

Pengawasan merupakan pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan Rutin/Reguler yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian.

1. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Rutin/Reguler

Pengawasan Rutin/Reguler merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada Pengadilan Militer III-17 Manado dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik di bidang perkara maupun kesekretariatan.

Pengadilan Militer III-17 Manado sebagai kawal depan (Provost) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016. Adapun tiga hal yang menjadi objek pengawasan Pengadilan Militer III-17 Manado yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah :

- Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang.
- Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik negara sehingga tujuan pembinaan aparatour menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado yaitu :

1. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik didalam Pengadilan Militer III-17 Manado.
2. Hakim Pengawasan yang ditunjuk telah melakukan pengawsan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan militer III-17 Manado, yang kemudian hasil pengawsan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan jajarannya.
3. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat pengadilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.

4. Mengadakan rapat berkala/jam Komandan setiap 1 (satu) bulan sekali.
5. Memberi sanksi jika terdapat personel baik militer maupun ASN yang melanggar disiplin.

Salah satu bentuk pengawasan internal yang sangat membantu dalam monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan yang berkaitan erat dengan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan.

B. Evaluasi

Evaluasi dari pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan melalui pembahasan atas laporan baik secara lisan maupun tertulis yang diajukan pada saat pertemuan rutin yang diselenggarakan secara berkala di Pengadilan Militer III-17 Manado.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa kekurangan dan kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia.

8. Pengadilan Militer III-18 Ambon

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, di bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal dilingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tujuan diadakan pengawasan adalah :

1. Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang.
2. Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa berdaya guna dan berhasil guna.

Keseluruhan hasil pengawasan tim ini dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan yang kemudian berdasarkan laporan ini akan diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan rutin yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian.

Komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum sebagai bagian dari penuntasan agenda reformasi sampai saat ini masih banyak menghadapi kendala. Harapan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan agar benar-benar dapat menempatkan dirinya sebagai benteng terakhir belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak. Hal ini terbukti dengan masih banyak kritik dan sorotan yang ditujukan terhadap lembaga peradilan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana kerja yang telah ditentukan. Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai penjuror depan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan pengawasan senantiasa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016.

Di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu :

1. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental dalam pelaksanaan tugas.
2. Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon
3. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
4. Mengadakan Monev/Jam Komandan setiap bulan pada minggu pertama.
5. Memberi sanksi jika terdapat personel baik Militer maupun ASN yang melanggar disiplin.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3-MIL07/0/Skep/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2023, untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Adapun objek pengawasan yaitu Bidang Administrasi Perkara dan Manajemen Peradilan, Bidang Administrasi Persidangan, Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan, serta bidang Umum dan Keuangan, Bidang Kepegawaian dan Ortala serta bidang Pelayanan Publik.

Berdasarkan Perintah Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: 60/KPM.W3-MIL07/SPRIN/IX/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang, Perintah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan di Masmil IV Makasar.

Tim Pengawas dan Pengamat ini melaksanakan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan IV (lemasmil) Makasar mulai tanggal 25 September sampai dengan tanggal 27 September 2023, dengan metode ; Wawancara dan Pemeriksaan Lapangan atau Kondisi fisik sel Tahanan, dan laporan dari Hasil Pengawasan dan Pengamatan tersebut sudah dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN EKSTERNAL

Dalam rangka Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI yang bertempat di Hotel The Natsepa & Conference Center Ambon, adun pada tanggal 18 Desember 2023, Mayjen TNI Purn) Dr. H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. (Ketua Kamar Militer MA RI) dan Brigjen TNI (Purn) Dr.Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Militer MA RI) juga melakukan pembinaan di Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dalam pembinaannya Beliau berharap Pengadilan Militer III-18 Ambon tetap mempertahankan kekompakan dan tingkatkan prestasi guna meraih WBBM kedepannya.

Pada hari yang sama Bapak H. Bambang Myanto, S.H.,M.H. selaku Plt. Dirjen Badilmiltun menyempatkan diri untuk berkunjung ke Pengadilan Militer III-18 Ambon dan disambut oleh Kadilmil Kolonel Chk R. Ach Agus Purno Wijoyo, S.H. dan KPT Ambon H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum. beserta seluruh Personil Pengadilan Militer III-18 Ambon.

B. EVALUASI

Secara prinsip bahwa terhadap hasil pengawasan dari seluruh pejabat pengawasan pada masing-masing bagian tersebut ditindak lanjuti melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan/ Jam Komandan sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok di bagian Kepaniteraan, mencakup Administrasi Perkara, Manajemen Peradilan dan Administrasi Persidangan.
2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok di bagian kesekretariatan yang mencakup bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, serta bidang Umum dan Keuangan.
- 3 .Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok di bagian Kesekretariatan yang mencakup bidang Kepegawaian dan Ortala serta Bidang Pelayanan Publik.

9. Pengadilan Militer III-19 Jayapura

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan, administrasi peradilan,

dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang pengawasan dan pembinaan langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya.

Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tahun 2023 berbentuk pembinaan Sumber daya manusia bidang teknis yudisial dan non teknis yudisial serta etika aparatur peradilan yang dilaksanakan dalam bentuk Rapat Rutin / Jam Komandan yang dilakukan rutin setiap sebulan sekali.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengawasan bidang oleh Hakim pengawas bidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura Sesuai dengan Surat Keputusan kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor W3.MIL.08/SK/10/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim tersebut antara lain :

- a. Letkol Laut (H) Slamet Widada, S.H., M.H NRP. 14131/P Jabatan Waka Dilmil III-19 Jayapura sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang
- b. Letkol Chk Arie Fitriansyah, S.H., M.H NRP. 11020021000978 Jabatan Pok Kimmil Gol V pada Dilmil III-19 Jayapura sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan Pemeriksa Keuangan, PBJ, dan BMN.
- c. Mayor Chk Dandi A Sitompul, S.H. NRP. 11000036211078 Jabatan Pok Kimmil Gol VI pada Dilmil III-19 Jayapura sebagai Hakim Pengawas Bidang Pemeriksa Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan.
- d. Mayor Chk M. Arif Sumarsono, S.H., M.H NRP. 11020006580974 Jabatan Pok Kimmil Gol VI pada Dilmil III-19 Jayapura sebagai Hakim Pengawas Bidang Pemeriksaan Manajemen Peradila dan Kinerja Pelayanan Publik.

Kemudian dengan adanya mutasi para hakim selanjutnya dilakukan pembaharuan Surat Keputusan yang telah terbitkan pada tanggal 04 September 2023 dengan Nomor Surat 49/W3.MIL.08/KPM/SK/IX/2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim tersebut antara lain:

- a. Letkol Chk Panjaitan Hotman M.T., S.H., M.H. NRP. 11000022761076 Jabatan Waka Dilmil III-19 Jayapura sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

- b. Letkol Chk Dandi A Sitompul, S.H. NRP. 11000036211078 Jabatan Pok Kimmil Gol V Pada Dilmil III-19 Jayapura sebagai Hakim Pengawas Bidang Pemeriksa Administrasi Umum.
- c. Letkol Chk M. Arif Sumarsono, S.H., M.H NRP. 11020006580974 Jabatan Pok Kimmil Gol V dan Kapten Chk Aditya Wicaksono, S.H NRP. 1100004840584 Jabatan Pok Kimmil Gol VII sebagai Hakim Pengawas Bidang Pemeriksa Administrasi Perkara.
- d. Mayor Chk Hengky Afandi, S.H., M.H NRP.11040016470180 Jabatan Pok Kimmil Gol VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Pemeriksaan Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan.
- e. Mayor Laut (H) Awang Setyadi Bawana, S.H NRP.17305/P Jabatan Pok Kimmil Gol VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Pemeriksaan Administrasi Persidangan.
- f. Mayor Chk Iskandar, S.H., M.H NRP. 21960346030574 Jabatan Pok Kimmil Gol VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Pemeriksa Keuangan, PBJ dan BMN .

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan, administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum, dan pelayanan public.

B. EVALUASI

Analisa dan evaluasi di bidang perkara dilaksanakan dengan cara meneliti putusan-putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, jenis dan jumlah tindak pidana maupun pelaku dari tindak pidana tersebut yang terjadi di wilayah hukum berada dalam wewenangnya, melaksanakan inventarisasi laporan penyelesaian perkara, Mengawasi dan memonitor dari kemungkinan-kemungkinan terjadi penyalahgunaan keuangan. Memonitor Setiap saat pada pelaksanaan apel pagi dan apel sore secara langsung serta memberi masukan kepada Dilmiltama setiap personel yang akan UKP (Usulan Kenaikan Pangkat). Dan Memberi teguran kepada semua personel yang melakukan kesalahan/pelanggaran bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pimpinan, sebagai masukan dan bahan pertimbangan satuan Atas.

Kondisi Lingkungan Strategis

Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pembangunan kearah perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan maka perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam kondisi Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyangkut Kekuatan dan Kelemahan sebagai berikut :

- 1). Kekuatan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang meliputi :
 - a) Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan TUPOKSI.
 - b) Adanya semangat kerja, disiplin Personil dan jiwa korsa yang tinggi.
 - c) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan peranan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam menjalankan tugas dan fungsi.

- 2). Kelemahan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang meliputi:
 - a) Kualitas SDM baik khususnya di bidang IT belum memadai dan kurangnya pengembangan karir untuk jajaran Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
 - b) Keterbatasan jumlah personil yang harus mengkafer pekerjaan pada jabatan yang kosong sehingga kinerja personil Dilmil III-19 Jayapura belum berjalan sesuai SOP.
 - c) Bimtek hanya terbatas pada bagian kepaniteraan, keuangan dan IT saja, namun pada bagian kepegawaian, ortala belum ada sehingga belum adanya kesamaan pola pikir dan produk yang dihasilkan.
 - d) Anggaran DIPA yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak sesuai dengan TOR dan RAB yang telah diajukan pada saat pengajuan Anggaran.

BAB VII

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan tugas Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Jajarannya telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kemampuan yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan juga sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang memadai dan sarana prasarana. Untuk lebih berhasil guna dan berdaya guna Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya telah membuat Program Kerja Tahunan dan rincian tugas setiap pegawai dengan membagi habis semua Pekerjaan

Hambatan yang masih dirasakan adalah secara Kualitatif dan Kuantitatif Sumber Daya Manusia yang masih perlu terus ditingkatkan kemandirian maupun tanggung jawabnya.

Rekomendasi

Hendaknya peningkatan Skill (kemampuan tugas) para Pegawai/Pejabat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya dapat terus diupayakan Kualitas dan Kuantitasnya melalui kegiatan Diklat, Sosialisasi dan Bimtek.

Untuk lebih memantapkan Fungsi-fungsi pelayanan kepada pencari keadilan kita tingkatkan Profesionalisme dan mengembangkan keteladanan

Agar ditambah Pegawai/TNI tertentu terutama bidang teknis Kepaniteraan (pengolah data dan Panitera Pengganti) dan Administrasi Umum (pengolah data bidang umum dan Kepegawaian serta Tenaga IT).

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III dan Pengadilan Militer se wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun Anggaran 2023 telah di susun dan di pertanggungjawabkan atas Penetapan Kinerja dan DIPA TA 2023, Berbagai kendala dan persoalan yang di hadapi dan telah di sampaikan dan mohon satuan Atas memberikan petunjuk dalam rangka

peningkatan Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer se- wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang lebih baik di masa yang akan datang

Sidoarjo, 31 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III



Kirto, S.H.,M.H
Brigadir Jenderal T